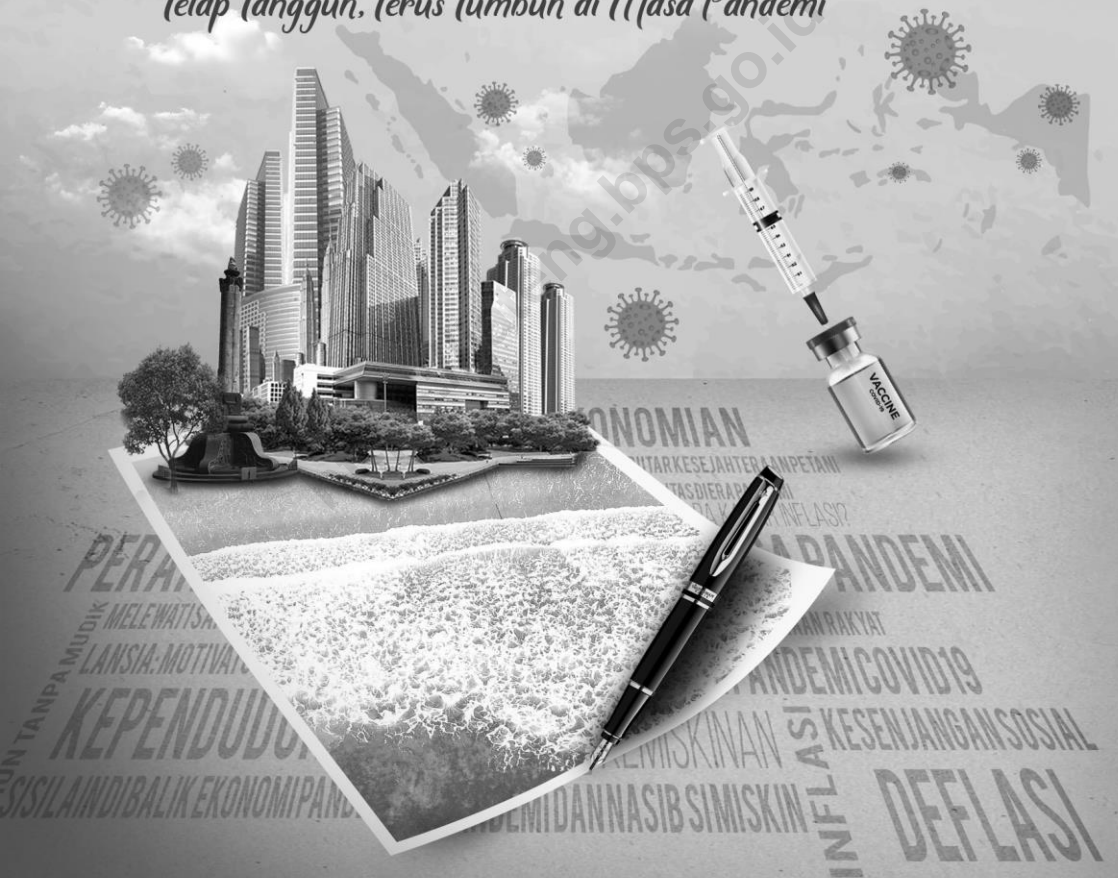


KUMPULAN OPINI STATISTISI BPS PROVINSI JAWA TENGAH 2021

Literasi

Untuk Negeri Edisi 3#

Tetap Tangguh, Terus Tumbuh di Masa Pandemi





LITERASI UNTUK NEGERI EDISI 3:

Tetap Tangguh. Terus Tumbuh di Masa Pandemi

Nomor Publikasi : 33000.2245

Katalog : 1205041.33

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 290 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun Literasi Untuk Negeri

**Pengarah
Adhi Wiriana**

**Penanggung Jawab
Didik Nursetyohadi**

**Editor
Eny Pramudyastuti**

**Penulis Analisis Tema
Diana Dwi Susanti**

**Desain Grafis
Joko Mulyono
Diana Dwi Susanti**

**Penyusun Buku
Diana Dwi Susanti**

**Kontributor Opini
Penulis BPS Jawa Tengah**



Penulis BPS Jawa Tengah

Adi Ratnaningrum, M.Si
Ahmad Fahrur Rohim
Annisa Purbaning Tyas
Azka Muthia
Dheriana
Dinar Tri Utami
Dwi Asih Septi Wahyuni
Eko Suharto
Ernie Irawaty Maysarah
Fajrin Fauzan Affandi
Hayu Wuranti
Irma Nur Afifah
Lina Dewi Yunitasari
Metriana Jovanika
Muhamad Yamani
Neti Ariyanti
Philipus Kristanto
Rukini
Sri Hartanti Sulistyaningsih
Sulthoni Syahid Sugito
Wahyu Triatmo

Agusthina Ouwpoly
Ani Widiarti
Ardita Mukti Wita Lestari
Danisworo
Diana Dwi Susanti
Dwi Agus Styawan
Dwi Indriastuti Yulianingsih
Eli Sufiati
Faisal Luthfi Arief
Harimurti
Hendrawan Toni Taruno
Laelatul Qomariyah
Lulu Lestari
Muahmmad Abdul Aziz
Musliman
Nurul Kurniasih
Retno Dian Ika
Santi Widyastuti
Sri Rejeki
Suparman
Yusup Rujiyanto



KATA SAMBUTAN

Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si
Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Tahun 2021 merupakan tahun pandemi kedua yang dirasakan oleh Bangsa Indonesia. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang diberikan, membuat Indonesia lebih tangguh dan setapak demi setapak mulai bangkit. Ketersediaan data dan informasi menjadi semakin dibutuhkan dan memiliki peran kunci bagaimana Indonesia mampu membangun strategi untuk kembali pulih dan mengejar ketertinggalan. Terlebih di masa pandemi ini, pemerintah seharusnya tidak membuka ruang untuk kesalahan pengambilan kebijakan.

Sebagai kantor statistik yang menjadi rumah bagi para Statistisi, BPS selalu mendukung terciptanya inovasi-inovasi di bidang statistik, khususnya dalam menjadikan statistik lebih ramah diterima dan dipahami oleh publik. Tujuannya jelas, bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah Buku Literasi untuk Negeri yang disusun oleh para Statistisi di BPS Provinsi Jawa Tengah. Buku ini merupakan percontohan bagaimana statistik ditransformasi menjadi suatu tulisan yang menceritakan kondisi Indonesia sesungguhnya, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dengan bertemanan "Tetap Tangguh, Terus Tumbuh di Masa Pandemi", buku ini menjadi edisi ketiga yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.

Saya sangat mengapresiasi BPS Provinsi Jawa Tengah yang telah kembali menerbitkan Buku Literasi untuk Negeri. Buku ini sangat bermanfaat bagi pembacanya, karena mampu memberikan informasi statistik yang komprehensif namun sederhana, sekaligus memberikan informasi pendukung yang dapat digunakan sebagai pijakan bagi para pengambil kebijakan. Teruslah berperan para penulis di BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam mengimplementasikan gerakan Cinta Data dan meningkatkan literasi statistik di masyarakat.

Jakarta, Mei 2022

Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si
Kepala Badan Pusat Statistik





“Jangan menunggu; tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana pun anda berada, dan bekerja dengan alat apa pun yang anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah”

~Napoleon Hill~



KATA SAMBUTAN

Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P **Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik** **Badan Pusat Statistik**

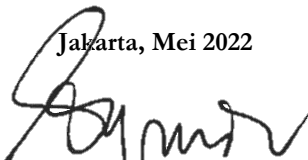
Saya merasa bangga dengan diterbitkannya Buku Literasi Untuk Negeri untuk yang ketiga kalinya. BPS Jawa Tengah kembali sanggup melahirkan penulis-penulis yang dapat merangkai data menjadi sebuah makna. Catatan penting tentang perjuangan melawan pandemi di tahun kedua menjadi tema tulisan sebagian besar statistisi. Tiga isu besar yang menjadi pokok utama yaitu kependudukan, pertanian dan ekonomi menjadi isu hangat yang menginspirasi penulis BPS Jawa Tengah.

Salah satu instrumen perencanaan pembangunan adalah dukungan data dan sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan data untuk keperluan pembangunan nasional. Tugas inilah yang bisa memotivasi penulis BPS agar bisa menarasikan dengan bahasa sederhana tentang data yang dimiliki BPS.

Berbagai indikator strategis sudah dihasilkan BPS dalam upaya membantu pemerintah untuk membuat program pembangunan di Indonesia. inilah kesempatan penting BPS untuk meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan nasional. Terima kasih kepala para penulis yang telah berusaha memberi literasi yang lengkap kepada para pengguna data sehingga tidak memberi pemahaman yang keliru terhadap data.

Saya ucapkan selamat kepada BPS Provisnis Jawa Tengah dan para penulis opini yang berbasis data atas dirangkumnya kumpulan tulisan menjadi sebuah buku. Buku ini menjadi sebuah literature perjalanan bangsa dalam sejarah perjuangan dalam melawan pandemi kedua dan pemulihannya yang bisa menjadi pelajaran untuk masa mendatang.

Jakarta, Mei 2022



Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik

“Resiko yang paling besar adalah tidak mengambil risiko. Dalam dunia yang berubah dengan cepat, strategi yang pasti akan gagal adalah tidak mengambil risiko”

~Mark Zuckerberg~



Literasi Data di Era Industri 4.0

Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D
Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM &
Rektor Universitas Trilogi

Literasi selalu jadi perhatian sejak era kemerdekaan. Program peningkatan literasi sudah dimulai sejak zaman kemerdekaan, di mana titik berat pengembangan waktu itu terletak pada pemberantasan buta huruf yang mulai dicanangkan sekitar 14 Maret 1948. Program ini dilanjutkan hingga 2015 yang berbuah pengentasan buta aksara di Indonesia akhirnya melebihi target. Berdasarkan data BPS tahun 2015, angka melek huruf Indonesia telah mencapai 95,22 persen. Bisa dipahami, fokus pemerintah pun beralih dari hanya sekadar baca tulis menjadi peningkatan “literasi” yang diadopsi survei Programme for International Student Assessment (PISA).

Sejak tahun 2016, Kemendikbud mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Permendikbud No.23 tahun 2015. Setidaknya ada 6 literasi dasar yang digencarkan, yaitu: literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya & kewargaan (lihat Gambar 1). Kemajuan jaman dan teknologi memaksa kemampuan kita harus terus beradaptasi. Pada awal 2018, Kemenristekdikti menyebutkan pentingnya 3 literasi baru yang diperlukan Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah literasi teknologi, literasi manusia, dan literasi data. Buku ini memfokuskan pada literasi data.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Sahabat Keluarga
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENGENAL RAGAM LITERASI DASAR

- LITERASI BACA TULIS**
Keluarga memiliki kemampuan mengakses, memahami, dan mengolah informasi saat membaca dan menulis
- LITERASI NUMERASI**
Meningkatkan kemampuan memahami peran dan kegunaan berhitung dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan menyelesaikan masalah.
- LITERASI SAINS**
Menggunakan pengetahuan, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan dalam memahami serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam.
- LITERASI DIGITAL**
Menggunakan dan mengelola media digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat untuk berinteraksi serta mendapatkan informasi yang bermanfaat.
- LITERASI FINANSIAL**
Kecakapan dalam mengelola keuangan demi terciptanya kesejahteraan keluarga.
- LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN**
Mampu memahami, menghargai, dan berpartisipasi dalam budaya. Berpartisipasi secara aktif dan menginisiasi perubahan dalam komunitas dan lingkungan sosial yang lebih besar.



Literasi data pada intinya adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan data sesuai konteks, termasuk memahami komponen dari data tersebut seperti sumber data, konsep definisi dan metodologi yang digunakan. Literasi data bukan berguna untuk mencari pekerjaan di era digital saja, kemampuan ini juga melekat dalam berbagai sisi kehidupan kita.

Buku yang ditulis oleh para statistisi BPS Jateng ini mencoba merangkai kejadian demi kejadian dengan landasan data dan berbagai sudut pandang tentang Covid-19 yang berdampak pada tataran kehidupan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Buku ini merekam dan menguraikan berbagai dimensi kehidupan rakyat Jateng dalam menghadapi kemelut pandemi. Kumpulan opini penulis BPS Jawa Tengah di berbagai media massa yang terangkum selama tahun 2021 menggambarkan berbagai dimensi keadaan yang abnormal, luar biasa, nyleneh. Semua gagasan yang ditulis berlatar belakang dan berbasis data mencerminkan ketangguhan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di tahun kedua yang berlangsung selama tahun 2021. Oleh karena itu, tepat sekali tema Literasi Untuk Negeri pada edisi ketiga yang diangkat adalah “Tetap Tangguh, Terus Tumbuh di Masa Pandemi.”

Buku ini mengulas beberapa dimensi literasi. Pertama, literasi sosial kependudukan yang memotret di cerita di era pandemi ada sisi kebangkitan ekonomi hijau, tantangan transformasi belajar daring, bagaimana industri yang terimbas pandemi menyebabkan pekerja terhempas yang bermuara menambah barisan pengangguran, menyimak peta dan potret kemiskinan yang cenderung meningkat, bagaimana kualitas manusia di era pandemi, bagaimana tantangan demografi, potret dan mutu pendidikan, derajat Kesehatan. Pesan utama bagian ini adalah memotret dimensi sosial kependudukan Jateng di tengah pandemi covid-19 dengan data.

Kedua, literasi pertanian. Bagian ini mengurai salah satu sektor yang tetap tangguh dan tumbuh positif adalah pertanian. Selain itu, problematika petani di era covid juga disoroti. Sungguh ironis, di tengah positifnya pertumbuhan sektor pertanian, ternyata nilai tukar petani di beberapa subsektor pertanian malah menurun.

Ketiga, literasi ekonomi. Bagian ini secara rinci menguraikan virus corona menggempur daya beli, menimbulkan resesi ekonomi, melumpuhkan pariwisata, bagaimana bisnis bermetamorfosis usaha di kala pandemi, menangkap sisi lain dampak pandemi termasuk investasi pilihan pada saat pandemi, lalin ekspor impor Jateng, neraca perdagangan, dan konsumsi pemerintah.

DI HUT kemerdekaan RI ke-77 ini, kita perlu merenungkan kembali sudahkah kita merdeka? Merdeka tidak hanya bebas dari penjajahan, namun juga bebas dari ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan, dan tidak melek data. Saya yakin Indonesia bisa menjadi negara maju, mandiri, dan berdaulat bila menunjukkan lompatan besar dalam 6 literasi dasar plus literasi data. Sejarah yang nanti akan mencatat apakah Indonesia akan menjadi negara industri atau jasa pada tahun 2045 pasca 100 tahun merdeka?





Menarik dicatat, sejarah kebangkitan dan momentum perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir oleh anak bangsa yang bermental “Harus Bisa”! Sejarah membuktikan rakyat Indonesia bisa survive, meski krisis dan cobaan tidak berhenti. Cobaan dan krisis, dari krisis moneter, krisis BBM, krisis listrik, krisis energi dan pangan global, bencana alam (tsunami, gempa bumi, banjir, longsor), dan krisis akibat pandemi dan resesi pasti akan dan selalu membayangi langkah Indonesia di masa depan.

Akhirnya, saya mengapresiasi para penulis buku ini yang telah mencoba menjabarkan dengan panjang lebar apa, mengapa, dan bagaimana potret, tantangan, dan literasi Jateng di tengah pandemi dan resesi. Niat para penulis untuk terus membunyikan data dan menginterpretasikan data kepada masyarakat dengan bahasa yang populer namun “enak dibaca dan perlu” layak diacungi jempol. Selamat menikmati membaca buku yang menarik ini.

Yogyakarta, Jakal KM14,
Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D
Email: profmudrajadk@gmail.com
Facebook:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100004624844304>



“Berilah saya waktu enam jam untuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan empat jam pertama untuk menajamkan kapaknya”

~ Abraham Lincoln ~

KATA PENGANTAR

Buku Literasi Untuk Negeri kembali terbit untuk edisi ketiga. Kumpulan opini penulis BPS Jawa Tengah yang terangkum selama tahun 2021 menggambarkan suatu perjuangan untuk kembali bangkit setelah dihantam pandemi tahun 2020. Hampir semua gagasan/ide yang berlatar belakang data, mencerminkan kondisi ketangguhan dalam melawan pandemi untuk terus tumbuh dan berjuang bebas dari pandemi. Untuk itu, tema Literasi Untuk Negeri edisi tiga adalah “Tetap Tangguh, Terus Tumbuh di Masa Pandemi.”

Angka-angka telah berbicara melalui tulisan para statistisi. Suka dan duka terilustrasi dalam opini yang disajikan. Statistisi BPS Jawa Tengah dalam periode 2021 telah melahirkan tulisan sebanyak 108 dari 40 penulis. Tulisan sebanyak 108 telah dimuat di koran lokal kabupaten, provinsi maupun nasional.

Mengumpulkan dan menyusun tulisan opini dari para statistisi berdasarkan data dengan sudut pandang yang berbeda-beda merupakan sebuah alur sejarah pembangunan bangsa dengan berbagai problematika dan solusi berdasarkan data. Tentu ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat dan khalayak umum yang ingin belajar tentang data dan statistik beserta interprestasinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Buku ini merupakan apresiasi saya sebagai pimpinan kepada penulis-penulis BPS Jawa Tengah. Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi bangsa dengan kemampuan literasi dan jangan lelah untuk terus belajar, membekali diri dengan ilmu-ilmu baru yang berkembang saat ini sehingga tidak ketinggalan jaman. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam menempuh perjalanan menuju masa depan yang lebih baik.

Semarang, Mei 2022

Ir. Adhi Wiriana
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah

SEKAPUR SIRIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan BPS yang telah membimbing, membekali dan mensupport kami untuk terus berkarya. Terutama kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Adhi Wiriana yang telah memberi wadah kepada kami dalam menuangkan karya-karya sehingga menjadi sebuah buku.

Sebuah buku adalah bentuk apresiasi tertinggi kepada kami sebagai penulis. Karena dengan dibukukannya karya kami, maka karya kami akan terus bermanfaat bagi pembacanya dan tidak akan hilang oleh perubahan waktu.

Semangat kami sebagai penulis selalu menggebu untuk terus membunyikan data dan merangkai kata untuk menginterpretasikan data kepada masyarakat. Karena data memang harus disampaikan walau itu pahit sekalipun. Dengan fakta yang jujur masyarakat bisa mengambil manfaat dari data yang telah dihasilkan dengan susah payah dan segenap tenaga yang tercurahkan.

Semoga tulisan kami yang tertuang dalam buku menjadi pemantik dan sebagai langkah awal untuk terus berkarya dan memberi motivasi kepada rekan-rekan yang lain. Sehingga lebih banyak lagi rekan-rekan yang menyuarakan data-data BPS. Dan pada akhirnya data BPS akan membumi dan bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas.

Semarang, Mei 2022

**Penulis
BPS Jawa Tengah**

*“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Menulis adalah bekerja untuk keabadian”*

~ Pramoedya Ananta Toer ~



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN MARGO YUWONO

KATA SAMBUTAN MOH EDY MAHMUD

KATA SAMBUTAN PROF. MUDRAJAD KUNCORO

KATA PENGANTAR ADHI WIRIANA

SEKAPUR SIRIH PENULIS

PREAMBULE: TETAP TANGGUH TERUS TUMBUH DI MASA PANDEMI 1

LITERASI SOSIAL KEPENDUDUKAN 3

Bagian 1. Peran Pemuda dalam Dilema Pandemi 5

Strategi Pengelolaan SDM Generasi Milenial di Masa Pandemi 6

Mencetak Generasi Entrepreneur Muda 8

Pentingnya Pendidikan Entrepreneurship 10

Generasiku Harus Kuat 11

Generasi Muda, Kunci Potensi dan Tantangan Bangsa 13

Program Generasi Mandiri : Terampil Tepat Tuntas 14

Penduduk: Modal Dasar Bangsaku 15

Pemuda Harapan Bangsa Bisa Menjadi Bencana 16

Bonus Demografi Jawa Tengah, Peluang atau Ancaman 18

Dominasi Gen-Z-Milenial: Modal Wujudkan Kebumen 20

Putus Sekolah di Masa Pandemi 22

NEET – Potret Fenomena Hopeless Kaum Muda Kebumen 25

Bonus Demografi Untuk Kabupaten Batang 27

Bagian 2. Kesehatan pada Masa Pandemi 31

Memotret Kesadaran Vaksinasi oleh Masyarakat 32

Masyarakat Sadar, Pandemi Berakhir 34

Tingkat Kepatuhan Protokol Kesehatan Masa PPKM 35

Efek Domino Kenaikan Cukai Rokok 37

Bagian 3. Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19 41

Mencermati Menurunnya Pengangguran di Puncak Pandemi 42

Serapan Tenaga Kerja Dampak Covid-19 di Jawa Tengah Berangsur Membaik 44

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan Kebumen 46

Pengangguran atukah Cuma Mager? 48

Mengurai Data dan Fenomena Ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara 49



Gaung Menghapus Pekerja Anak di Bulan Juni 51
Ancaman Pengangguran Terdidik dan Muda di Kota Pekalongan 53

Bagian 4. Pandemi dan Nasib Si Miskin 57

Evaluasi Kemiskinan di Masa Pandemi 58
Perlu Upaya Pemerataan Kesejahteraan 61
Satu Tahun Negeri Ini Dilanda Pandemi Covid-19 63
Siapa Mereka yang Miskin Ekstrim 66
Persentase Penduduk Miskin di Jateng Naik 67
Akibat Covid-19, Kemiskinan Kota Semarang 69
Pola Pikir Berharga dan Bermastabat 71
Bantuan Mengalir, Kemiskinan Tetap Naik 73

Bagian 5. Membangun Manusia Berkualitas di Era Pandemi 75

Aspek-aspek Positif Covid-19 Menuju Pembangunan Berkelanjutan 77
Setahun Pandemi, Pembangunan Manusia Meningkatkan 80
Membangun Manusia Purworejo di Masa Pandemi 82
Merencanakan Keluarga Berkualitas 83
Indeks Pembangunan Manusia (IOM) Jawa 2021 Bertengger di Angka 72,16 85
Lima Kabupaten IPM Tinggi 87
Pertumbuhan IPM Grobogan Tertinggi di Jawa Tengah 88

Bagian 6. Peran Perempuan di Masa Pandemi 91

Dampak Ekonomi Masa Pandemi, Lebih Buruk bagi Perempuan 92
Perempuan Aset Pembangunan 93
Potret Perempuan Jateng dalam Peran Ganda di Rumah Tangga 95
Kiprah Perempuan Jawa Tengah 97
Kartini dan Pemberdayaan Gender di Jawa Tengah 100
Ibu, Citra Perempuan Indonesia 101
Ketimpangan Uph Menurut Gender 103
Pekerja Perempuan Purbalingga 105

Bagian 7. Generasi Tanpa Stunting 109

Jawa Tengah Bebas Stunting 110
Berdayakan Ibu untuk Cegah Stunting 112
Pekerjaan Rumah Kebumen Tanpa Stunting 114

Bagian 8. Lansia: Motivator dan Inspirator 117

Tantangan Penuaan Penduduk Jawa Tengah 119
Persiapan Dini Menuju Lansia Mandiri 122
Meraih Mimpi Wujudkan Kota Ramah Lansia 125
Mewujudkan Lansia Hebat Kota Semarang 127

Bagian 9. Pembangunan dalam Data 129

Merajut Asa Melalui Satu Data Indonesia 130
Satu Data Indonesia, Sebuah Niscaya 132

Data Penduduk Purworejo dan Jawa Tengah dalam Pandangan Nasional 134
Menilai Pembangunan Desa Melalui IPD 135
Menggali Potensi Desa di Indonesia 137
Refleksi Hari Anti Korupsi, Masyarakat Semakin Anti Korupsi 139
Puaslah dengan Pelayanan Publik Pemerintah 141

Bagian 10. Air Sumber Kehidupan 144

Menghargai Air Menghargai Kehidupan 145
Air Untuk Kehidupan 147
Banjir Rob di Kota Pekalongan, Sebuah Ironi, dan Ikhtiar Pemerintah 148

LITERASI PERTANIAN 151

Bagian 1. Kekuatan Pertanian Sebagai Pengungkit Ekonomi 153

Pertanian Penopang Ekonomi Tangguh yang Rapuh 155
Pertanian Kuat, Ekonomi Meningkat 157
Pertanian Peluang Bangkit dari Resesi 158

Bagian 2. Seputar Kesejahteraan Petani 161

Bukan Lagi Bangsa Tempe 162
Problema Kesejahteraan Petani Tentukan Masa Depan Sektor 164
Daya Saing Pertanian dan Kesejahteraan Petani 166
Dilema Panen Raya 168
Pertanian Kurang Menarik untuk Pemuda, Jadi Pahlawan 170

Bagian 3. Menyoal Beras 173

Menyoal Impor Beras di Tengah Panen Raya 174
Meneropong Masa Depan Produksi Beras Kota 176
Panen Melimpah, Petani Resah 178

LITERASI EKONOMI 181

Bagian 1. Bangkit Dari Resesi 185

Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah 186
Sektor Unggulan Jawa Tengah 188
Menggelorakan Ekonomi dengan Investasi 191
Ekonomi Bersemi di Tengah Pandemi 196
Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah di Masa Pandemi 198
Pemulihan Ekonomi dan Tertahannya Kemiskinan 200
Harmoni Presiden G20 untuk Recovery Ekonomi 204
Tantangan Memulihkan Ekonomi Kendal 206
Produk Dalam Negeri, Berjuang Untuk Dicintai 208

Bagian 2. Melewati Satu Tahun Pandemi 211

Mempertahankan Lebaran *Effect* Tanpa Mudik 212
Mengukur Dampak Ekonomi Larangan Mudik 214

Mudik Yang Tak Dirindukan 217
THR, Sekoci Ekonomi Rumah Tangga di Tengah Pandemi 218

Bagian 3. Melewati Satu Tahun Pandemi 221

Secercah Harapan pada Tahun Kedua Pandemi 222
Secercah Asa di Tengah Pandemi 223
Kabar Jawa Tengah Setahun Corona 225
Ekonomi Jawa Tengah di Masa PPKM 227
Setahun Pandemi, Tingkatkan Ketimpangan Semakin Melebar 229
Vaksinasi dan Normalisasi Ekonomi 231
Dampak Penerapan PPKM di Salatiga 233
Diterjang Pandemi, PDRB Kabupaten Purworejo Memprihatinkan 235
Pandemi Turut Mempercepat Penetrasi Internet Jepara 236
Dampak Pandemi Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Rembang 2020 Minus 1,49% 238
Better Late than Never 231

Bagian 4. Apa Kabar Inflasi? 243

Nasibku Hargamu 244
Pemicu Inflasi Jawa Tengah 245
Tak Semanis Rasa Gula 247
Mahalnya Harga Telur Jelang Natal-Tahun baru dan Tingkat Konsumsi Protein di Indonesia 250
Harga Minyak Goreng dan Negeri Penghasil Sawit 252

Bagian 5. Pariwisata dalam Tahun Kedua Pandemi 255

Memulihkan Sektor Pariwisata 256
Pandemi Covid-19, Apa Kabar Tren Leisure 259
Wajah Pariwisata Jateng di Tengah Pandemi 260
Hampir 50% Hotel Gulung Tikar Akibat Pandemi Covid-19 263
Omicron dan Potensi Turunnya Kunjungan Wisman 265
UMK Tak Menyentuh Penjaga Warisan Budaya 266
Menyembuhkan Angkutan Pasca Pandemi 269
Menjaga Momentum Peningkatan Wisata Berlibur ke Karimun 271
Geliat Batik Pekalongan di Masa Pandemi 273

Bagian 6. Sisi Lain Di Balik Ekonomi Pandemi 275

BTS Meal dan Pergeseran Pola Konsumsi 276
Kenaikan UMP Tameng atau Bumerang? 279
Standar Hidup di Tengah Kenaikan Upah Yang Minimum 281
Optimalisasi E-Commerce untuk UMKM 283
Potensi Produksi Kopi Nasional Belum Tercapai 284
Penipuan Pinjol, Salah Siapa? 286

DAFTAR PUSTAKA 289



Preamble

Tetap Tangguh Terus Tumbuh di Masa Pandemi

Diana Dwi Susanti

Dua tahun dunia hidup bersama pandemi Covid-19 yang menerpa. Ada banyak cerita kesedihan, ada penderitaan, menguji ketangguhan dan membuat kita tumbuh kembali setelah menembus titik nadir. Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, berbagai jenis Covid-19 (virus Corona) bermutasi. Hal yang menggembirakan tahun kedua pandemi ini vaksin sudah diberikan kepada hampir seluruh masyarakat. Sehingga sedikit mengurangi infeksi virus yang disebabkan oleh Covid-19.

Pandemi Tahun Kedua Tataran Global

Virus covid-19 menjadi topik terhangat sepanjang tahun 2020. Virus ini menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia. Bahkan setelah dua tahun sejak Covid-19 dinyatakan pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa pandemi masih jauh dari kata selesai. Kasus kematian yang dilaporkan tahun 2020 sebesar 1,7 juta jiwa kemudian meningkat tahun 2021 merenggut lebih dari 6 juta orang.

Posisi 30 Desember 2021, kasus Covid-19 di dunia mencapai 284,4 Juta (sumber: Johns Hopkins University). Seiring dengan dengan meroketnya kasus Covid-19 dan tahun kedua pandemi dibarengi dengan vaksinasi yang telah mencapai 9 miliar dosis. WHO mengingatkan agar dunia bisa mencapai target 70 persen vaksinasi pada 2022. WHO terus berupaya semua penduduk dunia mendapatkan vaksin. Terutama sejumlah besar orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang bahkan belum menerima dosis vaksin. Menurut Our World Data, sekitar 58,3 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 tetapi hanya 8,5 persen orang di negara berpenghasilan rendah yang telah diinokulasi dengan setidaknya satu dosis.

Adanya vaksin telah menumbuhkan kepercayaan baru untuk memulai pemulihan ekonomi. Tahun 2021, sejumlah indikator telah mengalami peningkatan. Pemulihan global sebagian besar didorong oleh belanja konsumen yang meningkat dan penyerapan investasi.

Rebound pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar mendapatkan pengaruh positif dari peluncuran program vaksinasi Covid-19. Harapan keberhasilan program vaksin mempengaruhi sentimen bisnis (peningkatan optimisme) dan mendorong pengeluaran konsumsi. Namun percepatan pemulihan ekonomi dunia tidak terjadi secara merata.



Secara global pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 5,5 persen. Negara Tiongkok tumbuh paling tinggi sebesar 8 persen sepanjang tahun 2021. Sedangkan negara-negara di Uni Eropa tumbuh 5,3 persen hampir mirip dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang terkoreksi 5 persen.

Pandemi Tahun Kedua di Indonesia

Perkembangan kasus Covid-19 pada kondisi 31 Desember 2021 total terkonfirmasi kumulatif mencapai 4,26 juta dan total sembuh 4,11 juta jiwa. Sedangkan kasus kematian mencapai 144,09 ribu jiwa. Namun keadaan ini dibarengi dengan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia yang menunjukkan perkembangan positif. Vaksinasi telah mencakup 77,34 persen dari target penduduk Indonesia per 31 Desember 2021, sekaligus Indonesia telah memenuhi target WHO sekurangnya 70% penduduk di negara telah divaksin.

Implementasi vaksinasi, sinergi kebijakan nasional dan pemulihan ekonomi global mendorong perbaikan perekonomian Indonesia. Realisasi pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 658,43 T atau 88,5 persen dari Pagu Rp 744,7 T. PPKM mikro meningkatkan pergerakan masyarakat di seluruh kategori lokasi. Dengan ketersediaan vaksin, secara tidak langsung membuat masyarakat lebih leluasa berkegiatan di luar rumah serta memicu pergerakan masyarakat untuk pulih lebih cepat.

Tahun 2021, berangsur-angsur ekonomi pulih setelah mengalami kontraksi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia kembali bangkit dan menunjukkan perbaikan signifikan ditandai dengan bergeraknya semua sektor lapangan usaha kecuali Administrasi Pemerintah. Ekonomi Indonesia tumbuh 3,69 persen.

Jawa Tengah Tumbuh setelah Resesi

Memasuki satu tahun setelah pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Tengah kembali bangkit dan tumbuh. Perbaikan ekonomi didorong oleh implementasi vaksinasi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa.

Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang mendapatkan vaksin, aktivitas masyarakat di luar rumah juga semakin meningkat. Hasil indeks Google Mobility menunjukkan jika mobilitas masyarakat Jawa Tengah sepanjang tahun 2021 sudah mulai kembali “normal” meskipun aktivitas di dalam rumah masih cukup terlihat. Indeks juga memperlihatkan bahwa aktivitas diluar rumah sudah mulai positif dengan trend garis yang meningkat. Kebijakan PPKM berbasis mikro membuat mobilitas masyarakat lebih leluasa dibandingkan ketika PSBB pada tahun 2020.

Membaiknya situasi selama tahun 2021 telah berimbas cukup baik bagi perekonomian Jawa Tengah. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 3,32 persen, atau menguat dibandingkan dengan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -2,65 persen. Dari sisi produksi, menguatnya pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh tumbuh positifnya semua sektor lapangan usaha kecuali sektor Administrasi Pemerintah. Pertumbuhan tertinggi disumbang oleh sektor konstruksi, setelah pada tahun sebelumnya (2020) berkontraksi -3,76 persen.

I

LITERASI SOSIAL KEPENDUDUKAN

Diana Dwi Susanti

Dinamika Kependudukan Indonesia Pandemi Jilid 2

Berdasarkan data hasil proyeksi Sensus Penduduk, penduduk Indonesia pertengahan tahun 2021 mencapai 272 juta jiwa. Indonesia menempati posisi keempat setelah Amerika Serikat. Dilihat dari laju pertumbuhan dari tahun 1971 sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini dapat dikatakan Indonesia selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang mencatat setiap sepuluh tahun sekali, laju pertumbuhan terakhir pada pertengahan 2021 sebesar 0,98 persen dengan perbandingan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.

Munculnya Covid-19 di Indonesia pada awal Maret menjadi momok yang sangat terasa di tengah-tengah proyeksi kependudukan yang sedang mengalami peningkatan usia harapan hidup dan meningkatnya jumlah penduduk usia muda bagi Indonesia. Meski demikian, pandemi mengakibatkan sejumlah penduduk sakit dan mati, serta adanya dominasi penduduk usia lanjut yang mengalami kematian. Keadaan ini tentu mempengaruhi pembentukan komposisi struktur usia penduduk. Sebuah fakta yang bertolak belakang dengan dalil dari *Demographic Transition Theory* yang menyatakan bahwa akan ada banyak penduduk berusia produktif dan terjadi periode *aging population* yang terjadi akibat peristiwa transisi demografi yang menimbulkan perubahan struktur usia dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan usia harapan hidup. Proyeksi penduduk lanjut usia selama periode tahun 2010-2035 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dari 18 juta jiwa (7,56 persen) pada 2010 menjadi 25,9 juta jiwa (9,7 persen) pada 2015, dan menjadi 27,1 juta jiwa (9,99 persen) pada 2020. Kemudian jumlah ini diproyeksi menjadi 42,0 juta jiwa (13,82 persen) pada 2030 dan meningkat menjadi 48,2 juta jiwa (15,77 persen) pada 2035.

Sebelumnya Indonesia dipercaya menuju struktur penduduk tua (*aging population*). Hal ini didukung oleh data adanya peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia dari 69,8



tahun pada 2010 menjadi 71,5 tahun pada 2020. Pandemi yang ditimbulkan oleh penyakit berpotensi memiliki dampak terhadap sumber daya manusia, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pandemi berpotensi mengakibatkan terjadi morbiditas dan mortalitas. Di Indonesia sendiri, peningkatan kasus Covid-19 masih terus terjadi meskipun sudah setahun pandemi berlangsung. Awal tahun 2021 tercatat 1,3 juta kasus terkonfirmasi Covid-19 dimana sebesar 2,7% dari kasus positif tersebut meninggal dunia (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020).

Secara tidak langsung berpengaruh pada sektor kesehatan (*The World Bank*, 2014), serta berpotensi menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap perpanjangan usia yang seharusnya dicapai (Karagiannis, 2020; McGilivray, 1991).

Dampak Covid-19 pada Perspektif Kependudukan

Pandemi ini menimbulkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan perspektif kependudukan. Morbiditas dan mortalitas menjadi dampak langsung dari permasalahan ini. Salah satu dampaknya adalah sakit dan kematian. Hal ini mempengaruhi susunan komposisi penduduk Indonesia dimana akan mengalami penurunan jumlah penduduk berdasarkan karakteristik usia maupun jenis kelamin.

Penduduk lanjut usia merupakan kelompok usia dengan angka kematian tertinggi, sekitar 44 persen (covid.go.id, 2020). Jika permasalahan ini tidak di tindaklanjuti maka akan menimbulkan perubahan secara besar-besaran untuk komposisi penduduk. Tantangan lainnya adalah pengendalian penduduk akibat meningkatnya rumah tangga miskin akibat dari pemutusan hubungan kerja.

Hal ini akan berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat dimana kesehatan menjadi salah satu prioritas mereka. Kesehatan merupakan dampak tidak langsung dari adanya pandemi Covid-19. Isu-isu tersebut terkait akan hal kematian ibu dan bayi, stunting, bahkan penyakit menular lainnya.

Bagian 1

Peran Pemuda Dalam Dilema Pandemi

Diana Dwi Susanti

Keberadaan orang muda di negara ini tidak bisa disepelekan. Sejarah mencatat, bahwa peran orang muda dalam perjalanan bangsa Indonesia sangat banyak. Kaum muda selalu memainkan peran penting, dan revolusioner. Kaum muda telah berjuang, dan tercatat memberikan pekerjaan vital dalam momen-momen genting dan penting. Kontribusi orang muda sangat diharapkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Bangsa Indonesia.

Sepak Terjang Pemuda

Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, peran pemuda dalam membantu masyarakat cukup besar. Pemuda bukan saja berperan membantu masyarakat akibat pandemi, melainkan juga melakukan perlawanan terhadap pandemi itu sendiri.

Melihat sepak terjang pemuda di lapangan dan melalui berbagai pemberitaan di media-media utama, setidaknya terdapat empat peran yang dilakukan dalam melawan pandemi Covid-19. Pertama, mendanai promotor prokes. Melalui kegiatan di lembaga-lembaga pendidikan, di lingkungan masyarakat atau melalui jejaring media sosial, para pemuda kerap mempromosikan protokol kesehatan (prokes), terutama Gerakan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker). Saat ini mempromosikan prokes mungkin sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja, namun pada awal-awal pandemi muncul, promosi prokes sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi untuk menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan (*green growth*). Secara kodrati, Indonesia adalah negara agraria, negara kehutanan, negara keanekaragaman hayati. Manfaatkanlah itu untuk menciptakan produk kebanggaan bangsa yang bernilai kompetitif tinggi untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Sehingga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kedua, melakukan penggalangan dana. Ketika pandemi muncul, masyarakat membutuhkan berbagai alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19. Masyarakat juga membutuhkan saluran bantuan pangan, terutama ketika melakukan isolasi mandiri atau saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemuda berinisiatif membantu secara bergotong-royong untuk melakukan penggalangan dana. Penggalangan



dana dilakukan melalui jaringan desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau secara online.

Ketiga, menciptakan inovasi teknologi. Sebagai bagian dari bangsa dan kelompok masyarakat yang melek teknologi, pemuda juga ikut turun tangan langsung dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi terkait Covid-19.

Keempat, menangkal hoax Covid-19. Merebaknya Covid-19 serta merta membuat media banjir informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan Covid-19. Namun sebagian informasi terbukti palsu. Informasi-informasi palsu itu disebut dengan istilah hoaks. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak awal merebaknya pandemi hingga bulan April 2021 telah terdapat 1.733 hoaks Covid-19. Hoaks tersebut mencakup berbagai konteks, seperti hoaks tentang vaksin, teori konspirasi, pengobatan alternatif, dan lain-lain. Persebaran hoaks telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan informasi akurat. Para pemuda tidak tinggal diam. Maka melalui berbagai medium, pemuda mulai mengkampanyekan gerakan anti hoaks, seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Tujuan dari gerakan anti hoaks tersebut adalah untuk menciptakan kenyamanan, meminimalisir keresahan massa, dan menetralkan penyusutan informasi.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam sebuah negara sangat penting. Berbagai tindakan yang dilakukan pemuda guna melakukan perlawanan terhadap pandemi Covid-19 merupakan kontribusi nyata. Para pemuda termotivasi untuk menjadi bagian dari solusi atas krisis yang sedang terjadi. Motivasi tersebut tidak terbangun secara acak (random), melainkan berdiri di atas fondasi integritas, etos kerja dan gotong royong. Sobat Revmen juga dapat turut memberikan kontribusi dalam memerangi pandemi. Lakukanlah hal yang paling sederhana, seperti menjaga proses dan tidak menyebarkan berita hoaks terkait Covid-19. Mari bersama-sama kita hadapi pandemi Covid-19 dengan integritas yang tinggi, semangat kerja yang kuat, dan saling bergotong royong.

Strategi Pengelolaan SDM Generasi Milenial di Masa Pandemi dan Era Digital

Dwi Indriastuti Yulianingsih – BPS Kabupaten Blora
MetroSemarang.com, 29 Januari 2021

Generasi Y atau yang lebih kita kenal dengan istilah generasi milenial adalah penduduk yang lahir pada rentang tahun 1982 sampai 1996 atau diperkirakan saat ini berusia 24-39 tahun. Kelompok penduduk ini adalah kelompok dengan komposisi terbesar kedua setelah generasi Z. Generasi Z sendiri adalah penduduk yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012 atau saat ini diperkirakan berusia 8-23 tahun. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, generasi milenial memiliki komposisi sebesar 25,87 persen sedangkan generasi Z memiliki komposisi sebesar 27,94 persen dari total penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa.

Generasi milenial ini lahir disaat teknologi tumbuh dengan pesat, seperti adanya pesan singkat, pesan instant, surat elektronik (email) dan media sosial, sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan koneksi internet. Generasi milenial saat ini diperkirakan telah bekerja baik pada sektor swasta maupun disektor pemerintahan, menggeser posisi generasi X (kelahiran rentang 1965-1980) yang saat ini sudah akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk generasi milenial sangatlah diperlukan, salah satunya dengan cara mengenali karakteristik kerja milenial dengan baik, agar tidak menimbulkan kesalahan yang fatal dalam suatu organisasi.

Di era digital seperti saat ini organisasi dituntut untuk melakukan pekerjaan secara digital, melalui proses komputersisasi dan teknologi cyber sehingga dianggap cocok dengan karakter generasi milenial yang sudah melek teknologi sejak lahir, piawai dalam menggunakan gadget serta fasih dalam menggunakan internet yang membuat mereka ingin selalu terhubung kapan pun dan dimana pun.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam proses bisnis suatu organisasi. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka langsung saat ini tidak bisa lagi dilakukan untuk menghindari penularan virus Covid-19. Oleh karena itu teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan agar proses bisnis dapat terus berjalan sesuai dengan harapan.

Disinilah peran dari sumber daya manusia generasi milenial, dimana mereka yang terkenal dengan generasi yang kreatif dan produktif dapat mengembangkan inovasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi ditempat mereka bekerja. Contohnya seperti penyelenggaraan kegiatan secara virtual, analisis menggunakan big data dan crawling data, pemanfaatan artificial intelligent, penggunaan internet untuk pemasaran produk dan profiling customer secara digital, serta lain sebagainya.

Pengelolaan sumber daya manusia generasi milenial haruslah diperhatikan jika ingin tetap bertahan di masa pandemi dan di era digital saat ini. Salah satu strateginya yaitu dengan cara menempatkan generasi milenial sesuai dengan bakat dan potensinya serta memberikan ruang untuk menyalurkan ide, kreatifitas dan gagasan mereka, sebab generasi milenial adalah generasi yang haus akan pengetahuan, mereka akan mencari pengetahuan dan cara baru yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Sehingga pada akhirnya energi yang besar dari generasi milenial ini dapat dirasakan secara optimal oleh organisasi atau instansi tersebut.



Mencetak Generasi Enterpreneur Muda

Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Today, 3 April 2021

Generasi enterpreneur adalah generasi kreatif. Generasi mandiri dan mampu bersaing dengan dunia luar. Indonesia memiliki enterpreneur 3,47% dari populasi penduduk. Angka yang masih sedikit, jika dibandingkan dengan negara utama di kawasan Asia Tenggara. Singapura sudah mencapai 8,76%, Malaysia dan Thailand mendekati angka 5% (Merdeka.com, 2020).

Minimnya jumlah enterpreneur salah satu faktor yang membuat kesejahteraan di Indonesia belum merata dan tingkat pengangguran masih tinggi. Karena enterpreneur merupakan kelompok yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengapa enterpreneur penting? Seiring berkembangnya zaman maka akan semakin menambah jumlah populasi manusia di Indonesia. Bertambahnya jumlah populasi semakin meningkatkan jumlah pengangguran manusia pada usia produktif karena kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan.

Indonesia mempunyai potensi untuk menciptakan enterpreneur muda. Karena generasi muda adalah penerus untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat 50% lebih penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi dengan umur 8-39 tahun (Sensus Penduduk, 2020). Ini menunjukkan potensi besar dan peluang Indonesia untuk meningkatkan peran pemuda dalam pengembangan enterpreneur.

Indonesia dipandang sebagai potensi tertinggi pasar bagi dunia industri. Jika dilakukan pengelolaan dan pengembangan ketrampilannya, SDM Indonesia akan menjadi kekuatan yang besar bagi pembangunan negara dan tawar menawar di mata dunia.

Namun perlu diingat, pertumbuhan jumlah enterpreneur harus didukung oleh lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Karena pendidikan paling penting untuk memberi modal dasar bagi para enterpreneur dalam menggunakan ide dan mengembangkan kreativitas.

Peran Pendidikan

Hal tersebut harus direspon secara cepat dan tepat oleh Perguruan Tinggi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Namun, tiap tahun tingkat pengangguran terdidik selalu menjadi masalah di Indonesia. Angka pengangguran dari lulusan SMK, Diploma dan Universitas selalu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMP ke bawah.

Hal tersebut menjadi tantangan nyata dalam dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya mampu bersaing dan berkompeten dalam berbagai bidang. Ekspektasi nyata terhadap perguruan tinggi diharapkan menjadi agen pengembangan ekonomi.

Maka wujud strategi, kebijakan, kurikulum pendidikan perguruan tinggi menemukan



tantangan yang tak lagi sederhana. Konteks universitas yang mampu mendorong tumbuhnya iklim berusaha mandiri dalam format industri kreatif berbasis digital, menciptakan kerja dan berkontribusi mengatasi kemiskinan.

Kebutuhan untuk mendukung diperlukan basis data yang kuat, kelompok think tank, jejaring dan cetak biru arah kebijakan pendidikan tinggi dalam kerangka jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan basis perubahan revolusi industri 4.0 yang mensyaratkan SDM yang bervisi entrepreneurship.

Tantangan menjadi seorang entrepreneur diperlukan kemampuan kompleks. Oleh sebab itu institusi yang memberikan pendidikan kepada mahasiswa harus mampu memenuhinya melalui pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan yang selaras dengan kebutuhan mahasiswa dan tantangan dunia bisnis.

Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan

Pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan sebaiknya menjawab tantangan dan membekali generasi muda sebagai tokoh kunci peradaban abad 21 dengan era revolusi industri 4.0. Berdasarkan World Economy Forum (2016) ada tiga hal yang menjadi pijakan sumber daya manusia (SDM) yaitu karakter, literasi dan kompetensi.

Pertama, karakter menurut Maxwell (2014) merupakan sebuah pilihan yang menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Pendidikan di perguruan tinggi haruslah dapat mengembangkan tiga kecerdasan sekaligus yaitu, IQ, EQ dan SQ dengan ditambah pendidikan leadership, personal responsibility, ethics, people skills, adaptability, self direction, accountability, social responsibility dan personal productivity. Maka akan mengokohkan karakter generasi muda Indonesia.

Kedua, literasi. Hasil PISA 2018 menunjukkan 70% siswa Indonesia tidak mampu mencapai level 2 pada framework PISA. Tingkat literasi yang rendah merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa karena sebagian besar keterampilan dan pengetahuan yang lebih mutakhir melalui kegiatan membaca (Kompas.com, 2020).

Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas negara. Produktivitas rendah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.

Untuk entrepreneur, kemampuan literasi secara mandiri mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan inovasi, menjalin relasi dan membuka peluang pasar pada tingkat global. Sebenarnya generasi milenial dan generasi Z menurut psikolog Elizabeth T.Santosa dalam bukunya *Raising Children in Digital Era*, mencatat bahwa generasi ini mempunyai ambisi besar, berperilaku instan, percaya diri dan yang paling menonjol adalah mahir dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Peluang ini harus ditangkap dengan memberikan kurikulum yang mendukung dan menyongsong era digitalisasi untuk memperkuat entrepreneur.

Ketiga, kemampuan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah memiliki keterampilan critical thinking, communication, collaborative, creative. Sebuah optimisme

Jika generasi muda adalah modal sosial potensial untuk menggerakkan perubahan dalam mewujudkan Indonesia Maju. Dan entrepreneur era 4.0 harus mampu mengkonsolidasi dan menyatukan generasi muda seluruh Indonesia dengan life skill dan entrepreneurship-nya.

Pentingnya Pendidikan Entrepreneurship

**Eli Sufiati – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 24 November 2021**

Tidak dapat di pungkiri pandemi covid-19 berdampak signifikan terhadap meningkatnya jumlah angka pengangguran. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021, jumlah pengangguran atau Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) mencapai 6,49 persen atau setara dengan 9,10 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka menurut kategori pendidikan di dominasi oleh lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 11,13 persen selanjutnya pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,09 persen, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 6,45 persen, pendidikan Universitas sebesar 5,98 persen, pendidikan Diploma I/II/III sebesar 5,87 persen dan pendidikan dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 3,61 persen.

Untuk menekan jumlah pengangguran lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dengan membuat peta jalan pengembangan pendidikan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match), meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, meningkatkan kerja sama dengan Kementrian / Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha / industri, meningkatkan akses sertifikasi lulusan pendidikan SMK dan akreditasi pendidikan SMK serta membentuk kelompok kerja pengembangan pendidikan SMK.

Tiga tahun sejak dilaksanakannya revitalisasi SMK, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang terbesar jumlah pengangguran di Indonesia. Lulusan pendidikan SMK yang di gadang – gadang menjadi solusi utama untuk mengurangi jumlah pengangguran malah menjadi penyumbang terbesar jumlah pengangguran. Belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi SMK menjadi penyebab utama tingginya jumlah pengangguran usia produktif tersebut. Dan target dari revitalisasi SMK itu sendiri yang masih berorientasi pada penciptaan tenaga kerja di sektor industri saja.

Nadiem dalam salah satu visinya mengatakan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan akan menjadi prioritas dalam lima tahun kedepan. Akan menciptakan institusi pendidikan yang bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga mencetak SDM yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut penulis, sosok Nadiem sebagai pengusaha dan pendiri Gojek

yang sukses inilah yang mendorongnya untuk menciptakan pendidikan yang berbasis entrepreneurship / kewirausahaan.

Ahli ekonomi J.Schumpeter mengatakan entrepreneurship sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran. Pentingnya wirausahawan dalam kegiatan ekonomi suatu negara, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut ketua umum perhimpunan waralaba dan lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit mengatakan Indonesia masih membutuhkan minimal 4 juta pengusaha baru, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (KOMPAS.com). Mengacu pada data Kementerian Perindustrian, jumlah entrepreneur / pengusaha di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 3,47 persen (Merdeka.com).

Dengan menambah wirausaha baru permasalahan ekonomi bisa di minimalisir. Hadirnya entrepreneur – entrepreneur baru khususnya dari lulusan pendidikan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) akan membuka lapangan kerja baru di sektor formal maupun informal dan dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivitas manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pada Agustus 2021 jumlah penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 53,14 juta orang (40,55 persen) dan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen). Kegiatan sektor formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap / dibayar sedangkan kegiatan informal mencakup mereka yang berusaha sendiri, berusaha di bantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar.

Pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah, untuk menjadikan lulusan pendidikan menengah ke atas (SMA sampai dengan tingkat Universitas) khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai entrepreneur – entrepreneur muda yang sukses. Dengan modal Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, Indonesia akan mampu bersaing dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, di mana Singapura dengan jumlah entrepreneurnya sudah mencapai angka 8,76 %, Malaysia 4,74 % dan Thailand 4,26 %.

Generasiku Harus Kuat

Philipus Kristanto – BPS Kota Salatiga

Jawa Pos, 26 September 2021

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita), yang diakibatkan kekurangan gizi dan infeksi berulang terutama pada periode seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia duapuluh tiga bulan. Balita stunting berpotensi memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional.

Pada tanggal 05 Agustus 2021 Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di tetapkan. Perpres tersebut merupakan payung hukum strategi nasional percepatan stunting yang telah dimulai sejak tahun 2018. Percepatan penanganan stunting melalui dua kerangka besar yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting, umumnya dilakukan pada sektor kesehatan, seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai pembangunan di luar sektor kesehatan, seperti peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi. Kedua intervensi ini lebih efektif apabila dilakukan secara terintegrasi atau terpadu.

Analisis kinerja penurunan stunting melalui penghitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS). Hasil penghitungan IKPS sebagai instrumen untuk mengevaluasi berbagai program penanganan stunting. Pada tahun 2020 nilai IKPS sebesar 67,3 dan tahun 2019 sebesar 66,1 (BPS, Rapat Koordinasi Nasional/Rakornas Percepatan Stunting). Jika dibandingkan pada kedua tahun ini terjadi peningkatan nilai IKPS sebesar 1,2 poin dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatan nilai IKPS ini di dukung dari dimensi kesehatan, dimensi gizi, dimensi perumahan, dan dimensi pendidikan. Sedangkan dimensi pangan dan dimensi perlindungan sosial masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan penghitungan IKPS tersebut menunjukkan semakin baik penanganan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting telah dilakukan secara multi sektor dari berbagai Kementerian/Lembaga. “Konvergensi berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting menjadi kata kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga kontribusi pada penurunan prevalensi stunting,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pembukaan Rakornas percepatan penurunan stunting secara virtual Senin, 23 Agustus 2021.

Diharapkan dengan kerja kolaborasi antar berbagai pihak bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting. Koordinasi dan konvergensi antar program dari Kementerian/Lembaga , pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa, bahkan rumah tangga sasaran. Pemantauan secara terpadu dan terkoordinasi agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik. Target penurunan stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai. Indonesia tangguh, walau pada masa pandemi mencegah generasi yang lemah, stunting harus dicegah, tetap berupaya keras untuk tumbuh menjadi generasi yang kuat.

Generasi Muda, Kunci Potensi dan Tantangan Bangsa

Lina Dewi Yunitasari – BPS Kabupaten Pati
Lingkar Jateng, 29 Oktober 2021

Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 adalah momentum persatuan dan tonggak sejarah kebangkitan pemuda serta kesadaran nasionalisme diseluruh penjuru bangsa yang memantik perjuangan nasional meraih kemerdekaan. Sejak itu, ditanggal yang sama setiap tahun kita memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Lalu seberapa besar potensi anak muda saat ini? Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997 – 2012) dan Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981 – 1996). Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94% dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87%. Artinya 53% komposisi penduduk adalah anak muda. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dari komposisi umur, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap total populasi pada tahun 2020 sebesar 70,72%. Sedangkan persentase penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,28% di 2020. Persentase penduduk usia produktif sebesar itu menunjukkan bahwa Indonesia diambang bonus demografi yang tentu menjadi modal besar Indonesia bertumbuh menjadi negara maju.

Generasi hari ini adalah generasi yang terkoneksi luas. Teknologi saat ini memungkinkan kita melakukan apapun, bahkan media sosialpun telah bertransformasi sebagai lapangan usaha baru. Tak lagi ada batasan-batasan nyata. Pergaulan kini bukan lagi sebatas teman sekolah, kantor atau rumah tapi sudah menjangkau dari belahan dunia lain. Hidup didunia digital yang serba luas dan cepat merupakan peluang emas anak muda bisa berkarya melampaui batas tempat batas waktu, terus menerus belajar hal baru dan mampu bekerjasama, mampu membuat pilihan dengan cara matang dan cerdas. Anak muda haruslah menjadi generasi aktif, yang tahu menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak dan mengutarakan pendapat dengan baik.

Berkaitan dengan generasi muda, hantaman pandemi covid-19 yang tak pernah terduga sebelumnya, telah menciptakan tantangan baru, khususnya dibidang ketenagakerjaan. Pandemi covid-19 membuat angka pengangguran semakin meningkat. BPS mencatat peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok anak muda yang berusia 20-29 tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada penduduk usia 20-24 tahun sebesar 17,66% pada Februari 2021, meningkat 3,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 14,3%. Peningkatan TPT pada kelompok usia ini menjadi yang terbesar dibanding kelompok usia lain.

Peningkatan TPT terbesar kedua ada pada penduduk usia 25-29 tahun. Pada Februari 2021, TPT kelompok usia ini sebesar 9,27%, meningkat 2,26% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 7,01%. Dari sisi pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi banyak dialami oleh lulusan SMA, SMK, dan pendidikan tinggi universitas. TPT dari lulusan SMA naik dari 6,69% tahun lalu menjadi 8,55% di tahun ini. Begitu pula dari lulusan SMK, naik dari 8,42% menjadi 11,45%, serta universitas dari 5,7% menjadi 6,97%.

Tantangan ketenagakerjaan tersebut adalah tugas bersama yang harus dituntaskan dan tak boleh menyurutkan semangat generasi muda untuk terus berjuang kearah masa depan bangsa yang lebih baik. Mengutip pernyataan Bung Karno pada Hari Sumpah Pemuda tahun 1963 silam, “Jangan warisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisi lah api-nya”.

Program Generasi Mandiri: Terampil Tepat Tuntas

Philipus Kristanto – BPS Kabupaten Kendal

Jawa Pos, 18 April 2021

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing adalah kunci keberhasilan kemajuan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,72 persen yang berarti Indonesia masih dalam masa bonus demografi yaitu suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Tantangan besarnya adalah kita harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Jika kita mampu membangun SDM yang unggul, maka bisa mengubah tingkat perekonomian dari negara berkembang menjadi negara maju.

Permasalahan yang masih menjadi dilema adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Jumlah pengangguran Agustus 2020 sebesar 7,07 persen terhadap jumlah angkatan kerja atau sebanyak 9,77 juta orang (Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, BPS). Sedangkan persentase penduduk miskin Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang. Keduanya saling berkaitan, perlu segera diatasi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Upaya mitigasi dampak pandemi covid-19 setahun terakhir oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, sampai tingkat Kabupaten/Kota di sektor ketenagakerjaan dan upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan.

Dalam mempersiapkan SDM guna menentukan tingkat keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi ini, dibutuhkan SDM yang berkualitas melebihi standar kualifikasi yang diperlukan, supaya mengurangi jumlah kemiskinan dan memberikan pengaruh yang baik kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan.

Upaya mempersiapkan generasi mandiri ini wilayah Kabupaten/Kota sebagai basis pembangunan di daerah. Selama ini beberapa program diberikan bagi masyarakat melalui dinas/instansi, dengan jenis program yang berbeda. Koordinasi dan kolaborasi masing-masing Dinas/Instansi di daerah, harus disatukan bersinergis untuk mengurangi dan mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Program generasi mandiri yang terampil, tepat, dan tuntas (3T), merupakan program yang dapat memberikan solusi yang baik.

Terampil artinya memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk bekal membuka lapangan pekerja. Salah satu faktor penting dalam mempersiapkan daya saing ekonomi nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sebagai pelaku ekonomi usaha. Menghasilkan produksi barang maupun jasa yang

berkualitas tinggi dan baik. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian.

Tepat artinya sesuai pada masyarakat yang diberi keterampilan. Beberapa jenis keterampilan disesuaikan dengan sektor unggulan di masing-masing wilayah. Sasaran prioritas kepada masyarakat miskin dan menganggur. Sesuai dengan kebutuhan kelompok di wilayah misalkan kelompok usaha pengrajin, usaha kecil, industri rumah tangga, peternakan dan pertanian berupa pengembangan keterampilan dibidang pembukuan, standarisasi kualitas produk, bantuan pemasaran produk, manajemen usaha dan kewirausahaan.

Tuntas artinya masyarakat dapat mandiri dengan bekal keterampilan ini. Diperlukan perhatian dari pemerintah dari perencanaan pengembangan ekonomi lokal secara terpadu dan berkelanjutan. Pendampingan dan pengawasan dari awal pemberian keterampilan, membuka usaha, pemasaran, dan sampai berjalan usahanya.

Perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat selama pandemi covid-19, diharapkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dengan tetap menerapkan kebijakan pembatasan jarak sosial, cuci tangan, dan menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mobilitas ke luar kota agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Hal ini pemerintah daerah fokus terhadap perencanaan pengentasan pengangguran dan kemiskinan yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Peningkatan SDM yang terampil berkualitas, hidup mandiri untuk keluarga, dan masyarakat menuju Indonesia maju.

Penduduk: Modal Dasar Bangsa

Philipus Kristanto – BPS Kota Salatiga

Jawa Pos, 16 Februari 2021

Modal dasar dari pembangunan nasional Indonesia antara lain: kemerdekaan dan kedaulatan, jiwa dan semangat persatuan, wilayah nusantara, kekayaan alam yang beraneka ragam, penduduk, serta adat istiadat dan budaya bangsa. Jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak. Setiap tahun penduduk dunia akan terus bertambah. Kenaikan tertinggi biasanya akan terjadi di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sejak Indonesia menyelenggarakan sensus yang pertama tahun 1961. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,72 persen yang berarti Indonesia masih dalam masa bonus demografi yaitu suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari

negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia.

Komposisi penduduk Indonesia menurut generasi Baby Boomer (usia 56-74 tahun) sebesar 11,56 persen; generasi X (usia 40-55 tahun) sebesar 21,88 persen; generasi milenial (usia 24-39 tahun) sebesar 25,87 persen; generasi Z (usia 8-23 tahun) sebesar 27,94 persen; dan Post generasi Z (usia sekarang-7 tahun) sebesar 10,88 persen. Pendapatan masyarakat akan meningkat bertumpu pada penduduk generasi milenial dan generasi X, saat ini merupakan penduduk usia bekerja yang dapat diandalkan.

Permasalahan yang masih menjadi dilema adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Jumlah pengangguran Agustus 2020 sebesar 7,07 persen terhadap jumlah angkatan kerja atau sebanyak 9,77 juta orang (Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, BPS). Sedangkan persentase penduduk miskin Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang. Keduanya saling berkaitan, perlu segera diatasi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi ini, dibutuhkan SDM yang berkualitas melebihi standar kualifikasi yang diperlukan, supaya mengurangi jumlah kemiskinan dan memberikan pengaruh yang baik kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan. Dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja.

Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini, diharapkan dari seluruh pihak mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas penduduk ini. Tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya dapat memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang untuk penyerapan tenaga kerja. Modal dasar bangsaku adalah penduduk yang berkualitas.

Pemuda Harapan Bangsa Bisa Menjadi Bencana

**Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 22 Desember 2021**

PARA pakar demografi memprediksikan bahwa pada 2020 hingga 2030 Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi yang ditandai dengan penurunan rasio ketergantungan (dependency ratio) yang disebabkan oleh transisi demografi. Semakin

tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Bonus Demografi adalah kondisi ketika penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Dalam ilmu ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi (Jati, 2015).

Berdasarkan data dari BPS, rasio ketergantungan (dependency ratio) tahun 2020 sebesar 47,70 persen. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 48 penduduk usia non produktif. Angka ini menurun 2,80 persen dari rasio ketergantungan 2010 yang sebesar 50,50 persen. Penurunan rasio ketergantungan akan berdampak positif pada penurunan besarnya biaya pemenuhan kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga sumber daya yang ada dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Sayangnya harapan akan semakin banyaknya penduduk usia produktif berkualitas yang dapat menanggung biaya hidup usia belum produktif (usia 0 – 14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) sepertinya belum tercapai. Indonesia memiliki tantangan besar dalam menangani penduduk usia produktif tapi berstatus tidak memiliki kegiatan.

BPS mencatat pada tahun 2020 di Indonesia ada sebanyak 24,28 persen penduduk usia muda (15 – 24 tahun) yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan sedang tidak mengikuti training/pelatihan (Youth Not in Education, Employment, and Training/NEET). Dan ironinya angka NEET tercatat cukup besar pada pemuda dengan pendidikan tinggi yaitu, 28,49 persen dengan pendidikan terakhir SMA, 31,72 persen dengan pendidikan terakhir SMK dan 29,43 persen lulusan perguruan tinggi.

Banyak penyebab penduduk usia produktif berada dalam kategori ini. Efek pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian lesu dan banyak pengurangan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan menyebabkan para pemuda menjadi lebih sulit mencari pekerjaan. Selain itu selama ini banyak yang terjebak untuk berkarir pada profesi umum dan populer sehingga abai terhadap profesi-profesi kurang populer yang justru membutuhkan tenaga & pemikiran anak-anak muda.

Tingginya Youth NEET pada lulusan pendidikan SMA ke atas juga mengindikasikan adanya fenomena semakin tinggi pendidikan maka akan lebih pilih-pilih pekerjaan dan memiliki daya tawar upah yang lebih tinggi. Sedangkan yang berpendidikan lebih rendah lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena cenderung nrimo untuk bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda.

Banyak hal yang bisa ditempuh, mulai dari mengevaluasi sistem pendidikan agar bisa selaras dengan kebutuhan dunia kerja (link & match), pembatasan jumlah mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sudah berlebih dalam pasar tenaga kerja, memberikan bekal

ketrampilan, membangun jiwa kreativitas dan inovasi pada para pemuda dan lain sebagainya. Karena untuk menghasilkan SDM unggul tidak hanya membutuhkan ijazah pendidikan yang lebih tinggi tapi juga kecakapan teori & praktik, motivasi kerja, tanggung jawan dan juga sikap yang baik.

Tidak hanya pada sisi penyiapan SDM unggul, pada tahapan penyediaan lapangan pekerjaan, pemerintah juga dapat berperan memberikan insentif di bidang keuangan dan bimbingan keterampilan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yang berbasis UMKM, sehingga penduduk berusia produktif dapat berkarya, meenciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu menjadi pondasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Tanpa melakukan berbagai upaya tersebut, apa yang sering digembar-gemborkan pemerintah dan para ahli demografi tentang bonus demografi akan berbalik arah dari berkah menjadi bencana. Kehadiran para pemuda harapan bangsa ini justru akan menjadi beban di masa depan karena mereka tidak produktif, banyak pemuda pintar tapi pengangguran.st

Bonus Demografi, Peluang dan Ancaman

Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 17 Februari 2021

PARA pakar demografi memprediksikan bahwa pada 2020 hingga 2030 Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi yang ditandai dengan penurunan rasio ketergantungan (dependency ratio) yang disebabkan oleh transisi demografi. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Bonus Demografi adalah kondisi ketika penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Dalam ilmu ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi (Jati, 2015).

Berdasarkan data dari BPS, rasio ketergantungan (dependency ratio) tahun 2020 sebesar 47,70 persen. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 48 penduduk usia non produktif. Angka ini menurun 2,80 persen dari rasio ketergantungan 2010 yang sebesar 50,50 persen. Penurunan rasio ketergantungan akan berdampak positif pada penurunan besarnya biaya pemenuhan kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga sumber daya yang ada dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Sayangnya harapan akan semakin banyaknya penduduk usia produktif berkualitas yang dapat menanggung biaya hidup usia belum produktif (usia 0 – 14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) seperti ini belum tercapai. Indonesia memiliki

tantangan besar dalam menangani penduduk usia produktif tapi berstatus tidak memiliki kegiatan.

BPS mencatat pada tahun 2020 di Indonesia ada sebanyak 24,28 persen penduduk usia muda (15 – 24 tahun) yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan sedang tidak mengikuti training/pelatihan (Youth Not in Education, Employment, and Training/NEET). Dan ironinya angka NEET tercatat cukup besar pada pemuda dengan pendidikan tinggi yaitu, 28,49 persen dengan pendidikan terakhir SMA, 31,72 persen dengan pendidikan terakhir SMK dan 29,43 persen lulusan perguruan tinggi.

Banyak penyebab penduduk usia produktif berada dalam kategori ini. Efek pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian lesu dan banyak pengurangan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan menyebabkan para pemuda menjadi lebih sulit mencari pekerjaan. Selain itu selama ini banyak yang terjebak untuk berkarir pada profesi umum dan populer sehingga abai terhadap profesi-profesi kurang populer yang justru membutuhkan tenaga & pemikiran anak-anak muda.

Tingginya Youth NEET pada lulusan pendidikan SMA ke atas juga mengindikasikan adanya fenomena semakin tinggi pendidikan maka akan lebih pilih-pilih pekerjaan dan memiliki daya tawar upah yang lebih tinggi. Sedangkan yang berpendidikan lebih rendah lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena cenderung nrimo untuk bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda.

Banyak hal yang bisa ditempuh, mulai dari mengevaluasi sistem pendidikan agar bisa selaras dengan kebutuhan dunia kerja (link & match), pembatasan jumlah mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sudah berlebih dalam pasar tenaga kerja, memberikan bekal ketrampilan, membangun jiwa kreativitas dan inovasi pada para pemuda dan lain sebagainya. Karena untuk menghasilkan SDM unggul tidak hanya membutuhkan ijazah pendidikan yang lebih tinggi tapi juga kecakapan teori & praktik, motivasi kerja, tanggung jawan dan juga sikap yang baik.

Tidak hanya pada sisi penyiapan SDM unggul, pada tahapan penyediaan lapangan pekerjaan, pemerintah juga dapat berperan memberikan insentif di bidang keuangan dan bimbingan keterampilan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yang berbasis UMKM, sehingga penduduk berusia produktif dapat berkarya, meciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu menjadi pondasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Tanpa melakukan berbagai upaya tersebut, apa yang sering digembar-gemborkan pemerintah dan para ahli demografi tentang bonus demografi akan berbalik arah dari berkah menjadi bencana. Kehadiran para pemuda harapan bangsa ini justru akan menjadi beban di masa depan karena mereka tidak produktif, banyak pemuda pintar tapi pengangguran.st

Dominasi Gen-Z-Milenial Modal Wujudkan Kebumen Semarak

Dwi Agus Styawan – BPS Kabupaten Kebumen
Jateng Daily, 13 Maret 2021

SENSUS Penduduk 2020 (SP2020) mencatat bahwa pada September 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1,35 juta jiwa. Hal yang menarik dari hasil SP2020 berdasarkan perspektif generasi, penduduk Kabupaten Kebumen didominasi oleh Generasi Z dan Milenial.

Generasi Z di Kabupaten Kebumen mencapai 341 ribu jiwa atau 25,30 persen, sedangkan generasi milenial sebanyak 332 ribu jiwa atau sekitar 24,63 persen. Dominasi Generasi Z dan Milenial ini menjadi angin segar bagi pembangunan Kabupaten Kebumen, terlebih bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.

Dominasi kedua generasi ini adalah modal awal bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan Kebumen Semarak, yakni Kebumen yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Namun demikian potensi ini harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia, sebab besarnya kuantitas akan sia-sia jika tidak diikuti dengan tingginya kualitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan generasi berdasarkan pengklasifikasian yang digunakan oleh William H. Frey dalam publikasi “Analysis of Census Bureau Population Estimates” (2020). Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997 – 2012 dengan perkiraan usia saat ini 8 – 23 tahun. Adapun Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981 – 1996 dengan perkiraan usia saat ini 24 – 39 tahun.

Oleh karena itu dari sisi demografi, generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Generasi milenial ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen. Sementara itu, sebagian Generasi Z pada tahun 2020 masih berada pada kelompok penduduk usia belum produktif.

Namun, sekitar tujuh tahun lagi seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Generasi Z ini lah yang akan menjadi pemimpin sekaligus aktor utama pembangunan pada masa mendatang. Dengan demikian, SP2020 secara tidak langsung menyuguhkan potret bahwa Generasi Z-Milenial merupakan modal berharga pemerintah untuk menciptakan Kebumen yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak pada masa kini dan nanti.

Potensi dominasi Generasi Z dan Milenial ini tentu harus diikuti dengan kualitas sumber daya manusia, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, maka pemerintah harus mulai memfokuskan anggaran pada pembangunan sumber daya manusia dalam setiap aspek tersebut.

Pada dasarnya, menurut United Nation Development Programme (UNDP), pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu proses memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*) untuk memperoleh umur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, serta memiliki akses terhadap sumber daya agar dapat hidup layak. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama pembangunan sumber daya manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Indikator untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menghitung IPM melalui tiga pendekatan dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan sehat diproksi dengan umur harapan hidup. Dimensi pengetahuan didekati dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun dimensi standar hidup layak diproksi melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM Kebumen

Berdasarkan metode penghitungan ini, BPS mencatat selama periode 2018 – 2020, IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 68,80 menjadi 69,81 dan masuk dalam kategori sedang.

Peningkatan IPM ini perlu kita apresiasi, sebab hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi capaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah. Secara umum, IPM Kabupaten Kebumen pada 2020 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah yang mencapai 71,87.

Capaian ini juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan IPM beberapa kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. Selain itu, apabila dilihat dari ketiga dimensi pembentuk IPM, pekerjaan rumah ini terletak pada dimensi pengetahuan dan standar hidup layak. Pada dimensi pengetahuan, pekerjaan rumah tampak pada rata-rata lama sekolah yang relatif rendah, yakni 7,54 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen telah mengenyam pendidikan selama 7,54 tahun atau setara SMP kelas VIII.

Demikian pula dalam dimensi standar hidup layak yang masih rendah dengan pengeluaran sebesar Rp 8,9 juta per kapita per tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2020 ini bahkan merupakan pengeluaran terendah kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Pemalang. Pengeluaran per kapita ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang mencapai Rp 9,1 juta per kapita per tahun.

Kemiskinan

Hal ini sejalan dengan indikator-indikator makro lain, yaitu kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sepanjang periode 2019 – 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen meningkat dari 16,82 persen menjadi 17,59 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama juga bertambah dari 4,76 persen menjadi 6,07 persen. Penurunan standar hidup layak dan peningkatan kemiskinan/pengangguran ini tentu menjadi penghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kebumen.

Dengan demikian berbagai data di atas memberikan gambaran bahwa pada satu sisi Kebumen menyimpan potensi dengan melimpahnya jumlah Generasi Z dan Milenial. Potensi ini mampu menjadi pendorong dan akselerator pembangunan. Akan tetapi pada sisi lain, potensi ini dapat menjadi bom waktu sebab relatif belum diikuti dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi ini terutama tampak pada aspek pengetahuan/pendidikan dan standar hidup layak. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih tentu telah memiliki program-program unggulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Berbagai program unggulan ini telah tertuang dalam penjabaran visi dan misi mereka.

Pelaksanaan program-program unggulan ini tentu membutuhkan dukungan dan sinergitas berbagai elemen di Kebumen, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Selain itu, berbagai program unggulan ini harus adaptif terhadap karakteristik Generasi Z dan Milenial. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital, sehingga digitalisasi akan menjadi kunci percepatan kesejahteraan masyarakat Kebumen.

Pembangunan sumber daya manusia juga tidak akan lepas dari keputusan politik dan sangat bergantung pada political will pemerintah. Bagaimanapun juga, hasil pembangunan sumber daya manusia tidak langsung terlihat dan dapat dinikmati seketika. Pembangunan sumber daya manusia bukan seperti kisah bandung bondowoso yang selesai membangun candi dalam semalam. Pembangunan sumber daya manusia bukan sekedar memenuhi janji-janji selama kampanye diri. Pembangunan sumber daya manusia bukan pula untuk mendapatkan puja-puji masa kini.

Segala jerih payah pembangunan sumber daya manusia baru akan dituai nanti, setelah tak lagi menduduki kursi. Pembangunan sumber daya manusia adalah pekerjaan panjang nan sunyi untuk kesejahteraan, kemandirian, dan keluhuran akhlak generasi. Pekerjaan ini membutuhkan kekuatan tekad, kebesaran hati, dan konsistensi kesetiaan. Kesetiaan pada janji yang telah terucap, kesetiaan pada sumpah di bawah kitab.

Pada akhirnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, selamat bertugas. Selamat menempuh jalan panjang nan sunyi itu. Selamat dan sukses.

Putus Sekolah di Masa Pandemi

**Ani Widiarti – BPS Kabupaten Purbalingga
Jateng Daily, 9 Desember 2021**

COVID (Corona Virus Disease), sebuah nama yang sedang menjadi tren saat ini. Hampir semua orang di seluruh dunia pernah mendengar nama ini. Sebuah nama yang telah mengguncang dunia pada dua tahun terakhir. Masa pandemi Covid telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan hingga pendidikan anak.

Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka antara guru dan murid, beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau virtual. Tentu ini berpengaruh terhadap hasil kompetensi belajar yang didapat oleh para murid. Belum lagi para orang tua yang harus

berdebat atau bahkan bertengkar dengan anak-anaknya pada saat pendampingan belajar anak di rumah.

Belum lagi ancaman putus sekolah yang menghantui dunia pendidikan. Akibat pandemi banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan, di PHK dari tempat kerja atau usahanya gulung tikar karena tidak mendapatkan hasil bahkan merugi.

Menurut penelitian dari beberapa Lembaga survei, fenomena anak putus sekolah makin marak di masa pandemi dengan masalah ekonomi menjadi penyebab utamanya dan proses pembelajaran jarak jauh yang kurang/tidak efektif. Permasalahan anak putus sekolah merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama namun saat ini ada kecenderungan terjadinya peningkatan akibat Covid.

Pembelajaran jarak jauh dapat menimbulkan permasalahan sosial tersendiri. Murid cenderung lebih banyak waktu untuk bergaul dan bermain daripada untuk belajar sehingga pergaulan menjadi lebih bebas. Dengan semakin lamanya waktu untuk bergaul dan bermain mengakibatkan murid menjadi malas untuk belajar dan akhirnya bisa memperbesar resiko putus sekolah.

Para orang tua juga cenderung kurang memperhatikan proses pembelajaran dari rumah anak-anaknya terutama pada anak-anak yang sedang beranjak remaja. Dan yang lebih mengerikan kemungkinan adanya pernikahan dini yang tentunya akan sangat merusak generasi penerus bangsa. Bonus demografi yang seharusnya meningkatkan kualitas bangsa bisa jadi akan berubah menjadi beban bagi bangsa karena kualitas sumber daya manusia yang semakin rendah.

Secara nasional jika kita melihat data hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2020 di Indonesia terdapat peningkatan persentase anak yang tidak sekolah lagi pada kelompok umur SMP. Tahun 2020 tercatat 7.29 persen anak usia SMP yang tidak sekolah, sementara pada tahun sebelumnya 6.92 atau terjadi peningkatan 0.39 persen. Kenaikan ini lebih didominasi oleh anak-anak yang berada di wilayah perkotaan dengan peningkatan 0.65 persen, sementara yang terjadi di pedesaan hanya meningkat 0.05 persen.

Apa yang menyebabkan anak-anak usia SMP di perkotaan cenderung lebih tinggi angka putus sekolahnya, dimungkinkan akibat pengaruh pergaulan yang semakin bebas. Pembelajaran jarak jauh tanpa pengawasan orangtua tentunya akan mendapatkan hasil yang tidak efektif. Untuk wilayah perkotaan jaringan internet tentunya tidak menjadi kendala. Justru dengan adanya media belajar menggunakan gadget atau gawai akan semakin memperbesar kemungkinan anak semakin lama bermain HP. Dengan alasan belajar, kesempatan menggunakan HP untuk hal-hal lain yang kurang bermanfaat semakin terbuka lebar apalagi jika orangtua kurang peduli terhadap kondisi ini.

Anak-anak remaja semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain melalui HP. Jam belajar tidak selama jam belajar sebelumnya, akibatnya anak menjadi tidak bersemangat untuk belajar dan bisa menimbulkan kecenderungan anak putus sekolah.

Data hasil Susenas 2020 juga mencatat bahwa peningkatan angka anak tidak sekolah di kelompok umur SMP terjadi pada kelompok anak laki-laki yaitu 8.42 persen, sedangkan pada anak perempuan tercatat 6.08 persen. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat

menurut Islam laki-laki adalah seorang pemimpin. Jika generasi pemimpin masa depan berkualitas rendah, bagaimana kondisi bangsa di masa depan.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan putus sekolah memiliki dampak panjang bagi kondisi sosial ekonomi warga. Ketika anak memilih putus sekolah dan bekerja, kemungkinan besar ia akan melakukan pekerjaan dengan gaji rendah sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan rentan sakit. Jika anak putus sekolah dan memilih untuk menikah, maka ia rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi dan masalah ekonomi.

Sementara itu banyak pakar menyebutkan bahwa kondisi ekonomi keluarga cukup mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Hal ini dikarenakan pada beberapa sekolah para murid masih harus membayar biaya pendidikan meskipun pemerintah telah membantu dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Covid 19 yang telah memporak porandakan perekonomian masyarakat punya andil yang begitu besar terhadap kondisi ekonomi keluarga saat ini.

Untuk melihat kelompok masyarakat berdasarkan pengeluaran rumahtangga dapat dilihat berdasarkan kuintil. Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima kelompok sama besar. Kuintil menjadi acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Oleh BPS, kelompok pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan kata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, terus meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi.

Hasil Susenas 2020 menggambarkan bahwa pada kelompok umur sekolah SMP semakin tinggi kuintil semakin rendah persentase anak yang tidak sekolah. Pada kuintil 1 tercatat 12.04 persen anak yang tidak sekolah, kuintil 2 tercatat 7.96 persen, kuintil 3 tercatat 6.36 persen, kuintil 4 tercatat 5.32 persen dan pada kuintil 5 tercatat 3.43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pengeluaran rumahtangga atau semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, maka kecenderungan untuk anak umur sekolah SMP tidak sekolah akan semakin besar.

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang dapat menjadi salah satu faktor anak tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka harus rela putus sekolah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, angka tersebut cenderung lebih besar dari sebelumnya. Pada kelompok pengeluaran atau kuintil bawah, metode pembelajaran jarak jauh yang memerlukan pulsa atau kuota tentunya menjadi beban orangtua.

Mereka harus menambah pengeluaran untuk membeli kuota setiap bulannya. Program pemerintah berupa bantuan kuota internet nyatanya belum menyapu ke semua lapisan. Dengan pembelajaran yang dirasa kurang efektif, sebagian masyarakat merasa bahwa antara bersekolah dan tidak bersekolah ternyata memberikan hasil yang tidak terlalu berbeda sehingga mereka beranggapan bahwa jika anak tidak bersekolahpun tidak terlalu berpengaruh ke anak.

Untuk membantu orangtua yang kehilangan pekerjaan, beberapa anak juga memutuskan untuk bekerja. Setelah bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri, anak menjadi malas untuk kembali belajar ke sekolah dan akhirnya putus sekolah.

Alasan lain adanya putus sekolah adalah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh seperti tidak memiliki gadget, tidak punya kuota, listrik sering padam, sinyal internet yang kurang bagus dan lain-lain. Tidak atau kurangnya fasilitas tersebut menyebabkan siswa menjadi malas belajar dan menjadi putus sekolah.

NEET-Potret Fenomena Hopeless Kaum Muda Kebumen

**Fajrin Fauzan Affandi – BPS Kabupaten Kebumen
Kebumen Esprss, 26 Juli 2021**

Pandemi Covid 19 menjadi realita sosial yang selain mengguncang dunia kesehatan, tidak bisa dipungkiri berdampak multi sektoral pada perekonomian global, nasional maupun lokal termasuk di Kebumen. Tiga bulan setelah kasus pertama Corona diumumkan di Indonesia pada Maret 2020, Moody's Investor Service memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan melambat 0,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tersebut jauh di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yakni 5,02%. Sementara di Kebumen, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen dan sejalan dengan perkiraan Moody's Investor Service , pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan 4,56 %. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021.

Mengingat bahwa hingga saat ini pandemi belum juga berlalu, muncul pertanyaan: apa dan bagaimana dampak Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Arief Ansory Yusuf (2020) membuat simulasi tiga skenario ((intervensi minimal terhadap Covid 19, PSBB/intervensi kuat, dan PSBB disertai stimulus fiskal) dan memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model CGE (computable general equilibrium). Hasil simulasi menemukan bahwa dalam skenario mana pun, ekonomi nasional akan mengalami penurunan terhadap baseline (kondisi seandainya tidak ada pandemi).

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS, secara khusus menambahkan pertanyaan terkait dampak Covid 19 terhadap ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi ILO (International Labor Organization). Secara garis besar, penduduk usia kerja yang terdampak Covid 19 dikelompokkan menjadi a) penganggur yang berhenti bekerja karena Covid 19, b) bukan angkatan kerja yang berhenti bekerja karena Covid 19, c) sementara tidak bekerja karena Covid 19, dan d) penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid 19.

Berdasarkan data Sakernas 2020, penduduk usia kerja di Kebumen adalah 910 ribu jiwa, dan 81 ribu atau 8,96 % diantaranya terdampak Covid 19. Penduduk yang terdampak tersebut terdiri dari 47 ribu laki-laki dan 34 ribu perempuan yang tersebar hampir merata baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dilihat dari karakteristik individu dapat diketahui bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja pada sektor formal lebih berpeluang untuk tidak terkena dampak Covid 19.

Lebih dari 60% penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor jasa dan 34% penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor manufaktur mengalami dampak akibat pandemi. Sementara pada sektor pertanian kurang dari 5% persen saja penduduk usia kerja yang terdampak. Seperti sejarah yang terulang, krisis 1997-1998 juga menunjukkan relatif bertahannya sektor pertanian terhadap krisis dan bahkan mampu menampung kembali tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di sektor lain.

Penduduk usia kerja yang memanfaatkan internet dalam pekerjaannya mempunyai peluang lebih banyak terdampak Covid 19 dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan internet. Hal ini menjadi ironi di tengah laju pertumbuhan PDRB Kebumen sektor informasi dan komunikasi yang tinggi.

Sementara dilihat dari kelompok umur, generasi milenial dan gen Z atau penduduk yang lahir setelah tahun 1995 relatif tidak terdampak dibandingkan dengan generasi yang lahir pada periode sebelumnya. Hal ini tentunya sangat melegakan mengingat bahwa gen Z adalah masa depan perekonomian yang memegang peranan perkembangan Kebumen ke depan.

Berangkat dari analisis sederhana dalam melalui masa pandemi, kerangka kebijakan ketenagakerjaan di Kebumen ke depan dapat terkonsentrasi pada penguatan sektor pertanian dan berfokus pada gen Z, sebagai lompatan mewujudkan tagline Kebumen, *agocity of java*. Pembangunan pertanian hendaknya berbasis pada *comparative advantage* dan dilakukan secara komprehensif, mulai dari sektor primer yang mengambil atau menghasilkan bahan mentah, sektor sekunder yang mengolah hasil dari sektor primer, dan sektor tersier dalam kerangka agrobisnis.

Dalam sudut pandang ekonomi, pandemi Covid 19 disebut sebagai peristiwa non-ekonomi yang mempunyai efek kejut terhadap perekonomian yang dampak langsungnya seperti tergambar dalam data hasil Sakernas. Upaya dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai skema bantuan sosial maupun berbagai kegiatan swadaya masyarakat melalui *crowdfunding* mampu mengendalikan dampak turunan seperti penurunan daya beli atau yang lebih ekstrim turunnya konsumsi pangan (*food insecurity*).

Terlepas dari masalah ekonomi, beragam upaya memutus rantai penyebaran Covid 19 terus dilakukan. Apresiasi yang sangat tinggi layak diberikan bagi seluruh tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan menghadapi Covid 19. Mari bersama patuh dan disiplin untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, serta menjauhi kerumunan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap upaya pemerintah memulihkan kesehatan. Karena di mata pemerintah, kita semua sangat berarti.

Bonus Demografi Untuk Kabupaten Batang

Wahyu Triatmo – BPS Kabupaten Batang
Radar Pekalongan, 17 November 2021

Bro..pernah dapat bonus ndak..yups pasti pernah dong.Bonus Hari Raya, Bonus lemburan, bonus liburan, dan lain-lain. Kalau kita mikir bonus pasti yang ada dibenak kita tentang sesuatu yang asyik dan menyenangkan serta menguntungkan bagi kita. Ndak salah juga sih..tapi kalau bonus yang satu ini bagaimana ya..

Bro and Sist semua pernah dengar nggak yang namanya Bonus Demografi??Whats apaan tuh..pikiran lugas kita pasti langsung mengartikan kalau Bonus adalah tambahan atau ekstra kalau Demografi berarti tentang kependudukan..ndak salah juga sih tapi arti yang sebenarnya dari Bonus Demografi menurut BPS adalah suatu keadaan dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak jumlahnya dibanding usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan proporsi lebih dari 60 % dari total jumlah penduduk.

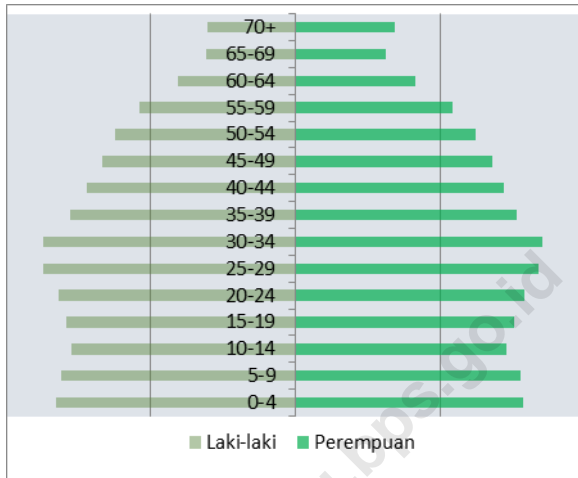
Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan pada periode tahun 2030-2040, secara nasional jumlah penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk dimana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah atau sekitar 10 penduduk usia produktif akan menanggung 3-4 penduduk usia non produktif. Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila sumberdaya manusia terutama usia produktif berkualitas dan sebaliknya akan menjadi bumerang apabila sumberdaya manusianya tidak dipersiapkan dengan baik (Nur Falikhah, 2020).

Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,18 juta jiwa. Jumlah ini bertambah setiap tahunnya. Dalam jangka waktu lima belas tahun yaitu tahun 2000 hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia mengalami penambahan sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun.

Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan SUPAS menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada pada kelompok umur muda. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kelahiran atau fertilitas di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yaitu dari 1,4 % tahun 2000-2010 menjadi 1,43% tahun 2010-2015.

Oke bro..mari kita lihat dulu kondisi demografi Kabupaten Batang dulu ya... Pada tahun 2020, Penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Sensus Penduduk 2020 sebanyak 801.718 jiwa dengan komposisi 404.807 laki-laki dan 396.911 perempuan.

PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BATANG 2020



Berdasarkan bentuk piramida penduduk menunjukkan bahwa populasi penduduk usia muda dan produktif lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun & lebih dari 65 tahun) 238.677 jiwa atau sama dengan 29,77 % sedangkan jumlah penduduk produktif 563.041 jiwa atau 70,23 % dari total penduduk Kabupaten Batang. Dapat kita lihat fenomena bonus demografi sebenarnya sudah terjadi di Kabupaten Batang.

Salah satu konsekuensi adanya Bonus Demografi adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah. Hal ini sebenarnya sangat tepat bila dikaitkan dengan ditetapkannya Kabupaten Batang menjadi salah satu Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang dicanangkan oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu. Dimasa datang diharapkan akan tersedia banyak sektor pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Melimpahnya jumlah kesempatan kerja tentu juga akan menarik minat pekerja dari daerah lain bahkan negara lain. Keadaan ini mau tidak mau harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Saat ini Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pertama, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas (Bappenas, 2017).

Nah bro..terkait hal diatas maka sudah semestinya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pendidikan serta keterampilan sumber daya manusia (SDM) beserta fasilitas pendukungnya. Menurutku sih..caranya dapat ditempuh antara lain dengan: 1. Menambah jumlah sekolah beserta fasilitas pendukungnya terutama di daerah pelosok, 2. Meningkatkan pelaksanaan Kejar

Paket sampai level SMA, 3. Meningkatkan jumlah berbagai pelatihan keterampilan kerja di setiap kecamatan serta 4. Memberikan bantuan modal bagi para perintis usaha juga akan meningkatkan daya saing bisnis, tentu saja pemerintah tetap harus memantau pelaksanaan didalamnya, apakah bantuan modal yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan semestinya atau tidak.

<https://jateng.bps.go.id>

“Hidup bukanlah tentang ‘Aku Bisa Saja’, namun tentang ‘Aku Mencoba’. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran”

~ Soekarno ~

Bagian 2

Kesehatan Pada Masa Pandemi

Diana Dwi Susanti

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali di dektesi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terparah.

Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus korona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif Korona mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh.

Ketahanan Sistem Kesehatan

Ketahanan sistem kesehatan sebelumnya didefinisikan sebagai “kapasitas pelaku kesehatan, institusi, dan populasi untuk mempersiapkan dan merespon krisis secara efektif; mempertahankan fungsi inti saat krisis melanda; dan, berdasarkan pelajaran yang didapat selama krisis, mengatur ulang jika kondisinya mengharuskan”. Sistem kesehatan yang tidak siap di seluruh dunia secara tidak sengaja berkontribusi pada penularan penyakit selama epidemi, sistem kesehatan yang tidak siap menghadapi bencana juga tidak dapat memberikan layanan penting.

Menurut Kruk et al. mendeskripsikan sistem kesehatan yang tangguh sebagai sistem yang “terintegrasi dengan upaya yang ada untuk memperkuat sistem kesehatan,” mampu “mendeteksi dan menafsirkan tanda peringatan lokal dan dengan cepat meminta dukungan,” mampu memberikan pelayanan untuk populasi yang beragam, mampu “mengisolasi ancaman dan mempertahankan fungsi inti, “dan mampu” beradaptasi dengan perubahan Kesehatan. Untuk mempercepat upaya pengendalian pandemi dan mengantisipasi kejadian pandemic dimasa mendatang diperlukan penguatan/reformasi system Kesehatan.

Reformasi Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi

Tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi dilakukan berbagai upaya untuk melakukan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2021-2024, Fokus yang akan di reformasi sesuai dengan Arahan Presiden yaitu penguatan sistem kesehatan sebagai bagian dari Pembelajaran pasca COVID-19 dengan Melibatkan Banyak Kementerian/ Lembaga seluruh Sub SKN (Upaya Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, Tenaga Kesehatan, Farmalkes, Manajemen Kesehatan, Litbangkes dan Pembiayaan Kesehatan) dan Dukungan (regulasi, pendanaan tahunan kelembagaan).

Catatan diatas menunjukkan bahwa sudah ada rencana untuk melakukan penguatan yang sudah dicanangkan tahun 2018 yang fokus kepada pelayanan Kesehatan, kejadian covid-19 merubah fokus penguatan menjadi reformasi system Kesehatan yang diharapkan mampu menyelesaikan pandemi danantisipasi kejadian dimasa yang akan datang.

Indikator Reformasi Sistem Kesehatan

Perluasan Covid-19 telah sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, menewaskan ratusan ribu orang, membuat sistem kesehatan mengalami tekanan yang sangat besar (selain mengganggu aktivitas ekonomi dan mengubah perilaku pribadi dan sosial). Dua elemen penting untuk memantau evolusi pandemi serta menganalisis keefektifan tindakan respons: data yang dapat diandalkan dan indikator yang berguna.

Memotret Kesadaran Vaksinasi oleh Masyarakat

Hayu Wuranti – BPS Provinsi Jawa Tengah Times Indonesia, 7 Agustus 2021

Sejak pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019, virus corona telah menyebar ke sejumlah negara, termasuk di Indonesia. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020 hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mulai pada bulan Juli 2021. Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan data epidemiologi terbaru (Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus pada gelombang kedua setinggi 381% per 21 Juni 2021), keberadaan varian delta COVID-19, dan pertimbangan politis. Hingga saat ini virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya.

Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak

pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini.

Kesadaran Masyarakat Melaksanakan Vaksin

Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 (SPMPMPC-19) secara daring (online) selama periode 13-20 Juli 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 2/3 responden yang sudah divaksin menyatakan bahwa kesadaran pribadi untuk pencegahan COVID-19 sebagai alasan mereka telah melakukan vaksinasi. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, bahkan sebanyak 20 persen yang belum melakukan vaksin karena khawatir dengan efek samping atau tidak percaya efektivitas vaksin. Persentase responden yang belum divaksin dan tidak mau divaksin karena khawatir efek samping atau tidak percaya efektivitas vaksin paling tinggi di Luar Jawa-Bali, berumur 60 tahun atau lebih, berpendidikan SMA ke bawah, dan belum pernah terpapar COVID-19.

Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.

Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang belum memiliki kekebalan terhadap virus Corona.

Pemerintah terus mengupayakan percepatan dan perluasan target vaksinasi. Semula, vaksinasi diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan, tenaga pengajar, dan lansia. Saat ini semua penduduk yang berusia 12 tahun ke atas sudah dapat menjalani vaksinasi. Terlepas dari upaya penyediaan oleh pemerintah, partisipasi dan kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita.

Masyarakat Sadar, Pandemi Berakhir

Dheriana – BPS Kabupaten Grobogan

Jateng Pos, 6 Maret 2021

Pandemi belum berakhir. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengkonfirmasi positif penduduk Indonesia hingga satu juta lebih pada awal bulan Februari 2021. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, di Indonesia pada tanggal 3 Februari terkonfirmasi positif sebesar 1,111 juta jiwa. Sebuah angka yang cantik akan tetapi sangat memilukan untuk negara sebesar Indonesia. Kurang sadarnya masyarakat dalam hal protokol kesehatan memicu melonjaknya angka terkonfirmasi positif di Indonesia. Dampak dari pandemi ini tidak hanya pada sektor kesehatan. Melainkan pada sektor ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Pada bidang ekonomi, ternyata mengalami dampak yang sangat serius akibat pandemi tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 minus 3,49 persen dan pada kuartal IV minus 2,19 persen (year on year/yoy). Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Data BPS juga menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019. Selain itu terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Penyebaran virus Corona di Indonesia harus ditekan semaksimal mungkin. Salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin 3M. 3M yang dimaksud yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Perilaku disiplin 3M yang termasuk dalam kampanye #ingatpesanibu demi terus menekan penyebaran virus Covid-19 hendaknya diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga terus menjalankan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) dengan yang harus didukung semua lapisan masyarakat. 3M dan 3T adalah satu paket upaya yang tidak dapat dipisahkan untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Pada bulan Januari 2021 pemerintah menerapkan kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali. PPKM ini ditujukan untuk daerah-daerah zona merah atau risiko tinggi. Kebijakan PPKM Jawa dan Bali dibuat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan sektor kesehatan dan ekonomi juga. PPKM ini dilaksanakan tanggal 14-25 Januari 2021 dan diperpanjang sampai 8 Februari 2020. Namun, presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah terbukti kurang efektif dalam menekan laju penularan Virus Corona. Menurutnya, hal itu dikarenakan karena implementasi yang tidak tegas sehingga tidak terlihat menurunkan mobilisasi di lapangan.

Semoga saja dengan adanya vaksin yang merupakan wujud usaha dari pemerintah mampu menekan laju penyebaran Covid-19. Manfaat vaksin yang paling mendasar ini adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh kita pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Tentunya segala usaha dari pemerintah ini harus didukung penuh dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat. Protokol kesehatan dengan menerapkan 3M dan 3T harus benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan.

Untuk itu, membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu kunci agar Covid-19 dapat ditekan penyebarannya. Namun, semua itu membutuhkan perilaku disiplin dari diri sendiri. Serta juga sangat perlu untuk dilakukan secara kolektif dengan penuh kesadaran. Kesadaran masyarakatlah yang akan mengakhiri pandemi Covid-19 ini. Kita berharap semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Sehingga kehidupan kembali normal dan ekonomi Indonesia segera bangkit. Aamiin.

Tingkat Kepatuhan Protokol Kesehatan Masa PPKM

Muhammad Yamani – BPS Kota Semarang

Jateng Daily, 24 Desember 2021

Guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity, Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan data epidemiologi terbaru (Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus pada gelombang kedua setinggi 381% per 21 Juni 2021), keberadaan varian delta COVID-19, dan pertimbangan politis. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat sempat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Kemudian sejak 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dikenalkan dengan PPKM Level 4 dan PPKM Level 2,3, dan 4 (yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian) pada 3 Agustus hingga 4 Oktober 2021. PPKM darurat diberlakukan pada berbagai tempat dan aktivitas. Kegiatan operasional beberapa aktivitas ekonomi dibatasi sampai pada jam tertentu bergantung pada tingkat urgensi aktivitas tersebut. Kegiatan belajar dan bekerja untuk sektor non esensial dilakukan di rumah. Selain itu, dilakukan penutupan area publik, taman umum, tempat wisata, tempat ibadah dan kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan kerumunan.

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan

Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 (SPMPMPC-19) secara daring (online) selama periode 13-20 Juli 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan secara umum sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari perilaku responden secara Nasional dalam menjalankan protokol kesehatan dimana 88,6 persen responden patuh dalam memakai 1

masker, 54,5 persen responden patuh dalam memakai 2 masker, 74,8 persen responden patuh dalam mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, 66,7 persen responden patuh dalam menjaga jarak minimal 2 meter serta 78,5 persen patuh dalam menghindari kerumunan. Namun, wilayah Luar Jawa-Bali, tingkat kepatuhan terhadap prokes masih cukup memprihatinkan, misalnya sekitar 63 persen responden belum patuh dalam memakai 2 masker, 35 persen belum mematuhi mencuci tangan dengan sabun/sanitizer, 44 persen belum mematuhi dalam menjaga jarak minimal 2 meter, dan 31 persen belum mematuhi dalam menghindari kerumunan.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, responden yang berpendidikan perguruan tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan SMA ke bawah dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Perempuan juga cenderung lebih patuh terhadap protokol kesehatan, terutama pada pemakaian 2 masker, dimana masih terdapat 25 persen responden laki-laki yang menyatakan abai terhadap pemakaian 2 masker. Sedangkan jika dilihat dari status perkawinannya, responden berstatus menikah cenderung lebih patuh dibandingkan yang berstatus belum/tidak menikah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dilihat dari pelaksanaan vaksinasi, secara umum tingkat kepatuhan responden yang sudah menjalani vaksinasi terhadap protokol kesehatan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang belum menjalani vaksinasi. Hal ini terutama terlihat pada tingkat kepatuhan dalam menggunakan 2 masker dan menjaga jarak minimal 2 meter, dimana pada responden yang belum melaksanakan vaksin terdapat 28,5 persen responden abai dalam memakai 2 masker dan 10 responden abai dalam menjaga jarak minimal 2 meter. Secara umum tingkat kepatuhan responden yang pernah terpapar COVID-19 terhadap protokol kesehatan lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah terpapar COVID-19. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, responden usia muda cenderung kurang patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Kelompok umur 46-60 tahun, cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang paling tinggi jika dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan kelompok umur 17-30 tahun merupakan kelompok umur dengan tingkat kepatuhan yang paling rendah. Secara umum responden berpendapatan rendah cenderung kurang patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan dibandingkan responden berpendapatan yang lebih tinggi di semua aspek yakni pemakaian masker, mencuci tangan dengan sabun/sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sedangkan jika dilihat dari frekuensi menjalani tes COVID-19, tingkat kepatuhan responden yang pernah menjalani tes COVID-19 terhadap protokol kesehatan lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah menjalani tes COVID-19.

Efektivitas pelaksanaan PPKM darurat sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Tanpa kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan, penyebaran virus korona akan sangat sulit dikendalikan. Munculnya varian baru dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri yang harus menjadi perhatian semua pihak. Selain kesadaran dan perilaku masyarakat, faktor ekonomi dan sosial juga perlu mendapat perhatian. Apalagi pembatasan kegiatan masyarakat diketahui tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi sosial tetapi juga meluas pada kondisi psikologi masyarakat.

Efek Domini Kenaikan Cukai

**Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 22 Desember 2021**

POLEMIK rokok dan tembakau menjadi persoalan yang kompleks dan kontroversial yang menimbulkan gerakan pro kontra. Satu sisi berkaitan dengan isu kesehatan dan sisi lain terkait kontribusinya terhadap perekonomian. Di tengah pro dan kontra, Menteri Keuangan sudah menetapkan kebijakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 13 Desember lalu.

Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022 dengan rata-rata kenaikan 12 persen. Sri Mulyani (Menkeu) menjelaskan bahwa kenaikan ini ditujukan sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cukai. Kebijakan cukai juga mempertimbangkan dampak kepada produsen yang meliputi petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan.

Konsumsi Rokok di Masyarakat

Kebijakan CHT memang bertujuan untuk mengendalikan tingkat konsumsi dan prevalensi rokok di masyarakat. Menurut data World Bank Group (2021) Indonesia menduduki peringkat ke tiga negara dengan penduduk yang merokok. Setidaknya 38 persen penduduk dewasa laki-laki dan perempuan di Indonesia mengkonsumsi rokok dan produk tembakau sejenis pada 2019.

Sedangkan dari data Susenas pada tahun 2019 penduduk usia 15 tahun keatas yang mengonsumsi rokok sebesar 28,69 persen. Angka ini termasuk tinggi karena berarti lebih dari seperempat penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia mengonsumsi rokok dalam kesehariannya.

Jika kita menyoroti dari konsumsinya, rokok memang menjadi konsumsi terbesar kedua pada pengeluaran makanan setelah makanan dan minuman jadi. Data dari Badan Pusat Statistik hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan bahwa pada tahun 2021 pengeluaran rokok sebesar 12,30 persen dari total pengeluaran makanan.

Pengeluaran rokok ini bahkan lebih tinggi dari pengeluaran padi-padian yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk protein, seperti daging, telur, tempe, serta ikan.

Mirisnya data menunjukkan semakin rendah ketahanan pangan ternyata semakin tinggi persentase konsumsi rokok dibandingkan total konsumsi makanan rumah tangga tersebut. Data BPS menunjukkan konsumsi rokok pada rumah tangga rawan pangan merupakan yang tertinggi dibandingkan rumah tangga yang lain. Pada tahun 2021 konsumsi rokok pada rumah tangga rawan pangan sebesar 21,98 persen.

Dengan adanya kenaikan CHT ini diperkirakan akan menaikkan harga rokok yang nantinya diharapkan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin sehingga alokasi keuangannya bisa dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lain. Hasil penelitian dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rokok sekitar 2 persen akan menurunkan pengeluaran beras, protein, dan sumber lemak di rumah tangga tersebut.

Target Menurunkan Prevalensi Merokok

Menurut Cigarette Tax Scorecard, penyesuaian CHT berkala di Indonesia berhasil menurunkan keterjangkauan harga rokok sebesar 3,3 persen setiap tahun selama tahun 2014-2020. Melalui kenaikan CHT kali ini, diharapkan semakin mampu menurunkan tingkat konsumsi rokok bagi remaja, anak, serta perokok pemula.

Penurunan konsumsi ini akan berdampak kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengadvokasikan gaya hidup sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan SDG's ketiga yaitu membentuk kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Pemerintah menargetkan prevalensi merokok anak Indonesia usia 10-18 tahun turun minimal menjadi 8,7 persen di tahun 2024 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dari data Riskesdas menunjukkan di tahun 2018 penduduk usia 10-18 tahun yang merokok sebanyak 9,1 persen dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 8,8 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu usaha keras dari pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok terutama untuk anak usia 10-18 tahun. Peningkatan prevalensi merokok ini menjadikan Indonesia terus mengalami kerugian kesehatan. Peneliti CISDI menyebutkan kenaikan cukai dapat mendorong penurunan konsumsi lebih tajam. Pada Tahun 2020 kenaikan cukai rokok menurunkan konsumsi rokok kretek sebesar 17,3 persen dan rokok putih 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rokok dan Kesehatan

Dari sisi kesehatan, rokok dapat memicu risiko stunting pada anak. Penelitian IFLS membuktikan bahwa perilaku merokok berdampak pada kondisi stunting anak yang ditunjukkan pada gangguan tinggi dan berat badan. Data menunjukkan orang tua perokok kronis memiliki probabilitas meningkatkan potensi anak mengalami stunting 5,5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak dari orang tua bukan perokok.

Selain itu merokok bisa memperparah dampak kesehatan akibat Covid-19 atau 14 kali berisiko terkena Covid-19 dibandingkan dengan bukan perokok. Hal ini menunjukkan bahwa disamping menimbulkan kerugian bagi perekonomian, rokok juga berdampak langsung pada kenaikan biaya kesehatan. CISDI memperkirakan biaya perawatan kesehatan untuk penyakit yang disebabkan oleh rokok pada tahun 2019 sebesar 17,9 triliun hingga 27,7 triliun. Sedangkan Kosen et al pada tahun 2017 menyatakan bahwa bila

memperhitungkan kerugian akibat hilangnya produktivitas dan kematian dini, kerugian ekonomi akibat rokok pada tahun 2015 sebesar 5 persen dari pendapatan domestik bruto atau mencapai 597 triliun.

Rokok dan Penerimaan Negara

Jika dilihat dari sudut pandang lain, kenaikan tarif CHT turut mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Saat ini persentase cukai terhadap harga jual rokok di Indonesia masih dibawah rekomendasi WHO yang sebesar 70 persen. Persentase cukai terhadap harga jual rokok di Indonesia saat ini sebesar 48 persen.

Tim Peneliti CISDI menunjukkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kenaikan cukai rokok akan menambah pendapatan pajak negara yang bersumber dari cukai rokok, pajak rokok, dan pajak pertambahan nilai. CISDI memperkirakan bahwa menaikkan cukai rokok kretek sebesar 30 persen dan rokok putih 45 persen masing-masing dapat menambah penerimaan negara sebesar Rp 5,7 triliun dan Rp 7,9 triliun. Dengan kenaikan penerimaan negara dari cukai rokok ini nantinya dapat dialokasikan untuk penanganan kesehatan yang diakibatkan oleh rokok dan meningkatkan sehingga dapat membantu pihak-pihak yang selama ini dirugikan oleh asap rokok.

Kebijakan Pendukung

Kenaikan CHT yang merupakan langkah pengendalian konsumsi rokok ini perlu adanya kebijakan pendukung. Hal ini dikarenakan apabila hanya kebijakan kenaikan CHT tidak akan cukup untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari penurunan konsumsi rokok. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah semakin maraknya peredaran rokok ilegal yang lebih terjangkau.

Selain itu perlu adanya mitigasi terhadap pertanian tembakau dengan memberikan alternatif pengolahan untuk komoditas tembakau agar petani tidak dirugikan dan tetap mendorong kesejahteraan petani. Hal yang tidak kalah penting adalah penyederhanaan struktur tarif cukai yang selama ini masih tergolong rumit sebagai upaya menurunkan variasi harga rokok. jatengdaily.com-st

*“Education is the most powerful weapon which
you can use to change the world”*

~Nelson Mandela~

Bagian 3

Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19

Diana Dwi Susanti

Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor paling terdampak luar biasa oleh Pandemi Covid-19 termasuk Indonesia. Lebih dari 2 juta orang harus kehilangan pekerjaannya, yang berarti mereka tidak lagi memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pandemi Sebabkan PHK

Mendapatkan kepastian keberlangsungan bekerja dan penghasilan yang layak adalah harapan setiap pekerja. Ketergantungan terhadap kebijakan dan kondisi stabilitas ekonomi membuat pekerja selalu dalam keadaan tidak aman. Berbagai masalah seperti Upah Minimum Regional, berpindahnya pabrik ke tempat yang lebih menguntungkan dan pandemi menjadi masalah besar untuk pekerja.

Penyebaran pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah negara-negara di dunia untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang ada akhirnya ditransmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah.

Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi.

Lapangan Usaha Terdampak Pandemi

Berdasarkan jenis pekerjaan, sektor non-pertanian mengalami kehilangan pekerja paling besar sepanjang dua tahun pandemi. Dari sisi pertumbuhan jumlah pekerja, dampak COVID-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang masih tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi.

Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dalam memitigasi dampak pandemi terhadap sektor tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian paket stimulus

ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia sebagai salah prioritas sektor tenaga kerja..

Mencermati Menurunnya Pengangguran di Puncak Pandemi

Hayu Wuranti – BPS Provinsi Jawa Tengah Times Indonesia, 8 November 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity. PPKM mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat sempat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Kemudian sejak 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dikenalkan dengan PPKM Level 4 dan PPKM Level 2,3, dan 4 (yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian) pada 3 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Pemberlakuan PPKM sempat dikhawatirkan menyebabkan potensi kenaikan pengangguran, terutama jika pandemi tidak dapat dikendalikan.

Karakteristik Pekerja dan Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 meningkat menjadi 67,80 persen dari 67,77 persen pada Agustus 2020. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar atau meningkat 1,22 juta orang, disusul sektor Perdagangan sebesar 1,04 juta orang. Meskipun sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 37,13 juta orang, namun sektor ini justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu 1,10 juta orang. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar yaitu 1,02 % poin, terutama pada buruh/karyawan/pegawai (dibandingkan Agustus 2020). Sementara itu pekerja informal turun dibanding Agustus 2020 dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap. Disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan telah terjadi akibat munculnya pandemi COVID-19, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk yang dalam pekerjaannya melakukan transaksi secara online sebanyak 1,83 juta orang.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021, menurun menjadi 6,49 persen, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 7,07 persen. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang dimanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT sebesar 6,49 persen pada Agustus 2021 berarti dari 100 orang angkatan kerja 6 orang diantaranya menganggur. Hal ini sejalan dengan jumlah iklan lowongan kerja pada Jobs.id, secara umum pada masa PPKM jumlah iklan lowongan kerja mengalami penurunan, tetapi jumlah iklan lowongan pada bulan Agustus 2021 masih lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020. Demikian juga dengan tren pencarian kerja berdasarkan Google Trends, pencari kerja pada Agustus 2021 lebih rendah dibandingkan Agustus 2020.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT tahun ini sebesar 6,74 persen laki-laki dan 6,11 persen perempuan. TPT laki-laki mengalami penurunan lebih tinggi daripada perempuan. Sementara itu berdasarkan tempat tinggal atau secara spasial angka pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di pedesaan, yakni masing-masing 8,32 persen dan 4,17 persen pada Agustus 2021, sedangkan pada Agustus 2020 masing-masing 8,98 persen dan 4,71 persen. Hal ini menunjukkan penurunan angka pengangguran lebih cepat di perkotaan ketimbang di pedesaan.

Dampak COVID-19 pada ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari besaran TPT. Selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Secara umum, upaya pengendalian pandemi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 21,32 juta orang di Agustus 2021, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 29,12 juta orang. Gambaran dampak COVID-19 terhadap pasar kerja pada Agustus 2021 terlihat mulai berkurang. Hal ini terlihat dari pengangguran karena COVID-19 (penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020) menurun 0,74 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020) menurun 0,06 juta orang, Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19 (penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja) menurun 0,38 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (shorter hours) karena COVID-19 menurun 6,62 juta orang.

Kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2021 menunjukkan tanda-tanda membaik lewat menurunnya pengangguran dan kembali naiknya jumlah pekerja formal. Namun, perbaikan itu belum diiringi dengan penguatan daya beli pekerja. Dari gambaran di atas memperlihatkan dengan membaiknya ekonomi secara alamiah kontribusi pertanian itu makin menurun. Dan ini diikuti ke sektor-sektor lain yang lebih formal, misal perdagangan dan industri pengolahan utamanya. Ini menunjukkan sudah ada pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pemulihan ekonomi dari sektor-sektor strategis seharusnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Demikian juga dengan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pemulihan ekonomi nasional diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka.

Serapan Tenaga Kerja Dampak Covid-19 di Jawa Tengah Berangsur Membaik

**Rukini– BPS Kabupaten Grobogan
Lingkar Jateng, 3 Desember 2021**

Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap Negara. Tenaga kerja merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun disisi lain meningkatnya tenaga kerja justru menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh konsekuensinya adalah terciptalah pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja dan pengangguran merupakan komponen pembentuk Angkatan Kerja. Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/Negara.

Secara umum upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi sebelum adanya pandemi Covid 19 cukup berhasil, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja meskipun tidak semua mampu terserap. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013-2019 menunjukkan trend penurunan tingkat pengangguran di Jawa Tengah cukup tinggi. Pada tahun 2013 pengangguran di Jawa Tengah sebesar 6,01 persen mengalami penurunan menjadi 4,44 persen pada tahun 2019.

Setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global yaitu tanggal 11 Maret 2020, pemerintah langsung melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Dampaknya terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah Agustus 2020 melonjak sebesar 6,48 persen.

Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus covid-19 pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional. Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi demand dan supply tetap terjaga. Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2021 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,56 persen dibanding triwulan III-2020 (y-on-y). Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang

memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,62 persen dan 6,52 persen

Per Agustus 2021, Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah sebanyak 18,96 juta orang, bertambah sebanyak 213 ribu orang dibanding Agustus 2020. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebanyak 17,84 juta orang, bertambah sebanyak 299 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 1,13 juta orang, mengalami penurunan sekitar 86 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Sejalan dengan naiknya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan. TPAK Agustus 2021 tercatat sebesar 69,58 persen, naik 0,15 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya supply tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2020 sebesar 6,48 persen turun menjadi 5,95 persen pada Agustus 2021. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masing-masing sebesar 1,53 persen poin, 0,43 persen poin dan 0,30 persen poin. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal. Pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 7,07 juta orang (39,62 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal atau meningkat sebesar 2,37 persen dibandingkan Agustus 2020.

Secara umum, upaya pengendalian pandemi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 2,95 juta orang di Agustus 2021, berkurang sebanyak 1,01 juta orang atau sebesar 25,53 persen dibandingkan dengan yang tercatat pada Agustus 2020. Sejalan dengan konsistensi penurunan kasus Covid-19 yang terus terjadi, pemerintah melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara lebih luas namun tetap dalam pengawasan dan penerapan protokol Covid-19 secara disiplin. Jumlah serapan tenaga kerja akan meningkat manakala pemerintah berhasil dalam meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19. Jika aktivitas kembali normal, ekonomi tumbuh artinya akan ada penyerapan tenaga kerja. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada beberapa indikator utama yang menunjukkan prospek baik bagi ekonomi.

Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan Kebumen

Fajrin Fauzan Affandi – BPS Kabupaten Kebumen

Kebumen Expres, 26 Juli 2021

Pandemi Covid 19 menjadi realita sosial yang selain mengguncang dunia kesehatan, tidak bisa dipungkiri berdampak multi sektoral pada perekonomian global, nasional maupun lokal termasuk di Kebumen. Tiga bulan setelah kasus pertama Corona diumumkan di Indonesia pada Maret 2020, Moody's Investor Service memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan melambat 0,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tersebut jauh di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yakni 5,02%. Sementara di Kebumen, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen dan sejalan dengan perkiraan Moody's Investor Service, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan 4,56%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021.

Mengingat bahwa hingga saat ini pandemi belum juga berlalu, muncul pertanyaan: apa dan bagaimana dampak Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Arief Ansory Yusuf (2020) membuat simulasi tiga skenario ((intervensi minimal terhadap Covid 19, PSBB/intervensi kuat, dan PSBB disertai stimulus fiskal) dan memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model CGE (computable general equilibrium). Hasil simulasi menemukan bahwa dalam skenario mana pun, ekonomi nasional akan mengalami penurunan terhadap baseline (kondisi seandainya tidak ada pandemi).

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS, secara khusus menambahkan pertanyaan terkait dampak Covid 19 terhadap ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi ILO (International Labor Organization). Secara garis besar, penduduk usia kerja yang terdampak Covid 19 dikelompokkan menjadi a) penganggur yang berhenti bekerja karena Covid 19, b) bukan angkatan kerja yang berhenti bekerja karena Covid 19, c) sementara tidak bekerja karena Covid 19, dan d) penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid 19.

Berdasarkan data Sakernas 2020, penduduk usia kerja di Kebumen adalah 910 ribu jiwa, dan 81 ribu atau 8,96% diantaranya terdampak Covid 19. Penduduk yang terdampak tersebut terdiri dari 47 ribu laki-laki dan 34 ribu perempuan yang tersebar hampir merata baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dilihat dari karakteristik individu dapat diketahui bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja pada sektor formal lebih berpeluang untuk tidak terkena dampak Covid 19.

Lebih dari 60% penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor jasa dan 34% penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor manufaktur mengalami dampak akibat pandemi. Sementara pada sektor pertanian kurang dari 5% persen saja penduduk usia kerja yang

terdampak. Seperti sejarah yang terulang, krisis 1997-1998 juga menunjukkan relatif bertahannya sektor pertanian terhadap krisis dan bahkan mampu menampung kembali tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di sektor lain.

Penduduk usia kerja yang memanfaatkan internet dalam pekerjaannya mempunyai peluang lebih banyak terdampak Covid 19 dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan internet. Hal ini menjadi ironi di tengah laju pertumbuhan PDRB Kebumen sektor informasi dan komunikasi yang tinggi.

Sementara dilihat dari kelompok umur, generasi milenial dan gen Z atau penduduk yang lahir setelah tahun 1995 relatif tidak terdampak dibandingkan dengan generasi yang lahir pada periode sebelumnya. Hal ini tentunya sangat melegakan mengingat bahwa gen Z adalah masa depan perekonomian yang memegang peranan perkembangan Kebumen ke depan.

Berangkat dari analisis sederhana dalam melalui masa pandemi, kerangka kebijakan ketenagakerjaan di Kebumen ke depan dapat terkonsentrasi pada penguatan sektor pertanian dan berfokus pada gen Z, sebagai lompatan mewujudkan tagline Kebumen, *agrocitry of java*. Pembangunan pertanian hendaknya berbasis pada *comparative advantage* dan dilakukan secara komprehensif, mulai dari sektor primer yang mengambil atau menghasilkan bahan mentah, sektor sekunder yang mengolah hasil dari sektor primer, dan sektor tersier dalam kerangka agrobisnis.

Dalam sudut pandang ekonomi, pandemi Covid 19 disebut sebagai peristiwa non-ekonomi yang mempunyai efek kejut terhadap perekonomian yang dampak langsungnya seperti tergambar dalam data hasil Sakernas. Upaya dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai skema bantuan sosial maupun berbagai kegiatan swadaya masyarakat melalui *crowdfunding* mampu mengendalikan dampak turunan seperti penurunan daya beli atau yang lebih ekstrim turunnya konsumsi pangan (*food insecurity*).

Terlepas dari masalah ekonomi, beragam upaya memutus rantai penyebaran Covid 19 terus dilakukan. Apresiasi yang sangat tinggi layak diberikan bagi seluruh tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan menghadapi Covid 19. Mari bersama patuh dan disiplin untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, serta menjauhi kerumunan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap upaya pemerintah memulihkan kesehatan. Karena di mata pemerintah, kita semua sangat berarti.

Pengangguran atukah Cuma Mager?

**Yusup Riyanto – BPS Kabupaten Jepara
Lingkar Jateng, 25 Juni 2021**

Pengangguran identik dengan kesan negatif di masyarakat. Umumnya masyarakat mendefinisikan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Bila merujuk konsep definisi BPS, pengangguran terbuka terdiri dari: Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Terlepas dari istilah “pengangguran”, kita sering mendengar istilah “mager”. Mager merupakan akronim dari malas gerak. Mager merupakan kata kata yang familiar dan sering diucapkan oleh generasi milenial serta generasi z. Mager ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak produktif karena orang yang terlalu mager hanya diam dan bermalas-malasan sehingga tidak mendapatkan apa-apa.

Penduduk usia 15-64 tahun Indonesia yaitu sebesar 70,72 persen. Banyaknya penduduk usia produktif ini bisa menjadi keuntungan jika dapat memanfaatkan berlimpahnya penduduk usia produktif, tetapi bisa juga menjadi kerugian jika penduduk-penduduk usia produktif ini menganggur (tidak produktif) dan akan menambah beban.

Sejalan yang terjadi di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Jepara mengalami penambahan penduduk sebesar 0,75 persen dari tahun 2010. Adapun proporsi penduduk usia produktifnya yaitu 70,15 persen. Generasi milenial dan generasi Z Kabupaten Jepara lebih banyak dibandingkan generasi-generasi lainnya. Generasi Milenial yaitu penduduk yang lahir 1981-1996, mendominasi dengan persentase 25,86 persen, sedangkan Gen Z yang lahir 1997-2012, ada sebesar 25,47 persen dari total penduduk Jepara.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menghasilkan informasi bahwa Kabupaten Jepara mengalami peningkatan pengangguran dari 2,97 pada tahun 2019 menjadi 6,7 pada tahun 2020. Kalau melihat hasil Sakernas sebelum tahun 2020, Kabupaten Jepara sebenarnya sudah bagus karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jepara terus menurun sampai dengan tahun 2019. Terlepas dari adanya pandemi covid-19 yang melanda Indoneisa tak terkecuali Kabupaten Jepara, hasil Sakernas ini merupakan warning bagi pemangku kebijakan serta masyarakat.

Sebenarnya jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang bekerja 2020 mengalami peningkatan jumlah yaitu dari 628.994 jiwa pada tahun 2019 menjadi 634.386 jiwa, tetapi peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerjanya. Pada tahun 2019 jumlah Angkatan kerja Kabupaten Jepara yaitu 648.233 jiwa sedangkan tahun 2020 bertambah menjadi 679.907 jiwa.

Pada kelompok usia 15-29 terjadi penurunan jumlah yang bekerja disaat jumlah angkatan kerja bertambah. Genarasi z dan generasi milenial paling besar peningkatan penganggurannya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Jepara pada tahun 2020 memang berdampak ke semua sektor perekonomian. Generasi z dan generasi milenial perlu memutar otak untuk lebih produktif dan tidak mager. Orang tua juga sebaiknya mendukung dan menstimulus pola pikir baru terkait kegiatan produktif untuk anaknya. Pemerintah juga berusaha memberi bantuan untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat tumbuh dan mengurangi pengangguran..

Mengurai Data dan Fenomena Ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara

Lina Dewi Yunitasari – BPS Kabupaten Jepara
Infojatenf.id, 14 Desember 2021

Ora obah ora mamah. Pepatah Jawa yang mengingatkan bahwa kita harus bergerak supaya bisa makan dan tercukupi kebutuhan hidup. Bergerak disini bisa diartikan dengan manusia menggerakkan segala daya upaya yang dimiliki agar terpenuhi hajat hidupnya, salah satunya dengan bekerja. Dalam bekerja, diperlukan dua unsur utama yaitu ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja. Keterlibatan kedua unsur tersebut mutlak dibutuhkan karena tenaga kerja sebagai motor penggerak utama agar kegiatan ekonomi bisa berjalan, sementara lapangan kerja adalah media menuangkan kreativitas bekerja sehingga proses ekonomi bisa berjalan

Terkait tenaga kerja, dalam konsep ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) dikenal istilah Penduduk Usia Kerja (PUK) yaitu semua penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Secara tren, PUK cenderung meningkat setiap tahun seiring pertambahan jumlah penduduk. PUK kemudian dipilah menjadi kelompok Angkatan Kerja (bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) dan Bukan Angkatan Kerja (masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, penduduk usia kerja di Jepara sebanyak 988.238 penduduk (naik 1,63 persen), dari jumlah tersebut 69,55 persennya merupakan angkatan kerja. Berdasarkan angka tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan angkatan kerja di Jepara cukup memadai sekaligus sebagai gambaran jumlah penduduk Jepara yang secara aktual siap terlibat dan ikut serta dalam jalannya kegiatan ekonomi.

Angkatan Kerja Bertambah vs Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Turun

Data jumlah angkatan kerja tersebut tak langsung membuat lega hati, diperlukan pengkajian lebih jauh seberapa besar tingkat partisipasi angkatan kerja secara nyata terhadap kegiatan ekonomi Jepara. Hasil pengkajian memperlihatkan terdapat beberapa fenomena menarik mengenai kondisi ketenagakerjaan di Jepara, salah satunya ternyata penambahan jumlah angkatan kerja tahun ini berbanding terbalik dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) yang justru menurun. Angka TPAK sendiri mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Idealnya, jika angkatan kerja bertambah maka TPAK juga meningkat sebagai pertanda baik atau tidaknya tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah

tersebut. Fenomena tidak ekuivalennya hubungan antara angkatan kerja dan TPAK di Jepara tersebut disinyalir karena pasokan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi berkurang. Karena barangkali penduduk yang termasuk sebagai penduduk usia kerja lebih memilih untuk keluar dari pasar kerja untuk mengurus rumah tangga, sekolah atau kegiatan lainnya. Faktor lain yang diduga berpengaruh adalah kondisi perekonomian saat ini masih dalam tahap perbaikan dan penataan kembali berkaitan erat dengan iklim usaha; peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti penambahan kesempatan kerja dan kemungkinan ketersediaan kesempatan kerja yang tidak sesuai dengan keahlian dan kualifikasi para pencari pekerja sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Turun dan Membludaknya Pengangguran Terdidik

Meskipun sempat terkena hantaman pandemi, tahun ini perekonomian Jepara secara umum berangsur mulai menunjukkan geliat menuju arah yang lebih baik. Secara data ditunjukkan dengan rilis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jepara tahun 2021 tercatat sebesar 4,23 persen atau menurun 2,47 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Turunnya TPT merupakan sinyal baik pertanda bahwa masyarakat sudah mulai bangkit aktif menjalankan usaha ekonomi dan kesempatan kerja semakin terbuka sehingga dapat menyerap tenaga kerja

Angka TPT merupakan indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Ditelaah menurut tingkat pendidikan, TPT dengan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi yaitu sebesar 8,47 persen. Sementara TPT terendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,67 persen. Dengan kata lain, ada penawaran kerja yang berlebih pada lapangan kerja yang pekerjaanya berpendidikan SD ke bawah.

Pengangguran di Jepara saat ini didominasi dengan pengangguran terdidik yaitu kelompok pengangguran terbuka yang berpendidikan menengah (SMA-sederajat) dan berpendidikan tinggi (Akademi dan Universitas) yaitu sebesar 6,52 persen, lebih tinggi dari pengangguran tidak terdidik di angka 3,04 persen. Seharusnya mereka yang berpendidikan menengah ke atas diharapkan memiliki kemampuan dan berkontribusi nyata meminimalisir pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Realitanya, mereka seringkali masih menggantungkan nasib pada lapangan kerja yang sudah ada, memperebutkan kesempatan kerja yang terbatas, kesulitan mengembangkan kemampuannya karena masih minimnya pengalaman kerja, enggan melamar/mengambil pekerjaan yang memiliki stigma rendah dimata masyarakat dll yang pada akhirnya membuat mereka tidak mampu terserap ke dalam lapangan kerja sehingga mereka terjebak dalam status pengangguran..

Dampak Pengangguran dan Solusi

Pengangguran adalah beban. Banyak dampak mengkhawatirkan dari pengangguran jika tidak segera ditangani dan dicarikan solusi. Penganggur dapat memakan hasil produktivitas orang lain sehingga tingkat pendapatan menjadi rendah karena beban yang ditanggung bertambah dan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Penganggur berpotensi besar mengurangi

pendapatan pajak pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.

Namun apresiasi tinggi perlu diberikan kepada pemerintah Jepara karena tahun ini berhasil menekan angka pengangguran. Prestasi ini tak boleh membuat lengah dan harus terus ditingkatkan. Kedepan, pemerintah perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata yang mampu mendorong penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta terus mamacu tumbuhnya sektor-sektor potensial yang memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja tinggi. Seperti sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran, pariwisata serta mengembalikan daya tarik masyarakat terhadap sektor pertanian.

Kalkulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tepat pun harus dipantau secara serius agar tidak meleset. UMK harus dapat memenuhi standar hidup layak di wilayah tersebut. Lompatan-lompatan pembangunan ekonomi sangat diperlukan seperti mendorong ekspor produksi industri besar-sedang di Jepara, menghidupkan usaha mikro kecil di Jepara dengan mengkampanyekan bangga memakai produk lokal, menjamin kemudahan perizinan dalam mengembangkan usaha mikro kecil, mendukung usaha teman/saudara/keluarga dll.

Mari bersama-sama bangkitkan ekonomi Jepara dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan menuju kompas baru pembangunan yang lebih baik.

Gaung Menghapus Pekerja Anak di Bulan Juni

**Dwi Agus Styawan – BPS Kabupaten Kebumen
Jateng Daily, 24 Juni 2021**

PANDEMI COVID-19 bukan hanya merusak tatanan sosial-ekonomi, tetapi juga mengancam masa depan anak-anak di seluruh dunia. Pandemi yang menghambat sebagian besar aktivitas ekonomi telah mengguncang denyut nadi kehidupan rumah tangga. Guncangan ini berisiko menyeret anak-anak masuk dalam pasar kerja, menenggalkan pendidikan, serta mengubur semua impian dan harapan kesuksesan.

Oleh karena itu, walaupun dalam situasi pandemi, International Labour Organization (ILO) tetap berupaya menggaungkan penentangan pekerja anak kepada dunia internasional. Upaya ini dilakukan melalui peringatan hari dunia menentang pekerja anak pada 12 Juni lalu. Peringatan ini bertujuan mengajak pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, serta seluruh masyarakat internasional untuk concern terhadap permasalahan pekerja anak.

ILO dalam publikasinya Child Labour Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward, menyatakan pada awal 2020 jumlah pekerja anak mengalami peningkatan secara global menjadi 160 juta anak. Hampir separuh pekerja anak tersebut berada dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keamanan, dan perkembangan moral mereka.

ILO juga menunjukkan bahwa sejak 2016, kemajuan global dalam melawan pekerja anak relatif stagnan. Selama empat tahun terakhir, persentase pekerja anak relatif tidak berubah tetapi jumlah absolut pekerja anak meningkat 8,4 juta anak. Hal ini berarti selama 2016 – 2020, sebanyak 8,4 juta anak terdorong menjadi pekerja. Lebih jauh lagi, ILO juga menyatakan bahwa 9 juta anak akan berisiko mengalami hal yang sama pada akhir 2022 sebagai imbas dari pandemi COVID-19.

Situasi Pekerja Anak di Indonesia

Lantas bagaimana situasi pekerja anak di Indonesia? Berdasarkan data Profil Anak yang merupakan kolaborasi KEMENPPPA dan BPS mencatat bahwa selama periode 2010 – 2019 tren persentase pekerja anak di Indonesia cenderung menurun, yakni dari 8,96 persen menjadi 6,35 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam menarik anak dari pekerjaan selama hampir satu dekade terakhir.

Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah melalui pembentukan Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Salah satu kegiatan program tersebut adalah Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan berhasil mengembalikan pekerja anak untuk kembali bersekolah. Prioritas sasaran program ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penetapan prioritas sasaran ini berdasarkan hasil-hasil kajian terkait pekerja anak yang menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam usaha pemenuhan nafkah rumah tangga.

Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahwa program bantuan tunai bagi masyarakat miskin cukup membantu mengurangi kerawanan keluarga untuk mengalami krisis ekonomi sehingga peluang anak untuk bekerja sebagai respon terhadap krisis menjadi berkurang.

Pertanyaan menarik terkait situasi pekerja anak di Indonesia adalah siapa mereka, bagaimana profil sosio-demografi mereka, dan di mana mereka tinggal. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, data Profil Anak menyebutkan bahwa pada 2019 persentase anak berumur 10 – 17 tahun yang bekerja di wilayah perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada wilayah perkotaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mohamud (2016), dalam artikel “Child labour and School Attendance in Somalia”, yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di perdesaan cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk bekerja dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan.

Dominasi Sektor Pertanian

Kondisi ini tidak lepas dari dominasi sektor pertanian di perdesaan. Sebagian besar penduduk perdesaan menjadikan pertanian sebagai tumpuan utama mata pencaharian. Sektor ini relatif tidak mengenal gender. Bahkan keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian relatif tinggi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021 mencatat secara absolut jumlah perempuan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 14,2 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 13,1 juta jiwa.

Relatif tingginya keterlibatan perempuan (ibu) ini lah menurut kajian yang dilakukan oleh Self (2011), dalam artikel “Market and Non-market Child Labour in Rural India: The Role of the Mother’s Participation in the Labour”, memiliki andil meningkatkan resiko anak ikut bekerja menambah pendapatan rumah tangga. Kondisi ini tercermin dalam data Profil Anak yang mencatat bahwa pada 2019 lebih dari separuh pekerja anak di wilayah perdesaan bekerja di sektor pertanian.

Ancaman Pengangguran Terdidik dan Muda di Kota Pekalongan

**Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 291 Desember 2021**

Dibalik kemelut penetapan upah minimum tahun 2022, terdapat permasalahan yang tak kalah peliknya yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Semakin meningkatnya Pendidikan Angkatan kerja tentunya membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kompetensinya. Sayangnya, gap antara permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja tidak seimbang.

Di kota Pekalongan pada tahun 2021 menyisakan 6,89 persen penduduk yang menganggur. Mirisnya, sebagian besar dari pengangguran tersebut berusia muda dan berpendidikan menengah atas. Pada tahun 2021 pengangguran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati urutan kedua terbesar penyumbang pengangguran di Kota Pekalongan, yaitu sebesar 23,51 persen. Jumlah ini cukup besar dan meningkat drastis dibandingkan tahun 2020 sebanyak 13,87 persen. Hal ini menandakan adanya potensi sumber daya yang kurang termanfaatkan di Kota Pekalongan (under utilized).

Ketidakmampuan sistem perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk semua angkatan kerja dapat mengakibatkan meningkatnya tenaga kerja informal disamping pengangguran. Di Kota Pekalongan pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja informal sebanyak 55,96 ribu orang dimana sebagian besar berada di sektor Industri, perdagangan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Menurut International Labour Organization (ILO) informalitas merupakan pekerjaan yang mempunyai dampak berbahaya terhadap hak-hak pekerja dan mempunyai dampak negatif terhadap sustainable enterprises karena faktor rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses modal.

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, ketika pendidikan berhasil ditingkatkan yang terjadi selanjutnya adalah tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompensasi lulusan. Ketika permintaan melebihi jumlah permintaan yang ada inilah menjadikan meningkatnya pengangguran terdidik.

Pendidikan yang tinggi yang diharapkan akan mempermudah untuk memasuki dunia kerja ternyata tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Pada

akhirnya banyak dari mereka yang mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang menjadikan meningkatnya tenaga informal maupun setengah pengangguran. Apalagi stigma di masyarakat ketika sudah megenyam pendidikan tinggi namun tidak bekerja menjadi beban tambahan untuk mereka.

Ini menjadi pekerjaan rumah untuk menyediakan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi yang ada sehingga angkatan kerja yang sudah memperoleh pendidikan menengah atas dapat terbedayakan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan kompetensi yang telah mereka pelajari. Jangan sampai pada akhirnya pendidikan tinggi namun ujungnya menjadi pengangguran karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikannya.

Disisi lain, tingkat pengangguran usia muda juga perlu menjadi sorotan. Pada tahun 2020 pengangguran terbuka umur muda di Kota Pekalongan hampir setengah dari total pengangguran yang ada di Kota Pekalongan. Celakanya sebagian besar dari pengangguran muda ini tamatan SMK. Padahal adanya SMK ini ditujukan untuk menyiapkan lulusan yang siap dan mampu untuk bekerja sesuai keahlian yang ditekuni.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa dengan Pendidikan SMK ditujukan untuk menyiapkan lulusan yang produktif, mampu bekerja mandiri, dan mengisi lowongan pekerjaan yang ada sesuai dengan kompetensi dengan dibekali ilmu dan kompetensi yang sesuai dengan program keahliannya.

Belum lagi tambahan masalah apabila kaum muda ini tidak melakukan kegiatan apapun atau Not in employment, education, training (NEET). Tingkat pengangguran usia muda dan NEET ini merupakan salah satu indikator kesempatan kerja. Kegagalan di sekolah atau meninggalkan sekolah lebih awal cenderung menyebabkan pengangguran dan tidak aktif di hari kemudian.

ILO menjelaskan bahwa pengangguran dan ketidakaktifan memiliki konsekuensi jangka Panjang baik kembali ke individu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan seperti pengurangan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih rendah di masa dewasa, ketergantungan yang lebih besar pada kesejahteraan, kehamilan dini, dan perilaku anti sosial. Pengangguran pada usia muda secara eksplisit juga terkait dengan risiko kemiskinan dan pengucilan social di kemudian hari (Papadakis et al, 2017).

Ketika dihadapkan dengan kenyataan ini, akan sangat disayangkan ketika pendidikan sudah tinggi yang didukung dengan kualitas kesehatan yang baik namun berakhir dengan menjadi pengangguran muda yang tergolong NEET. Ini akan menyebabkan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ternyata belum diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai dan berkualitas.

Kemudian perlu langkah-langkah pencegahan dari berbagai pihak salah satunya dari pemerintah. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan dan merugikan dikemudian harinya. Menciptakan lapangan usaha dengan mendorong kewirausahaan bisa menjadi salah satu solusi.

Untuk mendorong kewirausahaan perlu adanya upaya dengan menyiapkan keterampilan keuangan, kewirausahaan, dan literasi digital. Hal ini dapat dilaksanakan melalui

pelatihan-pelatihan. Pada akhirnya semua itu pada akhirnya sebagai upaya untuk mendorong kemakmuran ekonomi dan tindakan preventif untuk mencegah kemiskinan ekstrem..

<https://jateng.bps.go.id>

*“Hidup itu sederhana, kitalah yang membuatnya
sulit”*

~Confucius~

<https://jaten.go.id>

Bagian 4

Pandemi dan Nasib Si Miskin

Diana Dwi Susanti

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Ini kondisi terjadi pada tahun 2020.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi menyerang dunia. Belajar dari pandemi tahun 2020, pemerintah belajar untuk tidak melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun pembatasan ini diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Hanya wilayah yang terdeteksi penderita Covid-19 tinggi yang diberlakukan PPKM, itupun dengan berbagai level.

Kemiskinan

Pemerintah memilih PPKM berskala mikro adalah banyak masyarakat Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia mengandalkan upah harian., jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian jika dilakukan PSBB. Terbukti kemiskinan mulai meningkat ketika terjadi pandemi tahun 2020.

Walaupun demikian tahun 2021 telah terjadi penurunan kemiskinan, meskipun belum turun seperti kondisi sebelum pandemi namun penduduk miskin berhasil diturunkan sebesar 185,92 ribu orang dibandingkan September 2020.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar menghitung persentase dan jumlah penduduk miskin. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.

Melalui indeks keparahan kemiskinan (P2) akan tergambar penyebaran pengeluaran kebutuhan penduduk miskin. Jadi jika nilai P2 tinggi, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2021 - September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahakan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 sebesar 1,938, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 1,911. Demikian juga dengan Indeks Keparahakan Kemiskinan (P2), pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,450 menjadi 0,459.

Relevan dengan peningkatan jumlah dan prevalensi kemiskinan pengaruh adanya pandemi, rata-rata pengeluaran masyarakat miskin cenderung semakin jauh dari GK dan ditandai dengan jatuhnya kelompok rentan miskin (buruh dan pekerja sektor informal) menjadi miskin dan masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Pandemi Covid-19 memperdalam dan memperparah kemiskinan.

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan. Pandemi Covid-19 juga mengubah peta sebaran kemiskinan menurut sektor ekonomi yang secara berturut-turut berpengaruh pada sektor informal, perdagangan dan jasa. Tingkat kesenjangan penduduk miskin juga semakin jauh dari GK. Penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin timpang. Dampak pandemi memang bersifat global, tetapi dampak lebih besar terjadi pada masyarakat miskin, dan ini telah memperlebar terjadinya kesenjangan.

Evaluasi Kemiskinan di Masa Pandemi

**Sulthoni Syahid Sugito – BPS Kabupaten Pematang
Detik.com, 24 Februari 2021**

Pandemi Covid-19 benar-benar memporak-porandakan ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia. Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kondisi September 2020 kemiskinan kembali naik bahkan kembali berada dua digit setelah lama ditinggalkan (terakhir September 2017). Dan, kesenjangan yang semakin melebar menjadi bukti saat ini kita dalam keadaan waspada.

Walaupun tidak separah dugaan lembaga proyeksi, salah satunya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang memproyeksikan angka kemiskinan tahun 2020 berada pada 9,7 hingga 10,2 persen atau setara dengan 26,2 hingga 27,5 juta orang. Data BPS menunjukkan penduduk miskin September 2020 "hanya" sebesar 10,19 persen atau ekuivalen dengan 27,55 juta orang --meningkat 0,97 persen dari September 2019 atau setara 2,76 juta orang.

Penduduk miskin perkotaan ternyata terdampak paling signifikan dibandingkan perdesaan. Penduduk miskin perkotaan meningkat 0,5 persen, sedangkan perdesaan 0,38 persen (masing-masing 7,88 persen dan 13,20 persen) dibandingkan Maret 2020.

Sementara itu ketimpangan yang diukur dari rasio gini turut melebar. Ketimpangan pengeluaran penduduk menjadi 0,385 (kondisi September 2020). Kenyataan ini lebih buruk dari kondisi September 2018 yang saat itu berada pada 0,384 poin. Walaupun menurut Bank Dunia kita masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah, bukan berarti kita terlena karena tren menunjukkan hal sebaliknya.

Faktor yang Berpengaruh

Kemiskinan dan ketimpangan yang dialami Indonesia diakibatkan pandemi Covid-19 terus berada pada tren meningkat. Kemiskinan bertambah karena dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, 14,28 persen atau 29,12 orang terdampak pandemi. Ini tentu menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan strategi tepat, karena mengakibatkan penambahan pengangguran sebesar 2,56 juta orang akibat pandemi. Dampaknya, pengangguran secara keseluruhan mencapai 9,77 juta orang (Agustus 2020).

Di sisi lain ekonomi Indonesia pada triwulan III - 2020 hanya 3,49 persen (y-on-y) atau mengalami kontraksi dibandingkan triwulan III - 2019. Ditambah kenaikan harga eceran beberapa komoditas di tingkat konsumen di antaranya daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan kembung. Selaras dengan kenaikan harga, angka inflasi Maret-September 2020 tercatat 0,12 persen. Dampaknya tentu pengeluaran konsumsi rumah tangga ikut berkontraksi mencapai 4,04 persen.

Di tengah pandemi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlu strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang tepat. Aspek terpenting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan hingga pengangguran adalah tersedianya data kemiskinan dan pengangguran yang akurat. Sehingga harapannya stimulus bantuan seperti bantuan sosial (bansos) yang dirasa paling tepat dan efisien saat ini bisa diterima masyarakat yang membutuhkan.

Bansos Tidak Cukup

Program bansos tetap berperan penting, namun ke depan perlu perbaikan. Tata kelola bansos harus dibenahi prioritasnya terkait data penerima manfaat. Dengan data dan proses penyaluran yang tepat manfaat, tujuan besarnya geliat ekonomi akan mendorong dan ekonomi masyarakat perlahan akan tumbuh bertahap. Namun itu saja tidak cukup.

Dari data BPS diketahui bansos sangat membantu masyarakat karena hingga kini telah menyentuh 60 persen masyarakat lapisan terbawah. Terlebih bantuan UMKM sudah banyak bermunculan dari berbagai pihak. Tak kalah membantu adanya program perlindungan sosial berupa kartu prakerja karena berdampak langsung terhadap keterampilan termasuk di dalamnya yang terkena PHK dampak pandemi. Diketahui sebanyak 89 persen pengguna kartu prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan menyatakan ini sangat bermanfaat dan meningkatkan keterampilan bekerja.

Dengan jumlah pekerja informal mencapai 60,47 persen (Agustus 2020), dengan dominannya pekerja informal bisa dipastikan keadaan ekonomi akan sangat bergantung dari pekerja sektor ini. Bansos seharusnya menyentuh lapisan pekerja ini yang sebagian besar adalah pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar.

Pandemi telah mengubah garis program pengentasan kemiskinan yang ada. Setidaknya kini ada beberapa bantuan sosial yang dipercepat penyalurannya dan pelebaran kategori penerima bansos. Program-program lain seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi tumpuan masyarakat bawah.

Strategi Jangka Panjang

Bansos sebagai bantalan bagi masyarakat menengah bawah untuk bertahan nyatanya diyakini belum cukup membantu ekonomi masyarakat jangka panjang. Penyangga pendapatan yang ditunggu-ditunggu masyarakat terdampak pandemi ini perlu dikaji lagi dampak jangka panjangnya. Menjadi prioritas selanjutnya ke depan perlu mendorong pemerintah ataupun swasta membuka lapangan kerja yang berkualitas di beberapa sektor produktif.

Hadirnya strategi yang matang dan tepat dapat mendorong sektor produktif untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dari hasil Sakernas Agustus 2020 diketahui sektor produktif terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 128,45 juta orang bekerja, sebesar 38,23 juta orang atau 29,76 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor terbesar kedua perdagangan besar dan eceran 19,23 persen dan urutan ketiga industri pengolahan 13,61 persen.

Data di atas bisa menjadi acuan dalam mengatur tata kelola serta manajemen pemberian stimulus. Adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya jadi motor penggerak, namun juga tidak bisa berjalan mulus jika tidak ada road map yang jelas untuk melakukan transformasi dan reformasi ekonomi secara inklusif.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dengan kondisi pandemi saat ini perlu mendorong dalam pengadaan barang maupun jasa harus sudah melibatkan UMKM lokal setempat agar sektor perdagangan eceran ikut tumbuh, bukan saja perdagangan besar. Tak kalah penting efek domino dan pengganda dari langkah ini tentu akan sangat besar dampaknya terutama di sisi ketenagakerjaan dan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain pertanian dan industri pengolahan kita seharusnya tidak tutup mata dengan pergeseran kebutuhan lapangan kerja yang mulai bergeser ke arah otomasi dan digitalisasi. Perlu adanya pembukaan lapangan kerja yang lebih mengedepankan inovasi berbasis teknologi. Perlu komitmen yang kuat untuk setidaknya mulai melirik dan menarik investasi khususnya industri padat karya yang hasilnya berorientasi pada ekspor dan ujungnya tentu menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya.

Tepat jika jangka panjang pemerintah tidak hanya bansos saja yang digelontorkan, tapi juga menysar perbaikan SDM melalui pendidikan dan kesempatan lapangan kerja. Harapannya tentu laju kemiskinan bisa ditekan dengan program yang tepat sasaran.

Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menyebabkan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini sulit diurai hingga ke akarnya. Hal ini merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional.

Data Sensus Penduduk

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (kondisi September 2020) --yang merupakan kolaborasi BPS dengan Ditjen Dukcapil-- seyogianya bisa menjadi batu loncatan, digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat seluas-luasnya dalam penanganan dampak Covid-19 di semua lini masyarakat. Selanjutnya, mengurai tantangan kemiskinan di tengah pandemi setidaknya perlu adanya perbaikan ke depan.

Pertama, integrasi data antar-K/L terutama pemanfaatan data SP 2020 yang lebih didorong utamanya bagi yang berkepentingan memberikan program bantuan langsung kepada masyarakat melalui program-program sosial.

Kedua, pemerintah terutama K/L terkait agar fokus dalam pemecahan pengentasan kemiskinan melalui data-data yang ada. Sehingga, mudah memetakan kantong-kantong kemiskinan, terutama kantong kemiskinan baru akibat dampak pandemi, dan analisis yang tepat terkait karakteristik. Sehingga, kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Ketiga, konsolidasi di tingkat bawah antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sehingga tidak terjadi lagi silang pendapat terkait data di lapangan. Terakhir adalah bervariasinya intervensi dan program pemerintah terhadap masyarakat miskin dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan terkini. Semakin dekatnya bantuan dengan sendi-sendi kemiskinan, semakin dekat pula penduduk terbebas dari belenggu kemiskinan.

Perlu Upaya Pemerataan Kesejahteraan

**Retno Dian Ika Wati – BPS Kota Semarang
Suara Merdeka, 10 Juni 2021**

Pangan adalah kebutuhan manusia yang paling utama dan tidak dapat ditunda, dan setiap negara memprioritaskan masalah pangan dalam pembangunan bangsa. Namun, apakah masyarakat di Jawa Tengah lebih mengutamakan kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan nonpangan?

Apakah ada perbedaan pola pengeluaran antara masyarakat desa dan kota? Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, penduduk Jawa Tengah lebih banyak menggunakan uangnya untuk mengkonsumsi barang non makanan dengan perbandingan rata-rata 49 persen untuk bahan makanan dan 51 persen untuk non makanan.

Adapun pengeluaran konsumsi makanan terbesar digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi yaitu 36,61 persen dari seluruh konsumsi makanan disusul konsumsi untuk rokok sebesar 12,14 persen dan konsumsi padi padian sebesar 10,66 persen.

Adapun pengeluaran non makanan didominasi oleh konsumsi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (22,81%), disusul konsumsi aneka komoditas dan jasa sebesar (13,39%).

Penghasilan/pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang sehingga dominasi konsumsi bukan makanan bisa jadi dikarenakan oleh peran dari penduduk kelompok pendapatan menengah atas.

Bagaimanapun penduduk tersebut adalah penduduk yang paling banyak melakukan konsumsi dibandingkan kelompok penduduk dibawahnya.

Tahun 2020, sekitar 81.47% konsumsi dilakukan oleh kelompok penduduk berpendapatan menengah keatas sedangkan sisanya dilakukan oleh kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Pola konsumsi rumah tangga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Rumah tangga dengan pendapatan yang terbatas akan lebih memprioritaskan kebutuhan makanan daripada non makanan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Seiring dengan peningkatan pendapatan maka pola pengeluaran akan bergeser ke pengeluaran non makanan dan pengeluaran non konsumsi seperti tabungan dan investasi. Dengan demikian komposisi pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Pola Konsumsi

Pola konsumsi secara teori ekonomi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya pendapatan (pengeluaran), kondisi sosial ekonomi dan lingkungan tempat tinggal.

Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat desa yang sederhana menjadikan pola konsumsinya sederhana, sedangkan masyarakat perkotaan yang memiliki fasilitas wilayah yang lebih lengkap, memudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya, pola konsumsinya juga lebih bervariasi.

Di Jawa Tengah, rata-rata pengeluaran per kapita di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata di pedesaan, walaupun sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pola pengeluaran konsumsi penduduk di perkotaan berbanding terbalik dengan pola konsumsi penduduk di pedesaan.

Pengeluaran penduduk di perkotaan lebih banyak untuk konsumsi non makanan (53,66 %), sementara pengeluaran penduduk di pedesaan lebih banyak untuk konsumsi makanan (52,01 persen).

Secara Umum. pola pengeluaran konsumsi makanan antara kota dan desa adalah sama yaitu paling banyak untuk konsumsi makanan dan minuman jadi (36,6 % untuk kota dan 32,9 % untuk desa) disusul dengan konsumsi rokok dan tembakau (11,1 persen kota dan 13,4 persen desa). Persentase pengeluaran padi padian, sayuran, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu, dan rokok penduduk untuk wilayah pedesaan ternyata lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Sedangkan persentase pengeluaran umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, kacang-kacangan, buah dan makanan minuman untuk wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan.

Persentase pengeluaran konsumsi non makanan yaitu perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas dan jasa, pajak, pungutan dan asuransi untuk masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Persentase pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala, komoditas tahan lama serta keperluan pesta dan upacara/kenduri untuk masyarakat pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Perbedaan pola pengeluaran antara perkotaan dan pedesaan mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk di perkotaan dan di pedesaan.

Dengan tingginya pengeluaran untuk non makanan di daerah perkotaan dan pengeluaran untuk konsumsi makanan di pedesaan dapat dikatakan penduduk perkotaan relatif lebih sejahtera dibandingkan penduduk pedesaan.

Kesenjangan kemajuan perkembangan antara kota dan desa, ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan adanya ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat kota dan desa. Pemerataan kesejahteraan antara kota dan desa sepertinya perlu lebih diupayakan. Selain itu, perlu juga pemikiran untuk mengembangkan kebijaksanaan agar kesejahteraan masyarakat kota dan desa dapat lebih setara.

Satu Tahun Negeri Ini di Landa Pandemi Covid-19, Penduduk Miskin diperkirakan Bertambah 1,12 Juta

Faisal Luthfi Arief – BPS Kabupaten Rembang
Suarahukum-news.com, 5 Agustus 2021

Semarang, www.suarahukum-news.com-Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis data tentang angka kemiskinan, berdasarkan hasil kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2021, di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, dengan melakukan wawancara pada 345.000 rumah tangga sebagai sampel.(04/08).

Pada Bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan mencapai angka 27,54 juta orang. Bila dibandingkan pada Maret 2020 (26,42 juta orang), berarti jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 1,12 juta orang selama kurun waktu satu tahun, setelah terjadinya wabah Nasional yang melanda Negeri ini (COVID-19). Persentase penduduk miskin, atau angka kemiskinan pun naik dari 9,78% menjadi 10,14%. Sebagaimana diketahui bersama, kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan Pemerintah RI pada 02 Maret 2020 lalu.

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik telah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan metode pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut BPS mendefinisikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita, per-bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makan, dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak termasuk kategori miskin. Nilai Garis Kemiskinan (GK) didapatkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang di setarakan dengan 2.100 kilo kalori per-kapita per-hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan di wakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis Kemiskinan pada Bulan Maret 2021 di perkirakan sebesar Rp 472.525,- per-kapita per- bulan. Dibandingkan Bulan Maret 2020 (Rp 454.652,- per kapita perbulan), dari data tersebut, telah menunjukkan terjadinya kenaikan sebesar 3,93%. Bila memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2021 sebesar 73,96%, telah mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pada Maret 2020 (73,86%).

Beras, masih menjadi penyumbang terbesar pada GK, baik di perkotaan (20,03%) dan di pedesaan (24,06%). Rokok Kretek Filter menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap GK di perkotaan sebesar 11,90% dan di pedesaan sebesar 11,24%. Pada komoditi bukan makanan, yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan maupun pedesaan adalah Perumahan, Bahan Bakar (bahan bakar kendaraan), Listrik, Pendidikan dan Perlengkapan Mandi.

Dari hasil kegiatan Susenas, juga dapat dihitung tentang Garis Kemiskinan per rumah tangga, yaitu gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Pada Bulan Maret 2021, garis kemiskinan per rumah tangga sebesar Rp 2.121.637,- per bulan, mengalami kenaikan 0,14% dibandingkan kondisi pada Bulan Maret 2020 (Rp 2.118.678,- per bulan).

Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2020 sampai dengan Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Bulan Maret 2021 adalah sebesar 1,71, telah menunjukkan angka naik, bila dibandingkan pada Bulan Maret 2020 yang sebesar 1,61. Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, yang berarti tingkat perekonomian penduduk miskin Indonesia pada Bulan Maret 2021 mengalami penurunan dibandingkan Bulan Maret 2020. Kondisi serupa terjadi pada Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), mengalami kenaikan dari 0,38 menjadi 0,42. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar di Maret 2021, bila dibandingkan pada Bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Naiknya data-data kemiskinan selama periode Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021, turut dipengaruhi dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk, terutama dalam mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Hal tersebut tentu saja menambah PR (Pekerjaan Rumah) bagi Pemerintah ketika Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan selama hampir 1,5 tahun ini.

Penduduk miskin yang juga merasakan dampak dari masa pandemi ini, sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah supaya semakin tidak terpuruk dalam kemiskinannya. Meskipun Pemerintah sudah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), serta Bantuan Sosial Sembako selama pandemi, penduduk miskin juga perlu diikutsertakan dan diberdayakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Program Padat Karya, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta Pelatihan Kerja dan sebagainya. Dengan demikian penduduk miskin telah mendapatkan kesempatan bekerja, untuk memperoleh pendapatan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Semoga, Pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Mari saling mengingatkan dalam menjaga Protokol Kesehatan, tetap semangat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya selalu di berikan kesehatan, perlindungan dari segala penyakit dan marabahaya.

Siapa Mereka yang Miskin Ekstrim

**Dwi Asih Septi Wahyuni – BPS Kabupaten Banyumas
Jateng Daily, 19 November 2021**

Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2024 di Indonesia tidak ada penduduk yang masuk kategori miskin ekstrim. Lalu, siapakah penduduk yang masuk miskin ekstrim? Penduduk yang termasuk miskin ekstrim adalah mereka yang memiliki pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan ekstrim. Garis kemiskinan ekstrim adalah garis kemiskinan internasional atau setara US \$ 1,9 PPP per hari. Konsep PPP atau Purchasing Power Parity dapat diilustrasikan jika harga satu buah apel di Amerika Serikat adalah US\$ 1 sedangkan harga satu buah apel sejenis di Indonesia adalah Rp 500, maka PPP adalah US\$ 0,002/Rupiah. Jika dirupiahkan pada tahun 2021 garis kemiskinan ekstrim sebesar Rp 11.941,1 per kapita per hari. Secara kasar dapat dikatakan bahwa ketika pengeluaran penduduk di bawah Rp 11.941,1 per kapita per hari maka penduduk tersebut dikatakan penduduk miskin ekstrim. Namun perlu diperhatikan bahwa angka tersebut merupakan angka rata-rata perkapita untuk semua kelompok umur yaitu bayi, balita, anak-anak, dewasa, dan lansia dimana memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda.

Penduduk miskin ekstrim merupakan bagian dari penduduk miskin. Pada tahun 2021 penduduk di Indonesia masuk ke dalam kelompok miskin ekstrim sebanyak 4% sedangkan penduduk miskin sebanyak 10,14 persen. Penduduk miskin ekstrim di Indonesia mayoritas berstatus bekerja. Mengapa demikian? Karena jika tidak bekerja maka tidak bisa makan oleh karena itu mereka tetap harus bekerja meskipun pendapatan yang diterima atau dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Lalu bagaimana cara agar pendapatan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga? Disinilah peran pemerintah baik pusat maupun daerah agar membantu penduduk pekerja dengan upah dibawah garis kemiskinan ekstrim seperti memberikan bantuan usaha tanpa agunan jika penduduk memiliki usaha kecil, meningkatkan kualitas hasil usaha rumah tangga jika penduduk memiliki usaha rumah tangga agar produk memiliki nilai jual yang tinggi, memotong sebagian mata rantai distribusi sektor pertanian agar nilai gabah yang diterima petani dapat lebih tinggi, selain itu pemerintah pusat juga dapat menelisik lebih dalam upah buruh yang diterima oleh penduduk yang tergolong miskin apakah sudah memenuhi UMR.

Jika dilihat karakteristik penduduk miskin ekstrim menurut jenis pekerjaan, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari lima puluh persen penduduk miskin ekstrim bekerja di sektor pertanian dimana mereka adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Artinya penduduk yang miskin ekstrim sebagian besar pendapatannya berasal dari usaha pertanian. Sebanyak 14 persen penduduk miskin ekstrim bekerja di sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum dimana sebagian besar mereka berusaha sendiri artinya mereka berdagang kecil-kecilan. Selain itu 9 persen penduduk miskin ekstrim bekerja di sektor industri pengolahan seperti menjadi buruh di pabrik, 7 persen bekerja di sektor konstruksi seperti buruh bangunan. Oleh karena itu desain

kebijakan pemerintah hendaknya dapat menyesuaikan dengan karakteristik pekerjaan penduduk miskin ekstrim.

Lalu bagaimana dengan penduduk miskin ekstrim yang berumur 55 tahun ke atas? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengangkat derajat kemiskinan ekstrim mereka? Tentunya pemerintah dapat lebih jeli memetakan jenis bantuan yang akan diberikan kepada penduduk miskin ekstrim. Penduduk yang berumur 55 tahun ke atas mereka sudah tidak mampu melakukan aktivitas ekonomi secara otomatis mereka tidak dapat bekerja atau masih dapat bekerja namun tidak dapat maksimal. Perlindungan negara kepada penduduk miskin ekstrim berumur 55 tahun ke atas dapat berupa bantuan langsung sebesar di atas nilai garis kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun untuk penduduk yang masih mampu melakukan aktivitas ekonomi, pemerintah dapat memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang mampu memenuhi minimal kebutuhan dasarnya.

Sinergi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim sangat diperlukan. Kompleksitas budaya dan karakter penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan perlu adanya sentuhan sosial dan pembinaan mental agar mereka nantinya dapat mandiri sehingga tidak terus menerus bergantung dengan bantuan pemerintah. Karena sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak akan mengubah status miskin seseorang ketika dia tidak mau berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kebijakan jangka panjang dalam upaya mengangkat derajat kemiskinan harus menjadi target capaian di setiap pemerintah baik pusat maupun daerah.

Persentase Penduduk Miskin di Jateng Naik

**Dwi Asih Septi Wahyuni – BPS Kabupaten Banyumas
Jateng Daily, 30 November 2021**

Badan Pusat Statistik telah merilis angka persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. Hasilnya, semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan persentase penduduk miskin. Secara rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 11,79 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,31 persen. Peralihan kenaikan penduduk miskin ini dikarenakan efek pandemi pada tahun 2021. Angka persentase penduduk miskin berasal dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Bulan Maret 2021. Pada periode pendataan tersebut, kondisi masyarakat masih mengalami shock ekonomi akibat pandemi covid-19.

Dampak sosial ekonomi pandemi covid-19 terhadap masyarakat miskin sangat terasa karena pendapatan masyarakat menurun akhirnya pengeluaran konsumsi baik makanan maupun non makanan juga mengalami penurunan. Dalam pendataan Susenas memuat

pertanyaan terkait pengeluaran konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama seminggu terakhir baik makanan tersebut berasal dari pembelian tunai/bon, pemberian pihak lain seperti pemberian dari tetangga, pemerintah maupun pihak swasta. Konsumsi tersebut dicatat sebagai konsumsi pengeluaran makanan rumah tangga. Pertanyaan tersebut ditanyakan untuk seluruh anggota rumah tangga yang terkena sampel Susenas.

Selain itu, dalam Susenas juga memuat pertanyaan pengeluaran konsumsi non makanan seperti pengeluaran untuk sewa rumah/kontrak, imputasi biaya sewa rumah jika rumah tersebut milik sendiri atau bebas sewa, pengeluaran keperluan sehari-hari mencakup kebutuhan kebersihan, kecantikan, perawatan, listrik, air, pembelian mebeulair, hp, pakaian, dan lain-lain yang termasuk pengeluaran konsumsi non makanan. Pencatatan pengeluaran non makanan adalah selama sebulan dan setahun terakhir. Perlu diingat bahwa konsumsi pengeluaran pakaian misalnya selama setahun terakhir jika dicatat pada bulan Maret 2021 maka pencatatan pembelian pakaian hari raya idul fitri dan natal tahun 2020 dicatat pada Susenas Maret 2021. Melihat situasi pada masa hari raya tahun 2020 dimana hampir semua daerah melakukan lockdown dan tidak ada aktivitas ekonomi sehingga jumlah belanja untuk pakaian selama setahun terakhir dari Bulan Maret 2021 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya (hari raya tahun 2019) dimana belum ada pandemi.

Kenaikan angka kemiskinan perlu dibaca dengan cermat agar tidak terjadi interpretasi yang salah. Periode waktu pendataan menjadi acuan bagaimana potret kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu tahun 2021 yang melekat pada kenaikan angka kemiskinan perlu kejelian sehingga tidak salah menafsirkan bahwa angka kemiskinan tersebut menggambarkan seluruh bulan pada tahun 2021 namun pada pendataan Maret 2021. Keterbandingan angka kemiskinan antar tahun dapat dilakukan karena BPS melakukan Susenas setiap tahun pada periode yang sama yakni setiap bulan Maret melakukan Susenas di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang menghasilkan angka kemiskinan pada level kabupaten/kota.

Tugas pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di setiap kabupaten kota harus memperhatikan level kemiskinan setiap penduduk. Hal ini dikarenakan dalam kemiskinan terdapat kelompok penduduk yang berada tepat atau dibawah angka garis kemiskinan, dan berada sangat di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp 409.123,- perkapita per bulan. Ketika penduduk memiliki pengeluaran perkapita per bulan sedikit dibawah garis kemiskinan, treatment yang dapat dilakukan oleh pemerintah tentunya dapat memberikan bantuan langsung. Namun berbeda ketika penduduk miskin tersebut memiliki pengeluaran di paling bawah garis kemiskinan dalam hal ini dapat dikatakan miskin ekstrim maka treatment pemerintah dalam upaya menyelamatkan penduduk miskin keluar dari kemiskinan tentunya dengan membantu dan membimbing penduduk miskin agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih layak, misalnya memberikan bantuan berupa benih padi, benih sayur, pupuk, pembinaan peningkatan kualitas produksi tanaman, pembinaan transformasi pangan

sehingga dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak dan berkualitas serta dapat go internasional. Hal-hal seperti ini yang sangat diperlukan oleh penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Karena jika dilihat dari tingkat pendidikannya, mereka sebagian besar hanya lulusan SD, sehingga kemampuan untuk mengembangkan usaha dan kapasitas produksi tidak dapat dilakukan secara mandiri.

Akibat Pandemi Covid-19, Kemiskinan Kota Semarang Meningkat

**Retno Dian Ika Wati – BPS Kota Semarang
Jateng Daily, 1 Februari 2021**

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Tengah terbaru, pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia telah mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2020 hingga 3.980,90 ribu orang. Tingkat kemiskinan penduduk di Jawa Tengah meningkat sebesar 0,83 persen dari 10,58 persen menjadi 11,41 persen dalam waktu enam bulan, relatif lebih tinggi dari tingkat nasional, dengan tingkat kemiskinan penduduk meningkat sebesar 0,56 persen dari 9,22 persen menjadi 9,78 persen dalam waktu enam bulan. Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang meningkat, namun kemiskinan juga semakin parah dan dalam. Kenyataan ini menyentak perhatian pemerintah, mengingat pandemi Covid-19 saat itu baru berlangsung satu bulan di Bulan Maret. Oleh karena itu, perlu upaya jaring pengaman sosial (JPS) berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan penduduk terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam menghadapi pandemi Covid-19, demikian pula segala kemungkinan yang bakal terjadi di masa yang akan datang, baik akibat bencana alam maupun karena bencana nonalam. Diketahui bahwa pandemi Covid-19 dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

Paket bantuan sosial bagi masyarakat rentan krisis dalam kerangka jaring pengaman sosial ditempuh pertama kali oleh Presiden Roosevelt pada tahun 1930an di Amerika Serikat. Depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat disertai badai salju yang parah mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar kegiatan ekonomi riil negara itu. Angka pengangguran meningkat tinggi, serta terjadi kontraksi ekonomi yang disertai dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. Menurunnya produktivitas berbagai sektor perekonomian ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya kualitas hidup sebagian besar masyarakat menurun drastis. Kondisi ini kemudian segera diatasi melalui langkah jangka pendek (crash program) dengan tujuan memulihkan kegiatan ekonomi dan menanggulangi dampak sosial. (Gunawan Sumodiningrat, 1999).

Di Indonesia Program JPS diluncurkan pertama kali ketika Indonesia dilanda badai krisis moneter (krismon) 1998. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini Program JPS diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum Covid-19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. Sementara

itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan budget (dana) lebih dari Rp. 2,09 triliun untuk penanggulangan dampak sosial pandemi Covid-19. Sejumlah budget tersebut dialokasikan ke dalam enam pos utama. Pertama, Rp. 1,32 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan program JPS. Sebagian besar anggaran JPS akan dikucurkan untuk bantuan pangan nontunai kepada 583.416 kepala keluarga (KK) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) nonpenerima sembako yang tidak dibiayai APBN, dengan pembiayaan senilai Rp1,07 triliun. Sementara itu, dalam pagu anggaran JPS tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana senilai Rp212,1 miliar untuk bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19. Total masyarakat yang menerima sebanyak 115.000 KK. Kedua, pagu senilai Rp183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi (JPE). Total alokasi akan dimanfaatkan ke dalam sejumlah program di antaranya untuk 400 UKM yang terdampak Covid-19. Dana yang disiapkan pengembangan akses pembiayaan bagi UKM sebanyak Rp1,69 miliar. Termasuk dalam JPE ini dialokasikan budget senilai Rp109 miliar untuk subsidi koperasi usaha mikro kecil dan menengah terdampak Covid-19. Ketiga, bantuan keuangan pembangunan desa yang dialokasikan senilai Rp68,5 miliar. Keempat, alokasi untuk fasilitas kesehatan senilai Rp425,14 miliar. Kelima, pengembalian pekerja migran senilai Rp16,09 miliar. Keenam, operasional senilai Rp1,65 miliar. (<https://semarang.bisnis.com>).

Agar pendistribusian dana jaring pengaman sosial lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran target penduduk yang terkena dampak pandemi Covid-19, seyogyanya pemerintah dan masyarakat senantiasa melakukan perbaikan data penduduk miskin yang saat ini menjadi tanggungjawab dinas sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai kepanjangan birokrasi dari Kementerian Sosial di tingkat pusat, karena updating data kemiskinan yang paling terakhir yang dilakukan oleh BPS adalah pada program pengumpulan basis data terpadu (PBDT) kemiskinan penduduk atas pelimpahan tanggungjawab dari kewenangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bernaung di sekretariat Kantor Wakil Presiden. Selanjutnya perbaikan data kemiskinan penduduk tersebut tidak lagi dilakukan oleh BPS melainkan telah diserahkan dari TNP2K kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sektor yang terdampak Covid-19.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak paling besar di perdesaan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah di perdesaan yang mencapai 2.175,25 ribu orang, sedangkan di perkotaan 1.805,65 ribu orang. Dampak lebih besar di perdesaan terjadi karena penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor tersebut terkena dampak Covid-19 karena merosotnya harga pertanian ketika terjadi guncangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 akibat turunnya permintaan rumah tangga, yang tertahan karena terbatasnya aktivitas penduduk dalam bertransaksi di pasar tradisional pertanian yang disebabkan oleh kebijakan diberlakukan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19. Meskipun pola perdagangan pertanian sudah mengikuti perkembangan teknologi yang dilakukan secara daring, namun belum bisa mendongkrak kemerosotan pendapatan petani dan buruh tani karena jumlah petani yang melakukan perdagangan daring juga masih sangat terbatas akibat gagap teknologi yang dihadapi petani, demikian pula para konsumennya yang sebagian besar adalah penduduk perdesaan.

Penguatan Sektor Pertanian.

Selain itu sektor pertanian harus diperkuat karena terbukti menjadi tulang punggung saat sektor ekonomi lain tidak mampu bertahan dihantam badai krisis. Misalnya, pada saat krisis ekonomi 1998 yang telah mengakibatkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada level minus 12,37 persen dan laju inflasi mencapai 67,19 persen dengan semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif kecuali pertanian yang masih mampu tumbuh 0,2 persen secara nasional. Pangan menjadi kebutuhan utama penduduk, terutama di masa krisis seperti pada masa pandemi Covid-19 ketika semua produsen pangan membatasi ekspor pangannya. Dengan jumlah penduduk 34,74 juta jiwa, tentunya Jawa Tengah harus mampu memproduksi pangan untuk mencukupi kebutuhan seluruh penduduknya.

Apalagi sektor pertanian ternyata masih menjadi kantung kemiskinan di Jawa Tengah. Sebanyak 27,48 persen rumah tangga miskin di Jawa Tengah menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Keberpihakan pemerintah dengan memberikan perhatian terhadap produktivitas pertanian dan harga komoditas di tingkat petani, akan meningkatkan kesejahteraan petani yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Pola Pikir Berharga dan Bermartabat

Philipus Kritanto – BPS Kota Salatiga
Jawa Pos, 19 Oktober 2021

Tiga kebuntuan ekonomi yang menjadi pemikiran negara maju maupun negara dunia ke tiga adalah masalah kemiskinan, kemerosotan lingkungan, dan pengangguran. Dalam situasi terpuruknya akibat pandemi covid-19, dialami sebagian besar negara berkembang, pertumbuhan produksi tidak menguntungkan semua penduduk pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu program prioritas nasional, untuk menanggulangi melebarnya jurang kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem mengacu pada standard Bank Dunia dapat diklasifikasikan bahwa setiap individu yang penghasilannya di bawah Parity Purchasing Power (PPP) US\$ 1,99/kapita/hari yang setara dengan Rp12.000/kapita/hari. Garis kemiskinan nasional pada dasarnya adalah sejumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan yaitu harga dari 2.100 kkal/kapita/hari ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan dari nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok nonmakanan lainnya.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Adapun hasil yang ditargetkan dari upaya ini adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang mencapai nol persen pada 2024. Hal tersebut diungkapkan Wapres saat memimpin Rapat Pleno Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Rabu (25/08/2021).

Penghitungan kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. (BPS, Berita Resmi Statistik 15 Juli 2021). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Sedangkan Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525,00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp349.474,00 (73,96 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.501,00 (26,04 persen).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah dengan keterbatasan dana untuk fokus di tujuh provinsi terlebih dahulu, yakni Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari tujuh provinsi yang terpilih akan diambil lima kabupaten/kota dari masing-masing provinsi, sehingga secara total fokus penenangan kemiskinan ekstrem tahun ini akan menyasar tiga puluh lima kabupaten/kota, yang didasarkan pada data BPS.

Kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Memaknai kemiskinan ekstrem bukan sekedar karena pendapatan per bulan mereka rendah, upah rendah dan untuk berusaha tidak memiliki modal. Ada warga miskin ekstrem yaitu mereka yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dengan ciri: lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih, dan sanitasi yang memadahi. Hal ini perlu diberikan bantuan, modal uang atau barang, disediakan lapangan kerja berupa padat karya pedesaan. Harapannya adalah dengan pemantauan sekaligus pendampingan dan pembinaan baik dari pemerintah maupun melibatkan lembaga/perusahaan, terlebih masyarakat itu sendiri agar memiliki polapikir menjadi masyarakat yang berharga dan bermartabat. Dengan modal yang diberikan dapat menjalankan roda usahanya, dan yang mendapatkan lapangan kerja meningkatkan pendapatannya. Polapikir berharga dan bermartabat, untuk tidak miskin lagi.

Bantuan Mengalir, Kemiskinan Tetap Naik

Dinar Tri Utami – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 25 Desember 2021

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi hampir di setiap daerah. Dalam pembangunan hal ini menjadi hal yang penting dibicarakan. Angka kemiskinan diperoleh dari Hasil Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas) Maret yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh Kabupaten Kota. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan, jadi garis kemiskinan itu sendiri terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2016-2021, garis kemiskinan Kota Pekalongan berturut turut adalah 375.600 rupiah, 390.555 rupiah, 415.172 rupiah, 425.026 rupiah, 460.789 rupiah, dan 480.415 rupiah. Garis Kemiskinan Kota Pekalongan terus mengalami kenaikan, salah satu penyebabnya yaitu inflasi yang berdampak pada kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan itu sendiri.

Sedangkan persentase penduduk miskin (Head count index) merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2015-2019 angka kemiskinan Kota Pekalongan terus mengalami penurunan yaitu 8,09; 7,92; 7,47; 6,75; dan 6,60 persen. Pada tahun 2020 dalam target rancangan awal RJMD 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan angka kemiskinan di tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 6,74 dan 6,71. Namun demikian, akibat pandemi covid-19, angka kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami kenaikan di tahun 2020-2021, yaitu sebesar 7,17 dan 7,59, meskipun termasuk dalam 5 besar urutan angka kemiskinan terendah se-Jawa Tengah di tahun 2020 maupun 2021.

Di masa pandemi covid-19 hampir semua sektor mengalami dampak, dan hampir semua wilayah terkena dampak covid-19. Bak rantai makanan, setiap sektor saling mempengaruhi satu sama lain. Tak hanya sektor industri, sektor perdagangan, pendidikan, angkutan, keuangan, bahkan sektor pertanian dan sektor lain juga terkena imbasnya. Padahal bermacam-macam bantuan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Mulai dari bantuan dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari yang berupa uang, sembako, listrik, hingga pulsa internet. Bantuan berupa uang tunai diantaranya melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), BLT-D (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Bantuan sembako diberikan melalui program kartu sembako dan program bantuan beras bulog. Bantuan listrik yang dimaksud adalah subsidi/diskon listrik dan abonemen. Sedangkan subsidi kuota internet diperuntukan bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik yang melangsungkan pembelajaran secara online. Selain itu juga program kartu prakerja, yang bertujuan menekan angka pengangguran dan program lainnya.

Permasalahannya, dari sekian banyak bantuan yang diberikan, apakah sudah tepat sasaran? Seharusnya masyarakat yang kurang mampu menjadi sasaran utama penerima bantuan

dari pemerintah. Namun pada kenyataannya masih ada pernyataan dari banyak pihak bahwa bantuan yang diberikan tidak tepat atau tersasar kepada yang mampu. Lagi-lagi data yang menjadi persoalannya. Update data yang valid sangat diperlukan dan menjadi suatu keharusan. Perlu adanya suatu kerjasama yang kuat agar penerima bantuan adalah yang benar-benar membutuhkan mulai dari tingkat RT/RW hingga level atas. Contoh yang sepele adalah penerima bantuan seharusnya penduduk setempat baik secara de jure maupun de facto. Akan tetapi masih ditemukan hal yang bertentangan dengan itu. Skema penyaluran bantuan yang dilakukan sudah bagus, akan tetapi perlu pengawasan yang lebih diperketat lagi agar data penerima bantuan valid. Masyarakat juga bisa memanfaatkan platform media yang disediakan oleh Kemensos dengan mengirimkan pesan pengaduan apabila ada hal yang tidak sesuai aturan. Sehingga semua pihak turut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan.

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Agar masyarakat tidak dibawah garis kemiskinan, program peningkatan pendapatan masyarakat juga perlu digalakkan. Dalam Rancangan awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2022, pada arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran salah satunya dengan fokus pada peningkatan kemampuan berusaha bagi warga miskin melalui ketrampilan usaha ekonomi produktif (kewirausahaan bagi penduduk miskin). Hal tersebut juga bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat/warga miskin. Banyak jalan yang bisa dilakukan, salah satunya adalah melalui pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi masyarakat yang di soundingkan hingga level bawah RT/RW agar masyarakat yang dibawah terdorong untuk mengikutinya. Tak hanya itu, bantuan modal usaha pun diperlukan. Pemetaan masyarakat miskin hingga level bawah sangat diperlukan agar berbagai program yang diluncurkan bisa terlaksana sesuai sasaran. Lagi-lagi data yang valid tentang penerima program bantuan sangat dibutuhkan. Update data secara berkala dan terintegrasi dari level paling bawah hingga level paling atas perlu dilakukan. Semoga kedepannya angka kemiskinan Kota Pekalongan bisa menurun seiring dengan kasus covid yang berangsur-angsur menurun, geliat ekonomi merangkak naik kembali dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, dan pengangguran berkurang.

Bagian 5

Membangun Manusia Berkualitas di Era Pandemi

Diana Dwi Susanti

Manusia adalah muara dari seluruh proses pembangunan karena pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif.

UNDP merumuskan pembangunan manusia sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010–2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Indonesia sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Umur Harapan Hidup

Bertambahnya kasus Covid-19 setiap harinya mau tidak mau menimbulkan rasa khawatir. Penambahan kasus Covid-19 tentu menyebabkan semakin penuhnya kapasitas fasilitas kesehatan. Selain itu kejadian kematian Covid-19 pun tidak sedikit. Banyaknya kematian akan memengaruhi tingkat harapan hidup manusia.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,76 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH Indonesia adalah 69,81 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun.

Pendidikan

Selama masa pandemi Covid-19, proses belajar dari rumah mulai diterapkan seiring diterbitkannya Surat Edaran Mendikbud No.4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Darurat Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembelajaran secara daring tentu banyak sekali tantangannya. Apalagi belum ada kurikulum yang disesuaikan akibat pandemi Covid-19.

Sinyal internet juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas manusia dalam bidang pendidikan. Untuk daerah perkotaan mungkin tidak terlalu sulit, tetapi untuk wilayah pedesaan masih banyak wilayah yang belum terjangkau sinyal internet. Masyarakat juga masih banyak yang tidak memiliki ponsel untuk mengakses internet.

Hal ini menyebabkan pembelajaran daring menjadi tidak optimal dan berdampak negatif, seperti adanya potensi murid putus sekolah dan terpaksa bekerja, terjadi penurunan kualitas pendidikan, serta angka kekerasan anak dan pernikahan dini meningkat. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga mengalami perlambatan tahun 2020.

Standar Hidup Layak

Pengeluaran per kapita riil penduduk Indonesia mencapai nilai Rp 11,16 juta pada 2021, sedikit meningkat dibandingkan dengan 2020 (Rp 11,01 juta). Peningkatan daya beli masyarakat terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan rumah tangga adanya pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Tantangan pembangunan manusia pada 2021 masih akan sama seperti pada 2020. Merujuk pada kondisi awal 2021, pandemi Covid-19 juga belum menunjukkan ada tanda-tanda penurunan jumlah kasus positif Covid-19. Justru jumlah kasus positif Covid-19 cenderung meningkat.

Walaupun vaksinasi Covid-19 sudah dimulai sejak 13 Januari 2021, tetapi butuh waktu lama untuk vaksinasi minimal 70% warga Indonesia agar tercapai *herd immunity*. Pemerintah menargetkan vaksinasi akan selesai dalam waktu 12 bulan. Jika benar itu terjadi, berarti vaksinasi baru akan selesai pada awal 2022. Tentu pandemi Covid-19 ini akan memengaruhi capaian pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup layak penduduk Indonesia. Patut ditunggu apakah tahun ini capaian pembangunan manusia yang dihitung melalui IPM nanti akan mampu tumbuh positif atau justru mengalami penurunan.

Aspek-aspek Positif Covid-19 Menuju Pembangunan Berkelanjutan

**Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Today, 28 Juli 2021**

Indonesia ditakdirkan menjadi negara agraris dengan sumber daya hayati yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia mempunyai kekayaan alam berupa hutan dan sungai untuk menghasilkan energi bersih. Back to nature dengan menggali potensi yang tidak dimiliki negara lain menjadi kekayaan yang unik. Indonesia bahkan dunia selama ini seperti dininabobokkan dengan pertambangan dan industri-industri berat tanpa mengindahkan kelangsungan hidup alam. Hanya mengejar ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan sesaat dan tidak mempedulikan nasib anak cucu mendatang.

Hingga datangnya pandemi Covid-19 telah menguasai hampir semua sisi kehidupan manusia di seluruh dunia. Pandemi datang tanpa diundang. Memaksa manusia mengubah tatanan kehidupan. Aktivitas dipaksa berhenti untuk menghindari penyebaran virus yang mengganas. Sejenak coba kita renungi, mengajak alam untuk berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa melalui beberapa manusia di bumi. Manusia mulai berkenalan dengan apa yang disebut teknologi.

Perjalanan Teknologi

Dunia telah melewati berbagai fase teknologi. Dari era industri 1.0 yang terjadi pada tahun 1750-1850 menemukan mesin uap untuk meningkatkan produksi tekstil yang sebelumnya masih ditangani oleh tenaga manusia.

Kemudian anugerah kecerdasan melaju terus membawa manusia ke era industri 2.0 ketika penemuan listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Sumber listrik tersebut mampu menggerakkan sistem kerja mesin. Penciptaan penggerak mesin jarak jauh juga terjadi pada era industri 2.0 dan mengubah kehidupan masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri.

Memasuki era industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data. Pada era ini manusia melalui kecerdasannya berhasil memecahkan kode dan melahirkan komputer Colossus.

Di zaman modern, manusia makin bersuka cita dengan berbagai penemuannya. Mereka membangun banyak gedung pencakar langit, membangun industri-industri tanpa berdialog dengan sekitar, apakah limbahnya nanti merugikan, penggundulan hutan tanpa memikirkan dampak kedepannya. Hingga datangnya corona untuk membantu bumi pulih dari derita-derita yang dia tanggung selama ini. Kekuatannya, dalam waktu singkat, manusia menjadi menerapkan hidup bersih, lingkungan bersih, menghentikan industri, tinggal di rumah, dan menggarasikan kendaraan-kendaraan yang biasa menyumbang polusi udara yang besar.

Namun perlu diketahui, sebelum ada corona Tuhan telah membekali manusia dengan masuknya era industri 4.0. Dimana era ini hampir semua hal terhubung melalui internet. Jarak antartempat menjadi tanpa sekat, bahkan seluruh dunia terhubung dengan mudah. Hidup di masa pandemi, dengan upaya tidak terjadi penyebaran virus semakin luas maka berbagai kebijakan untuk tetap tinggal dan beraktivitas di rumah saja, menghindari kontak langsung sesama manusia, tetapi manusia tetap dituntut untuk tetap produktif. Dengan smartphone, tetap bisa berdagang, kuliah, maupun rapat dengan kolega-kolega yang tersebar di penjuru dunia.

Coba bayangkan jika corona terjadi sebelum era industri 4.0. Apa yang bisa dilakukan manusia. Tatanan sosial ekonomi akan terhenti karena sama sekali tidak ada aktivitas. Atau bahkan pandemi akan menjadi bencana karena manusia dihadapkan pada dua pilihan ekonomi dan kesehatan yang harus dijaga. Walaupun Covid-19 dalam beberapa hal berdampak negatif, tetapi Covid-19 juga membawa dampak positif bagi bumi. Berbagai media memberitakan tingkat polusi udara di kota-kota besar di dunia menurun. Madrid, pada bulan Maret 2020 level NO₂ turun 41-56% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan ibu kota Indonesia, di Jakarta tercatat partikel debu halus turun selama penerapan *work from home*, dimana indeks kualitas udara/AQI rata-rata di angka 60. Kabar dari NASA menjelaskan kondisi lapisan ozon membaik sejak adanya corona.

Laporan Climate Transparency memaparkan bahwa penurunan emisi karbon tahun ini lebih banyak berasal karena pembatasan kegiatan dan mobilisasi untuk mencegah penularan Covid-19. Walaupun isu pembatasan suhu global ini sudah 20 tahun digaungkan. Sebelum pandemi, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya perekonomian berkelanjutan (*sustainable economy*) dan dampaknya bagi lingkungan serta kehidupan di masa mendatang.

Momentum Pembangunan Ekonomi Hijau

Pandemi Covid-19 menyadarkan, bahwa selama ini manusia kurang peduli kepada bumi dengan tidak menghiraukan kondisi alam yang semakin memburuk akibat pembangunan yang tidak menjaga lingkungan. Untuk kembali membangkitkan ekonomi pasca pandemi dari krisis kesehatan dan resesi ekonomi akibat Covid-19 ini adalah dengan melakukan investasi lebih besar ke arah energi terbarukan dan menerapkan pemulihan hijau (*green recovery*).

Adanya pandemi covid-19 bisa menjadi momentum Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau. Pertanian, informasi teknologi, kesehatan dan industri hijau menjadi aspek yang akan membantu percepatan pemulihan ekonomi. Saat ini industri masih menggunakan ekonomi linier dan menunjukkan *raw materials*. Barang yang diproduksi, digunakan, lalu dibuang, sehingga tidak ada barang yang didaur ulang. Sudah saatnya manusia yang dibekali Tuhan mempunyai kecerdasan tinggi dan mampu menciptakan teknologi yang mumpuni, mulai memikirkan kelestarian alam dan dampaknya untuk kesehatan. Pandemi ini merupakan *wake up call* untuk kembali ke alam.

Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam mengembangkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau memiliki peluang lainnya yaitu menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan prinsip *green jobs*. Green jobs membuka peluang usaha yang membantu melindungi ekosistem, mengurangi atau mencegah pembuatan segala bentuk limbah dan polusi. Menggunakan strategi yang memiliki efisiensi tingkat tinggi untuk mengurangi energi, materi, dan konsumsi air. Penciptaan green jobs tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Perlu kerjasama dari berbagai pihak seperti pelaku usaha dan masyarakat.

Saatnya negeri ini bangkit. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati terbaik di dunia. Faktanya adalah bahwa negara-negara di jalur khatulistiwa yang berhujan lebat dan matahari bersinar sepanjang tahun sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dibandingkan dengan negara-negara bermusim empat.

Ironisnya, Indonesia belum menyadari potensi besar yang dimiliki. Indonesia belum menerapkan konsep ekonomi hijau yang jelas melalui kebijakan yang terpadu antara seluruh sektor dan sub-sektor Pemerintahan. Jika saja konsep ekonomi hijau dikembangkan akan menjadi benefit negara dengan kapasitas sumber daya alam terbarukan yang luar biasa besar potensinya.

Dengan berbagai potensi yang besar ini ekonomi hijau dapat menjadi jaminan terciptanya lapangan pekerjaan (*pro jobs*) dan menjadi motor perekonomian bangsa yang senantiasa tumbuh secara berkelanjutan (*pro growth*). Sebagai contoh: Indonesia memiliki lahan kritis sebesar 19,5 juta hektar (dalam kawasan hutan) dan 10,6 juta hektar (luar kawasan hutan).

Lahan kritis ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kebun kelapa sawit yang ramah lingkungan, bahan bakar etanol, dan lahan pertanian organik. Bahkan kualitas bioetanol yang diperoleh dari lahan kritis diprediksi dapat memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia setiap hari. Bioetanol yang dihasilkan diperoleh dari sumber tanaman jagung, ketela, gandum, dan tebu. Betapa banyak masyarakat lokal di sekitar lahan kritis ini yang akan terserap apabila pembangunan ekonomi hijau dikelola dengan sungguh-sungguh.

Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan (*green growth*). Secara kodrati, Indonesia adalah negara agraria, negara kehutanan, negara keanekaragaman hayati. Manfaatkanlah itu untuk menciptakan produk kebanggaan bangsa yang bernilai kompetitif tinggi untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Sehingga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Setahun Pandemi, Pembangunan Manusia Meningkat

Faisal Luthfi Arief – BPS Kabupaten Rembang

Suarahukum-new.com, 22 Desember 2021

Badan Pusat Statistik telah merilis angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 yang menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam rilisnya dijelaskan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2010, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Status IPM rendah apabila $IPM < 60$, sedang $60 \leq IPM < 70$, tinggi $70 \leq IPM < 80$ dan sangat tinggi apabila $IPM \geq 80$. (22/12).

Selama 2010–2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Setelah melambat pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IPM Indonesia kembali mengalami perbaikan pada tahun 2021 seiring meningkatnya kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Peningkatan IPM tahun 2021 didukung dengan adanya perbaikan di setiap dimensi penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan yang disebabkan turunnya dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).

Peningkatan IPM di tingkat nasional juga terjadi pada level provinsi. Selama periode 2020–2021, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,11), sedangkan urutan IPM terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua (60,62). Pada periode ini, DI Yogyakarta mengikuti DKI Jakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Dengan peningkatan status pembangunan manusia di DI Yogyakarta, jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) menjadi sebanyak 21, status “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$) sebanyak 11, dan tidak ada lagi provinsi dengan status “rendah” ($IPM < 60$). Sejak tahun 2018 tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah”. Hal tersebut terjadi setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.

Pencapaian setiap Dimensi.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang direpresentasikan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,76 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen tahun. UHH Indonesia pada tahun 2010 adalah 69,81 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, dimensi pengetahuan pada IPM terus meningkat dari tahun ke tahun, meski selama pandemi COVID-19 mengalami perlambatan. Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,35 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,24 persen per tahun.

Pada tahun 2021, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021.

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Indonesia mencapai Rp 11,16 juta per tahun. Angka ini meningkat 1,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali.

Permasalahan di masa Pandemi.

Meskipun IPM kembali meningkat setelah setahun pandemi, masih menyisakan beberapa permasalahan terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Di bidang kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan masyarakat dan kesadaran terhadap perilaku sehat masih harus ditingkatkan, terlebih lagi dengan masih adanya ancaman pandemi Covid-19. Di bidang ekonomi, kondisi perekonomian yang kembali kondusif telah berkontribusi besar dalam peningkatan kehidupan yang layak, namun demikian tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan dan melebarnya tingkat ketimpangan harus diupayakan solusinya secepat mungkin oleh Pemerintah.

Di sisi lain, disparitas capaian antarwilayah juga perlu mendapat perhatian. Disparitas IPM antara satu provinsi dengan provinsi lainnya masih tinggi, misalnya IPM DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang sudah atas 80 persen dengan Papua yang baru 60,62 persen. Hal tersebut harus segera dipecahkan permasalahannya supaya kondisinya mengalami perbaikan dan disparitasnya semakin rendah.

Membangun Manusia Purworejo di Masa Pandemi

Musliman – BPS Kabupaten Purworejo Radar Semarang, 8 Maret 2021

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk dalam mengakses berbagai pembangunan yang ada. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat dari pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator statistik yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia yang mengindikasikan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah.

IPM terbentuk dari 3 dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Berdasarkan metode perhitungan terbaru yang digunakan oleh BPS, variabel yang digunakan dalam menghitung IPM di Indonesia adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah yang mewakili dimensi pengetahuan, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang mewakili dimensi standar hidup layak. Seluruh dimensi tersebut kemudian diagregasikan dengan menggunakan rata-rata geometrik sehingga menghasilkan angka IPM yang tidak akan tergantung pada satu dimensi saja apabila terdapat nilai yang ekstrim.

Tahun 2020 merupakan tahun ketujuh bagi Kabupaten Purworejo dalam meraih IPM di atas 70 atau masuk kategori tinggi. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Purworejo selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Purworejo tahun 2020 adalah 72,68, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 72,50. Akan tetapi, tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dan sulit bagi semua orang. Pandemi yang menyerang seluruh dunia menghambat berbagai hal karena pembatasan-pembatasan yang diterapkan demi mengurangi laju penyebaran COVID-19.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo di tahun 2020 merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir, dimana hanya mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin atau naik 0,25%. Padahal dalam 3 tahun sebelumnya, pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo selalu di atas 0,80%. Berbagai pembatasan aktivitas menyebabkan variabel pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Purworejo adalah 10,34 juta per tahun, sedangkan tahun ini hanya sebesar 10,16 juta per tahun. Hal ini juga tercermin dari angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Mengutip dari situs web BPS Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 bertambah menjadi sebesar 11,78 persen dari yang sebelumnya 11,45 persen. Sementara itu, 2 dimensi penyusun IPM lainnya masih mengalami kenaikan. Usia Harapan Hidup Saat Lahir sebesar 74,72 tahun yang naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 74,52. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 13,5 tahun dan 8,5 tahun dari yang sebelumnya 13,49 tahun dan 7,91 tahun.

Akan tetapi, perlambatan laju IPM di Kabupaten Purworejo sejalan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. IPM Jawa Tengah tahun 2019 yang sebesar 71,73 hanya

tumbuh 0,14 poin menjadi 71,87 di tahun 2020, melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apabila kita lihat dari data yang ada, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo lebih tinggi 0,81 poin dibandingkan IPM Jawa Tengah. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purworejo menduduki peringkat ke-14 dari 35 kabupaten/kota.

Sementara itu, di kawasan eks Keresidenan Kedu sendiri, IPM Purworejo menduduki peringkat ke-2 di bawah IPM Kota Magelang yang sebesar 78,99 dan masih di atas kabupaten lain yang seluruhnya memiliki IPM di bawah 70 atau masih masuk kategori sedang. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Magelang justru mengalami stagnasi atau tidak naik ataupun turun. Bahkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan menjadi sebesar 68,22.

Pencapaian IPM Kabupaten Purworejo di tahun 2020 patut disyukuri akan tetapi juga harus dievaluasi. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan sehingga berbagai perlambatan ini tidak terjadi berkepanjangan hingga menyebabkan krisis. Dengan telah dimulainya penyuntikan vaksin di Indonesia, semoga menjadi awal bagi pulihnya kehidupan masyarakat dengan beraktivitas secara normal. Penulis yakin, apabila aktivitas telah kembali normal maka laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purworejo akan semakin naik secara signifikan.

Merencanakan Keluarga Berkualitas

**Santy Widyastuti – BPS Kota Salatiga
Jateng Daily, 29 Juni 2021**

BEBERAPA tahun terakhir kata bonus demografi seringkali digaungkan oleh banyak kalangan. Menariknya isu bonus demografi membuat berbagai penelitian dilakukan, di antaranya mengenai prediksi kapan bonus demografi berlangsung, kapan puncaknya terjadi, apa penyebabnya serta bagaimana dampaknya.

Bonus demografi adalah suatu fenomena kependudukan yang terjadi ketika jumlah atau persentase penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Dalam definisi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia produktif adalah mereka yang berusia antara 15-64 tahun.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bonus demografi diperkirakan terjadi di Indonesia antara tahun 2020-2035. Seperti prediksi beberapa ahli penduduk usia produktif saat ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penduduk usia produktif di Indonesia sebesar 70,72 persen.

Dampak Bonus Demografi

Dampak dari bonus demografi disebut sebagai dua sisi mata uang. Sisi baiknya, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Hal ini menjadi modal penggerak perekonomian. Banyaknya penduduk usia produktif bisa mendukung industri padat karya

sebagai tenaga kerja. Selain itu jumlah penduduk produktif yang besar berkaitan dengan konsumsi yang besar pula.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu jika ada pengungkit besar pada komponen konsumsi rumah tangga maka akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Dampak positif yang diharapkan hanya akan terjadi jika kualitas penduduk usia produktif tersebut baik. Kualitas yang diharapkan mencakup banyak hal di antaranya memiliki kesehatan dan pendidikan yang baik. Dengan modal tersebut maka penduduk usia produktif akan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja pada posisi yang mendapatkan upah dan perlindungan yang layak.

Pada akhirnya jika memiliki pendapatan yang baik maka akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk usia non produktif).

Sebaliknya penduduk usia produktif yang tidak memiliki kualitas baik maka justru akan menjadi beban baik untuk keluarga bahkan untuk negara. Selain itu dalam jangka panjang, ledakan penduduk usia produktif di masa kini akan menjadi ledakan penduduk lanjut usia (lansia) di masa mendatang, sehingga jika tidak berdaya maka akan menjadi beban bagi generasi penerusnya.

Penyebab Bonus Demografi

Ledakan lansia di masa mendatang bukan tidak mungkin terjadi. Jika kita turut ke belakang, bonus demografi sejatinya adalah buah dari program pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Pada tanggal 28 Januari 1987 (www.bkkbn.go.id), pemerintah secara resmi mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) secara mandiri. Inti dari program tersebut adalah membatasi jumlah anak dalam satu keluarga. Mereka menggunakan tagline “Dua Anak Cukup”.

Setelah 34 tahun berlalu, buah dari program pengendalian jumlah penduduk sudah dirasakan. Selanjutnya mitigasi ledakan penduduk lansia harus segera dipersiapkan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa bonus demografi akan menjadi sesuatu yang baik jika kualitas penduduk terutama yang berusia produktif, baik. Sayangnya dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya sebesar 8,48 tahun.

Meskipun rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi angka tersebut masih jauh dari cukup. Rata-rata lama sekolah 8,48 tahun menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan setara kelas VIII-IX pada sekolah menengah pertama. Kita tahu bahwa sebagian besar sektor formal pada saat ini menginginkan tenaga kerja dengan pendidikan minimal setara sekolah menengah atas.

Jika penduduk usia produktif tidak memiliki pendidikan seperti yang diinginkan oleh sebagian besar sektor formal, maka mereka akan terjebak pada sektor informal. Dampak lanjutannya adalah mereka tidak mendapatkan jaminan atas upah dan perlindungan ketenaga kerjaan yang layak.

Oleh karena itu peran pemerintah sangatlah penting dalam mendorong penduduk terutama usia produktif untuk memiliki pendidikan yang memadai. Selain itu diperlukan juga bekal ketrampilan terutama penduduk usia produktif yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menempuh pendidikan.

Selanjutnya dari sisi kesehatan, upaya untuk mewujudkan penduduk yang sehat semestinya dimulai sedini mungkin. Seperti yang dilakukan pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2021. Tema yang diusung adalah “Keluarga Keren Cegah Stunting”. Tema ini penting karena stunting di Indonesia masih sebesar 30,18 persen pada tahun 2018.

Angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen. Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu akibat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Akibat stunting adalah terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.

Dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan dan kesehatan yang baik. Selamat Hari Keluarga Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah 2021 Bertengger di Angka 72,16

Muslimin – BPS Kabupaten Purworejo Radar Semarang, 9 Desember 2021

Angka IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (bps.go.id). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Komponen pembentuk IPM ada tiga. Komponen pertama adalah dimensi kesehatan yang diwakili oleh dimensi umur panjang dan hidup layak serta Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Komponen yang kedua adalah Dimensi Pendidikan yang diwakili oleh dimensi Pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25 th+). Komponen yang terakhir adalah Dimensi Ekonomi yang diwakili oleh dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

IPM mempunyai setidaknya 4 manfaat yaitu yang pertama sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kedua, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI seperti rancangan RKP dan RAPBN. Ketiga, IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Terakhir, komponen IPM seperti HLS, RLS, dan Pengeluaran merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

IPM merupakan komponen dasar dalam menilai kemajuan pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari kecepatan IPM serta status IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode. Status IPM menggambarkan level percepatan pembangunan manusia dalam satu periode, di mana untuk $IPM \geq 80$ menggambarkan level sangat tinggi, untuk $70 \leq IPM < 80$ masuk kategori Tinggi, untuk $60 \leq IPM < 70$ masuk level sedang, dan jika $IPM < 60$, berarti masih rendah.

Didik Nursetyohadi, M.Agb. selaku KF Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan dalam acara Rilis Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah November 2021 yang disiarkan melalui kanal Youtube BPS Provinsi Jawa Tengah (15/11) bahwa IPM Jawa Tengah 2021 adalah 72,16. Nilai ini mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2020 sebesar 71,87; tahun 2019 sebesar 71,73; tahun 2018 sebesar 71,12 dan tahun 2017 sebesar 70,52. Meskipun masih terimbas pandemi COVID-19, IPM Jawa Tengah tahun 2021 masih mampu tumbuh positif 0,29 poin, dari 71,87 poin di tahun 2020 menjadi 72,16 poin di tahun 2021. Sejak tahun 2017, status IPM Jawa Tengah masuk dalam kategori tinggi dan selama 2010-2021, IPM Jawa Tengah terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan pertahun sebesar 0,55 persen. Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), dimensi pengetahuan (HLS dan RLS), maupun dimensi standar hidup baik (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan). Walaupun mengalami kenaikan, tetapi angka IPM Jawa Tengah masih dibawah IPM Nasional.

Komponen Penyumbang poin IPM Jawa Tengah diantaranya Umur harapan Hidup saat Lahir (UHH) tahun 2021 tumbuh 0,13 persen dan berada pada 74,47 poin dari tahun sebelumnya yang berapa pada 74,37 poin. Angka Harapan Lama sekolah juga meningkat, dari 12,70 tahun di tahun 2020 naik menjadi 12,77 tahun di tahun 2021 atau tumbuh sebesar 0,55 persen. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 adalah 7,75 tahun yang pada tahun sebelumnya adalah 7,69 tahun atau naik sebesar 0,78 persen. Pengeluaran per kapita per tahun masyarakat yang disesuaikan dengan PPP (Purchasing, Power, Parity) naik sebesar Rp. 104.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp. 11.034.000,00 pada tahun 2021 atau naik sekitar 0,98 persen.

Angka IPM di Jawa Tengah memang sudah masuk dalam kategori tinggi, akan tetapi angka tersebut masih di bawah IPM nasional. Besar harapan kepada pemerintah Provinsi selaku pemangku kebijakan agar tidak puas dengan angka tersebut dan senantiasa memperbaiki kebijakan agar IPM Jawa Tengah berimbang dengan pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang sudah maju di Jawa Tengah.

Lima Kabupaten IPM Tinggi

Dwi Asih Septi Wahyuni – BPS Kabupaten Banyumas
Jateng Daily, 18 November 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah telah merilis angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Tercatat ada lima kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan level status IPM dari status IPM sedang menjadi tinggi. IPM dengan level tinggi memiliki nilai IPM lebih dari sama dengan 70 sampai dengan kurang dari 80. Adapun lima kabupaten yang mengalami kenaikan level dari IPM sedang menjadi IPM tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Kebumen, Magelang, Grobogan dan Pekalongan. Naiknya level IPM ini disebabkan kenaikan nilai pada setiap dimensi IPM yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan.

Naiknya level IPM menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pembangunan manusia. Dari lima kabupaten yang naik level, Kabupaten Grobogan adalah kabupaten dengan kecepatan IPM tertinggi yakni sebesar 0,77 persen. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Selain itu Kabupaten Cilacap dan Pekalongan juga memiliki kecepatan IPM yang tinggi masing-masing sebesar 0,67 dan 0,69 persen. Sedangkan kecepatan IPM Kabupaten Kebumen dan Magelang masing-masing sebesar 0,34 dan 0,36 persen.

Jika dirangking lebih rinci angka penyusun IPM dari kelima kabupaten yang naik level tersebut, nilai rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kabupaten Magelang sebesar 7,79 tahun. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata di Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau setara SMP Kelas 1. Angka rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Adapun penghitungan rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Angka rata-rata lama sekolah diperoleh melalui pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun.

Angka harapan lama sekolah tertinggi dari lima kabupaten yang naik level berada di Kabupaten Kebumen sebesar 13,34 tahun artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,34 tahun atau setara Diploma III. Angka ini di atas rata-rata lama sekolah provinsi Jawa Tengah sebesar 12,77 tahun. Angka harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Dalam penghitungan angka harapan lama sekolah, BPS mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas yakni siswa yang bersekolah di pesantren sebagai faktor koreksi.

Umur harapan hidup tertinggi diantara lima kabupaten yang naik level sebesar 74,84 tahun di Kabupaten Grobogan artinya bayi yang baru lahir di Kabupaten Grobogan memiliki peluang hidup hingga 74,84 tahun. Angka ini berada di atas rata-rata umur harapan hidup

Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,47 tahun Umur harapan hidup mencerminkan derajat Kesehatan suatu masyarakat.

Indikator standar hidup layak yakni pengeluaran perkapita disesuaikan tertinggi diantara lima kabupaten yang naik level sebesar Rp 10,534 juta perkapita per tahun di Kabupaten Cilacap. Dalam konsep ini pengeluaran perkapita dihitung rata-rata untuk semua kelompok umur artinya termasuk penduduk usia bayi, balita, anak-anak, dewasa dan lansia. Selain itu angka pengeluaran perkapita disini telah memperhitungkan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas non makanan.

Level IPM yang meningkat dari level sedang ke level tinggi tentunya didukung oleh indikator proxy yang dapat meningkatkan masing-masing indikator penyusun IPM. Beberapa indikator proxy yang dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah antara lain akses terhadap fasilitas Pendidikan, biaya Pendidikan, jumlah tenaga pengajar, program Pendidikan, dll. Dalam dimensi Kesehatan pemerintah juga hendaknya dapat meningkatkan kemudahan akses terhadap fasilitas Kesehatan, biaya erobat yang terjangkau untuk semua elemen masyarakat, keberadaan tenaga medis di setiap desa, dll. Tentunya strategi penguatan dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi oleh pemerintah daerah akan menstimulus meningkatnya IPM secara umum.

Pertumbuhan IPM Grobogan Tertinggi di Jawa Tengah

Rukini – BPS Kabupaten Grobogan

Jawa Pos Radar Kudus, 21 November 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat digunakan Angka Harapan Hidup waktu lahir. AHH merupakan indikator penting dalam mengukur panjang umur seseorang berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat atau negara dengan penggunaan sumber daya yang tersedia berusaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Oleh karena itu, pembangunan manusia belum berhasil apabila pemanfaatan sumber daya masyarakat tidak diarahkan pada pembinaan kesehatan agar dapat hidup lebih lama sekaligus hidup sehat.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk yang berumur 7 tahun. Pembangunan manusia belum berhasil apabila masyarakat belum memiliki tingkat pengetahuan yang memadai.

Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Rata-rata pengeluaran per kapita

setahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP) terdiri dari 4 kriteria, yaitu $IPM \geq 80$ kategori sangat tinggi, $70 \leq IPM < 80$ kategori tinggi, $IPM 60 \leq IPM < 70$ kategori sedang dan $IPM < 60$ kategori rendah.

Berdasarkan data BPS, selama tahun 2010-2021 tercatat IPM Grobogan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IPM Grobogan sebesar 70,41 masuk dalam kategori tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 0,54 poin atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,77 persen dibandingkan IPM Grobogan tahun 2020 sebesar 69,87.

Pertumbuhan IPM Grobogan sebesar 0,77 persen ini merupakan pertumbuhan IPM tertinggi di Jawa Tengah tahun 2021. Selain itu Pertumbuhan IPM Grobogan lebih tinggi pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun IPM Indonesia. IPM Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 72,19 meningkat 0,29 poin atau tumbuh 0,40 persen dibandingkan IPM Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 71,87. Sementara pertumbuhan IPM Indonesia tahun 2021 sebesar 0,49 persen atau naik 0,35 poin dibandingkan IPM Indonesia tahun 2020 sebesar 71,94.

Peningkatan IPM Grobogan pada 2021 didorong oleh seluruh dimensi pembentuknya yang mengalami peningkatan, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pembangunan manusia.

Umur panjang dan hidup sehat

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, dapat diukur dari angka harapan hidup saat lahir. Dimana bayi yang lahir tahun 2021 di Grobogan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,84 tahun atau lebih lama 0,09 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2020. Angka harapan hidup Grobogan sebesar 74,84 melebihi angka harapan hidup Jawa Tengah maupun angka harapan hidup Indonesia masing-masing sebesar 74,47 tahun dan 71,57 tahun.

Pengetahuan

Pada dimensi pengetahuan, diukur dari angka HLS dan RLS. Penduduk berusia 7 tahun di Grobogan tahun 2021 memiliki HLS atau dapat menjalani pendidikan formal selama 12,44 tahun. Angka ini hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, HLS Grobogan tahun 2021 meningkat 0,14 tahun atau tumbuh sebesar 1,14 persen melebihi pertumbuhan HLS Jawa Tengah maupun HLS Indonesia masing-masing tumbuh sebesar 0,55 persen dan 0,77 persen.

Sementara itu, RLS penduduk umur 25 tahun ke atas di Grobogan tahun 2021 sebesar 7,11 meningkat 0,2 tahun atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,89 persen dari tahun 2020 sebesar 6,91. Hal ini menunjukkan, rata-rata penduduk di Grobogan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,11 tahun atau sedang menempuh kelas VIII. Pertumbuhan sebesar 2,89 persen RLS di Grobogan melebihi pertumbuhan RLS Jawa Tengah maupun RLS Indonesia masing-masing tumbuh sebesar 0,78 persen dan 0,71 persen.

Standar Hidup Layak

Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita disesuaikan di Grobogan tahun 2021 sebesar Rp. 10.221.000,- naik sebesar Rp. 73.000,- atau tumbuh sebesar 0,71 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 10.221.000,-. Pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan di Grobogan tahun 2021 masih di bawah pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan di Jawa Tengah maupun pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan Indonesia. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19, masyarakat Grobogan masih belum bisa secara cepat menyesuaikan/beradaptasi kembali (new normal).

Dengan meningkatnya status capaian pembangunan manusia masuk kategori tinggi, berharap pemerintah Grobogan terus berupaya meningkatkan segala program/kebijakan terhadap layanan kesehatan, bantuan pendidikan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat kesehatan dan pengetahuan yang tinggi akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup.

Bagian 6

Peran Penting Perempuan di Masa Pandemi

Diana Dwi Susanti

Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 khususnya di dua sektor yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu kesehatan dan ekonomi sehingga ruang yang aman dan nyaman sudah semestinya menjadi hak mereka. Untuk itu, upaya meningkatkan semangat dan memperkuat peran para perempuan dalam menangani Covid-19 sangat penting dilakukan.

Tantangan Perempuan

Situasi pandemi menghambat pencapaian pembangunan yang telah direncanakan di beberapa sektor dalam beberapa dekade terakhir. Termasuk pemberdayaan perempuan, baik sebagai pengelola usaha, maupun dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena itu, pemerintah selalu memastikan peran sentral perempuan pada masa pandemi, utamanya dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan.

Pandemi Covid-19 memaksa setiap orang untuk menghadapi segala perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tak hanya para laki-laki perempuan juga memiliki tantangan masing-masing untuk bertahan di tengah pandemi. Sebagian perempuan di masa pandemi bahkan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Misalnya istri awalnya bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan, setelah suami di-PHK maka pekerjaan suami pun ikut ke istri yaitu berdagang.

Membimbing Keluarga Saat di Rumah

Seorang istri atau ibu memiliki peran penting untuk membimbing keluarganya ketika di dalam rumah. Berbagai informasi terkait COVID-19 dapat disampaikan langsung dengan cara yang paling tepat. Perempuan memiliki andil besar dalam penerapan protokol kesehatan di keluarga. Mengingat, penularan juga terjadi di kluster keluarga.

Dengan kata lain, perempuan adalah garda terdepan dalam perawatan keluarga. Perempuan yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga dapat membantu menyediakan kebutuhan rumah tangga selama pandemi.

Dampak Ekonomi Masa Pandemi, Lebih Buruk Bagi Perempuan

Annisa Purbaning Tyas – BPS Kabupaten Tegal
Jateng Today, 2 Juli 2020

Setelah lebih dari setahun pandemi COVID-19 hadir, peluncuran vaksin memberikan secercah harapan bagi kita untuk mengatasi krisis kesehatan global ini. Namun, harapan ini tidak secara otomatis mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Secara khusus, berbagai penelitian telah menggarisbawahi bahwa perempuan yang paling terdampak dengan adanya krisis ini.

Sejak sebelum pandemi, perempuan sudah memikul tanggung jawab untuk sebagian besar pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Dengan adanya *School from Home* (SFH) dan *Work from Home* (WFH), beban dan tanggung jawab perempuan semakin meningkat. Bagi ibu yang bekerja, situasi ini mengharuskan adanya keseimbangan antara pekerjaannya, sebagian tambahan pekerjaan dari anggota keluarga lain yang menjalankan WFH, dan sebagai perpanjangan tangan dari guru dalam pendidikan anak yang SFH.

Tanggung jawab merawat anggota keluarga yang sakit dan lanjut usia seringkali juga menjadi tanggung jawab perempuan.

Ketidakamanan ekonomi pada perempuan

Lonjakan kemiskinan yang disebabkan pandemi juga akan memperlebar kesenjangan kemiskinan gender. Artinya, peluang perempuan untuk jatuh semakin dalam pada jurang kemiskinan, semakin besar dibandingkan laki-laki. Dengan adanya pandemi, keamanan ekonomi perempuan semakin rendah. Perempuan secara umum berpenghasilan lebih rendah dan memiliki pekerjaan yang kurang aman dibandingkan laki-laki. Dengan anjloknya aktivitas ekonomi, perempuan sangat rentan terhadap PHK dan kehilangan mata pencaharian.

Hingga saat ini, ketidaksetaraan gender di tempat kerja masih tetap ada. Namun, pandemi kali ini semakin memperjelas bahwa masih banyak tugas yang harus kita kerjakan terkait perbedaan pandangan mengenai laki-laki dan perempuan di lingkup tempat kerja.

Di sektor informal, selain memiliki pendapatan yang rendah, kondisi kerja yang buruk dan kurangnya perlindungan sosial (tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan, dan pensiun) sudah terjadi jauh sebelum pandemi. Secara global, 58 persen perempuan yang bekerja bekerja di pekerjaan informal, dan perkiraan menunjukkan bahwa selama bulan pertama pandemi, pekerja informal secara global kehilangan rata-rata 60 persen dari pendapatan mereka.

Ketidakamanan perekonomian bukan hanya mengenai situasi dalam pekerjaan itu sendiri, melainkan juga karena hilangnya pendapatan pada saat ini serta pendidikan yang masih terbatas khususnya di masa pandemi. Hal ini dapat berimbas pada kehidupan perempuan di segala usia hingga masa mendatang.

Dampak dari pendidikan dan pekerjaan pada perempuan secara umum, memiliki konsekuensi jangka panjang. Jika tidak ditangani, akan membalikkan pencapaian dalam kesetaraan gender yang telah diperoleh saat ini.

Kesenjangan gender pada pendidikan yang semakin lebar, memiliki implikasi serius bagi perempuan. Selain pencapaian pendidikan yang rendah, berkaitan juga dengan peningkatan pernikahan dan kehamilan di usia remaja.

Konsekuensi ini tidak akan hilang ketika nantinya pandemi mereda. Hal ini karena perempuan cenderung mengalami kemunduran jangka panjang dalam partisipasi dan pendapatan di dunia kerja. Selain itu, adanya dampak mengenai jumlah tabungan yang dimiliki selama bekerja hingga akhirnya mereka pensiun, akan berimplikasi pada keamanan ekonomi perempuan di masa mendatang.

Secercah harapan di Indonesia

Hasil Sakernas Februari 2021 menunjukkan bahwa adanya optimisme kondisi pasar kerja setelah terdampak cukup besar pada Agustus 2020 lalu (14,20%). Disamping itu, dapat dilihat bahwa betapa tangguhannya perempuan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup besar dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada perempuan. Dimana sebelum adanya pandemi, TPAK perempuan cenderung tidak bergerak (flat). Hal ini cukup berbeda dengan pekerja laki-laki yang angkanya terus menurun. (bps.go.id)

Meningkatnya rata-rata upah buruh (sekitar 3 %) di Indonesia, dapat mengindikasikan bahwa suatu usaha/perusahaan sudah mampu dalam peningkatan produksi. Dapat diartikan disini, usaha/perusahaan tentu akan membayar peningkatan balas jasa sesuai dengan peningkatan produksinya.

Mendapatkan kembali momentum ekonomi setelah pandemi tentu saja tidaklah mudah. Terutama di negara-negara di mana pemerintahnya sudah kekurangan dana, sistem kesehatan yang rapuh, dan distribusi vaksin yang kemungkinan akan memakan waktu lebih lama karena jumlah penduduk yang besar. Namun pembuat kebijakan harus memanfaatkan kesempatan penting ini untuk menempatkan perempuan yang telah menderita karena dampak pandemi khususnya pada sisi ekonominya.

Saat kita nanti dapat melewati krisis ini, kita memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kepada para pemimpin bisnis bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diperlengkapi untuk merawat keluarga mereka dan tetap berhasil dalam pekerjaan mereka.

Perempuan Aset Pembangunan

Santy Widyastuti – BPS Kota Salatiga

Jateng Daily, 16 April 2021

BULAN April merupakan bulan yang spesial bagi semua perempuan di Indonesia. Pasalnya setiap tanggal 21 April, perempuan di Indonesia memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan salah satu pahlawan perempuan di Indonesia

yang gencar memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pada saat itu fokus perjuangan Kartini di bidang pendidikan, akan tetapi peringatan hari kelahirannya menjadi momentum untuk menyuarakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan.

Lebih dari 1 abad setelah hari kelahiran Kartini, isu mengenai kesetaraan gender masih banyak didiskusikan. Hal itu terjadi karena nyatanya masih banyak ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai hal seperti akses kesehatan, kesempatan mengenyam pendidikan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapat upah yang layak dan sebagainya.

Di Kota Salatiga, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 sebesar 83,14. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kab/kota lain di Jawa Tengah. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Salatiga sangat baik.

IPM merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia dilihat dari tiga dimensi kualitas hidup yaitu kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengetahui apakah kualitas pembangunan manusia sudah setara antara laki-laki dan perempuan, perlu melihat perbandingan antara IPM perempuan dan laki-laki.

Oleh BPS, rasio antara IPM perempuan dan laki-laki digambarkan dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Ternyata IPG Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 95,18 atau berada pada urutan kesepuluh jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Nilai IPM Kota Salatiga yang paling tinggi, sementara nilai IPG bukan yang paling tinggi menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki memiliki kualitas yang lebih unggul.

Komitmen Pemerintah

Di Kota Salatiga program pengarusutamaan gender merupakan salah satu fokus prioritas pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender diwujudkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Pada misi ke delapan pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak. Komitmen Kota Salatiga dalam mewujudkan kesetaraan gender dibuktikan dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang pernah diterima pada tahun 2018.

Anugerah Parahita Ekapraya menunjukkan bahwa Kota Salatiga memenuhi tujuh komponen kunci dalam pengarusutamaan gender yaitu memiliki komitmen, kebijakan, kelompok kerja atau tim khusus, menyediakan sumber daya manusia dan mengalokasikan anggaran khusus, memiliki alat analisis gender, memiliki data yang baik menurut gender dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender.

Kerja Keras

Kerja keras sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi fakta bahwa ketimpangan gender masih ada tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih fokus

pada komponen-komponen yang menjadi indikator kesetaraan gender. Pemerintah juga perlu memilah kembali komponen apa yang harus dipertahankan dan komponen apa yang harus digenjut lebih tinggi lagi.

Berdasarkan komponen penyusun IPM, perempuan di Kota Salatiga tertinggal pada dua komponen, pertama adalah rata-rata lama sekolah dan kedua adalah pengeluaran perkapita. Pada komponen rata-rata lama sekolah, secara rata-rata laki-laki bisa sekolah pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Oleh karena itu, pemerintah bisa lebih memberikan perhatian berupa kebijakan yang berpihak pada peningkatan pendidikan perempuan. Dalam menjalankan kebijakan tentu saja diperlukan anggaran ekstra untuk mewujudkannya.

Sayangnya, masalah pendidikan perempuan tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan masalah budaya. Sistem budaya patriarki yang mengakar kuat terutama pada masyarakat Jawa menyebabkan perempuan tidak memiliki dominasi penuh bahkan untuk dirinya sendiri.

Perempuan seringkali dianggap tidak perlu untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena pada akhirnya “hanya” akan menjadi istri yang tugasnya adalah mengurus suami dan anak. Lebih parah lagi praktek perkawinan dibawah umur masih terjadi, bahkan persentasenya cukup besar. Data BPS menyebutkan bahwa 20,24 persen perempuan di Kota Salatiga melakukan perkawinan pertama pada umur di bawah sembilan belas tahun.

Dampak dari pendidikan yang rendah disertai dengan perkawinan di bawah umur menyebabkan perempuan berada dalam kelas kedua pada pasar tenaga kerja. Akibatnya upah perempuan juga menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketika upah perempuan lebih rendah maka perempuan akan lebih sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti halnya laki-laki.

Berbagai rentetan sebab akibat tersebut menunjukkan bahwa budaya dan stigma mengenai peran perempuan perlu mulai sedikit demi sedikit dirubah. Semua pihak perlu lebih menyadari bahwa dari rahim perempuan lahirlah generasi penerus yang akan membangun peradaban di masa mendatang. Perempuan lah yang menjadi madrasah pertama bagi generasi penerus.

Jika perempuan berpendidikan dan berdaya maka akan menjadi aset besar dalam pembangunan suatu wilayah pada masa kini juga bagi masa mendatang. Oleh karena itu, mendorong perempuan untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan berdaya sama saja membangun kejayaan suatu wilayah. Selamat hari Kartini. Jatengdaily.

Potret Perempuan Jateng dalam Peran Ganda di Rumah Tangga

Annisa Purbaning Tyas - BPS Kabupaten Tegal
Jateng Today, 24 Februari 2021

Meskipun kesetaraan gender telah menjadi perhatian khusus yang dimasukkan dalam

salah satu tujuan program Sustainable Development Goals (SDGs), dukungan besar dalam kesetaraan gender ini tidak mampu memisahkan kodrat perempuan untuk melahirkan. Peran perempuan dalam kegiatan domestik masih mungkin diambil alih oleh laki-laki atau pembantu namun kodrat untuk melahirkan tetap milik perempuan. Dengan adanya perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan ini diduga memengaruhi pembuatan keputusan untuk masuk dalam angkatan kerja.

Masyarakat Jawa khususnya di Jateng menjunjung budaya perempuan sebagai konco wingking. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa perempuan tidak sejajar dengan laki-laki karena pekerjaan perempuan hanya di belakang atau urusan domestik. Sehingga partisipasi perempuan dalam pasar kerja tidak terlalu diperhitungkan dan masih dibawah laki-laki.

Dalam bidang ekonomi, disparitas gender ini cukup terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data Sakernas Agustus 2019, TPAK laki-laki (82,43 %) di Jateng jauh lebih besar dibandingkan TPAK perempuan (55,33 %). Rendahnya TPAK perempuan dapat terjadi karena alokasi waktu dalam pekerjaan rumah tangga dan faktor siklus hidup seperti perkawinan dan melahirkan. Oleh karena itu, banyak perempuan yang ketika memiliki balita cenderung keluar dari pasar kerja.

Tidak semua perempuan yang menikah akan keluar dari pasar kerja. Proporsi perempuan berstatus kawin yang bekerja di Jateng sebesar 73,48 % pada Agustus 2019.

Mereka yang telah menikah tidak lagi hanya mengurus rumah tangganya, namun juga ikut membantu perekonomian keluarganya.

Yang menarik ketika melihat proporsi pekerja perempuan yang berstatus cerai hidup (3,35 %) maupun cerai mati (10,66 %) cukup besar. Pekerja perempuan ini memasuki pasar kerja mungkin saja sebagian diantaranya terpaksa harus bekerja demi menghidupi keluarganya karena ketiadaan suami sebagai pencari nafkah.

Nilai Anak Bagi Perempuan Bekerja

Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu, apakah fertilitas memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja atau keputusan perempuan untuk bekerja yang memengaruhi fertilitasnya.

Rata-rata jam kerja perempuan di Jateng berdasarkan Sakernas Agustus 2019 sebesar 38,40 jam seminggu. Rata-rata ini lebih kecil daripada pekerja laki-laki (43,27 jam seminggu).

Ketika seorang perempuan memiliki anak yang masih kecil, dia akan cenderung mengurangi jam kerjanya. Karena anak kecil sangat membutuhkan lebih banyak waktu sang ibu.

Sehingga perempuan yang merupakan seorang ibu dengan anak kecil, lebih memilih bekerja di rumah atau bahkan keluar dari pasar kerja. Bahkan bagi perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan profesional cenderung menunda untuk memiliki anak dibandingkan dengan perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan di bawahnya.

Sebabnya, perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan profesional menghadapi hambatan yang lebih tinggi dalam memiliki anak sesuai yang mereka inginkan. Sehingga

jumlah anak yang diinginkan bagi perempuan yang bekerja secara perlahan akan berkurang. Oleh karena itu, semakin banyak anak maka semakin besar peluang perempuan untuk meninggalkan pasar kerja karena alasan maternity leave atau child bearing.

Upah Pekerja Perempuan

Tidak dapat di pungkiri bahwa salah satu daya tarik masuk pasar kerja adalah upah yang ditawarkan. Bagi perempuan yang tidak masuk dalam pasar kerja, seluruh waktunya digunakan untuk berbagai kegiatan domestik rumah tangga.

Pertanyaannya, apakah seorang perempuan yang tidak bekerja akan mau untuk masuk pasar kerja? Pada tingkat upah berapakah seorang perempuan akan mau untuk masuk pasar kerja?

Pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan reservation wage. Yaitu upah minimal yang akan diterima oleh seseorang untuk mau bekerja. Jadi jika seseorang perempuan ditawarkan sebuah pekerjaan tetapi upah yang ditawarkan lebih kecil dari reservation wage, maka pekerjaan tersebut akan ditolak.

Pada kenyataannya upah yang ditawarkan pada perempuan lebih rendah daripada upah yang ditawarkan untuk pekerja laki-laki. Sehingga mereka cenderung menurunkan reservation wage.

Meskipun setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pekerja perempuan, namun pekerjaan yang diperoleh masih menunjukkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Terlihat dari upah yang diterima oleh perempuan lebih rendah dibandingkan upah pekerja laki-laki. Berdasarkan Sakernas Agustus, meskipun rata-rata upah perempuan meningkat dari tahun 2018 ke 2019 (Rp 1,82 juta), nilainya masih dibawah laki-laki (Rp 2,43 juta).

Perempuan Jateng tidak hanya dibatasi oleh budaya namun juga kodrat yang melekat pada dirinya dalam memutuskan apakah dia harus bekerja atau tidak. Belum lagi adanya kesempatan upah yang harus diterima ketika memasuki dunia kerja. Namun para perempuan ini tidak semuanya tergantung pada keluarga khususnya suami sebagai pencari nafkah. Bagi mereka yang ‘terpaksa’ menjalankan peran sebagai tulang punggung keluarga, segala konsekuensi harus diterima agar dapur tetap mengebul.

Kiprah Perempuan Jawa Tengah

Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan

Jateng Daily, 10 Maret 2021

“CHOOSE to Challenge”, menjadi tema Hari Perempuan Internasional tahun ini yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Laman international womens day mengajak semua orang untuk mengangkat telapak tangan setinggi-tingginya dan menunjukkan lewat potret di media sosial. Hal ini sebagai tanda keikutsertaan dan komitmen untuk menentang serta menyerukan ketidaksetaraan gender. Hari Perempuan Internasional adalah sebuah

perayaan kesetaraan gender di berbagai bidang, meliputi sosial, ekonomi, kebudayaan, politik dan lain sebagainya. Momen ini dimulai pada tahun 1908 ketika para buruh perempuan di New York melakukan demo menyuarakan hak mereka tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja. Sejak saat itu, setiap 8 Maret seluruh penjuru dunia memperingatinya sebagai Women International Day.

Membahas tentang perempuan, orang Indonesia pasti langsung teringat pada Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan pada masanya. Kala itu perempuan dianggap hanyalah golongan kelas 2 yang lemah, dibatasi pergerakannya untuk maju. Perempuan Indonesia ketika itu identik dengan ‘macak, masak, manak’, alias berdandan, memasak dan melahirkan saja. Raden Ajeng Kartini berjuang untuk melunturkan kepercayaan itu di tengah masyarakat. Beliau berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang layak dan bisa berkiprah selayaknya laki-laki.

Meskipun berat, perjuangan Raden Ajeng Kartini yang saat itu ibarat “menentang matahari” berakhir dengan hasil yang manis. Saat ini, banyak bermunculan tokoh-tokoh perempuan luar biasa di Indonesia yang bukan hanya berkiprah di nusantara tapi juga di dunia internasional. Salah satu srikandi Jawa Tengah, Sri Mulyani Indrawati, merupakan salah satu tokoh perempuan hebat Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pernah dipercaya sebagai wanita pertama di Indonesia bahkan di dunia yang menjadi Direktur Bank Dunia (World Bank) pada periode Juni 2010 hingga Juli 2016. Berkat pemikiran dan strategi ekonomi beliau, perekonomian Indonesia bisa tetap bertahan stabil di kala dunia sedang mengalami krisis ekonomi berat tahun 2008 lalu.

Karena kiprahnya yang luar biasa, beliau pernah dinobatkan menjadi Menteri Keuangan Terbaik di Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets, terpilih menjadi wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007, dan menjadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Berikutnya pada tahun 2018 Sri Mulyani juga mendapatkan penghargaan dari majalah Finance Asia, Hongkong sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik. Pada tahun yang sama beliau juga mendapatkan penghargaan Menteri Terbaik di Dunia pada World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dan pada tahun 2019 Menteri Keuangan Republik Indonesia ini menyabet penghargaan Asian Business Leadership Forum (ABLF) Statesperson Award di Dubai. Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin teladan di pemerintahan dan pelayanan publik yang berinovasi, dan bisa mendukung pengembangan masyarakat dan negara yang berkelanjutan serta kepada sosok yang mampu membantu membentuk kebijakan pemerintah yang proaktif dan positif.

Tak kalah dari Sri Mulyani, Jawa Tengah juga memiliki Septi Peni Wulandani, tokoh perempuan yang menjadi founder komunitas Ibu Profesional. Sebuah komunitas yang telah dinobatkan menjadi The Most Influence Community pada tahun 2017 versi koran Jawa Pos. Komunitas yang didirikan beliau saat ini sudah memiliki puluhan ribu anggota

yang tersebar di seluruh pelosok nusantara bahkan hingga luar negeri. Melalui komunitas ini, Ibu Septi mendidik dan berbagi ilmu kepada perempuan-perempuan Indonesia agar mampu berubah untuk dirinya sendiri hingga nantinya akan mampu merubah keluarganya menjadi agen perubahan masyarakat di sekitarnya.

Diharapkan seorang ibu bangga akan posisinya sebagai ibu, mendidik anak dengan sepenuh hati, cekatan dalam mengurus manajemen keluarganya, bisa mandiri secara finansial serta bermanfaat lebih pada masyarakat. Tidak hanya sebagai founder komunitas besar Ibu Profesional, beliau juga founder Jarimatika, sebuah metode belajar matematika, founder Abaca baca, dan founder Jari Qur'an. Beliau juga pendiri Padepokan Lebah Putih di Salatiga, sebuah sekolah ramah anak dan juga pendiri Komunitas Belajar Cantrik yang menjadi kumpulan orang tua dengan anak homeschooling. Semangat beliau tak pernah padam untuk berbagi ilmu agar perempuan Indonesia bisa menjadi pilar keluarga tangguh dan menjadi pendidik terbaik generasi penerus bangsa.

Jawa Tengah perlu berbangga memiliki aset berharga, tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa. Jawa tengah juga perlu berbangga karena jumlah sarjana perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa 5,45 persen perempuan berusia 15 tahun ke atas di Jawa Tengah tahun 2020 memiliki ijazah S1 ke atas. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki berusia 15 tahun ke atas, yaitu 5,27 persen saja. Dilihat dari sisi kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan di Jawa Tengah juga lebih tinggi dari laki-laki. Perempuan memiliki Usia Harapan Hidup hingga 76,30 tahun sedangkan laki-laki memiliki angka yang lebih rendah yaitu 72,51 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesehatan perempuan Jawa Tengah lebih baik dibandingkan laki-laki.

Tapi sayangnya jika dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum, IPM perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. IPM perempuan sebesar 69,94 dan IPM laki-laki sebesar 75,87. Hal ini disebabkan oleh nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang lebih rendah. Laki-laki menjalani pendidikan formal lebih lama dari perempuan pada tahun 2020 yaitu selama 8,16 tahun sedangkan perempuan hanya selama 7,24 tahun. Selain itu IPM perempuan yang lebih rendah juga disebabkan oleh daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 9.724.000 per orang per tahun. Angka ini menandakan bahwa perlu upaya lebih dari pemerintah untuk mendorong angka IPM perempuan agar meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pemberian beasiswa pendidikan khusus perempuan, pengadaan pelatihan kerja yang banyak mengakomodir ketrampilan-ketrampilan perempuan, dan juga menyediakan lapangan kerja yang lebih luas untuk kaum perempuan.

Kartini dan Pemberdayaan Gender di Jawa Tengah

**Neti Ariyanti – BPS Kabupaten Grobogan
Jateng Pos, 11 Mei 2021**

Generasi Y atau yang lebih kita kenal dengan istilah generasi milenial adalah penduduk yang lahir pada rentang tahun 1982 sampai 1996 atau diperkirakan saat ini berusia 24-39 tahun. Kelompok penduduk ini adalah kelompok dengan komposisi terbesar kedua setelah generasi Z. Generasi Z sendiri adalah penduduk yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012 atau saat ini diperkirakan berusia 8-23 tahun. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, generasi milenial memiliki komposisi sebesar 25,87 persen sedangkan generasi Z memiliki komposisi sebesar 27,94 persen dari total penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa.

Generasi milenial ini lahir disaat teknologi tumbuh dengan pesat, seperti adanya pesan singkat, pesan instant, surat elektronik (email) dan media sosial, sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan koneksi internet. Generasi milenial saat ini diperkirakan telah bekerja baik pada sektor swasta maupun disektor pemerintahan, menggeser posisi generasi X (kelahiran rentang 1965-1980) yang saat ini sudah akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk generasi milenial sangatlah diperlukan, salah satunya dengan cara mengenali karakteristik kerja milenial dengan baik, agar tidak menimbulkan kesalahan yang fatal dalam suatu organisasi.

Di era digital seperti saat ini organisasi dituntut untuk melakukan pekerjaan secara digital, melalui proses komputerisasi dan teknologi cyber sehingga dianggap cocok dengan karakter generasi milenial yang sudah melek teknologi sejak lahir, piawai dalam menggunakan gadget serta fasih dalam menggunakan internet yang membuat mereka ingin selalu terhubung kapan pun dan dimana pun.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam proses bisnis suatu organisasi. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka langsung saat ini tidak bisa lagi dilakukan untuk menghindari penularan virus Covid-19. Oleh karena itu teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan agar proses bisnis dapat terus berjalan sesuai dengan harapan.

Disinilah peran dari sumber daya manusia generasi milenial, dimana mereka yang terkenal dengan generasi yang kreatif dan produktif dapat mengembangkan inovasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi ditempat mereka bekerja. Contohnya seperti penyelenggaraan kegiatan secara virtual, analisis menggunakan big data dan crawling data, pemanfaatan artificial intelligent, penggunaan internet untuk pemasaran produk dan profiling customer secara digital, serta lain sebagainya.

Pengelolaan sumber daya manusia generasi milenial haruslah diperhatikan jika ingin tetap bertahan di masa pandemi dan di era digital saat ini. Salah satu strateginya yaitu dengan cara menempatkan generasi milenial sesuai dengan bakat dan potensinya serta memberikan ruang untuk menyalurkan ide, kreatifitas dan gagasan mereka, sebab generasi milenial adalah generasi yang haus akan pengetahuan, mereka akan mencari pengetahuan dan cara baru yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Sehingga pada akhirnya energi yang besar dari generasi milenial ini dapat dirasakan secara optimal oleh organisasi atau instansi tersebut.

Ibu, Citra Perempuan Indonesia

Agusthina Oupoly – BPS Kota Semarang Jateng Today, 22 Desember 2021

“Bagi banyak orang, ibu adalah sosok yang sangat istimewa. Besarnya perhatian dan pengorbanan ibu kepada anak-anaknya tergambar dalam ungkapan “kasih ibu sepanjang jalan”. Tidak ada ujungnya. Bagi banyak orang, makanan paling enak adalah masakan ibu. Tempat yang paling aman adalah pelukan ibu. Figur ibu dijadikan teladan. Nasihatnya didengarkan dan ditaati”.

Hari ini, 22 Desember 2021 diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. yang sering dirayakan setiap 22 Desember memiliki latar belakang sejarah panjang dan penuh perjuangan yang diprakarsai oleh para pejuang perempuan waktu itu.

Jika di Amerika, penetapan Hari Ibu dilatarbelakangi oleh ide Ms Anna Jarvis untuk menciptakan hari untuk menghormati Ibu. Maka di Indonesia, dipilihnya hari bersejarah, 22 Desember ini bermula dari semangat wanita Indonesia untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Proses ini berawal dengan Kongres I Perempoean Indonesia di Yogyakarta pada 22 Desember 1928 yang dihadiri 30 organisasi wanita dari 12 Kota di Jawa dan Sumatera yang kemudian melahirkan terbentuknya Kongres Perempoean yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Kowani adalah organisasi wanita yang terinspirasi para pahlawan perempuan Indonesia, Kartini, salah satunya.

Kongres bertujuan menyatukan organisasi perempuan untuk memajukan nasib perempuan dengan agenda utama peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa. Juga agenda perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, serta agenda lainnya.

Menariknya, pada Kongres Perempoean Indonesia II tahun 1935 di Jakarta, beberapa keputusan penting yang dilahirkan: kewajiban utama Wanita Indonesia ialah menjadi ‘Ibu Bangsa’ yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan

kebangsaannya. Baru pada Kongres Perempuan III tahun 1938 di Bandung, ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai 'Hari Ibu'.

Perempuan Masa Kini

Memaknai hari ibu di zaman manapun kita berada seharusnya ada spirit kasih sayang dengan orientasi melakoni zaman saat ini. Konsekuensi dengan mudahnya akses teknologi setiap orang dengan mudah beraktivitas dengan efisien yang lebih mobile melalui jaringan internet. Ini adalah era terbaik bagi generasi republik ini karena Indonesia saat ini tengah memperoleh jendela kesempatan demografi (*demographic window of opportunity*).

Berdasarkan data hasil SP2020 BPS Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk pada bulan September 2020 sebanyak 36,52 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 18,36 juta jiwa laki-laki atau 50,29% dari penduduk Jawa Tengah sementara jumlah penduduk perempuan 18,15 juta jiwa, atau 49,71% dari penduduk Jawa Tengah.

Dewasa ini banyak perempuan masa kini yang aktif dengan kegiatan sosial dan juga pekerjaannya, seiring dengan meningkatnya pengalaman, ilmu dan pendidikan yang ditempuhnya, kegiatan perempuan masa kini tidak lagi hanya sebatas dapur, sumur, dan kasur seperti istilah orang tua zaman dahulu. Mereka mulai mengembangkan kiprah sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan bidang yang ingin ditekuninya, namun tentu saja dengan tidak melupakan perannya sebagai perempuan, baik sebagai isteri ataupun sebagai ibu yang kegiatannya ini tidak mengesampingkan kewajibannya, dan tentu juga harus mendapat dukungan penuh dari keluarga, suami dan anak-anaknya.

Perempuan mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan laki-laki, perempuan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama (*multitasking*), perempuan juga biasa berbagi peran yang disebut *multiperan*, jika di rumah dia bisa menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya dan menjadi seorang istri bagi suaminya, dalam pekerjaannya dia bisa menjadi pemimpin, karyawan atau apa saja, bahkan terkadang pekerjaan keras yang membutuhkan tenaga laki-laki pun bisa dijalannya.

Peran ganda seorang perempuan dalam ranah domestik dan publik menjadi aspek yang tak terbantahkan. Perempuan turut berperan dalam skala pembangunan bangsa tercermin dalam peranan dan perjuangannya di sektor publik. Negara dalam hal ini juga sudah memberikan peluang untuk para perempuan, misalnya bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik dengan memberikan kuota 30% dalam parlemen.

Dalam lingkup areal rumah tangga, sosok perempuan sangat mulia dalam mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anaknya. Peranan perempuan ini menjadikannya tokoh sentral sekaligus penentu kualitas generasi penerus bangsa. Pada tahun 2020, BPS Jawa Tengah mencatat bahwa sebanyak 32,26% perempuan 15 tahun ke atas hanya berfokus mengurus rumah tangga (Sakernas, Agustus 2020)

BPS Jawa Tengah juga mencatat pekerja laki-laki lebih banyak dibanding pekerja perempuan baik pada pekerja formal maupun informal. Hal ini tercermin pada data yang

ditunjukkan pada Tahun 2020 sebanyak 39,99% perempuan bekerja sebagai pekerja formal dan 43,95% bekerja sebagai pekerja informal (Sakernas Agustus 2020).

Selanjutnya peran Perempuan Indonesia di masa kini ini juga tercermin pada perannya di sektor perekonomian. Data dari Survei Industri Mikro Kecil (IMK) BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 48,22% pengusaha Industri Kecil dan Menengah adalah perempuan.

Secara rinci, pelaku usaha perempuan ini terlihat pada industri berskala mikro yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang. Perempuan juga banyak terserap pada sektor jasa-jasa. Belum lagi peran wanita sebagai pekerja di perusahaan kian penting dan dituntut untuk terus inovatif serta adaptif menghadapi perubahan yang ada di Era Industri 4.0. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Sakernas Agustus 2020) justru menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 57,54%, sedangkan TPAK pria telah mencapai 81,68%.

Dalam memperingati hari Ibu kali ini di masa pandemi COVID-19, mari kita kembalikan makna Hari Ibu yang dulu digagas oleh para perempuan tangguh sebelum kita, bagaimana melanjutkan estafet cita-cita menjadi 'Ibu Bangsa', melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, mencerdaskan, membangun akhlak mulia, mendidik anak-anak dengan tauladan, melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter sekaligus memberi sumbangsih pembangunan bangsa, berkumpul dengan masyarakatnya, turut memberi sumbangsih untuk lingkungannya, sadar dan aktif terlibat dalam isu-isu strategis.

Bersama, kita bisa. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di seluruh tanah air tercinta, Indonesia.

Ketimpangan Upah Menurut Gender

Santi Widyastuti – BPS Kota Salatiga

Jateng Daily, 10 Mei 2021

Tanggal 1 Mei merupakan hari spesial bagi semua buruh di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya pada tanggal tersebut diperingati *may day* atau di Indonesia sering disebut sebagai hari buruh. Sejarah hari buruh tidak terlepas dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1886. Demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa tersebut menuntut jam kerja yang layak yaitu delapan jam per hari setelah sebelumnya buruh diharuskan bekerja selama enam belas jam per hari.

Di Indonesia penetapan hari buruh juga melalui perjalanan yang berliku. Terakhir penetapan hari buruh dilakukan pada era reformasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 1 Mei 2013 sebagai hari buruh sekaligus sebagai hari libur nasional.

Pada era reformasi ketika Indonesia sudah menetapkan hari buruh, jam kerja buruh secara umum sudah dapat dikatakan layak. Pada tahun 2020, secara rata-rata buruh bekerja selama 40 jam. Jika dibagi berdasarkan gender, laki-laki bekerja 41 jam seminggu sedangkan perempuan bekerja selama 36 jam seminggu.

Karena dari sisi jam kerja sudah dapat dikatakan layak, maka sebagian besar tuntutan saat ini mengarah pada kesejahteraan salah satunya upah yang layak. Jika dikulik lebih dalam lagi, permasalahan buruh kaitannya dengan upah tidak hanya tentang upah yang belum layak, tetapi juga ada ketimpangan disana. Menurut data BPS dari hasil Survei Angkatan Kerja (Sakernas) Bulan Agustus, rata-rata upah laki-laki pada tahun 2015 sebesar 2,17 juta sedangkan rata-rata upah perempuan sebesar 1,86 juta.

Artinya upah laki-laki lebih tinggi dibandingkan upah perempuan sebesar 314,6 ribu rupiah. Selisih rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan terus meningkat, hingga tahun 2019 selisih antara upah laki-laki dan perempuan sebesar 712,9 ribu rupiah. Peningkatan selisih rata-rata upah buruh laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi semakin melebar dari tahun ke tahun.

Penelitian mengenai ketimpangan upah menurut gender sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Beberapa penyebab terjadinya ketimpangan upah adalah jam kerja perempuan yang lebih sedikit, pendidikan yang rendah, status perkawinan, jumlah anak, tempat tinggal, dan lain-lain. Meskipun beberapa faktor tersebut berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi, akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan ketimpangan upah diantaranya adalah faktor budaya.

Di berbagai negara termasuk Indonesia, perempuan ditempatkan pada posisi kedua dalam ekonomi. Perempuan ditempatkan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan domestik rumah tangga serta pengasuhan anak. Oleh karena itu jika perempuan sudah menikah atau memiliki anak, maka mereka cenderung keluar dari pasar tenaga kerja atau bertahan di pasar tenaga kerja tetapi bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit.

Dampak dari rendahnya peran perempuan dalam ekonomi dapat dilihat dari sumbangan pendapatan perempuan yang cukup rendah. BPS menyebutkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2020 hanya sebesar 37,26 persen. Meskipun angka tersebut sudah mengalami peningkatan setidaknya dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, tetapi nyatanya masih jauh dari setara dengan laki-laki.

Rendahnya pendapatan perempuan tidak terlepas dari belum setaranya peran perempuan sebagai tenaga profesional. Meskipun persentase perempuan sebagai tenaga profesional juga mengalami peningkatan menjadi 48,76 persen tahun 2020, akan tetapi hal tersebut juga mengindikasikan bahwa laki-laki lebih banyak bekerja sebagai tenaga profesional dibandingkan perempuan. Dampaknya tentu saja adalah upah perempuan secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kebijakan afirmasi sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan membuat undang-undang yang memberikan kuota keterlibatan perempuan di parlemen minimal 30 persen. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Sayangnya kesempatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun terus mengalami peningkatan, tetapi kuota perempuan di parlemen tahun 2020 hanya sebesar 21,09 persen. Peningkatan kuota perempuan di parlemen penting karena perempuanlah yang tau apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasinya dalam bekerja. Oleh karena itu jika keterlibatan perempuan di parlemen cukup besar maka diharapkan kebijakan mengenai ketenagakerjaan bisa berpihak pada perempuan.

Usaha pemerintah dalam hal kesetaraan gender memang perlu diapresiasi, akan tetapi fakta bahwa ketimpangan masih ada disana sini juga harus disadari. Perlu upaya semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi menurut gender. Salah satu caranya adalah dengan membuat perempuan menjadi berkompetensi. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pendidikan merupakan faktor terbesar yang bisa menjadi penguangkit kompetensi seseorang.

Oleh karena itu kerja keras untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal ekonomi maupun upah bisa dimulai dari memberi dukungan pada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Pekerja Perempuan Purbalingga

**Ani Widiarti – BPS Kabupaten Purbalingga
Jateng Daily, 31 Desember 2021**

DAHULU, perempuan mungkin dianggap kaum yang lemah. Tugasnya hanya mengurus suami, anak dan rumah tangga. Namun kini peran tersebut sudah bergeser seiring dengan perubahan jaman yang dinamis. Perempuan bekerja zaman sekarang adalah hal yang biasa. Motif ekonomi karena ingin membantu perekonomian keluarga, memacu keinginan perempuan untuk bisa bersaing di dunia kerja.

Selain untuk menopang ekonomi keluarga, bahkan ada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi penentu kelangsungan hidup rumah tangga. Perempuan pekerja dapat menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki, baik dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu perempuan yang bekerja juga dapat meningkatkan rasa percaya diri

bahwa mereka bisa berperan dalam membantu ekonomi keluarga dan juga meningkatkan skill atau kemampuan perempuan.

Perempuan yang bekerja di Purbalingga dapat dikatakan cukup luar biasa. Data Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan bahwa pada tahun 2021, jumlah pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia dan mampu secara aktif untuk dapat memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Purbalingga sebanyak 204.543 orang atau 55,42 persen dari seluruh perempuan berusia 15 tahun keatas di Purbalingga.

Angka ini biasa disebut dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang menggambarkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa cukup besar persentase penduduk perempuan di Purbalingga yang potensial untuk memproduksi dan menghasilkan barang dan jasa secara ekonomi. Persentase ini meliputi penduduk yang saat ini bekerja maupun penduduk yang mencari pekerjaan.

Dari sekian ratus ribu perempuan 15 tahun keatas tersebut, tercatat 194.093 yang berstatus sedang bekerja pada kondisi Agustus 2021. Dengan kata lain 94,89 persen perempuan telah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Angka ini dikenal dengan istilah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, semakin besar peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.

Meningkatnya tingkat kesempatan kerja sejalan dengan menurunnya angka pengangguran. Tercatat 10.450 perempuan Purbalingga berusia 15 tahun keatas yang tergolong sebagai angkatan kerja berstatus menganggur atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan sebesar 5,11 persen. Sementara TPT laki-laki tercatat 6,69. Jika dibandingkan dengan TPT laki-laki, TPT perempuan lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada angkatan kerja perempuan yang siap memproduksi secara ekonomi, lebih banyak yang sudah dimanfaatkan dan terserap dalam lapangan pekerjaan dibandingkan laki-laki di Purbalingga.

Tantangan hidup yang semakin keras menyebabkan para perempuan di Purbalingga tidak tinggal diam untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Data Sakernas juga mencatat bahwa pada tahun 2021, sebagian perempuan yaitu 41,71 % pekerja perempuan Purbalingga terserap di sektor industri.

Purbalingga yang terkenal sebagai daerah penghasil ekspor bulu mata palsu dan rambut palsu, telah membuka peluang perempuan di Purbalingga untuk mendapatkan penghasilan. Sejak beberapa tahun yang lalu telah didirikan puluhan pabrik besar investasi asing yang memproduksi barang pendukung kecantikan yaitu bulu mata dan rambut palsu.

Selain dari pabrik-pabrik besar, bulu mata palsu juga banyak diproduksi di rumah-rumah penduduk atau lebih dikenal dalam bentuk plasma. Industri plasma rambut ini tidak hanya terfokus pda satu wilayah tapi tersebar hampir merata di setiap desa/kelurahan. Tenaga kerja yang banyak dibutuhkan di sektor industri ini adalah perempuan.

Dengan hanya bermodal ketrampilan tangan, para ibu-ibu bisa mempergunakan waktunya untuk menghasilkan uang tanpa mereka harus meninggalkan anak dan

keluarganya. Meskipun pendapatan yang mereka terima jauh dari kata cukup, namun ini masih banyak dilakukan para perempuan terutama di pedesaan untuk menambah pendapatan suami yang rata-rata juga minim. Untuk para laki-laki lebih banyak di sektor pertanian dan konstruksi.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, para perempuan pekerja ini juga lebih banyak yang berstatus sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 45,74 persen dan 16,79 persen berstatus sebagai pekerja keluarga.

Untuk pekerja dengan status buruh, sebagian besar adalah buruh/karyawan di industri bulu mata/rambu palsu baik yang merupakan karyawan pabrik maupun pekerja industri rumahan. Industri lain yang juga banyak dilakukan penduduk di wilayah pedesaan adalah industri gula dimana industri rumahan ini biasanya hanya melibatkan anggota keluarga sebagai pekerjanya dan disini para istri/anak biasanya membantu para suami sebagai pekerja keluarga. Sektor pertanian juga cukup banyak menggunakan tenaga kerja perempuan sebagai pekerja keluarga.

Hal yang cukup menarik dari para pekerja perempuan di Purbalingga adalah bahwa para pekerja ini lebih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMP kebawah. Pekerja perempuan yang berpendidikan SD kebawah sebesar 48,96 persen sedangkan pekerja yang berpendidikan SMP sebesar 23 persen. Sementara itu pekerja yang berpendidikan SMA tercatat hanya 10,52 persen.

Masih rendahnya tingkat pendidikan para pekerja perempuan di Purbalingga memunculkan kemungkinan bahwa sektor industri yang dominan sebagai pekerjaan utama perempuan di Purbalingga tidak terlalu membutuhkan skill atau keahlian tertentu. Perempuan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan minimum pun masih dapat menghasilkan di sektor ini.

Memang secara kenyataan, produksi bulu mata palsu lebih banyak membutuhkan ketelatenan, ketelitian dan keuletan pekerjanya. Pekerjaan ini tidak terlalu membutuhkan skill yang tinggi sehingga siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk di sektor ini.

Kondisi ini juga bisa kita saksikan bahwa mobilitas orang untuk dapat bekerja sebagai karyawan pabrik bagian produksi bulu mata palsu cukup tinggi. Orang bisa dengan mudah keluar masuk dari pekerjaannya dan berpindah ke pabrik lain atau keluar dari pekerjaan demi mengurus rumahtangga. Demikian juga yang terjadi di industri bulu mata palsu rumahan. Asalkan ada kemauan, para perempuan dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan ini.

Dampak negatif yang ditimbulkan secara tidak langsung dari banyaknya pabrik bulu mata palsu di Purbalingga adalah kecenderungan para perempuan muda untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan daripada melanjutkan sekolah. Dengan bekal pendidikan SMP bahkan hanya SD, mereka sudah bisa memperoleh uang sendiri. Dari uang yang dihasilkan tersebut, mereka sudah dapat membeli telepon seluler/HP, mampu membeli kendaraan bermotor sendiri meskipun secara kredit dan sebagian bisa diberikan kepada orangtua untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan dampak negatif terhadap para perempuan yang sudah berkeluarga antara lain adalah berkurangnya waktu dan perhatian terhadap anak (untuk perempuan yang sudah memiliki anak) yang dapat menyebabkan anak dapat terjerumus kepada hal-hal negatif, memperbesar peluang terhadap resiko terjadinya kegagalan rumah tangga (perceraian) dikarenakan istri sibuk bekerja sehingga suami ada kecenderungan kurang diperhatikan oleh istri.

<https://jateng.bps.go.id>

Bagian 7

Generasi Tanpa Stunting

Diana Dwi Susanti

Mempersiapkan generasi emas 2045 bukan hal mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera diatasi karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045.

Pencegahan Stunting pada Era Pandemi

Masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlanjut maka pemerintah membuat kebijakan PSBB/PPKM Mikro. Kebijakan ini menyebabkan masalah pada perubahan sosial ekonomi. Banyak orang miskin mendadak akibat pandemi, sehingga tidak mampu mencukupi nutrisi/gizi yang bisa mengakibatkan terjadinya stunting pada anggota keluarganya, termasuk keluarga yang mempunyai anak bawah dua tahun (baduta) dan ibu hamil, kurangnya pengetahuan dalam memberikan nutrisi yang tepat pada ibu hamil, menyusui dan anak baduta juga bisa menyebabkan stunting.

Masyarakat adalah salah satu unsur penting. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi masalah mereka sendiri, mengembangkan kreatifitas agar bisa memanfaatkan setiap potensi yang ada, untuk tujuan memperbaiki kualitas diri dan lingkungannya. Hal ini nantinya akan melahirkan aset yang dapat membentuk modal sosial.

Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia, telah membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dampak secara ekonomi sangat terasa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program pencegahan stunting harus terus dilaksanakan, agar Indonesia tidak menderita *generation lost* dimasa depan.

Dampak secara ekonomi yang terlihat secara langsung adalah banyaknya pengangguran di desa yang tidak bisa memiliki peluang usaha, sehingga pendapatan berkurang, sehingga daya beli menurun lalu menyebabkan asupan gizi untuk keluarga juga berkurang. Dalam rangka pencegahan stunting, terdapat beberapa kegiatan yang berdampak langsung yaitu pemberian PMT, pemantauan gizi di Posyandu, KRPL, KWT dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Dengan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui 5 (lima) kegiatan diatas, diharapkan angka prevalensi stunting dapat terus ditekan. Terdapat 5 faktor yang

berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu (1) perencanaan dan sosialisasi (2) pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok sasaran, (3) pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan mendukung diversifikasi konsumsi pangan, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya, (5) pentingnya aspek promosi dan pemasaran. Jika pemberdayaan masyarakat optimal pada program-program ini maka pencegahan stunting di era new normal ini akan mendapatkan hasil yang optimal.

Jawa Tengah Bebas Stunting

Ernie Irawaty Maysarah – BPS Kabupaten Kendal Jateng Daily, 20 September 20201

PREVALENSI kejadian stunting atau kerdil di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 28,5 persen. Artinya, sekitar satu dari empat anak di Jawa Tengah mengalami kekerdilan. Menurut KBBI, stunting atau kerdil didefinisikan sebagai tidak dapat menjadi besar karena kekurangan gizi atau karena keturunan.

Stunting sendiri baru dapat dikenali ketika menginjak usia dua tahun, dimana tubuh anak tampak lebih pendek dibandingkan tubuh anak seusianya.

Tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, stunting juga mempengaruhi perkembangan kognitif, motorik, bahkan kemampuan verbal anak. Karena kurangnya imunitas tubuh, stunting juga mempengaruhi kesehatan reproduksi anak ketika dewasa. Jika menelaah lebih lanjut, dari sisi ekonomi pun akan kita temukan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Anak stunting yang rentan sakit akan menambah biaya pengeluaran dalam hal perawatan kesehatan. Belum lagi ketika dewasa, terhambatnya pertumbuhan fisik dan motorik anak stunting akan mengurangi produktivitas kerja. Produktivitas kerja yang rendah akan mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menjadi faktor yang meningkatkan pengangguran serta menghambat penurunan kemiskinan di suatu daerah.

Menurut beberapa studi, stunting dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti pola makan, pola asuh, perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Pola makan dinilai yang paling mempengaruhi terjadinya stunting pada anak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 75 tahun 2013 telah ditetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG merupakan jumlah kecukupan kalori per hari sesuai kelompok usia dan jenis kelamin.

Secara umum, kalori yang dibutuhkan anak usia 1 hingga 6 tahun adalah 1125-1600 kkal per hari. Kebutuhan kalori anak sendiri sangat bervariasi, menyesuaikan usia, jenis kelamin dan tingkat aktivitas fisiknya setiap hari. Kementerian Kesehatan telah merangkum angka kecukupan gizi ini dalam iklan layanan masyarakat “Isi Piringku”.

Iklan berdurasi 30 detik ini menjelaskan, bahwa dalam sepiring makanan setidaknya terdiri dari sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk dan

seperenam buah-buahan. Jika dikonversikan, dalam sehari minimal seorang balita harus makan 2 porsi nasi, dengan takaran seperempat kilogram ikan bandeng goreng, sayur bayam dan pisang ambon.

Selain pola makan, pola asuh diyakini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Pola asuh pada seribu hari pertama anak menjadi faktor krusial pertumbuhan tubuhnya. Seribu hari pertama ini dimulai sejak masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Dengan kata lain, stunting juga dipengaruhi dari asupan ibu sejak masa kehamilan.

Berat Lahir Rendah

Usia ibu hamil yang matang, di mana calon ibu berusia di atas 20 tahun, diyakini akan mengurangi kelahiran bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) atau berat lahir bayi dibawah 2,5 kilogram. BBLR sendiri diyakini mempengaruhi sekitar 20 persen terjadinya stunting. Jika dalam 2 tahun terakhir, ada 1 dari 10 perempuan di Jawa Tengah yang melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, BPS), bisa diperkirakan berapa bayi yang kelak akan tumbuh kerdil?

Selain anjuran kawin di usia matang dan menjaga asupan sejak hamil, pemerintah juga mengkampanyekan pemberian asi eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak, kemudian dilanjutkan menyusui hingga 2 tahun sebagai bentuk pencegahan stunting.

Perbaikan sanitasi dan perbaikan akses air bersih juga disebut-sebut sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Di Jawa Tengah, masih ada sekitar 1,69 persen rumah tangga memiliki sanitasi yang tidak layak, dan sekitar 19,36 persen yang malah belum memiliki akses terhadap air bersih (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, BPS). Upaya persuasif berupa peningkatan kesadaran kepada warga perlu terus diatkan.

Masyarakat perlu disadarkan bahwa sanitasi yang tidak terawat dan kotor akan mempengaruhi tingkat kesehatan. Masyarakat pun harus paham mengenai pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga yang tepat, begitu pula dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun serta kebiasaan tidak buang air besar di sembarang tempat. Semua kebiasaan ini akan membentuk pola hidup sehat yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan kejadian stunting.

Hal lain yang masih menjadi PR Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kejadian stunting adalah mengatur usia perkawinan pertama pada wanita. Di Jawa Tengah, pada tahun 2020 sekitar 60,85 persen wanita melangsungkan kawin pertama pada usia 20 tahun ke bawah. Perkawinan di usia belum matang dan tingkat pengetahuan kurang dalam pengasuhan anak secara tidak langsung ikut meningkatkan peluang kejadian stunting.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang semakin baik ditambah dengan program pemerintah dalam peningkatan gizi baik ibu hamil maupun balita, tentu akan membantu upaya mengurangi angka kejadian stunting. Tentu saja upaya meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat ini, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi perlu menjadi kesadaran bersama swarga. Mari membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik, salah satunya dengan mewujudkan Jawa Tengah tanpa stunting.

Berdayakan Ibu untuk Cegah Stunting

Lulu Lestari – BPS Kabupaten Cilacap

Infojateng.id, 28 Desember 2021

Masalah Stunting

Kasus stunting di Indonesia jumlahnya mencengangkan. Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2020 prevalensi balita yang mengalami stunting adalah 31,8 persen dan menduduki peringkat ke dua tertinggi di Asia Tenggara. Stunting adalah kondisi dimana balita mengalami gangguan pertumbuhan sehingga memiliki tinggi badan yang kurang. Anak yang mengalami stunting biasanya lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Permasalahan stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga pada kehidupannya saat dewasa nanti. Stunting membuat kemampuan kognitif anak kurang dan rentan terhadap penyakit sehingga menyebabkan produktivitasnya saat dewasa tidak maksimal. Menurut laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terganggunya produktivitas masyarakat akan menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang kompleks seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan turun temurun, dan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Melihat dampak serius yang ditimbulkan, permasalahan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Penyebab Stunting

Anak-anak yang mengalami masalah stunting juga ditemui di Jawa Tengah. Menurut Studi Status Balita Kementerian Kesehatan tahun 2019 terdapat sekitar 27,7 persen balita stunting di Jawa Tengah. Artinya satu dari empat balita mengalami kekurangan gizi. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa. Kota Surakarta, Grobogan, Brebes, Pati, dan Pekalongan merupakan lima wilayah dengan angka stunting terbesar di Jawa Tengah.

Stunting adalah masalah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menurut Dashboard Pemantauan Terpadu Percepatan Pencegahan Stunting Kementerian Dalam Negeri, penyebab stunting dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung berupa asupan gizi yang dikonsumsi oleh anak dan status kesehatan anak. Penyebab tidak langsung diantaranya yaitu ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, dan lingkungan pemukiman. Berbagai macam faktor itulah yang secara terkait berproses dan menyebabkan stunting pada balita. Salah satu faktor dominan dalam proses kasus stunting adalah peran pengasuhan orang tua khususnya ibu. Ibu sangat berperan pada proses penyebab langsung terjadinya stunting yaitu pada makanan yang dikonsumsi oleh anak sehari-harinya dan terwujud pada status kesehatan anak tersebut.

Peran Ibu

Kondisi stunting yang dialami seorang anak sebenarnya merupakan proses yang dimulai sejak dirinya berada dalam kandungan ibu. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan menghasilkan bayi yang stunting. Dalam proses kehamilan, gizi sangat dibutuhkan oleh seorang ibu. Kesiapan prakonsepsi juga penting. Setidaknya calon ibu harus rutin mengonsumsi asam folat, pemeriksaan hemoglobin darah, dan minum tablet penambah darah yang semuanya bisa didapatkan secara gratis di Puskesmas terdekat. Berbagai upaya tersebut diyakini mampu mencegah lahirnya bayi dengan gizi kurang yang bercirikan panjang tubuh kurang dari 48 centimeter dan berat badan tidak mencapai 2,5 kilogram.

Peran ibu setelah bayi terlahir juga sangat menentukan pencegahan stunting pada anak. Anak yang lahir dengan berat badan dan tinggi yang normal masih memiliki resiko mengalami stunting pada masa tumbuh kembangnya. Asupan Air Susu Ibu (ASI) dibutuhkan oleh bayi-bayi yang baru lahir minimal sampai dengan usia 6 bulan. Setelah fase tersebut bayi membutuhkan makanan pendamping ASI yang cukup dan bergizi sampai dengan 1000 hari kehidupannya untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal.

Makanan yang bergizi harus mengandung komponen protein, karbohidrat, lemak, kalsium, zat besi, zinc, dan vitamin. Makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak sekali bahan makanan di sekitar kita yang bergizi dan harganya terjangkau, seperti telur, tahu, tempe, daging ayam, ikan, sayur, dan buah. Peran ibu sangat dibutuhkan dalam proses menyelaraskan antara kebutuhan gizi anak dan kondisi ekonomi rumah tangga. Pendidikan yang dimiliki oleh seorang ibu juga mempengaruhi. Semakin tinggi pengetahuan ibu tentang gizi dan pertumbuhan anak maka semakin maksimal pula dalam memberikan asupan gizi bagi anak-anak mereka.

Berdayakan Ibu

Pentingnya peran ibu dalam pencegahan stunting harus disadari oleh semua pihak. Ibu merupakan elemen utama pencegah stunting sehingga harus diberdayakan. Pemberdayaan awal yang dapat dilakukan yaitu kepada wanita yang belum menikah. Pastikan usianya cukup pada saat menikah yaitu minimal 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kecukupan usia mutlak dibutuhkan agar kesiapan fisik seorang wanita pada saat hamil dalam kondisi prima. Wanita juga harus berpendidikan tinggi. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, wanita diharapkan memiliki pengetahuan yang baik tentang prakonsepsi, kosepsi, kehamilan, dan pola asuh anak. Sehingga akan tercipta generasi yang cerdas dan bebas dari stunting.

Berikutnya adalah pemberdayaan untuk wanita yang sudah menikah. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan. Keberadaan Bidan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu lebih digiatkan. Para ibu dapat melakukan konsultasi mengenai proses kehamilan, melahirkan, maupun pemakaian kontrasepsi dengan bidan-bidan desa yang ada. Pemantauan tumbuh kembang bayi juga selalu dapat diawasi lewat kegiatan Posyandu yang rutin digalakkan setiap bulan. Program-program pemerintah

untuk mencegah stunting seperti: pemberian ASI, nutrisi lengkap, imunisasi dan sanitasi layak juga dapat disisipkan lewat kegiatan rutin Posyandu. Pemberdayaan kaum ibu merupakan cara jitu untuk menekan angka stunting hingga separuhnya pada tahun 2024.

Pekerjaan Rumah Kebumen Tanpa Stunting

Dwi Agus Styawan – BPS Kabupaten Kebumen
Jateng Daily, 27 Maret 2021

SENSUS Penduduk 2020 (SP2020) mencatat bahwa pada September 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1,35 juta jiwa. Hal yang menarik dari hasil SP2020 berdasarkan perspektif generasi, penduduk Kabupaten Kebumen didominasi oleh Generasi Z dan Milenial.

Generasi Z di Kabupaten Kebumen mencapai 341 ribu jiwa atau 25,30 persen, sedangkan generasi milenial sebanyak 332 ribu jiwa atau sekitar 24,63 persen. Dominasi Generasi Z dan Milenial ini menjadi angin segar bagi pembangunan Kabupaten Kebumen, terlebih bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.

Dominasi kedua generasi ini adalah modal awal bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan Kebumen Semarak, yakni Kebumen yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Namun demikian potensi ini harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia, sebab besarnya kuantitas akan sia-sia jika tidak diikuti dengan tingginya kualitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan generasi berdasarkan pengklasifikasian yang digunakan oleh William H. Frey dalam publikasi “Analysis of Census Bureau Population Estimates” (2020). Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997 – 2012 dengan perkiraan usia saat ini 8 – 23 tahun. Adapun Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981 – 1996 dengan perkiraan usia saat ini 24 – 39 tahun.

Oleh karena itu dari sisi demografi, generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Generasi milenial ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen. Sementara itu, sebagian Generasi Z pada tahun 2020 masih berada pada kelompok penduduk usia belum produktif.

Namun, sekitar tujuh tahun lagi seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Generasi Z ini lah yang akan menjadi pemimpin sekaligus aktor utama pembangunan pada masa mendatang. Dengan demikian, SP2020 secara tidak langsung menyuguhkan potret bahwa Generasi Z-Milenial merupakan modal berharga pemerintah untuk menciptakan Kebumen yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak pada masa kini dan nanti.

Potensi dominasi Generasi Z dan Milenial ini tentu harus diikuti dengan kualitas

sumber daya manusia, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, maka pemerintah harus mulai memfokuskan anggaran pada pembangunan sumber daya manusia dalam setiap aspek tersebut.

Pada dasarnya, menurut United Nation Development Programme (UNDP), pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu proses memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*) untuk memperoleh umur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, serta memiliki akses terhadap sumber daya agar dapat hidup layak. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama pembangunan sumber daya manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Indikator untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menghitung IPM melalui tiga pendekatan dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan sehat diproksi dengan umur harapan hidup. Dimensi pengetahuan didekati dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun dimensi standar hidup layak diproksi melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM Kebumen

Berdasarkan metode penghitungan ini, BPS mencatat selama periode 2018 – 2020, IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 68,80 menjadi 69,81 dan masuk dalam kategori sedang.

Peningkatan IPM ini perlu kita apresiasi, sebab hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi capaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah. Secara umum, IPM Kabupaten Kebumen pada 2020 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah yang mencapai 71,87.

Capaian ini juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan IPM beberapa kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. Selain itu, apabila dilihat dari ketiga dimensi pembentuk IPM, pekerjaan rumah ini terletak pada dimensi pengetahuan dan standar hidup layak. Pada dimensi pengetahuan, pekerjaan rumah tampak pada rata-rata lama sekolah yang relatif rendah, yakni 7,54 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen telah mengenyam pendidikan selama 7,54 tahun atau setara SMP kelas VIII.

Demikian pula dalam dimensi standar hidup layak yang masih rendah dengan pengeluaran sebesar Rp 8,9 juta per kapita per tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2020 ini bahkan merupakan pengeluaran terendah kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Pemalang. Pengeluaran per kapita ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang mencapai Rp 9,1 juta per kapita per tahun.

Kemiskinan

Hal ini sejalan dengan indikator-indikator makro lain, yaitu kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sepanjang periode 2019 – 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen meningkat dari 16,82 persen menjadi 17,59 persen. Adapun

tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama juga bertambah dari 4,76 persen menjadi 6,07 persen. Penurunan standar hidup layak dan peningkatan kemiskinan/pengangguran ini tentu menjadi penghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kebumen.

Dengan demikian berbagai data di atas memberikan gambaran bahwa pada satu sisi Kebumen menyimpan potensi dengan melimpahnya jumlah Generasi Z dan Milenial. Potensi ini mampu menjadi pendorong dan akselerator pembangunan. Akan tetapi pada sisi lain, potensi ini dapat menjadi bom waktu sebab relatif belum diikuti dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi ini terutama tampak pada aspek pengetahuan/pendidikan dan standar hidup layak. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih tentu telah memiliki program-program unggulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Berbagai program unggulan ini telah tertuang dalam penjabaran visi dan misi mereka.

Pelaksanaan program-program unggulan ini tentu membutuhkan dukungan dan sinergitas berbagai elemen di Kebumen, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Selain itu, berbagai program unggulan ini harus adaptif terhadap karakteristik Generasi Z dan Milenial. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital, sehingga digitalisasi akan menjadi kunci percepatan kesejahteraan masyarakat Kebumen.

Pembangunan sumber daya manusia juga tidak akan lepas dari keputusan politik dan sangat bergantung pada political will pemerintah. Bagaimanapun juga, hasil pembangunan sumber daya manusia tidak langsung terlihat dan dapat dinikmati seketika. Pembangunan sumber daya manusia bukan seperti kisah bandung bondowoso yang selesai membangun candi dalam semalam. Pembangunan sumber daya manusia bukan sekedar memenuhi janji-janji selama kampanye diri. Pembangunan sumber daya manusia bukan pula untuk mendapatkan puja-puji masa kini.

Segala jerih payah pembangunan sumber daya manusia baru akan dituai nanti, setelah tak lagi menduduki kursi. Pembangunan sumber daya manusia adalah pekerjaan panjang nan sunyi untuk kesejahteraan, kemandirian, dan keluhuran akhlak generasi. Pekerjaan ini membutuhkan kekuatan tekad, kebesaran hati, dan konsistensi kesetiaan. Kesetiaan pada janji yang telah terucap, kesetiaan pada sumpah di bawah kitab.

Pada akhirnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, selamat bertugas. Selamat menempuh jalan panjang nan sunyi itu. Selamat dan sukses.

Bagian 8

Lansia: Motivator dan Inspirator

Diana Dwi Susanti

Ageing population atau penuaan penduduk di masa mendatang akan menjadi isu yang krusial di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merilis hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) di Jawa Tengah relatif tinggi, yakni sekitar 4,4 juta jiwa atau 12,15 persen dari total penduduk Jawa Tengah yang mencapai 36,52 juta jiwa. Persentase penduduk lanjut usia di Jawa Tengah yang lebih besar dari 10 persen ini menandakan bahwa Jawa Tengah telah memasuki era penuaan penduduk atau *ageing population*.

Kuantitas dan Kualitas Hidup Lansia Jawa Tengah

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terjadi dalam waktu 50 tahun terakhir. Di Jawa Tengah persentase lansia meningkat dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya (Gambar 4.3) terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2013, proporsi lansia Jawa Tengah mencapai 11,11 persen dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 13,81 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Jawa Tengah yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (Kemenkes, 2017). Jumlah penduduk lansia yang membesar ternyata berpotensi memberikan banyak benefit jika tangguh, sehat dan tetap produktif. Penduduk lansia tersebut bahkan diprediksi menjadi bonus demografi kedua bagi Indonesia. Namun demikian, menjadikan penduduk lansia tetap sehat, tangguh dan produktif tentu membutuhkan banyak persiapan serta dukungan dari semua pihak. Persoalan kualitas gizi, sanitasi serta dukungan lingkungan yang sehat kemudian menjadi beberapa hal prioritas yang wajib diwujudkan, sama halnya dengan penyiapan kualitas penduduk usia produktif.

Kualitas kesehatan lansia tidak lepas dari transisi demografi yang diikuti dengan transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit degeneratif. Potret ini terlihat dari hasil Susenas Maret 2020 yang menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk lanjut usia Jawa Tengah mengalami keluhan kesehatan, baik fisik maupun psikis (49,84 persen). Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Keluhan kesehatan tidak selalu

mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dapat menggambarkan tingkat kesehatan secara kasar. Sementara itu, persentase penduduk lanjut usia yang mengalami sakit, besarnya hampir mencapai seperempat lansia yang ada di Jawa Tengah (24,67 persen). Angkatan kesakitan ini cenderung terus mengalami penurunan.

Lansia SMART

National Institute on Aging (NIA) mengatakan, “Orang berusia lanjut menjadi proporsi penduduk yang paling cepat berkembang di antara populasi dunia.” Orang hidup semakin lanjut, tapi tidak berarti mereka lebih sehat. Penambahan populasi usia lanjut membawa banyak kesempatan tetapi juga sejumlah tantangan kesehatan masyarakat yang perlu kita persiapkan.” Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perlu diingat bahwa lansia merupakan siklus hidup manusia yang pasti akan dilalui setiap orang setelah mereka melewati masa produktif. Artinya, selama masih hidup, manusia akan mengalami penuaan. Pada fase ini, kemampuan seseorang akan menurun drastis dibandingkan pada masa muda mulai dari daya tahan tubuh, mental, hingga fisiknya. Melihat tren kenaikan jumlah lansia yang akan dihadapi Indonesia, diperlukan persiapan yang matang terutama dalam segi pelayanan kesehatan untuk lansia oleh pemerintah agar sumber daya lansia dapat terawat dengan baik sehingga menciptakan lansia yang berdaya guna, mandiri, dan aktif.

Sebelum melihat kondisi pelayanan kesehatan lansia di Indonesia saat ini, perlu untuk diketahui bahwa kesejahteraan lansia sendiri telah memiliki payung hukum yang diatur oleh pemerintah dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang tersebut mengatur perihal hak-hak kelompok lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; serta bantuan sosial..

Tantangan Penuaan Penduduk Jawa Tengah

Dwi Agus Styawan – BPS Kabupaten Kebumen

Jateng Daily, 23 Januari 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Sensus yang dilaksanakan pada September 2020 ini mencatat jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) di Jawa Tengah relatif tinggi, yakni sekitar 4,4 juta jiwa atau 12,15 persen dari total penduduk Jawa Tengah yang mencapai 36,52 juta jiwa.

Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk lanjut usia secara keseluruhan di Indonesia yang hanya 9,78 persen atau sekitar 26,4 juta jiwa. Persentase penduduk lanjut usia di Jawa Tengah yang lebih besar dari 10 persen ini menandakan bahwa Jawa Tengah telah memasuki era penuaan penduduk atau ageing population.

Pada dasarnya penuaan penduduk merupakan konsekuensi dari terjadinya transisi demografi di Jawa Tengah, yaitu tingkat kematian dan kelahiran yang semakin rendah. Penurunan tingkat kelahiran menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana. Program yang telah dicanangkan sejak 1970 ini bertujuan untuk menekan tingginya pertumbuhan penduduk melalui pengendalian atau perencanaan kelahiran.

Program keluarga berencana bukan sekedar fokus pada penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga terkait dengan kesehatan ibu dan anak, serta perencanaan dalam keluarga yang mencakup usia ideal untuk menikah, usia ideal untuk melahirkan anak pertama, dan jarak ideal antar kehamilan. Berbagai kebijakan dalam program keluarga berencana ini mendorong ukuran keluarga menjadi cenderung lebih kecil dan laju pertumbuhan penduduk relatif rendah.

Hal ini tercermin dari hasil SP2020 yang mencatat bahwa selama satu dekade terakhir (2010 – 2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 1,17 persen per tahun. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode yang sama mencapai 1,25 persen per tahun.

Sementara itu, penurunan tingkat kematian merupakan wujud peningkatan kondisi ekonomi, asupan nutrisi dan perbaikan kondisi sanitasi. Selain itu, penurunan tingkat kematian juga menunjukkan kesuksesan pembangunan di bidang kesehatan, baik dalam hal pelayanan atau keterjangkauan fasilitas kesehatan maupun pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan ini tercermin dari peningkatan angka harapan hidup penduduk Jawa Tengah selama periode 2010 – 2020 dari 72,73 tahun menjadi 74,37 tahun. Hal ini berarti penduduk Jawa Tengah yang dilahirkan pada tahun 2020 memiliki harapan hidup hingga usia 74 atau 75 tahun.

Tantangan

Penuaan penduduk yang dialami Jawa Tengah, terlebih dalam masa pandemi ini, tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Tantangan penuaan penduduk dalam aspek pendidikan adalah relatif banyak penduduk lanjut usia yang belum mengenyam pendidikan.

Kondisi ini tercermin dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia Jawa Tengah didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Lebih dari separuh penduduk lanjut usia Jawa Tengah tidak tamat SD/ sederajat atau tidak pernah bersekolah. Sementara itu, hanya 35,44 persen penduduk lanjut usia Jawa Tengah yang berpendidikan SD/ sederajat atau SMP/ sederajat, dan 10,24 persen yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas.

Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk lanjut usia Jawa Tengah juga berbanding lurus dengan rendahnya rata-rata lama sekolah. Hasil Susenas Maret 2020 mencatat bahwa rata-rata penduduk lanjut usia Jawa Tengah bersekolah selama 4,4 tahun atau setara kelas 4 SD/ sederajat.

Sementara itu, tantangan penuaan penduduk dalam aspek kesejahteraan adalah kondisi penduduk lanjut usia Jawa Tengah yang relatif mengkhawatirkan secara ekonomi. Kondisi ini di antaranya tercermin dari sisi kelayakan perumahan atau hunian tempat tinggal. Hasil Susenas Maret 2020 mencatat sebesar 66,83 persen penduduk lanjut usia Jawa Tengah bertempat tinggal di rumah layak huni.

Hal ini berarti masih terdapat 3 dari 10 penduduk lanjut usia Jawa Tengah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Potret ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan rumah layak huni bagi penduduk lanjut usia. Bagaimanapun juga, rumah yang layak huni akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi penduduk lanjut usia dalam menapaki masa senja. Kelayakan hunian ini pada akhirnya dapat mendorong penduduk lanjut usia menjadi penduduk yang sehat dan produktif.

Relatif mengkhawatirkannya kondisi penduduk lanjut usia Jawa Tengah juga terlihat dari sisi status ekonomi. Pada dasarnya transisi menuju lanjut usia dapat diartikan sebagai transisi dari masa bekerja menuju masa pensiun. Idealnya, ketika memasuki masa senja, penduduk lanjut usia seharusnya sudah memiliki kemapanan ekonomi sehingga pada saat produktivitas mulai menurun kualitas hidup mereka masih terjaga.

Apabila penduduk lanjut usia masih harus bekerja pada masa tuanya, produktivitas yang dihasilkan tentu relatif lebih rendah dibandingkan penduduk usia kerja yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Hal ini menyebabkan upah yang diperoleh penduduk lanjut usia cenderung kecil. Kondisi tersebut mengakibatkan penduduk lanjut usia cenderung rentan hidup dalam kemiskinan.

Hasil Susenas Maret 2020 menyatakan bahwa mayoritas penduduk lanjut usia Jawa Tengah berada dalam kelompok rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah (45,17 persen). Kondisi ini semakin menguatkan fenomena yang banyak terjadi pada negara berkembang, yakni penuaan penduduk tidak berbanding lurus dengan kemapanan ekonomi yang dimiliki.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Adioetomo (2013) bahwa secara umum penduduk Indonesia mengalami *getting older before getting rich* atau menua sebelum kaya. Sementara itu, penduduk lanjut usia Jawa Tengah yang tinggal dalam kelompok rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas hanya sebesar 18,15 persen atau sekitar 2 dari 10 penduduk lanjut usia.

Aspek Kesehatan

Tantangan lain penuaan penduduk Jawa Tengah adalah aspek kesehatan. Tantangan kesehatan ini tidak lepas dari transisi demografi yang diikuti dengan transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit degeneratif. Potret ini terlihat dari hasil Susenas Maret 2020 yang menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk lanjut usia Jawa Tengah mengalami keluhan kesehatan, baik fisik maupun psikis (49,84 persen).

Sementara itu, persentase penduduk lanjut usia yang mengalami sakit, besarnya hampir mencapai seperempat lansia yang ada di Jawa Tengah (24,67 persen). Sejalan dengan terjadinya transisi epidemiologi, penyakit yang dialami para penduduk lanjut usia merupakan penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia misalnya penyakit jantung, diabetes melitus, stroke, serta gangguan pendengaran dan penglihatan (Kemenkes RI, 2019).

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh penduduk lanjut usia. WHO menyatakan bahwa penduduk lanjut usia merupakan kelompok paling rentan terpapar COVID-19. Kerentanan ini terjadi karena melemahnya daya tahan tubuh serta adanya penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (LIPI, 2020).

Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 21 Januari 2021, terdapat 10,6 persen penduduk lanjut usia Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan persentase kematian mencapai 45,4 persen. Persentase kematian penduduk lanjut usia akibat COVID-19 merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan atau sakit masih relatif besar. Selain itu, penduduk lanjut usia merupakan kelompok yang rentan terpapar COVID-19 dan memiliki resiko kematian akibat COVID-19 yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan jaminan kesehatan bagi penduduk lanjut usia.

Upaya pemenuhan jaminan kesehatan ini sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia 2020 – 2024, yaitu mensinergikan seluruh pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk lanjut usia guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kesehatan penduduk lanjut usia.

Hasil Susenas Maret 2020 mencatat sekitar tiga perempat penduduk lanjut usia Jawa Tengah telah memiliki jaminan kesehatan. Walaupun capaian ini relatif baik, namun masih terdapat 24,64 persen penduduk lanjut usia yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Universal Health Coverage belum sepenuhnya terwujud di Jawa Tengah.

Artinya sistem jaminan kesehatan nasional belum mampu mencakup seluruh penduduk lanjut usia di Jawa Tengah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar seluruh penduduk lanjut usia di Jawa Tengah memiliki jaminan kesehatan mengingat urgensi yang relatif tinggi bagi mereka untuk memiliki jaminan kesehatan tersebut.

Dengan demikian, secara keseluruhan SP2020 membuka mata kita bahwa Jawa Tengah telah memasuki era penuaan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang melindungi penduduk lanjut usia. Kebijakan ini dapat berupa pendampingan atau perawatan oleh tenaga sosial/kesehatan melalui kunjungan ke rumah penduduk lanjut usia (Home Care).

Program Home Care ini khususnya ditujukan bagi penduduk lanjut usia berisiko tinggi, tinggal sendirian, serta mereka yang memiliki ketergantungan sedang atau berat (penyandang disabilitas). Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan keberadaan Posyandu Lansia. Optimalisasi ini dilakukan dengan memperluas cakupan pelayanan.

Posyandu Lansia bukan hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mulai fokus memberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, keterampilan, olahraga, seni budaya, dan pelayanan lain yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mendorong penduduk lanjut usia beraktifitas dan mengembangkan potensi diri. Penduduk lanjut usia, walau mereka menua sebelum kaya, tetap berhak bahagia. Saatnya memberi mereka ruang untuk menggenapkan segala asa.

Persiapan Diri Menuju Lansia Mandiri

Lina Dewi Yunitasari – BPS Kabupaten Jepara
Infojateng.id, 9 November 2021

Kisah viral Bu Trimah belum lama ini yang diduga ditelantarkan dengan diserahkan ke panti jompo oleh anak-anaknya menggegerkan masyarakat. Kisah viral ini menuai beragam respon dari netizen. Terlepas dari kisah tersebut, saat ini banyak orang lanjut usia

(lansia) yang dipandang menjadi 'beban' dalam keluarganya karena faktor kesehatan dan ekonomi.

Lalu, siapakah lansia itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998, Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas, baik pria maupun wanita. Proses seseorang menjadi lansia atau menua adalah alamiah, biasanya dalam proses tersebut disertai dengan penurunan kondisi fisik, biologis, psikologis maupun faktor sosial. Perubahan ini cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Sehingga karena kondisinya tersebut, lansia sering dikategorikan sebagai kelompok rentan.

Persoalan Lansia dan Ageing Population Menjadi Isu Global

Dinamika kependudukan yang terus berkembang menghadapkan dunia pada suatu permasalahan baru, yaitu ageing population atau penuaan penduduk khususnya bagi negara-negara berkembang. Penuaan penduduk adalah suatu fenomena yang terjadi ketika umur median penduduk dari suatu wilayah/negara mengalami peningkatan yang disebabkan oleh bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya fertilitas (United Nations, 2015). Penuaan penduduk digambarkan dengan meningkatkan proporsi lansia terhadap populasi. Proporsi jumlah lansia terhadap populasi global diprediksi akan berlipat ganda dari 11 persen pada 2006 menjadi 22 persen pada 2050. Angka ini menandakan akselerasi penuaan penduduk yang cukup signifikan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Negara-negara maju telah terlebih dahulu menghadapi permasalahan penuaan penduduk disaat negara-negara berkembang seperti Indonesia sedang berada dalam masa bonus demografi pertama (ditandai dengan melimpahnya jumlah penduduk usia produktif). Namun, beberapa tahun kedepan, negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia diprediksi akan segera menghadapi permasalahan penuaan penduduk.

Sekilas Profil Lansia Indonesia

Persentase penduduk lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat selama kurun waktu hampir lima dekade (1971-2020). Jumlah lansia pada tahun 2020 telah mencapai 26 juta orang atau 9,92 persen dari total populasi di Indonesia. Bahkan enam provinsi yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat saat ini memasuki struktur penduduk tua dengan persentase lansianya diatas 10 persen. Diproyeksikan tahun 2045 nanti, sebanyak 1 dari 5 penduduk di Indonesia adalah lansia. Peningkatan jumlah penduduk lansia bukanlah permasalahan sederhana dan berpotensi menimbulkan konsekuensi kompleks serta tantangan baru jika tidak dipersiapkan dengan matang sedini mungkin.

Ibarat dua sisi mata uang, populasi lansia yang cukup besar dapat membawa dampak positif dan negatif. Bisa berdampak positif apabila lansia hidup dengan mandiri, sehat, aktif, dan produktif sehingga tidak menjadi beban keluarga maupun negara, namun akan

berdampak negatif apabila lansia tersebut hidup dalam kondisi ketergantungan penuh pada orang lain atau keluarga, sakit dan tidak produktif.

Dari aspek pendidikan, sebagian besar lansia Indonesia berpendidikan rendah yaitu 32,48 persen tidak tamat SD dan 31,78 persen hanya tamatan SD, bahkan ada 13,96 persen lansia tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali (Susenas BPS, 2020). Dipandang dari sisi kesehatan, hampir separuh lansia Indonesia (48,14 persen) mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Angka kesakitan lansia sebesar 24,35 persen, artinya sekitar 24 dari 100 lansia sakit dan terganggu aktivitas sehari-harinya akibat keluhan kesehatan/sakit tersebut. Kesadaran lansia terhadap keluhan kesehatan yang dideritanya cukup tinggi tercermin dari tindakan pengobatan yang dilakukan oleh lansia. Mayoritas lansia mengobati keluhan kesehatannya, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat jalan ke praktik dokter/bidan, puskesmas, rumah sakit dll mencapai 96,12 persen. Angka tersebut cukup membuat kita lega. Sayangnya, jaminan kesehatan belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lansia. Masih ada 26,41 persen penduduk lansia belum memiliki jaminan kesehatan. Jenis Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh lansia saat ini adalah BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu sebesar 44,59 persen.

Menjadi Lansia Yang Mandiri

Jika kita mampu mengendalikan jumlah kelahiran dengan program KB, persoalan populasi lansia tidak bisa ditekan. Yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan lansia menjadi lansia yang mandiri, sehat, produktif dan berkualitas. Jika ini terwujud, maka bisa dibayangkan berapa banyak biaya pengurusan penduduk usia lanjut yang bisa dihemat pemerintah dan bisa digunakan untuk percepatan ekonomi bangsa. Melihat data-data lansia diatas, tampaknya masih merupakan tugas besar kita bersama untuk mewujudkan lansia yang mandiri dimasa mendatang, sehingga harapan kita untuk memperoleh bonus demografi kedua tidak hanya harapan kosong. Pembinaan-pembinaan diberbagai aspek mutlak dibutuhkan. Dari aspek pendidikan, tingkat partisipasi sekolah harus terus didorong sampai pendidikan tinggi, tidak hanya cukup dipendidikan dasar karena pendidikan berpengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang. Kesempatan belajar bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa ditingkatkan dengan adanya sekolah bebas biaya, program PIP, PKH, subsidi silang, beasiswa dll. Program-program pembangunan kesehatan semakin digalakkan, kemudahan akses fasilitas kesehatan, biaya kesehatan terjangkau dan kepemilikan jaminan kesehatan lansia perlu terus dimaksimalkan sehingga ada rasa “aman” yang lansia rasakan ketika mereka sakit. Edukasi pentingnya menabung dan memiliki asuransi/ jaminan hari tua sangat diperlukan untuk menjamin kebutuhan finansial dimasa tua. Program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan lansia di Indonesia terus didorong, seperti yang terbaru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Strategi Nasional Kelanjutusiaan dengan lima pilar utamanya; program pelayanan dan pemberdayaan lansia seperti ATENSI, SERASI, ASLUT, homecare dll terus

dikembangkan. Penduduk usia muda dan produktif perlu dididik menjadi Generasi Berencana, karena menjadi lansia itu tidak ujug-ujug, bisa dipersiapkan dan direncanakan.

Meraih Mimpi Wujudkan Kota Ramah Lansia

Dinar Tri Utami – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 28 Desember 2021

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Merujuk dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, persentase penduduk lansia Kota Pekalongan tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar 7,95 persen, 8,25 persen, 8,57 persen, 8,9 persen, dan 9,18 persen. Angka ini hampir mendekati 10 persen. Dilansir dari kompas.com, para ahli demografi menjelaskan bahwa suatu Negara atau wilayah dapat dikatakan mengalami fenomena aging population, jika jumlah penduduk berusia lanjut mengalami peningkatan. Peningkatan persentase penduduk lansia tersebut seiring dengan peningkatan angka harapan hidup kota Pekalongan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 73,32; 74,19; 74,25; 74,28; dan 74,38. Lantas apakah dengan meningkatnya penduduk lansia berarti beban tanggungan penduduk usia produktif semakin bertambah?

Diperlukan strategi dan program pemberdayaan lansia menuju pembangunan masa depan. Kualitas hidup lansia perlu diperhatikan. Kelompok lansia di masa yang akan datang diusahakan untuk tetap produktif. Aspek penting terhadap kualitas hidup lansia diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Angka melek huruf lansia di Kota Pekalongan pada tahun 2020 adalah 86,13 persen. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, lansia di Kota Pekalongan pada tahun 2020 terdiri dari 34,13 persen tidak pernah sekolah/tidak tamat SD; 30,86 persen tamat SD/ sederajat; 13,52 persen tamat SMP/ sederajat; dan 21,49 persen tamat SMA/ sederajat ke atas. Paling banyak lansia pada golongan tidak sekolah/tidak tamat SD. Hal ini wajar, mengingat akses pendidikan jaman dahulu tidak seperti sekarang ini.

Sementara itu dari sisi kesehatan, sekitar 48,85 persen Lansia mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2020. Angka kesakitan lansia kota pekalongan pada tahun 2020 adalah sebesar 20,26 persen. Rata-rata lama rawat inap penduduk lansia adalah 5,41 hari. Secara fisik, lansia mengalami pengurangan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena penyakit. Pandemi covid-19 memakan banyak korban, terlebih para lansia yang lebih rentan terkena covid-19. Banyak lansia yang khawatir terhadap situasi ini. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mengejar capaian vaksinasi covid-19 dengan berbagai cara diantaranya dengan mengadakan undian berhadiah bagi seluruh peserta vaksinasi, dan pemberian beras bagi peserta vaksin lansia.

Dari hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) agustus pada tahun 2019 dan 2020, terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk lansia di Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 sebesar 47,18 persen, menurun pada tahun 2020 sebesar

44,77 persen. Persentase penduduk lansia Kota Pekalongan yang bekerja pada tahun 2019 adalah 46,78 persen, dan tahun 2020 sebesar 44,34 persen. Sebesar 65,53 persen lansia berperan sebagai kepala rumah tangga pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa lansia masih mampu produktif bekerja mencari nafkah dan berperan penting dalam rumah tangga. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil sepeda motor dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia yaitu sebesar 50,71 persen di tahun 2019 dan 44,75 persen di tahun 2020. Secara status pekerjaan, status berusaha sendiri paling banyak dilakukan lansia, yaitu sebanyak 40,38 persen di tahun 2019 dan 46,13 persen di tahun 2020. Hal ini berarti lansia bisa mandiri dalam kegiatan ekonomi. Jika dilihat dari jumlah jam kerja, terlihat bahwa lansia Kota Pekalongan masih sangat bersemangat bekerja. Mayoritas jumlah jam kerja lansia di tahun 2019 dan 2020 adalah 35-54 jam. Persentase lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja seluruhnya 35-54 jam pada tahun 2019 adalah sebesar 47,11 persen dan pada tahun 2020 sebesar 35,49 persen.

Dilansir dari kompas.com, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Perpres ini diteken Jokowi pada 14 September 2021. Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang selanjutnya disebut Stranas Kelanjutusiaan adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah terkait kelanjutusiaan dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Stranas tersebut mencakup lima pilar utama. Pilar pertama terkait perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu. Pilar kedua mengenai derajat kesehatan dan kualitas lanjut usia. Pilar ketiga mengenai pembangunan lingkungan ramah lanjut usia. Pilar keempat penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan. Pilar kelima terkait penghormatan dan perlindungan hak lanjut usia. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya kerjasama tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga sektor swasta, peneliti, dan masyarakat, agar berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan lansia.

Sedangkan Kota Ramah lansia itu sendiri, dilansir dari indonesiamahlanisia.org, menurut WHO ada 8 dimensi terkait kota ramah lansia, antara lain gedung dan ruang terbuka, transportasi, perumahan, partisipasi sosial, penghormatan dan keterlibatan sosial, partisipasi sipil dan pekerjaan, komunikasi dan informasi, serta dukungan masyarakat dan kesehatan.

Mengingat hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memberikan perhatian kepada lansia dalam rencana pembangunan ke depan untuk mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota ramah lansia. Dilansir dari <http://pekalongankota.go.id>, pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan sudah melakukan pembangunan rumah lansia, sebagai titik awal menuju kota ramah lansia. Selanjutnya, perlu pengoptimalan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Posyandu Lansia bulanan, program pemberdayaan/pengembangan kegiatan ekonomi lansia dengan memberi ruang agar lansia dapat berkiprah dan menjadi lansia tangguh, serta sistem informasi lansia untuk mempermudah pelayanan terhadap lansia dan perencanaan pembangunan kota ramah lansia.

Mewujudkan Lansia Hebat Kota Semarang

Retno Dian Ika Wati – BPS Kota Semarang

Jateng Daily, 29 Mei 2021

Keberhasilan pembangunan salah satunya tercermin dari tingkat kesejahteraan yang semakin membaik, termasuk kesehatan dan Pendidikan dan hal tersebut berdampak pada bertambahnya usia harapan hidup penduduk. Konsekuensi keadaan tersebut adalah bertambahnya penduduk lanjut usia (lansia). Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas.

Dari seluruh penduduk di Kota Semarang, sekitar 9 persen adalah lansia dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun (proyeksi penduduk Kota Semarang). Keliru jika menganggap lansia adalah beban bagi negara. Jumlah lansia yang semakin membesar dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial jika mereka tetap Tangguh, sehat dan produktif.

Penduduk senior ini memiliki kelebihan dalam pengetahuan, sifat kearifannya dan terutama pengalaman yang hampir tidak dimiliki oleh generasi muda.

Berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, lansia di kota semarang didominasi oleh lansia muda (60-69 tahun) yang mencapai 77,22 persen, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70-79 tahun) sekitar 20,01persen dan lansia tua (80 tahun keatas) sekitar 2.77 persen.

Sedangkan jika dipilah menurut jenis kelamin, persentase lansia perempuan mencapai 54 persen dan lansia laki laki sekitar 46 persen. Data Susenas mencatat angka kesakitan penduduk lansia di Kota Semarang mencapai 28,7 persen pada tahun 2020, artinya terdapat 28 hingga 29 dari 100 lansia yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari harinya.

Semakin bertambah usia maka semakin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu masalah yang sangat mendasar adalah masalah kesehatan akibat proses degenerative. Oleh karena diperlukan strategi pembangunan bidang kesehatan yang promotif dan preventif dengan dukungan pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas, termasuk dalam hal kesehatan Lansia. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta Program Keluarga Sehat adalah beberapa strategi unggulan yang sedang dijalankan Kemenkes.

Dari sisi Pendidikan, masih ada sekitar 7,1 persen lansia yang tidak dapat membaca dan menulis dan sekitar 29,5 persen lansia yang tidak memiliki ijazah Pendidikan. Meskipun begitu lansia lulusan perguruan tinggi ada sekitar 8,2 persen. Riset membuktikan, lansia yang memiliki pendidikan tinggi jarang mengalami kepikunan, sementara yang berpendidikan rendah sering mengalami kepikunan atau demensia, karena pikun atau demensia ini bisa dicegah sedini mungkin dengan terus mengasah kemampuan otak atau kemampuan berpikir.

Dalam rangka menciptakan lansia yang tangguh, sehat dan produktif, berbagai kementerian dan Lembaga ambil bagian dalam pemberdayaan lansia. Kementerian kesehatan memiliki program untuk meningkatkan status kesehatan para lanjut usia dengan peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar, khususnya Puskesmas dan kelompok Lanjut Usia melalui konsep Puskesmas Santun Lanjut Usia.

BKKBN memiliki program pemberdayaan lansia, salah satunya adalah program Bina Keluarga Lansia (BKL). BKL merupakan kelompok kegiatan yang sasaran langsungnya adalah para lansia dan sasaran tidak langsungnya adalah keluarga yang mempunyai lansia. Tujuan dari BKL adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. BKL diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan pemberdayaan lansia yang didukung oleh masyarakat dan keluar yang memiliki lansia.

Kementerian Sosial hadir untuk kesejahteraan sosial lanjut usia dengan kebijakan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Arah kebijakan ini dalam bentuk penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan perlindungan lansia. ATENSI berbasis residensial yaitu perawatan lansia melalui Balai Rehsos, Panti Rehsos atau LKS Lanjut Usia. Layanan ini diberikan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga, ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga tidak mampu mengurus lansia karena permasalahan ekonomi.

Masih banyak lagi program pemberdayaan lansia yang dimiliki oleh kementerian/ Lembaga. Hal yang paling diperlukan adalah upaya sinergis dan strategis yang pro lansia dalam memberdayakan mereka agar lebih sehat, produktif, kreatif, mandiri, dan sejahtera.

Kegiatan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi kreatif juga sangat diperlukan untuk merangsang produktifitas ekonomi lansia. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020 di Kota Semarang menunjukkan sekitar 36,4 persen lansia masih aktif bekerja dan 3,4 persen lansia masih mencari pekerjaan.

Hal ini membuktikan bahwa lansia merupakan penduduk yang potensial dan berdaya guna, lansia selain sebagai objek pembangunan, juga merupakan sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan khususnya kesehatan keluarga.

Menjadi tua itu pasti tetapi menjadi orang yang selalu sehat, produktif dan bahagia adalah pilihan. Tugas kita bersama adalah menjadikan lansia sejahtera lahir batin. Peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lansia dapat menjadi daya ungkit dalam kesejahteraan bangsa dan negara.

Bagian 9

Pembangunan Dalam Data

Diana Dwi Susanti

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan harus disusun berdasarkan data-data. Data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta dinamakan informasi (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004).

Bagi banyak orang, data hanyalah angin lalu yang hanya merepotkan untuk mendapatkan dan mengelolanya. Tapi jauh diatas itu semua, data adalah modal mutlak keberhasilan suatu strategi. Data ibarat kompas yang memandu dalam pelaksanaan pembangunan.

Peran Data

Peran data dan informasi dalam era pembangunan sangat strategis. Data dan informasi menurut perannya dibagi menjadi data dasar, data sektoral dan data khusus. Data dasar ditujukan untuk keperluan yang bersifat lebih luas baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Data yang disajikan memiliki kandungan lintas sektoral berskala makro dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

Data Sektoral perannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyedia data dan informasinya adalah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah dan Lembaga Negara.

Data khusus merupakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan khusus dunia usaha diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan atau unsur masyarakat.

Peran Masyarakat Membangun Data

Data sebagai pondasi pembangunan telah memiliki perannya masing-masing dengan penanggung jawab. Namun tidak kalah penting dari suatu data adalah peran masyarakat dalam memberikan data kepada lembaga penghasil data.

Seberapa pun bagus metodologi pengumpulan data tanpa peran masyarakat dalam merespon dalam proses pengumpulan data, maka data itu akan menjadi sampah. Masyarakat yang apatis terhadap proses pengumpulan menyebabkan data tidak bermanfaat, sia-sia dan akan menimbulkan kesalahan pembangunan karena tidak sesuai dengan kondisi di dalam masyarakat.

Masyarakat merupakan penyedia sumber data utama dimana informasi yang dikumpulkan sangat berguna bagi instansi pemerintah maupun konsumen publik. Kesadaran

masyarakat akan pentingnya sebuah data dan informasi bukan sekedar suatu keharusan atau perintah. Namun, kejujuran sebagai masyarakat dalam memberikan data adalah sebuah andil yang sangat berarti dalam pembangunan berkelanjutan. Sebuah tanggung jawab yang akan melahirkan sebuah angka. Peran serta masyarakat dalam pemenuhan data yang berkualitas adalah salah satu wujud pola pikir bangsa yang maju.

Merajut Asa Melalui Satu Data Indonesia

Danisworo – BPS Provinsi Jawa Tengah
harianjateng.com, 7 Mei 2021

Banyumas, Harianjateng.com- “Data adalah minyak baru”, terminologi masa depan yang mula-mula disampaikan oleh Clive Humby, matematikawan berkebangsaan Inggris, di periode awal tahun 2006 yang kemudian di berbagai kesempatan banyak dikutip tokoh-tokoh dunia di antaranya juga oleh orang nomor satu negeri ini, Presiden Joko Widodo, pada Pidato Kenegaraan di depan parlemen tanggal 16 Agustus 2019 yang menunjukkan kekuatan data sebagai suatu kekayaan baru sebuah bangsa. Bagaimana strategisnya data, yang terdefinisi sebagai sekumpulan informasi berupa teks, gambar, diagram dan multimedia baik kuantitatif maupun kualitatif, akan bisa bermakna pada saat diperoleh, diolah, dianalisis dan disajikan menurut kegunaan masing-masing dalam mendukung proses pembangunan. Kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan sangat dipengaruhi ketersediaan dan interpretasi dari data yang ada.

Permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan ketersediaan data, diibaratkan dengan sebuah ungkapan bahwa data itu ada dimana-mana, tetapi ketika dicari kita tidak menemukannya dimana-mana. Adalah ironi ketika pengguna data kesulitan mendapatkan informasi yang akurat tentang sebuah data di tengah semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini. Tidak adanya standar yang jelas tentang konsep definisi yang digunakan pada saat pengumpulan data, proses pengolahan dan penyajian yang ala kadarnya, bisa menjadikan kualitas informasi dalam sebuah data menjadi menurun. Terkadang pula muncul narasi yang sifatnya manipulatif terhadap sebuah data yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sebagian pihak tertentu yang notabene mendiskreditkan pihak lain tanpa menggunakan aturan yang jelas.

Salah satu solusi untuk mengatasi carut marutnya terkait data, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, bisa dibagi pakaikan antar instansi pusat maupun daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk. Dari sini diharapkan muncul aturan bagaimana suatu data itu dikemas, proses yang mengikuti sampai data disajikan, metodologi suatu nilai itu dihitung dan diinterpretasikan secara tepat melalui mekanisme metadata statistik. Sedangkan dalam aturan interoperabilitas membahas mengenai aturan bagi pakai antar sistem elektronik secara terintegrasi, dalam lingkup beberapa instansi produsen data sesuai tugas dan kewenangannya yang dapat memastikan keandalan, akuntabilitas, serta keamanan suatu data untuk dapat diakses.

Beberapa lembaga pemerintah terkait ditunjuk untuk mengawal penerapan aturan tentang Satu Data Indonesia, yang berkewajiban untuk memberi konsep definisi yang jelas, tahapan yang harus dilalui, serta menyetujui alur hingga suatu data dapat digunakan tanpa ada kendala termasuk menghindari duplikasi informasi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data. Proses ini yang masih membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang, dimana kondisi sekarang tingkat kesadaran para penghasil data yang cenderung masih mengedepankan ego sektoral dan tanpa menggunakan kaidah baku bagaimana data itu dikumpulkan. Dalam peraturan yang sudah disahkan ini, ada instansi yang ditugaskan sebagai pembina data baik di level pusat maupun daerah, demikian pula untuk instansi yang diposisikan sebagai wali data dalam kaitan proses approval sebuah data bisa dihasilkan dengan aturan yang terstandarisasi.

Tidak bisa dipungkiri masih banyak kendala lain yang harus dihadapi untuk tercapainya tujuan Satu Data Indonesia ini, disamping proses sosialisasi yang masih terus berjalan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkup instansi yang diberikan tanggung jawab sebagai pembina data maupun sebagai wali data. Keterbatasan SDM yang memenuhi persyaratan teknis salah satunya disebabkan masih minimnya bimbingan teknis tentang Satu Data Indonesia, apalagi melihat cakupannya yang bukan hanya di level pusat, tetapi juga sampai tingkat daerah dengan berbagai macam kompleksitas geografis dan birokrasi masing-masing didalamnya. Tugas bagian ini cukup berat, selain mengawal standar data, mereka juga diharapkan bisa berbagi konsep metodologi pengumpulan data yang benar serta melakukan pendampingan pada para penghasil data, di tengah minimnya tenaga dan waktu disamping tugas rutin pekerjaan secara kelembagaan.

Kemudian kendala ketersediaan infrastruktur yang mendukung berjalannya Satu Data Indonesia juga menjadi salah satu sebab proses sosialisasi kegiatan ini berjalan lambat. Untuk mendapatkan data yang terintegrasi dan bisa diakses semua kalangan serta dijamin keamanannya dibutuhkan investasi infrastruktur yang tidak sedikit, tidak hanya dari sisi pengumpulan datanya, tetapi sampai dengan di ujungnya yaitu penyajian data. Selain itu yang tidak kalah menghambat proses penyebaran informasi tentang Satu Data Indonesia ini adalah kondisi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum jelas kapan bertemu titik akhirnya, yang mengharuskan ada sebuah kondisi adaptasi baru di dalamnya.

Meskipun tantangan dan hambatan sedemikian besar yang dihadapi, proses pelaksanaan Satu Data Indonesia harus tetap didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahapan yang sedang berjalan hendaknya dijaga agar tetap dalam koridor yang digariskan dalam aturan yang sudah dibuat. Banyak hal bisa kita nantikan hasilnya jika proses ini berjalan sebagaimana mestinya, bukan hanya buat kalangan pemerintah dan swasta saja yang menikmati berbagai informasi yang saling terintegrasi, tetapi juga masyarakat luas bisa mendapatkan data-data yang selama ini masih 'tersembunyi'. Jadikan sumber kekayaan baru ini menjadi harta karun yang bisa meningkatkan kualitas diri bangsa kita.

Satu Data Indonesia, Sebuah Niscaya

**Laelatul Qomariyah – BPS Kabupaten Sukoharjo
Malut Pos, 28 September 2021**

Data, sesuatu yang tampak sepele namun rumit. Data bukanlah sekedar deretan angka dan bilangan. Pun data tak sekedar menunjukkan perkembangan, kondisi atau penghias laporan para pemangku kepentingan. Sudah saatnya dan sudah selayaknya data diperlakukan sebagaimana mestinya. Dari datalah, kebijakan besar suatu bangsa berawal. Dari datalah kucuran dana disalurkan. Lalu, bagaimana kondisi data kita sekarang?

Kondisi Saat ini

Persoalan carut marut data sesungguhnya sudah ada sejak jaman baheula. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki data berdasarkan kebutuhan, kebijakan dan konsep definisi masing-masing. Seringkali kebijakan yang diambil akhirnya menjadi tidak sinkron dikarenakan kebingungan dalam penggunaan data. Beberapa data yang sama memiliki nilai yang berbeda antar pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki konsep definisi yang berbeda, karena memang tujuan pengumpulan dan penggunaan data yang berbeda. Selama ini, segala perbedaan tersebut dimaklumi, dengan syarat menyebutkan sumber datanya. Contohnya data penduduk. Selama ini, data penduduk dominan dihasilkan oleh Kementerian dalam negeri dan Badan Pusat Statistik. Keduanya memiliki angka penduduk yang berbeda karena konsep dan tujuan pendataan yang berbeda. Kementerian dalam negeri menggunakan konsep *de jure* (penduduk berdasarkan data administratif), sementara BPS menggunakan konsep *de facto* (penduduk berdasarkan domisili). Tentu saja, keduanya akan berbeda hasilnya. Namun secara agregat nasional, tidak akan banyak berbeda. Ini baru satu data saja, masih banyak data lain yang beda sumber beda angka, misalnya data luas wilayah, data jarak dan beragam data lainnya.

Pun, data yang sama terkadang dikumpulkan oleh instansi yang berbeda dalam rentang waktu yang berdekatan. Masing-masing dengan pemahaman yang berbeda meski judul datanya sama. Katakanlah yang baru-baru ini dilakukan, pendataan potensi desa oleh Badan Pusat Statistik dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Keduanya dilaksanakan hampir bersamaan di rentang Maret hingga Juni 2021. Dengan objek yang sama dan tujuan yang hampir mirip yaitu untuk memotret perkembangan desa. Kemendes menghasilkan IDM (Indeks Desa Membangun) sementara BPS menghasilkan IPD (Indeks Pembangunan Desa). Item-item pertanyaan di dalamnya pun nyaris sama, penulis perkirakan 90 persen sama. Awalnya, pendataan potensi desa dilakukan oleh BPS sebanyak 3 kali dalam 10 tahun sebagai pendataan awal sebelum sensus, di tahun 2008 untuk menyongsong Sensus Penduduk 2010, tahun 2011 untuk menyongsong Sensus Pertanian 2013 dan tahun 2014 untuk menyongsong Sensus Ekonomi 2016. Dikarenakan tuntutan kebutuhan data yang semakin tinggi, maka sejak 2018 data Podes dikumpulkan setiap tahun. IDM awalnya menggunakan data podes 2014 untuk penghitungannya. Namun sejak 2018 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan pendataan IDM sendiri dengan mengerahkan para pendamping dan relawan desa. Padahal, pertanyaan dalam kedua kuesioner tersebut nyaris sama. Bisa dibayangkan berapa rupiah yang akhirnya keluar untuk pendataan yang

sama di instansi yang berbeda padahal tujuannya sama yaitu memotret perkembangan desa.

Perlunya Satu Data Indonesia

Mengintip kasus-kasus di atas, sudah saatnya semua pemangku kepentingan duduk bersama menyatukan visi dan orientasi. Tak lagi berfikir tentang proyek atau UUD (ujung-ujungnya duit). Menurut penulis, pengumpulan data yang sama di waktu yang sama dengan objek yang sama tentu sangat mubadzir. Mubadzir dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Lantas, apa yang harus dilakukan?

BPS bersama Bappenas sesungguhnya sudah mulai merintis upaya mewujudkan prinsip satu data. Satu langkah awal yang sudah dilakukan adalah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019. Di dalam peraturan tersebut mencakup 8 bab dan 43 pasal. Prinsip satu data Indonesia adalah memastikan data yang diproduksi oleh produsen data berkualitas (sesuai standar, metadata baku dari Pembina data serta dapat dimanfaatkan bersama). Harapannya kondisi data yang saat ini cenderung menyebar, dipegang secara personal dan untuk mengaksesnya diperlukan MOU atau PKS, akan dapat diminimalisir dan lebih transparan. Wujud nyata dari perpres ini adalah tersedianya data berkualitas dan mudah diakses melalui satu portal yaitu portal satu data Indonesia. Jika portal satu data Indonesia sudah terwujud dan ketersediaan datanya sesuai harapan (tersedia, terupdate dan terjaga kualitasnya), maka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional akan tercapai. Akhirnya, upaya mewujudkan masyarakat makmur sejahtera akan lebih efektif dan efisien.

Dalam perpres tersebut, ada tiga komponen pokok yang terlibat dalam mewujudkan SDI, yaitu pembina data, wali data dan produsen data. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Ketiganya disatukan dalam forum satu data Indonesia. Di tingkat pusat, forum SDI dikoordinatori oleh pejabat eselon I Bappenas, dengan Pembina data adalah BPS, BIG dan Kemenkeu. Sementara wali data adalah unit pengelola data K/L. Produsen data adalah semua pihak yang menghasilkan data dari tiap unit kerja di kementerian terkait. Sementara di daerah, forum SDI dikomandoi oleh Kepala Bappeda, pembina data adalah BPS dan BIG, wali data adalah Dinas Komunikasi dan Informatika serta didukung oleh unit kerja pengelola data di masing-masing OPD. Saat ini tindak lanjut atas perpres SDI sudah sampai pada tahap sosialisasi dan pembentukan forum SDI.

Praktik nyata lain yang sudah dilakukan adalah diwujudkan satu data kependudukan Indonesia. Sensus Penduduk 2020 lalu, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan koordinasi yang apik dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini perlu diapresiasi, mengingat sepanjang sejarah sensus penduduk, baru kali ini dilakukan metode kombinasi dengan memanfaatkan data administratif catatan sipil. Hasil sensus penduduk 2020 menjadi langkah awal mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

Beberapa instansi dan kementerian sesungguhnya sudah memulai upaya mewujudkan satu data ini. Contohnya Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang sudah memiliki dapodik (data satuan pokok pendidikan). Di dalamnya tersimpan lengkap segala hal terkait peserta didik, tenaga kependidikan dan sarana pendidikan. Pun kementerian

kesehatan, pertanian dan masing-masing K/L terkait memiliki dashboard data masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah menyatukan segala jenis data tadi dalam satu portal raksasa yang memuat seluruh data Indonesia dengan konsep yang disepakati. Data-data yang menjadi domain sektoral seyogyanya ditangani dan dibuat standarnya oleh kementerian terkait. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih data ataupun kebingungan data. Tentu harapan ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Butuh upaya keras, kerjasama yang intens dan waktu yang panjang. Namun, bukan berarti mustahil, bukan? Semoga Satu Data Indonesia segera terwujud. Semoga.

Data Penduduk Purworejo dan Jawa Tengah dalam Pandangan Nasional

Musliman – BPS Kabupaten Kebumen Jawa Pos Radar Semarang, 18 April 2021

Hasil Sensus Penduduk 2020 yang resmi dipublikasikan secara serentak oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, memberikan banyak informasi penting bagi masyarakat. Terkhusus bagi masyarakat kabupaten Purworejo dan Jawa Tengah. Tidak hanya data tentang jumlah penduduk, akan tetapi banyak data-data lainnya yang sangat informatif. Diantaranya adalah data tentang rasio jenis kelamin, persentase penduduk usia produktif, persentase penduduk lansia, serta laju pertumbuhan penduduk yang sangat menarik untuk diulas lebih dalam.

Melihat jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah per September 2020 menurut data Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 36.516.035 jiwa yang terdiri dari 18.362.143 penduduk laki-laki dan 18.153.892 penduduk perempuan. Menempatkan Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk nasional, jumlah penduduk Jawa Tengah sekitar 13,51%.

Rasio jenis kelamin Provinsi Jawa Tengah hasil sensus penduduk 2020 adalah 101,15 menempatkan Jawa Tengah pada urutan ke 27 dari 34 Provinsi dengan rasio jenis kelamin terbesar di Indonesia. Rasio Jenis Kelamin Jawa Tengah juga lebih rendah dari rasio jenis kelamin nasional yang sebesar 102,34.

Adapun persentase penduduk usia produktif Jawa Tengah hasil sensus penduduk 2020 sebesar 70,60%. Persentase ini masih masuk pada kategori bonus demografi. Akan tetapi, persentase di atas masih lebih rendah sedikit daripada persentase penduduk usia produktif nasional hasil sensus penduduk 2020 yang sebesar 70,72%. Sedangkan persentase penduduk lansia Jawa Tengah menurut sensus penduduk 2020 sebesar 12,15%, naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 10,34% dan juga lebih tinggi dari persentase penduduk lansia nasional hasil sensus penduduk 2020 yang berada pada angka 9,78%.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun Jawa Tengah pada selang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,17% atau lebih lambat dari laju pertumbuhan penduduk nasional yang sebesar 1,25%. Akan tetapi, laju pertumbuhan penduduk per

tahun Jawa Tengah di atas, lebih cepat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun pada periode 2000-2010 untuk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,37%.

Sedangkan untuk kabupaten Purworejo sendiri, Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo per September 2020 menurut data Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 769 880 jiwa yang terdiri dari 385 266 penduduk laki-laki dan 384 614 penduduk perempuan. Dari data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purworejo hanya sekitar 2,1 % penduduk Jawa Tengah atau sekitar 0,28% penduduk Indonesia. Hal ini menempatkan Kabupaten Purworejo pada urutan ke 29 dari 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah atau urutan ke 7 dari 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Jawa Tengah.

Rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Purworejo adalah 100,17. Angka ini lebih rendah dibandingkan rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Jawa Tengah juga lebih rendah dari rasio jenis kelamin penduduk nasional.

Menilai Pembangunan Desa Melalui Angka IPD

Wahyu Triatmo – BPS Kabupaten Batang

Radar Pekalongan, 1 September 2021

Presiden mengamanatkan bahwa di tahun 2019 pembangunan desa harus dapat mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa. Amanat ini sekaligus sebagai implementasi Nawacita yang ketiga mengenai membangun bangsa dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bulan Juli Tahun 2021 Badan Pusat Statistik melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) lengkap sebagai salah satu tugas BPS untuk menyediakan data di level desa, baik mulai dari ketersediaan infrastruktur sampai SDM yang dimiliki oleh desa.

Pendataan Podes lengkap yang dilaksanakan terakhir pada tahun 2018, dan setelah itu setiap tahunnya dilakukan Updating Podes, dan baru dilaksanakan secara lengkap kembali tahun 2021 ini. Oleh karena itu data yang bisa digunakan adalah berasal dari Podes 2018. Salah satu hasil yang akan diperoleh dari pendataan Podes adalah data Indeks Pembangunan Desa (IPD). IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia.

Indeks yang menggunakan “Desa” sebagai unit analisis ini mencakup 5 (lima) dimensi yang saling melengkapi, adalah pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Kelima dimensi tersebut disusun dari 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. IPD merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat pembangunan desa yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :

1. Kategori Desa Mandiri, yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, Nilai IPD > 75;
2. Kategori Desa Berkembang, yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai, $50 < \text{Nilai IPD} \leq 75$;
3. Kategori Desa Tertinggal, yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim, Nilai IPD ≤ 50 ;

Nilai IPD semakin mendekati 100 maka tingkat perkembangan desanya semakin baik, begitupun sebaliknya.

Nilai IPD Nasional, Jawa Tengah, Batang dan Kecamatan Tulis Tahun 2014 dan 2018

Nilai IPD	Nasional	Jawa Tengah	Batang	Kecamatan Tulis
Tahun 2018	66,90	67,37	66,25	68,11
Tahun 2014	65,76	64,83	63,09	62,48

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Kita coba menyoroti angka IPD yang ada di Kecamatan Tulis seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Dinamika Nilai IPD di Kecamatan Tulis Tahun 2014 dan 2018

NO	DESA	2014	2018
1.	SEMBOJO	58,38	59,70
2.	MANGGIS	52,71	61,36
3.	SIBERUK	57,75	62,04
4.	CLUWUK	58,21	62,65
5.	JOLOSEKTI	60,10	66,01
6.	JRAKAHPAYUNG	65,15	66,97
7.	WRINGINGINTUNG	59,05	67,16
8.	PONOWARENG	62,90	67,49
9.	KEBUMEN	59,17	67,65
10.	POSONG	52,83	67,74
11.	KEDUNGSEGOG	67,87	67,85
12.	TULIS	68,11	70,12
13.	KALIBOYO	70,22	70,81

14.	SIMBANGJATI	59,70	70,88
15.	BEJI	70,87	72,45
16.	SIMBANGDESA	69,99	74,13
17.	KENCONOREJO	69,15	82,85

Dari tabel diatas maka di Kecamatan Tulis, yang termasuk Kategori Desa Mandiri ada 1 desa dan Desa Berkembang ada 16 desa sedang kategori Desa tertinggal tidak ada. Bila kita lihat dari tabel diatas kita ambil contoh misalnya Desa Kenconorejo yang pada tahun 2014 nilai IPD nya sebesar 69,15 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 82,85. Ini berarti secara umum desa Kenconorejo mengalami kenaikan nilai di berbagai dimensi.

Pembangunan desa menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh setiap pihak terutama Pemerintah Daerah. Koordinasi dari level bawah dalam hal ini pihak desa sampai level atas Pemerintah Daerah merupakan kunci agar tercapai keberhasilan. Pertemuan dan rapat serta evaluasi harus menjadi agenda utama, namun agar tujuan utama peningkatan pembangunan terlaksana maka secara berkala dilakukan monitoring dan pendampingan langsung di lapangan atau di lokasi agar pembangunan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

Menggali Potensi Desa di Indonesia

**Irma Nur Afifah– BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 19 Juni 2021**

Desa seringkali memberikan gambaran akan suatu ruang nan sejuk dengan panorama pemandangan yang indah. Terbayang sawah membentang, aliran sungai yang jernih dengan keragaman hayatinya, serta kultur tradisional terasa masih kental disana. Terlepas dari itu semua seiring berjalannya waktu, bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan informasi dan teknologi yang cepat, menyebabkan dibutuhkan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Pola ruang desa pun perlahan mulai mengalami pergeseran, hingga perlu masterplan guna membangun desa menjadi lebih mandiri dan modern.

Pembangunan desa sejatinya telah mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua peraturan ini menjadi dasar pentingnya pembangunan Indonesia yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling rendah.

Potensi desa perlu dikaji dan digali lebih dalam serta dikembangkan menjadi desa yang maju dan mandiri. Mulai dari kondisi alamnya, sosial budaya, perekonomian, pariwisata dsb. Untuk mengungkap itu semua diperlukan pengumpulan data yang mencakup semua dimensi, guna keperluan perencanaan tata ruang desa.

PENDATAAN POTENSI DESA

Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi penghimpun data, kembali menggelar pendataan Potensi Desa (PODES) 2021, yang merupakan pendataan lengkap kewilayahan satu-satunya sebagai updating data desa terkini, dengan sistem yang modern dibanding PODES sebelumnya, yaitu adanya predefine geotagging dan infrastruktur pada program Computer Assisted Personal Interview (CAPI). Latar belakang kegiatan ini yaitu, kebutuhan data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil semakin beragam dan harus dipenuhi untuk perencanaan pembangunan. Dengan data valid maka pengukuran perkembangan desa secara makro dapat terukur. PODES menyediakan data potensi sosial ekonomi, sarana dan prasana wilayah kabupaten/kota, kecamatan hingga level desa.

Selain itu data hasil pendataan PODES juga mampu menggambarkan potensi yang dimiliki wilayah tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yaitu tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah yang tercakup dalam kuesioner PODES. Data PODES juga sangat strategis karena menyediakan data pokok penyusunan Small Area Estimation (SAE) dan menyediakan data yang mendukung perencanaan Sensus Pertanian 2023. Selain itu, PODES juga merupakan sarana updating untuk MFD, urban rural, dan tipologi desa lainnya (BPS,2021).

INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA

Pendataan PODES oleh BPS menghasilkan indikator penting bagi pembangunan desa khususnya, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan/perkembangan desa pada suatu waktu, berguna untuk evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan desa (BPS,2021). Angka IPD digunakan Bappenas untuk mengetahui perkembangan desa dan menyusun perencanaan pembangunan.

Indikator lainnya Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar, sehingga menjadi data sentral dalam rangka pengalokasian dana desa yang digelontorkan pemerintah. Angka IKG dimanfaatkan oleh Kemenkeu sebagai input formulasi besaran dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dapat dikatakan bahwa IPD dan IKG sangat bermanfaat bagi pemerintah guna menyusun masterplan pembangunan hingga level desa.

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan informasi teknologi, telah membawa arus perubahan komunikasi sangat cepat. Kebutuhan sarana IT seolah menjadi wajib di setiap lini area administratif hingga level desa. Pandemi COVID-19 yang melanda berdampak semakin dibutuhkannya sarana IT yang mencukupi untuk terlaksananya proses edukasi di dunia Pendidikan misalnya.

Berbagai upaya Pemerintah untuk desa sejatinya telah mendapat perhatian serius, diantaranya program internet masuk desa yang dikelola oleh Dinas Kominfo, pengembangan desa melalui program desa wisata untuk pemulihan ekonomi yang pelaksanaannya berkolaborasi antara kemendes dan kemenparekraf. Program pengembangan desa digital guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat desa dapat memberikan manfaat ekonomi, contohnya online shopping telah merambah hingga ke desa dsb.

Akhirnya data-data yang digali dari pendataan PODES2021 mencakup dimensi sosial, ekonomi, infrastruktur, wisata dsb, akan segera menghasilkan data terkini. Pendataan yang dilaksanakan serentak pada Juni 2021, hasilnya kelak dapat memberikan gambaran keberhasilan pembangunan desa di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Refleksi Hari Anti Korupsi, Masyarakat Semakin Anti Korupsi

**Hayu Wuranti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Times Indonesia, 8 Desember 2021**

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus korupsi yang menjadi trending topik di tahun 2021 antara lain kasus mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, yang dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan dikenai pidana pengganti sebesar Rp 14,59 miliar karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19. Selain korupsi bansos Covid-19, ada beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Internasional oleh berbagai negara di belahan dunia. Hari Anti Korupsi dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional.

Di Indonesia, guna mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

BPS telah melaksanakan sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016) Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala

kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), gratifikasi (gratification), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman merupakan pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Nilai IPAK berada pada skala antara 0 sampai dengan 5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Nilai IPAK Semakin Meningkat, Masyarakat Semakin Anti Korupsi

Walaupun nilai IPAK di bawah target RPJMN dimana target IPAK 2021 adalah 4,03, namun nilainya cenderung mengalami kenaikan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012 nilai IPAK tercatat sebesar 3,55 meningkat hingga tahun 2020 menjadi 3,88. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia semakin memiliki sikap anti korupsi. Jika dilihat dari dimensi penyusunnya, nilai Indeks Persepsi 2021 sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90) sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020 (3,91).

Lebih dalam lagi, nilai IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat pedesaan (3,83). Hal ini mengandung arti masyarakat perkotaan cenderung lebih anti korupsi dibandingkan masyarakat pedesaan. Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2021, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99. Sedangkan dari sisi kelompok umur, masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40–59 tahun sedikit lebih anti korupsi. Tahun 2021, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,89; usia 40–59 tahun sebesar 3,88; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,87.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan. Masyarakat seharusnya berperan serta aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Puaskah dengan Pelayanan Publik Pemerintah

Ardita Mukti Wita Lestari – BPS Kabupaten Jepara
Lingkar Jateng, 30 Agustus 2020

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik buruknya kualitas layanan berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik yang buruk akan membentuk citra negatif bagi aparatur pemerintah. Mindset masyarakat tentang pelayanan aparatur pemerintah adalah pelayanan yang lambat dan terlalu rumitnya prosedur pelayanan. Jika ingin mendapatkan pelayanan yang optimal, masyarakat harus melakukan balas jasa (feedback) dengan membayar dalam jumlah tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah secara langsung.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik melalui penyediaan data dan informasi statistik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. BPS merasa perlu menyelenggarakan suatu survei sebagai bahan evaluasi guna mengetahui kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS. Survei ini disebut dengan Survei Kebutuhan Data (SKD). Cakupan responden SKD adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit (Pelayanan Statistik Terpadu) PST BPS khususnya PST BPS Kabupaten Jepara pada kurun waktu 1 Januari 2020 sampai periode akhir pengumpulan data, baik yang datang langsung ke unit PST BPS atau melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, layanan statistik online, Sirusa, Romantik online, telepon, faksimili, e-mail, surat, maupun media layanan lainnya.

Terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan terhadap pelayana yaitu responsiveness (daya tanggap), assurances (jaminan), tangible (fisik), empathy (empati), dan reliability (keandalan). Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS Kabupaten Jepara adalah Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Aspek yang dihitung dengan menggunakan IKK adalah kualitas layanan. Indeks ini diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2020 untuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Jepara memperoleh nilai IKK sebesar 84,12. Hal ini menunjukkan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh PST Kabupaten Jepara termasuk kedalam kategori

baik. Selain IKK, SKD 2020 juga menghasilkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Nilai IPAK hasil SKD 2020 untuk PST BPS Kabupaten Jepara ialah 88,34. Nilai ini menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di BPS Kabupaten Jepara.

Walaupun nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Jepara sudah termasuk dalam kategori baik, BPS Kabupaten Jepara tetap membutuhkan sumbangsih saran dan kritik agar kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Perbaikan pelayanan publik harus dilaksanakan oleh semua instansi/lembaga secara berkelanjutan. Pelayanan publik yang semakin baik, akan semakin mempermudah segala urusan berbagai pihak.

<https://jateng.bps.go.id>

“Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender. That is strength.”

~Mahatma Gandhi~

Bagian 10

Air Sumber Kehidupan

Diana Dwi Susanti

Air adalah sumber kehidupan. Tubuh manusia saja terdiri dari 70% air, hal itu menjadikan air sebagai unsur paling dominan yang membentuk tubuh kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi hal yang diperebutkan dan dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup di dunia ini membutuhkan ketersediaan air bersih.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang pesat memberikan tekanan yang sangat besar pada sumber air tawar terus berkurang karena pencemaran dari pembuangan kotoran domestik, limbah industri, limbah padat dan aliran dari limbah pertanian ke sungai-sungai dan danau-danau. Suhu tinggi akibat perubahan iklim dan curah hujan yang tinggi akan memperburuk kelangkaan air. Patut menjadi perhatian bersama bahwa kelangkaan air atau air bersih juga menjadi perhatian dunia yang dirayakan setiap tahun oleh masyarakat dunia yaitu Hari Air Sedunia suatu gerakan penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan beberapa pengertian terkait dengan air, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber daya air adalah air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- b. Air adalah semua air yang terdapat pada diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan.
- c. Air Bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
- d. Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- e. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- f. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- g. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.

Air begitu dibutuhkan oleh kita semua. Disadari atau tidak, kita semua membuang-buang air seakan air itu tidak terbatas, air berlimpah seperti banjir tidak akan pernah habis. Persoalannya adalah seperti yang dikatakan pada awal tulisan ini, tidak semua air dapat dipergunakan untuk beraktifitas. Air yang kotor bagaikan tidak berguna bagi kita manusia, siapa yang mengotori air kita juga akibat perilaku manusia yang mengotorinya sehingga persediaan air bersih di kota-kota besar dan bahkan dunia sudah mulai menipis. Sebaliknya siapa yang menjaga ketersediaan air bersih adalah kita juga ummat manusia agar air bersih tetap tersedia bagi pemenuhan kebutuhan bagi seluruh ummat manusia.

Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk hidup tidak dapat terlepas dari kebutuhan ketersediaan air. Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk mendapat air yang baik, yang sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah kegiatan manusia.

Menghargai Air Menghargai Kehidupan

Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan

Jateng Daily, 21 Maret 2021

“MENGHARGAI AIR” menjadi tema World Water Day tahun ini. Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret merupakan sarana untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya air bersih dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Sidang umum PBB pada tanggal 22 Desember 1992 menyepakati bahwa Hari Air Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Maret, dimulai pada 1993. Dengan peringatan ini diharapkan masyarakat sedunia memberi dukungan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi air dengan cara mengurangi penggunaan air yang berlebihan.

Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat vital untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk bumi, tak terkecuali manusia. Tak ada satu haripun dalam kehidupan kita yang bisa terlepas dari kebutuhan air. Mandi, mencuci, minum, masak, dan banyak kegiatan kita lainnya ditunjang oleh air. Bahkan 60 – 70 persen komposisi tubuh kita adalah cairan. Jadi, air adalah kebutuhan yang sangat krusial bagi manusia. Bisa dibayangkan jika keberadaan air lama kelamaan semakin berkurang bahkan habis, maka keberlangsungan hidup manusia pun akan terancam. Oleh karena itu, menghargai air sama dengan menghargai kehidupan.

Perlu adanya suatu gerakan yang disosialisasikan secara masif pada masyarakat untuk menjaga ketersediaan air di bumi ini. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPH) & Sumber Daya Alam (SDA) Majelis Ulama Indonesi (MUI) telah menginisiasi suatu gerakan yang idenya sangat cemerlang. Jika gerakan ini diikuti oleh lebih banyak komunitas, niscaya ketersediaan dan kualitas air akan dapat dijaga. Lembaga tersebut telah mengkampanyekan cara memperlakukan air melalui gerakan eco masjid. Gerakan tersebut terdiri dari simpan air, hemat air dan jaga air.

Simpan air dilakukan dengan cara menyimpan air hujan dalam sumur resapan, menanam pohon untuk menyerap air dan juga membuat embung-embung air di pedesaan. Hemat air dilakukan dengan menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Dan jaga air dilakukan dengan menjaga kebersihan sumber-sumber air seperti air tanah dan air di atas permukaan yaitu air sungai, danau dan laut. Menjaga kualitas air di atas permukaan dari limbah baik sampah maupun limbah industri sangatlah penting agar tetap bisa menjadi sumber air bersih bagi masyarakat.

Hasil riset para ilmuwan di dunia menyimpulkan bahwa temperatur bumi saat ini semakin meningkat, sehingga proses penguapan air berlangsung lebih cepat. Lahan-lahan hijau banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman, gedung perindustrian atau perkantoran, jalan dan lain sebagainya sehingga pengikat air dalam tanah semakin berkurang. Dengan bertambahnya pemukiman dan gedung-gedung, kebutuhan air pun turut bertambah. Pun begitu kegiatan masyarakat yang langsung mengkonsumsi air tanah sebagai sumber air utamanya juga semakin tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat jika penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama untuk minum terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2018 penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama untuk minum sebesar 19,10 persen, lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi 19,60 persen dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 20,65 persen. Begitu pula penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama mandi/masak/cuci juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 BPS mencatat penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama mandi/masak/cuci sebesar 32,56 persen dan meningkat menjadi 35,19 persen pada tahun 2020. Sumur bor/pompa menempati peringkat pertama dibanding sumber air lain seperti air kemasan bermerk/isi ulang, sumur terlindung, ataupun ledeng.

Penggunaan sumur bor/pompa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri. Pemanfaatan air tanah secara masif akan menimbulkan potensi penurunan ketinggian tanah, seperti yang sedang marak diberitakan akhir-akhir ini yaitu penurunan tanah yang terjadi di Kota Pekalongan. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat penurunan muka tanah di Kota Pekalongan sebesar enam sentimeter setiap tahunnya. Dengan perhitungan rata-rata penurunan permukaan tanah enam sentimeter per tahunnya, maka diperkirakan pada tahun 2036 Kota Pekalongan akan tenggelam. Sungguh kekhawatiran yang sangat besar sehingga butuh penanganan yang tepat dari pemerintah.

Gerakan hemat air harus terus digalakkan.

Penerapan perijinan tentang pembuatan sumur bor juga perlu dibuat agar eksploitasi air tanah tidak semakin menjadi-jadi. Menjaga kualitas air permukaan dari limbah juga perlu ditingkatkan agar bisa dimanfaatkan sebagai sumber air utama selain air tanah. Program penanaman pohon perlu digencarkan kembali, karena akar-akar pohon akan mengikat air. Jika tidak ada yang mengikat air, maka air akan menggenang di atas tanah dan banjir menjadi ancaman di musim hujan. Tentunya semua usaha untuk menjaga keberadaan air di bumi ini bukanlah kewajiban pemerintah semata tapi juga kewajiban kita semua. Semoga dengan peringatan World Water Day, kita semua bisa tersadarkan untuk semakin menghargai air. Karena menghargai air berarti menghargai kehidupan.

Air Untuk Kehidupan

Ardita Mukti Wita Lestari – BPS Kabupaten Jepara Lingkar Jateng, 21 Maret 2021

Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di Bumi ini adalah air. Ketersediaan air memiliki peranan penting, tidak hanya menentukan dimana seseorang dapat tinggal, tetapi juga menentukan bagaimana kualitas hidup mereka.

Walaupun ada banyak air di Bumi, air tidak selalu tersedia kapan dan dimanapun dibutuhkan, juga tidak selalu dalam kualitas yang sesuai untuk semua penggunaan. Air harus dianggap sebagai sumber daya terbatas yang memiliki batasan ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan. Air harus cukup tersedia untuk suatu daerah berkembang dan suatu daerah tidak dapat terus berkembang, jika jumlah permintaan air jauh melebihi persediaan air yang tersedia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Air tersebut harus memenuhi standar kondisi fisik air yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, dan tidak berbau, sehingga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan karena buruknya kualitas air.

Air yang digunakan sebagai sumber air minum, harus air yang berkualitas (layak). Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 76,09 persen meningkat 2,07 persen menjadi 78,16 persen di tahun 2018. Peningkatan akses air minum layak di Provinsi Jawa Tengah yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 15,66 persen menjadi 93,82 persen.

Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 94,07 persen. Capaian tersebut telah melebihi capaian penggunaan sumber air minum layak nasional sebesar 90,21 di tahun 2020. Namun, masih terdapat sekitar 6 persen rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah belum memiliki akses terhadap air minum layak. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kesadaran dari diri sendiri dan perlu juga peran aktif pemerintah untuk membantu mengatasi masalah terhadap akses air minum yang layak. Diperlukan adanya kerjasama untuk melakukan pemeliharaan air maupun sanitasi lingkungan. Pemeliharaan air dan sanitasi khususnya disekitar sungai supaya kondisi air tetap jernih dan layak dipakai.

Apabila melihat lebih mendalam lagi khususnya di Kabupaten Jepara pada tahun 2020, mayoritas penduduk memanfaatkan sumur terlindung sebagai sumber air minum utamanya. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur terlindung untuk air minum sebesar 33,76 persen. 16,24 persen rumah tangga menggunakan sumur bor atau pompa untuk minum. Rumah tangga yang menggunakan air isi ulang dan leding untuk minum masing-masing sebesar 15,27 persen dan 10,79 persen. Masih terdapat 14,50 persen rumah tangga yang menggunakan sumur tak terlindung dan mata air tak terlindung sebagai sumber air minum utamanya.

Kemudahan akses terhadap air bersih dan air layak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu betapa pentingnya pengelolaan sumber air bersih yang berkesinambungan sehingga ketersediaan air akan terus tercukupi untuk generasi yang akan datang.

Banjir Rob di Kota Pekalongan, Sebuah Ironi dan Ikhtiar Pemerintah

Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 20 November 2021

“MENGHARGAI AIR” menjadi tema World Water Day tahun ini. Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret merupakan sarana untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya air bersih dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Sidang umum PBB pada tanggal 22 Desember 1992 menyepakati bahwa Hari Air Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Maret, dimulai pada 1993. Dengan peringatan ini diharapkan masyarakat sedunia memberi dukungan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi air dengan cara mengurangi penggunaan air yang berlebihan.

Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat vital untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk bumi, tak terkecuali manusia. Tak ada satu haripun dalam kehidupan kita yang bisa terlepas dari kebutuhan air. Mandi, mencuci, minum, masak, dan banyak kegiatan kita lainnya ditunjang oleh air. Bahkan 60 – 70 persen komposisi tubuh kita adalah cairan. Jadi, air adalah kebutuhan yang sangat krusial bagi manusia. Bisa dibayangkan jika keberadaan air lama kelamaan semakin berkurang bahkan habis, maka keberlangsungan hidup manusia pun akan terancam. Oleh karena itu, menghargai air sama dengan menghargai kehidupan.

Perlu adanya suatu gerakan yang disosialisasikan secara masif pada masyarakat untuk menjaga ketersediaan air di bumi ini. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPH) & Sumber Daya Alam (SDA) Majelis Ulama Indonesi (MUI) telah menginisiasi suatu gerakan yang idenya sangat cemerlang. Jika gerakan ini diikuti oleh lebih banyak komunitas, niscaya ketersediaan dan kualitas air akan dapat dijaga. Lembaga tersebut telah mengkampanyekan cara memperlakukan air melalui gerakan eco masjid. Gerakan tersebut terdiri dari simpan air, hemat air dan jaga air.

Simpan air dilakukan dengan cara menyimpan air hujan dalam sumur resapan, menanam pohon untuk menyerap air dan juga membuat embung-embung air di pedesaan. Hemat air dilakukan dengan menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Dan jaga air dilakukan dengan menjaga kebersihan sumber-sumber air seperti air tanah dan air di atas permukaan yaitu air sungai, danau dan laut. Menjaga kualitas air di atas permukaan dari limbah baik sampah maupun limbah industri sangatlah penting agar tetap bisa menjadi sumber air bersih bagi masyarakat.

Hasil riset para ilmuwan di dunia menyimpulkan bahwa temperatur bumi saat ini semakin meningkat, sehingga proses penguapan air berlangsung lebih cepat. Lahan-lahan hijau banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman, gedung perindustrian atau perkantoran, jalan dan lain sebagainya sehingga pengikat air dalam tanah semakin berkurang. Dengan bertambahnya pemukiman dan gedung-gedung, kebutuhan air pun turut bertambah. Pun begitu kegiatan masyarakat yang langsung mengkonsumsi air tanah sebagai sumber air utamanya juga semakin tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat jika penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama untuk minum terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2018 penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama untuk minum sebesar 19,10 persen, lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi 19,60 persen dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 20,65 persen. Begitu pula penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama mandi/masak/cuci juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 BPS mencatat penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber utama mandi/masak/cuci sebesar 32,56 persen dan meningkat menjadi 35,19 persen pada tahun 2020. Sumur bor/pompa menempati peringkat pertama dibanding sumber air lain seperti air kemasan bermerk/isi ulang, sumur terlindung, ataupun ledeng.

Penggunaan sumur bor/pompa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri. Pemanfaatan air tanah secara masif akan menimbulkan potensi penurunan ketinggian tanah, seperti yang sedang marak diberitakan akhir-akhir ini yaitu penurunan tanah yang terjadi di Kota Pekalongan. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat penurunan muka tanah di Kota Pekalongan sebesar enam sentimeter setiap tahunnya. Dengan perhitungan rata-rata penurunan permukaan tanah enam sentimeter per tahunnya, maka diperkirakan pada tahun 2036 Kota Pekalongan akan tenggelam. Sungguh kekhawatiran yang sangat besar sehingga butuh penanganan yang tepat dari pemerintah.

Gerakan hemat air harus terus digalakkan.

Penerapan perijinan tentang pembuatan sumur bor juga perlu dibuat agar eksploitasi air tanah tidak semakin menjadi-jadi. Menjaga kualitas air permukaan dari limbah juga perlu ditingkatkan agar bisa dimanfaatkan sebagai sumber air utama selain air tanah. Program penanaman pohon perlu digencarkan kembali, karena akar-akar pohon akan mengikat air. Tentunya semua usaha untuk menjaga keberadaan air di bumi ini bukanlah kewajiban pemerintah semata tapi juga kewajiban kita semua. Semoga dengan peringatan World Water Day, kita semua bisa tersadarkan untuk semakin menghargai air. Karena menghargai air berarti menghargai kehidupan.

“You never know how much can you do in your life”

~ Jack Ma ~

<https://jateng.bps.go.id>

II

LITERASI PERTANIAN

Diana Dwi Susanti

Pertanian, Sektor Tertua Indonesia

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Keanekaragaman hayati darat Indonesia merupakan terbesar nomor dua di dunia setelah Brazil. Bahkan keanekaragaman laut, Indonesia menduduki peringkat pertama. Keragaman jenis komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan sudah lama diusahakan untuk sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa dataran tinggi dan rendah mendukung keanekaragaman hayati tersebut. Limpahan sinar matahari dan intensitas hujan yang merata sepanjang tahun memungkinkan untuk aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Gunung berapi yang banyak dimiliki oleh Indonesia, walaupun mempunyai dampak buruk berupa bencana alam, tetapi abu vulkaniknya sangat bermanfaat untuk pertanian karena banyak mengandung mineral yang menyuburkan tanaman. Tidak heran jika masa dahulu wilayah Indonesia pernah menjadi rebutan penjajah asing demi kekayaan alam yang melimpah di Indonesia.

Sejarahnya, sejak pra kolonial hingga era penjajahan, penduduk nusantara telah makmur karena pertanian. Berbagai catatan sejarah dunia menyebutkan kerajaan-kerajaan di Nusantara kekayaannya telah menyamai kerajaan-kerajaan di India. Era penjajahan Belanda, produk utama pertanian diperdagangkan secara monopoli. Pemerintah kerajaan Hindia Belanda mengintesivkan pertanian dengan aturan Sistem Tanam Paksa (1830 – 1870). Dan berhasil menjadikan Kerajaan Belanda menjadi salah satu kerajaan terkaya di dunia waktu itu.

Pertanian di Nusantara telah memberikan bukti kekayaan kepada siapa yang mengelolanya. Kembali pada jati diri perekonomian bangsa yang sudah terbukti selama ratusan bahkan ribuan tahun mampu memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.

Sehingga sudah saatnya pemerintah memfokuskan pembangunannya kepada pertanian.

Bisa dikatakan Pertanian di Indonesia menjadi sebuah potensi yang harus dimaksimalkan oleh semua pihak. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan pertanian maka kedaulatan pangan Indonesia akan terwujud.

Kedaulatan Pangan

Berbicara kemakmuran rakyat tentu tidak jauh dari urusan pangan dan kedaulatannya. Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan persoalan yang sangat mendasar, dan sangat menentukan nasib suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya.

Kedaulatan pangan artinya, Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, menyediakan pangan yang beraneka ragam, bermutu dan berkualitas. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau, mempermudah rakyat memperoleh kebutuhan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas.

Kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih, pupuk, dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya. Hal ini perlu disertai dengan melaksanakan pertanian yang berkelanjutan bukan saja memperbaiki kualitas tanah tetapi juga lingkungan dan produksi yang aman bagi kesehatan manusia.

Bagian 1

Kekuatan Pertanian Sebagai Pengungkit Ekonomi

Diana Dwi Susanti

Kekuatan Pertanian di Masa Sulit

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor kunci untuk menstabilkan ekonomi negara, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona. Sektor pertanian selama ini terbukti mampu bertahan dalam situasi apapun termasuk krisis moneter, defisit perdagangan, maupun pandemi.

Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 1997-1998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Peran sektor pertanian sebagai sektor penyangga (*buffer sector*) di masa krisis akan terulang di masa pandemi.

Imbas pembatasan sosial pada sektor pertanian relatif kecil, karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk. Sektor pertanian terutama tanaman pangan secara alamiah tidak separah sektor lain ketika terjadi krisis. Ini terjadi karena sifat barang-barang pertanian tanaman pangan yang elastisitas permintaannya rendah. Ketika ekonomi mengalami periode *booming*, permintaannya tidak akan meningkat pesat. Demikian pula ketika terjadi *resesi*, permintaannya tidak akan menurun drastis.

Dari sudut pandang urgensi, pertanian menjadi sektor penopang ketahanan pangan yang krusial di kala krisis ekonomi. Perdagangan internasional, termasuk sektor pertanian terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan pembatasan ekspor produk pertanian (laporan WTO). Ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Tidak heran apabila dikatakan bahwa pandemi Covid-19 berakibat kepada krisis pangan.

Kebijakan Pangan di Masa Pandemi

Pertanian tidak lepas dari pangan. Pertahanan yang penting dalam melawan covid-19 ialah ketahanan pangan. Pangan tidak hanya sebatas bertahan hidup tapi juga masalah asupan gizi masyarakat. Krisis moneter 1997/1998 meninggalkan generasi yang mengalami

stunting dan *malnutrition* yang cukup parah di kalangan anak-anak dan ini mempunyai dampak permanen. Sebagian besar daerah dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi saat ini diyakini disebabkan kekurangan pangan pada krisis lalu.

Angka *stunting* nasional pada tahun 2013 sebesar 37,2%. Angka ini masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi *stunting* di suatu negara tak boleh melebihi 20%. Walaupun sudah terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 27,67% tetapi belum memenuhi standar WHO. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kedua tingkat prevalensi *stunting* setelah Kamboja di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana kondisi *stunting* yang akan terjadi pada masa pandemi?

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tumbuh positif pada masa pandemi. Meskipun sektor pertanian masih cukup potensial untuk menjadi tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun Indonesia masih mempunyai wilayah miskin dan terpencil yang memiliki kerawanan pangan sebelum virus covid-19 melanda.

Adanya pandemi ini, hilangnya sumber uang dari pengiriman keluarga di kota yang juga terdampak pandemi dan mata pencaharian di luar pertanian, maka kerawanan pangan akan terjadi dalam skala lebih besar. Akankah petani masih memiliki cukup modal untuk investasi produksi pertanian di muka? Sedangkan untuk makan saja keadaan sulit.

Sampai saat ini, kebijakan ketahanan pangan pemerintah adalah berfokus menjaga pasokan bahan makanan pokok. Kebijakan yang bersifat sementara karena, masih pada kisaran peningkatan produksi dan menghapus pajak impor untuk menjaga pangan negeri.

Indonesia sebenarnya memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Hasil Survei Pertanian Antar-Sensus (SUTAS) 2018 menunjukkan terdapat 27,68 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP), dan angka ini meningkat 5,7% dibandingkan Sensus Pertanian (ST) 2013. Dari jumlah tersebut, 47,5% RTUP merupakan produsen padi dan 25,8% produsen palawija.

Produksi beras nasional pun masih surplus. Namun tidak setiap daerah mempunyai produksi beras. Sehingga pemerintah memastikan distribusi merata pada daerah-daerah yang bukan sentra padi.

Selain itu berdasarkan Survei Ongkos Usaha Tani (SOUT) 2017 yang dilakukan di 34 provinsi, rasio pendapatan bersih petani padi adalah 26,7%. Pengeluaran petani untuk tenaga kerja dan jasa pertanian cukup dominan dalam komponen ongkos produksi petani. Pengeluaran petani lainnya yang cukup besar adalah pupuk.

Kebijakan yang relevan adalah pengadaan alat pertanian modern tanpa sewa untuk membantu petani dan intervensi harga pupuk. Program lain untuk memberi jaminan kesejahteraan petani adalah dengan memberlakukan sistem kontrak kepada petani untuk memastikan budi daya prioritas dapat berjalan pada musim tanam berikutnya dan kesanggupan pemerintah untuk membeli hasil-hasil pertanian yang dibudidayakan pada musim panen berikutnya.

Pertanian Penopang Ekonomi Tangguh yang Rapuh

Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Daily, 21 Februari 2021

Genap setahun perekonomian Jateng berada dalam masa sulit. Masa dimana pandemi COVID-19 menyerang tidak hanya Jateng bahkan ekonomi dunia berkontraksi hingga -4% (World Economic Outlook, IMF). Kinerja ekonomi Jateng ikut terpuruk dengan pertumbuhan minus -2,65 selama tahun 2020.

Kondisi krisis ini mempengaruhi ketahanan pangan hampir di seluruh dunia. Produksi padi global 2020 turun hingga 0,5% dibandingkan 2019 (sumber : US Departement of Agriculture dan Internasional Grains Council). Bahkan negara pengekspor beras seperti Vietnam dan India melakukan pembatasan ekspor. Fenomena perubahan iklim yang diprediksi oleh BMKG berlangsung pada bulan Oktober 2020-Februari 2021, menjadi penghambat tersedianya pangan nasional. Karena pada masa ini, petani tidak akan melakukan penanaman.

Bagaimana dengan ekonomi Jateng? Saat pandemi, hampir seluruh sektor ekonomi berkontraksi kecuali sektor pertanian, pengadaan listrik dan air, informasi dan komunikasi dan sektor kesehatan. Sektor pertanian sebagai penopang utama setelah industri pengolahan justru tumbuh positif 2,48%.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor tangguh dalam menghadapi badai resesi ekonomi. Zona ekonomi paling kuat bertahan dari dampak pandemi COVID-19 disektor jasa dan manufaktur menjadi zona yang paling terpukul. Apalagi Jateng merupakan bagian dari lumbung pangan nasional dan menjadi tumpuan pangan dari berbagai daerah. Di saat dunia mengurangi ekspor pangan sebagai antisipasi keamanan pangan negaranya, pangan lokal menjadi andalan utama ketahanan pangan nasional.

Penopang yang Tangguh

Jateng beruntung mempunyai mesin penggerak PDRB sektor pertanian yang menjadi andalan setelah sektor industri pengolahan. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam wilayah Jateng tidak terlalu sulit meskipun di masa pandemi. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, kemampuan produksi pertanian Jateng mampu menghidupi masyarakat di kala krisis. Inflasi khususnya komponen makanan bisa ditekan. Walaupun ada PSBB, namun kemandirian pangan Jateng patut diacungi jempol.

Potensi pertanian Jateng sudah tidak diragukan lagi. Sebagai penopang nomor 3 terbesar nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, sektor pertanian Jateng mampu menyumbang 9,37% dari total sektor pertanian nasional (BPS,2020). Pada masa pandemi, pertanian Jateng tidak terpengaruh bahkan mampu meningkatkan ekspor pertanian hingga tumbuh 25% dibandingkan tahun 2019 (BPS,2020).

Bahkan Jateng menjadi daerah penghasil produksi padi terbesar nomor dua nasional dengan capaian 8,40 juta ton. Walaupun ada penurunan produksi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, namun kondisi ini masih surplus 1,65 juta ton beras (BPS,2020).

Sektor Yang Rapuh

Sektor pertanian Jateng tangguh terhadap krisis, namun tidak terhadap iklim. Pengolahan pertanian yang masih menggunakan cara tradisional tanpa ada sentuhan teknologi, sangat berpengaruh dengan perubahan cuaca.

Ditambah lagi dengan masalah pelaku usaha tani, yang masih jauh dari kata sejahtera. Produktivitas pertanian berada pada urutan terakhir dari semua sektor usaha di Indonesia maupun di Jateng. Namun, sebagian besar penduduk masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian mereka.

Di saat hampir semua sektor collaps dan PHK merajalela, sektor pertanian menjadi tumpuan 26% penduduk Jateng. Pertumbuhan tenaga kerja pada sektor ini meningkat 3,04%. Tentu ini menambah beban produktivitas pertanian.

Petani Jateng 86,43% didominasi oleh petani gurem yang menguasai lahan sawah di bawah 0,5 hektar (BPS, 2018). Tentu ini berkaitan dengan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Jateng ikut merosot pada saat pandemi. Padahal dari sisi produksi, sektor pertanian berjaya dibandingkan sektor lainnya. Namun tidak demikian dengan pelaku usahanya.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Walaupun dari sisi produksi pandemi Covid-19 tidak berdampak pada sektor pertanian namun dari sisi petani, NTP Jateng merosot -0,06% poin dibandingkan tahun 2019.

Pemasaran dan distribusi produk pertanian menjadi kendala bagi petani terutama petani gurem. NTP Jateng khususnya NTP Tanaman Pangan yang menjadi sumber utama pertumbuhan sektor pertanian Jateng masih berfluktuasi mengikuti gerak musim tanam dan panen. Di saat panen, NTP turun karena harga yang diterima petani menjadi rendah. Sedangkan pada saat paceklik NTP naik.

Perlindungan terhadap harga hasil produksi petani masih belum mengangkat NTP. Sehingga petani yang sebagian besar petani gurem di wilayah Jateng ikut merasakan tingginya harga pangan di saat paceklik. Ongkos produksi yang tinggi sebesar 84,9% dari total usaha tani di Jateng mendorong petani menjual semua hasil produksinya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan selama empat bulan. Penyerapan gabah petani Jateng, 50% lebih masih didominasi oleh pedagang pengepul yang sering mengendalikan harga terutama pada saat panen raya. Ini menjadi masalah mendasar pada sektor pertanian di Provinsi Jateng yang notabene sebagai salah satu produsen pangan nasional.

Investasi Pertanian

Untuk mendorong peningkatan pendapatan petani diperlukan investasi di bidang pertanian. Pertanian bukan hanya masalah budidaya tapi juga logistik dan penyimpanan. Sistem produksi pun harus bisa membaca situasi pasar.

Melihat gambaran pertanian di atas mengindikasikan bahwa perubahan iklim dan distribusi komoditas menumpuk pada wilayah sentra, menjadi tantangan. Tantangan ini bisa menjadi peluang bagi investor pertanian.

Investor pertanian sekaligus mengembangkan industri pertanian di daerah sentra di pedesaan merupakan peluang yang bisa dikembangkan. Selain mengurangi kemiskinan pedesaan yang selalu lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan, membangun kilang-kilang padi modern atau kilang produk pertanian lainnya, diharapkan akan bisa menghasilkan produk pertanian dengan kualitas tinggi.

Selain bisa menyerap hasil pertanian yang melimpah, industri modern yang mengolah dan mengemas hasil pertanian menjadi peluang membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Jika hasil pertanian diolah dan dikemas selain meningkatkan nilai tambah, tidak ada lagi produksi pertanian yang rusak. Bahkan bisa menjadi produk eksport.

Investasi pertanian, selain menjaga bumi tetap lestari dan menjaga pangan tetap melimpah, juga meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani meningkat, sektor pertanian tidak akan ditinggalkan. Karena produktivitasnya mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya.

Pertanian Kuat, Ekonomi Meningkat

Dheriana – BPS Kabupaten Grobogan Jateng Pos, 9 Mei 2021

Sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian bagi masyarakat pedesaan. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya sebagai sumber pangan masyarakat setiap harinya, namun juga sebagai sumber devisa negara. Adanya pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 dan sampai awal tahun 2021 saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen pada sektor pertanian tumbuh sebesar 2,19 persen, kuartal III 2020 minus 3,49 persen pada sektor pertanian tumbuh sebesar 2,15 persen dan pada kuartal IV minus 2,19 persen pada sektor pertanian tumbuh sebesar 2,59 persen (year on year/yoy). Data BPS juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sektor ekonomi pada kuartal II 2020 tumbuh sebesar 2,19 persen, kuartal III 2020 tumbuh sebesar 2,15 persen dan pada kuartal IV tumbuh sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy). Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap survive dan menjadi penyelamat bagi tumbuh kembangnya ekonomi nasional saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini .

Data BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019. Selain itu terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang). Hal ini, berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang mengalami

peningkatan persentase terbesar adalah di sektor pertanian (2,23 persen poin). Ini adalah bukti bahwa sektor pertanian harus diperhatikan secara khusus oleh semua pihak. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional selain mensejahterakan petani juga sebagai penyerap tenaga kerja.

Untuk penguatan sektor pertanian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mempunyai tiga program untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Ketiga program ini yaitu penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Program KUR adalah program strategis yang diperuntukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah. Program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara yang tidak biasa. Dengan adanya pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani) dapat memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan.

Kementerian Pertanian juga membuat terobosan membangun Agriculture War Room (AWR) yang akan memudahkan untuk memantau perkembangan harga produk pertanian di tingkat petani, khususnya pada saat panen raya yang sering tidak berpihak pada petani. Masalah lonjakan harga, isu kelangkaan pupuk dan input produksi lainnya dapat terpantau. Sehingga petani dapat menggunakan input produksi tepat waktu dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tanaman, serta pada tingkat harga yang terjangkau (Harga Eceran Tertinggi). Kementerian Pertanian harus terus berupaya untuk menjalankan program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang meningkat tentunya akan menambah daya beli petani.

Keberhasilan dalam sektor pertanian harus selalu didukung oleh semua pihak. Baik itu, pemerintah, petani dan swasta harus terus bersinergi dalam menguatkan sektor pertanian Indonesia. Semoga dengan kekuatan di sektor pertanian dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aamiin.

Pertanian Peluang Bangkit dari Resesi

Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Today, 21 Mei 2021

Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum Jawa Tengah bangkit dari resesi. Setelah terkontraksi cukup dalam sebesar 5,91 persen pada triwulan II/2020, perekonomian Jawa Tengah perlahan mulai bangkit. Pada triwulan III/2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat masih -3,79 persen, kemudian menguat menjadi -3,34 persen pada triwulan IV/2020, dan kembali menguat menjadi -0,87 persen pada triwulan I/2021.

Dari sisi produksi, menguatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi -0,87 persen dari -3,34 persen ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh positif 13,89 persen.

Pertanian menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I/2021 dan sebagai penahan ekonomi terkontraksi lebih dalam lagi yang disebabkan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi industri pengolahan sebagai penopang pertama ekonomi.

Tanpa Migas Ekonomi Positif

Industri pengolahan pada triwulan I/2021 masih terkontraksi sebesar -3,94 persen. Kontraksi cukup tinggi untuk sektor yang menjadi penopang kuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Penyebabnya adalah industri migas yang terperosok cukup dalam hingga -23 persen. Tanpa migas, industri pengolahan terkontraksi tipis -0,44 persen.

Bahkan jika migas dikeluarkan dari komponen pembentukan PDRB, ekonomi Jawa Tengah positif 0,43 persen. Ini sinyal positif bahwa ekonomi Jawa Tengah mulai bangkit. Telah diketahui, migas adalah ekonomi yang dikelola oleh pusat tapi menjadi bagian dari perekonomian Jawa Tengah sebagai konsekuensi keberadaan industri kilang migas di wilayah Jawa Tengah.

PDRB tanpa migas mencerminkan pendapatan riil per kapita. Karena sektor-sektor di luar migas adalah potensi dari ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Tidak bisa dipungkiri Jawa Tengah mempunyai potensi pertanian yang sangat tangguh. Produksi padi bahkan menjadi produksi tertinggi tingkat nasional pada tahun 2019 dan tertinggi kedua pada tahun 2020 dengan capaian masing-masing 9,65 juta ton padi dan 9,49 juta ton padi.

Dan ini menempatkan pertanian menjadi rem ekonomi Jawa Tengah pada masa pandemi. Karena pada saat pandemi ini, seakan-akan ekonomi menjadi blong. Pemberlakuan PSBB untuk mencegah penularan virus covid-19 menjadikan semua sektor ekonomi mati suri. Aktivitas dibatasi, industri tidak jalan karena bahan baku masih tergantung dari impor luar negeri. Produksi menjadi mati, dan tenaga kerja banyak yang berhenti.

Hal sama juga terjadi pada sektor jasa kecuali infokom dan jasa kesehatan. Padahal ekonomi Jawa Tengah semakin tergantung dengan sektor ini. Kontribusinya sudah mencapai hampir separo dari total kegiatan ekonomi Jawa Tengah. Namun pada saat pandemi, sektor ini paling terdampak. Transportasi diberhentikan, tempat hiburan dan wisata ditutup, pedagang kaki lima yang biasa mangkal di pinggir jalan, depan sekolah, kantor kehilangan pangsa pasarnya. Sebab, semua orang melakukan pembatasan diri untuk tidak keluar rumah.

Ironis

Berbeda dengan pertanian. Sejak awal pandemi kinerja pertanian berada di tempat positif. Pada triwulan II/2020 awal ekonomi Jawa Tengah terkontraksi, pertanian tumbuh 0,94 persen, kemudian tumbuh semakin menguat 6,61 persen pada triwulan III/2020 di saat Jawa Tengah mengalami resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pertanian terus berkibar dengan tumbuh 7,56 persen pada triwulan IV/2020. Dan triwulan I/2021 kinerja pertanian semakin tangguh dengan tumbuh sebesar 13,89 persen.

Namun hal ini ironis dengan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan petani tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pada saat kinerja ekonomi pertanian melambung tinggi terutama pertanian tanaman pangan yang mendongkrak pertumbuhan

hingga 41 persen, justru NTP tanaman pangan berada di bawah 100. Artinya pendapatan petani tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan petani dan biaya produksi pertanian.

Padahal saat ini petani sedang panen raya. Jerih payahnya selama tiga bulan dipetik saat ini. Saat dimana petani menikmati hasil usahanya. Lagi-lagi petani tidak punya daya. Karena produksi yang melimpah membuat harga gabah menjadi murah.

Perlindungan dan Penguatan Pertanian

Pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan. Saat krisis, dimana hampir semua negara berusaha mempertahankan ekonomi negaranya untuk tidak ambruk, termasuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri sehingga tidak melakukan impor pangan, pertanian domestik tampil sebagai perisai ketahanan pangan nasional.

Perdagangan internasional terutama pertanian sedang terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian (WTO,2020). Ini peluang emas bagi Jawa Tengah untuk meningkatkan produk pertanian menuju ke perdagangan internasional.

Dengan demikian harga pertanian bisa didongkrak naik. Keadaan ini memerlukan perlindungan harga petani oleh pemerintah. Dan memang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menyerap produk pertanian Jawa Tengah dan memasarkan ke luar Jawa Tengah atau bahkan ke luar negeri. Tentunya dengan berbagai pembinaan produksi terlebih dahulu untuk menjadi produk berskala internasional.

Dengan meningkatkan kesejahteraan petani, otomatis mengurangi kemiskinan di tingkat desa. BPS mencatat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan September 2021 angka kemiskinan pedesaan mencapai 13,20 persen atau ada penambahan 54 ribu penduduk miskin di desa sejak Maret 2020. Sedangkan kemiskinan di perkotaan hanya 10,57 persen.

Pada hakikatnya momentum pandemi ini membuka mata kita, bahwa pertanian Jawa Tengah menjadi produk unggulan dan penopang ekonomi di saat semua sektor berkontraksi. Sudah saatnya pertanian dan petani mendapat perhatian lebih. Dan ini akan menjadi peluang Jawa Tengah untuk mulai bangkit dari resesi.

Bagian 2

Seputar Kesejahteraan Petani

Diana Dwi Susanti

Pertanian hingga saat ini masih dinilai sebagai sektor penggerak perekonomian Indonesia yang penting dan terbukti memiliki ketahanan yang paling tinggi pada saat terjadi dan pasca periode krisis ekonomi, krisis moneter maupun krisis akibat pandemi.

Keberhasilan sektor pertanian sebagai sektor yang handal dan tangguh tentunya tidak terlepas dari peran atau daya dukung seluruh aspek sehingga mendorong kemampuan yang cepat dari sektor ini untuk beradaptasi pada berbagai kondisi. Akan tetapi kalau dikaji lebih mendalam pada tingkat kegiatan usaha tani masyarakat, ternyata masih banyak ditemukan kekurangan atau adanya masalah di sekitar proses kegiatan pembangunan pertanian.

Pertama, masalah lahan hampir 60% petani di Indonesia hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar (SUTAS,2018). Padahal salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga keluar dari perangkap kemiskinan adalah peningkatan akses penguasaan lahan oleh petani. Luasan lahan yang dibutuhkan per rumah tangga tani tanaman pangan untuk memperoleh pendapatan setara atau diatas Garis Kemiskinan BPS minimal 0,83 hektar (Sri Hery S, M.Maulana, 2012). Wajar jika sampai saat ini kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dari kota. Karena mayoritas penduduk desa mempunyai mata pencaharaian bercocok tanam.

Selain itu, banyak petani belum mengerti potensi lahan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan lahan yang digunakan kurang termanfaatkan dengan baik. Tak jarang petani juga tak dapat mengatasi permasalahan hama dan penyakit yang ada pada lahan mereka. Akibatnya pengendalian yang salah justru membuat kondisi lahan semakin parah.

Kedua, petani juga dihadapkan dengan pasar yang kian ketat persaingannya. Tak jarang harga jual dari petani merosot sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Belum lagi masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini membuat harga produk tidak stabil.

Beberapa produk tani bersifat musiman. Artinya, produk hanya mencukupi kebutuhan pada waktu tertentu saja. Saat hasil panen melimpah, harga produk akan jatuh. Sebaliknya, saat pasokan terbatas justru akan terjadi lonjakan harga.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penggudangan hasil panen dan pengemasan produk panen. Namun hal itu memerlukan modal yang lebih guna perawatan pasca panen dan pemeliharaan gudang. Permodalan sering menjadi masalah umum petani. Terlebih jika petani mengalami gagal panen karena kendala alam atau serangan hama dan penyakit. Belum lagi jika harga produk sedang anjlok, petani tidak memiliki modal untuk melanjutkan usaha taninya.

Bahkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai daya tukar pertanian selalu berfluktuasi mengikuti arah gerak panen. Ketika panen raya NTP jatuh. Bahkan panen raya di bulan Maret 2021 menyebabkan NTP tanaman pangan di bawah 100 yang artinya nilai tukar produk pertanian kalah dibandingkan konsis pada tahun dasar (2018). Karena ongkos produksi dan konsumsi petani lebih tinggi daripada pendapatan petani dari hasil usahanya.

Untuk mendorong peningkatan pendapatan petani diperlukan investasi bidang pertanian. Tetapi pertanian bukan hanya masalah budi daya, namun juga logistik dan penyimpanan. Sistem produksi pun harus bisa membaca situasi pasar. Mengembangkan industri pertanian di perdesaan merupakan peluang investasi. Contoh, dengan membangun kilang-kilang padi modern atau kilang produk pertanian lainnya. Dengan begitu bisa dihasilkan beras berkualitas tinggi. Selain bisa menyerap hasil pertanian yang melimpah, industri modern yang mengolah dan mengemas hasil pertanian menjadi peluang membuka lapangan pekerjaan di perdesaan. Jika hasil pertanian diolah dan dikemas selain meningkatkan nilai tambah, tidak ada lagi produksi pertanian yang rusak. Pendapatan petani pun terjaga, karena dengan mengemas produk pertanian akan meningkatkan nilai tambah.

Bukan Lagi Bangsa Tempe

**Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Times Indonesia, 2 Maret 2021**

Menikmati tempe goreng hangat diiringi suara hujan deras dari luar rumah sangatlah nikmat. Merenungi tentang tempe dan sejarahnya, terbayang tanaman kedelai yang tumbuh liar dan subur di bumi pertiwi. Penduduk dengan pakaian khas Jawa memanen kedelai dan sebagian dibungkus daun untuk dibuat tempe. Menunggu semalam untuk bisa diolah menjadi makanan yang siap disantap.

Saat ini, tempe masih menjadi makanan yang sangat mudah ditemui di setiap sudut manapun di Indonesia. Dari pasar sampai mall, pedagang kaki lima hingga restoran mewah tidak luput dari jenis makanan bernama tempe. Karena, setiap orang di negeri ini rata-rata mengkonsumsi tempe 7,4 kg per tahun (BPS,2020).

Tempe menjadi makanan murah meriah yang melegenda sepanjang masa. Produk asli Indonesia yang sudah merambah dunia dan telah menjadi warisan budaya nasional. Bolehlah kalau Indonesia disebut Bangsa Tempe.

Bangsa Tempe

Dari berbagai literatur diketahui penyebutan tempe sudah ada pada Kidung Sri Tanjung masa abad 13 yang tertulis di relief Candi Penataran di Jawa Timur. Penyebutan tempe yang lebih jelas terdapat pada Serat Centhini dari abad 18.

Tempe bukan begitu saja lahir menjadi lauk pauk seperti lauk hewani lainnya. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk di Jawa yang tinggi. Walaupun tidak ada data yang menyebutkan secara pasti pertumbuhan penduduk di Jawa, namun bersumber dari sejarawan Ong Hok Ham dalam artikelnya menyebutkan kota-kota pelabuhan terbesar di Nusantara berpenduduk 50.000-100.000 jiwa. Ini lebih padat dibandingkan kota-kota di dunia seperti London, New York dan Bristol yang berpenduduk hanya 10.000-40.000 jiwa (Tempo,1981).

Penduduk yang besar dan peraturan kerja yang diterapkan oleh Van Den Bosch dengan mengharuskan seluruh rakyat menanam tanam-tanaman perkebunan seperti karet dan tebu, menjadikan krisis pangan melanda. Rakyat yang kelaparan dan kehilangan padinya sebagai akibat berebut dengan jam kerja rodi, membuat mereka makan-makanan yang gampang tumbuh seperti ubi, singkong dan kedelai. Kedelai ini diolah menjadi tempe dan menjadi makanan yang amat terkenal pada masa krisis.

Tempe dianggap sebagai makanan prihatin, makanan kelas bawah. Hanya rakyat jelata yang sering mengolah makanan ini. Maka timbul istilah "bangsa tempe" atau "mental tempe." Perumpamaan kata yang sebenarnya merendahkan bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno sendiri pernah berteriak di depan ratusan ribu pendengarnya :”Janganlah kita sekali-sekali menjadi Bangsa Tempe”.

Namun dibalik itu semua, tempe adalah makanan sehat dengan protein nabati yang tinggi tanpa lemak. Bahkan kandungan proteinnya melebihi telur. Hal ini menyebabkan rakyat jelata bertahan hidup ditengah kesengsaraan kerja rodi.

Ironis sebagai Bangsa Tempe

Seiring dengan perkembangan waktu keberadaan tempe telah diakui oleh berbagai kalangan dari belahan dunia. Koki dunia memvariasikan tempe menjadi hidangan lezat dan menyebutnya sebagai magic food. Tempe dengan kandungan proteinnya kerap kali dimanfaatkan oleh mereka pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging dalam menu makanan mereka.

Tempe yang dikenal sebagai makanan asli Indonesia hanya cerita sejarah. Karena tempe jaman dahulu dengan masa sekarang berbeda. Kalau dulu, bangsa Indonesia mengandalkan tempe, karena bahan baku kedelai yang sangat mudah didapat.

Namun pada saat ini, industri tempe tergantung dengan pasar impor. Kebutuhan kedelai dalam negeri berkisar antara 3 sampai 4 juta ton kedelai per tahun (BPS,2020). Produksi dalam negeri hanya mampu mencukupi 0,3 juta ton. Kebutuhan kedelai 90% diimpor dari Amerika.

Sejak kran impor dibuka tahun 1998, kedelai petani lokal bersaing dengan kedelai impor. Tentu petani Indonesia bukan menjadi pesaing yang handal. Proses produksi yang masih sederhana dengan ongkos yang mahal masih bergelut dengan produktivitas tanah yang

semakin menurun menambah suram petani kedelai Indonesia. Ditambah harga kedelai impor yang murah, membuat petani semakin enggan mengusahakan jenis tanaman ini. Apalagi iming-iming alih fungsi lahan dari industri maupun rumah tangga semakin menjauhkan petani dari aktivitas bercocok tanam.

Praktis saat ini, industri tempe Indonesia sangat tergantung oleh impor luar negeri. Duh, bagaimana kalau Amerika sudah tidak lagi berkeinginan mengekspor kedelai? Bagaimana kalau tidak ada negara yang bersedia mengekspor kedelai ke Indonesia?

Bagaimana nasib bangsa Bangsa Tempe? Tempe akan menjadi barang mahal. Bukan lagi makanan rakyat jelata. Bukan lagi makanan orang prihatin seperti yang diceritakan sejarah pada jaman dahulu.

Apalagi kalau Amerika menguasai proses pembuatan tempe. Bagaimana kalau Amerika hanya ingin mengekspor tempe bukan kedelai? Tentu dengan harga yang mahal.

Jika Indonesia tidak berbenah dengan pertanian, masalah tempe akan menjadi masalah besar. Bisa saja tempe sebagai warisan budaya Indonesia tidak akan pernah diakui oleh dunia. Karena bahan baku tempe bukan berasal dari Indonesia.

Sambil masih mengunyah gurihnya tempe dan terlintas pikiran nakal. Apakah kita ingin lepas dari "bangsa tempe?" Membayangkan saja tidak berani. Mungkin suatu saat, tempe akan menjadi barang langka. Menjadi barang impor dan hanya tersedia di restoran mahal.

Tentu tidak akan ada lagi yang melecehkan tempe. Bahkan orang akan bangga dengan sebutan bangsa tempe karena harganya yang mahal. Dan saat itu Indonesia Bukan Lagi Bangsa Tempe.

Problem Kesejahteraan Petani Tentukan Masa Depan Sektor Pertanian

**Rukini – BPS Kabupaten Grobogan
Jateng Pos, 18 April 2021**

Kesejahteraan petani dinilai menjadi isu penting terkait masa depan sektor pertanian. Tanpa orientasi pada kesejahteraan petani, sektor pertanian lambat laun akan ditinggalkan petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) pertanian pada kuartal IV-2020 tumbuh sebesar 2,59 persen (yoy). Dari enam besar penyumbang ekonomi terbesar, hanya sektor pertanian yang masih mencatat pertumbuhan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum semuanya mengalami pertumbuhan negatif. Bahkan BPS memproyeksikan ada kenaikan produksi gabah pada Januari-April 2021 sebesar 26, 88 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton gabah.

Namun disisi lain disaat PDB sektor pertanian tumbuh positif, nilai Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator proxy kesejahteraan petani atau salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan justru terjadi penurunan.

Secara nasional Februari 2021 sebesar 103,10 atau turun 0,15 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Salah satu penyebab adalah turunnya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang dipicu oleh turunnya kualitas gabah. Sehingga petani terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah jauh dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satu kendala yang sering dihadapi petani selama ini diantaranya kelangkaan pupuk bersubsidi juga pemasaran hasil produksi. Jika kondisi seperti ini berlangsung terus menerus para petani kemungkinan juga akan bergeser mencari pekerjaan baru. Karena setiap musim panen raya, petani selalu kesulitan dalam menjual gabahnya dan merugi. Sehingga yang terjadi akan semakin memperburuk kondisi perekonomian para petani.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dibanding dengan sektor lain. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, terkecuali tahun 2020 terjadi kenaikan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 2,67 juta orang. Banyak diantara mereka pulang ke kampung untuk menjadi petani karena tidak menemukan pekerjaan di perkotaan.

Mirisnya lagi petani menjadi kelompok paling rentan terhadap kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar yaitu 46,30 persen tahun 2020. Tingkat kemiskinan yang masih terpusat di pedesaan menjadi salah satu faktor pendorong kemiskinan di kalangan petani, mengingat petani sebagian besar berada di pelosok daerah.

Potensi pertanian Indonesia yang besar bahkan terbesar ketiga negara penghasil beras di kawasan Asia setelah Cina dan India. Namun kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian, kalau Pemerintah tidak segera mempertimbangkan dan memberi perhatian khusus pada petani. Tujuan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan akan sulit terealisasi. Kekhawatiran akan muncul karena sektor pertanian berkontribusi cukup besar pada peningkatan kemiskinan.

Peran pemerintah sangat menentukan masa depan sektor pertanian. Pemerintah harus memberikan jaminan kesejahteraan petani yakni menyelamatkan harga dengan cara menyerap hasil produksi pertanian, memberikan jaminan kelancaran distribusi, jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian lain. Selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan industri pasca panen jika terkendala pengeringan, salurkan bantuan alat pengering gabah. Tak lupa pengawasan yang intensif guna mewujudkan pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Daya Saing Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Harimurti – BPS Kabupaten Pekalongan

Jateng Daily, 29 Juni 2021

Pertanian merupakan salah satu sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Sejarah mencatat ketika krisis ekonomi besar menerjang pada tahun 1998, sektor pertanian Indonesia bisa bertahan, bahkan tetap tumbuh positif. Saat itu, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif 0,26% disaat pertumbuhan ekonomi ambruk hingga mencapai minus (-13,10%).

Begitu pula saat krisis 2008, krisis yang menyebabkan kehancuran sistem keuangan dunia yang berdampak kelumpuhan pada banyak sektor di seluruh dunia. Ekonomi dunia terpuruk hingga minus (-0,1%). Negara-negara industri Eropa dan eksportir Asia menjadi korban dampak krisis global. Namun Indonesia mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan sektor pertanian bahkan tercatat naik signifikan sebesar 14,4% pada tahun 2008. Gambaran ini menunjukkan kinerja sektor pertanian memiliki pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Kinerja positif sektor pertanian pada tahun 2008 juga terlihat dari catatan neraca perdagangan ekspor-impor. Volume ekspor pertanian tahun tersebut tumbuh 12,9% dan impor turun sebesar 20,9%. Keadaan terkait dengan kondisi kelangkaan pangan di pasar global pada tahun tersebut. Ancaman kelangkaan pangan terjadi sebagai salah satu dampak krisis ekonomi global. Indonesia sebagai salah satu negara pertanian di Asia, tidak terlalu terdampak oleh krisis global yang terjadi.

Saat ini, pada situasi merebaknya virus covid-19 pada awal tahun 2020 yang telah menyebabkan ekonomi dunia mengalami resesi dan kontraksi pada tahun 2020 sebesar -3% (IMF, 2021), Indonesia juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi minus (-2,07%) dan hampir seluruh sektor mengalami kontraksi namun sektor pertanian kembali mengukuhkan kekuatannya. Sektor ini sebagai salah satu sektor tangguh yang mampu tumbuh positif sebesar 3,16% (BPS, 2021).

Potensi Pertanian

Salah satu sektor riil yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia adalah sektor pertanian. Jika tidak ada bahan pangan hasil sektor pertanian, manusia akan mati. Sektor pertanian sangat penting karena memiliki banyak peranan. Sumber daya alam telah memungkinkan tumbuhkan tanaman dan hidupnya hewan dan ikan. Jika ditransaksikan dan diusahakan, akan menjadi kegiatan pertukaran barang dan jasa.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Keanekaragaman hayati darat Indonesia merupakan terbesar nomor dua di dunia setelah Brazil. Bahkan keanekaragaman laut, Indonesia menduduki peringkat pertama. Keragaman jenis komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan sudah lama diusahakan untuk sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa dataran tinggi dan rendah mendukung keanekaragaman hayati tersebut. Limpahan sinar matahari dan intensitas hujan yang

merata sepanjang tahun memungkinkan untuk aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Gunung berapi yang banyak dimiliki oleh Indonesia, walaupun mempunyai dampak buruk berupa bencana alam, tetapi abu vulkaniknya sangat bermanfaat untuk pertanian karena banyak mengandung mineral yang menyuburkan tanaman. Tidak heran jika masa dahulu wilayah Indonesia pernah menjadi rebutan penjajah asing demi kekayaan alam yang melimpah di Indonesia.

Sejarahnya, sejak pra kolonial hingga era penjajahan, penduduk nusantara telah makmur karena pertanian. Berbagai catatan sejarah dunia menyebutkan kerajaan-kerajaan di Nusantara kekayaannya telah menyamai kerajaan-kerajaan di India. Era penjajahan Belanda, produk utama pertanian diperdagangkan secara monopoli. Pemerintah kerajaan Hindia Belanda mengintegrasikan pertanian dengan aturan Sistem Tanam Paksa (1830 – 1870). Dan berhasil menjadikan Kerajaan Belanda menjadi salah satu kerajaan terkaya di dunia waktu itu.

Pertanian di Nusantara telah memberikan bukti kekayaan kepada siapa yang mengelolanya. Kembali pada jati diri perekonomian bangsa yang sudah terbukti selama ratusan bahkan ribuan tahun mampu memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Dan saat Indonesia mengalami krisis dan pandemi, pertanian kembali tampil di depan dan melindungi rakyat Indonesia dari kelaparan. Sehingga sudah saatnya pemerintah memfokuskan pembangunan ekonominya kepada pertanian.

Bisa dikatakan Pertanian di Indonesia menjadi sebuah potensi yang harus dimaksimalkan oleh semua pihak. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Ancaman Pertanian

Tetapi melihat kontribusi pertanian pada PDB Indonesia terus mengalami penyusutan hingga 1,22 persen dalam satu dasa warsa ini menunjukkan bahwa pembangunan di sektor pertanian terus mengalami kemunduran. Lahan pertanian mengalami penyusutan hingga 150 hektar setiap tahun (Kementerian ATR/BPN, 2021). Kondisi ini terjadi lantaran pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara lahan yang ada terbatas. Lahan ini beralih menjadi industri, perkantoran, kawasan bisnis, perumahan dan lain-lain.

Ditambah dengan generasi muda yang enggan terjun sebagai petani. Tercermin dari jumlah petani dengan usia 55 tahun ke atas mencapai 64 persen. Dan petani usia dibawah 25 tahun hanya mencapai 0,99 persen saja (Sutas, 2018).

Wajar jika generasi muda meninggalkan pertanian. Karena kehidupan petani jauh dari kata sejahtera. Nilai Tukar Petani yang menggambarkan indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani hanya berkisar di angka 100 bahkan sering di bawah 100. Artinya pendapatan petani dari usahanya tidak mencukupi untuk biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga petani. Tidak heran jika 46,30 persen penduduk miskin adalah petani.

Selama ini pembangunan pertanian selalu difokuskan pada upaya peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Akibatnya, tanpa disadari pembangunan

pertanian selalu berujung pada lemahnya daya saing produk pertanian dan belum baiknya tingkat kesejahteraan petani.

Daya Ungkit Pertanian

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah maupun pihak swasta sebagai investor di bidang pertanian bisa menciptakan peluang usaha tani dengan melihat berbagai aspek. Pertama, aspek permintaan. Sektor pertanian bisa dikembangkan dari sisi hulu, tengah sampai hilir. Dari sisi hulu, permintaan benih/bibit terus meningkat, ini merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Kebutuhan Indonesia sampai saat ini masih dipenuhi dari pasar impor. Walaupun ada dari Indonesia, kualitasnya masih kalah dari benih impor terutama sayuran. Perlu dikembangkan industri perbenihan di Indonesia untuk menangkap peluang usaha pertanian.

Kedua, aspek penawaran. Aspek ini terkait dengan produksi pertanian. Kecenderungan petani melakukan panen bersamaan, karena pertanian di Indonesia masih tergantung dengan iklim. Di saat panen raya penawaran meningkat sedangkan permintaan tetap. Yang terjadi harga produk pertanian jatuh. Tidak jarang petani merugi dengan keadaan ini. Di sini peran pemerintah sangat diharapkan untuk bisa menyerap produk pertanian, sehingga petani tidak merugi. Bisa menggandeng investor untuk menyerap dan membuka peluang industri UMKM untuk pengepakan, pengemasan dan pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah pertanian.

Ketiga, aspek distribusi. Distribusi sangat penting karena tidak semua wilayah menjadi sentra pertanian. Mengembangkan sistem pemasaran digital menjadi solusi untuk peluang usaha di bidang pertanian. Setelah hasil produk pertanian dikemas atau diolah maka pemasaran produk bisa lewat internet dan atau pemerintah melakukan promosi dan iklan produk pertanian tersebut.

Keempat, aspek teknologi. Perkembangan teknologi bisa mempengaruhi produsen untuk mengembangkan usahanya. Teknologi memungkinkan munculnya efisiensi usaha. Dengan adanya efisiensi, ada daya saing bagi suatu produk. Dengan teknologi memungkinkan produsen menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti makanan sehat atau produk organik yang sekarang sering dicari oleh konsumen golongan atas, bisa dikembangkan peluang usaha disektor pertanian.

Dengan adanya pandemi menunjukkan kekuatan sektor pertanian. Indonesia seperti diingatkan untuk kembali fokus dan menjadikan pertanian sebagai pondasi pembangunan. Sehingga rakyat tenang karena perut kenyang.

Dilema Panen Raya

Danisworo – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Daily, 11 Maret 2021

KONDISI musim panen raya padi sedang berlangsung di Provinsi Jawa Tengah untuk beberapa waktu terakhir ini, bahkan di wilayah tertentu ada yang sudah selesai panen.

Permasalahan klasik kembali muncul seiring dengan datangnya musim panen ini, yaitu anjloknya harga gabah di tingkat petani.

Dilansir oleh media, ada di kabupaten tertentu, harga gabah kering panen tercatat Rp 340 ribu sampai Rp 370 ribu rupiah per kuintalnya, yang berada jauh di harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan pemerintah sesuai SK Kemendagri no 24 tahun 2020 Rp 4.200 per kilogram di tingkat petani.

Fenomena ini didukung dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Februari, di Provinsi Jawa Tengah turun 0,60 persen dan di tingkat nasional mengalami penurunan 0,15 persen. Jika diamati lebih dalam lagi untuk melihat komponen pendukungnya, NTP di sektor tanaman pangan di Provinsi Jawa Tengah turun 1,97 persen dengan indeks yang diterima petani padi turun 2,01 persen dibanding bulan sebelumnya.

Berarti hasil pertanian tanaman padi yang dihasilkan dari penjualan produksi hasil pertanian tanaman padi mengalami penurunan. Di sisi lain biaya pengeluaran para petani tanaman pangan ini mengalami peningkatan, dengan tercatatnya konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 0,42 persen dan konsumsi untuk biaya produksi pertaniannya juga meningkat 0,58 persen.

Dari informasi tersebut dapat kita rasakan kondisi dilematis para petani padi, sukacita panen raya membawa efek yang tidak begitu menguntungkan mereka dan berulang di setiap musimnya. Data terbaru rilis BPS yang masih terkait dengan sektor pertanian adalah, tentang menurunnya luas panen padi selama tahun 2020 sebesar 0,69 persen dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah produksi gabah kering giling yang juga mengalami penurunan 0,17 juta ton atau 1,72 persen di Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran data di atas memberikan kekhawatiran tentang menurunnya gairah masyarakat untuk bergerak di sektor pertanian, yang masih menjadi salah satu sektor andalan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Ironi

Adalah menjadi sebuah ironi di tengah berbagai usaha yang digencarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui dinas instansi terkait untuk mengatasi anjloknya harga gabah di musim panen dengan realita bahwa kondisi ini selalu berulang setiap periodenya.

Peningkatan proses penyerapan gabah yang dilakukan pemerintah untuk cadangan beras nasional masih belum sepenuhnya menutup masalah.

Tidak bisa dipungkiri tingginya supply di masa panen raya sedikit menyulitkan solusi yang sudah diambil ini, meskipun dibatasi agar harganya tidak berada di bawah HPP yang sudah ditetapkan pemerintah. Bayang-bayang berita akan datangnya beras impor di tengah kondisi puncak panen makin menempatkan petani padi pada posisi yang sulit, meskipun kepastian informasi tentang impor beras masih terus dipertimbangkan.

Pada akhirnya, harus dicari solusi bersama tentang nasib petani padi ini di saat panen raya. Jangan sampai kegembiraan keberhasilan panen luruh dengan serta merta pada saat dihadapkan dengan harga jual yang tidak seperti harapan mereka, sementara beban yang

harus dipenuhi tidak memungkinkan berkurang dari sisi pengeluaran rumah tangganya, maupun pengeluaran sebagai biaya produksi proses usaha pertanian.

Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa petani terutama petani tanaman pangan menjadi bagian masyarakat yang tidak bisa terpisahkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang sedang digencarkannya. Posisi mereka yang cenderung lemah, berakibat rentan masuk dalam kategori penduduk miskin dan juga tergambarkan sebagai golongan yang minim tingkat kesejahteraannya.

Jangan biarkan mereka menyesali pilihan hidupnya atau bahkan tanpa kuasa bisa memilih, untuk bergerak di sektor pertanian.

Pertanian Kurang Menarik untuk Pemuda, Jadi Pahlawan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

**Suparman – BPS Kabupaten Pati
Media Online Seputar Muria, 27 Oktober 2021**

Seputarmuria.com, PATI – Pandemi covid-19 berdampak multisektor untuk semua daerah, termasuk dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil releas BPS Kabupaten Pati pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -1,15 (minus 1,15). Sedangkan dari hasil survei dampak covid yang direlas BPS Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa covid-19 telah memukul sektor pariwisata.

Selain itu, ada 3 (tiga) lapangan usaha yang paling terdampak meliputi; Sektor perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Transfortasi dan Pergudangan, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Adanya larangan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menjadikan tempat wisata dalam negeri sepi pengunjung.

Namun demikian, meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati mengalami penurunan (minus), ada sektor yang masih tumbuh positif yaitu sektor pertanian yang tumbuh 2,20 persen atau menyumbang pertumbuhan 0,51 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati.

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenagakerja. Dari 607.706 penduduk Pati yang bekerja, ada sebanyak 198.732 jiwa yang bekerja disektor pertanian. Sedangkan tahun 2019 penduduk Pati yang bekerja disektor pertanian sebanyak 165.115 jiwa.

Kondisi pandemi yang mengguncang semua sektor mengakibatkan banyak usaha dan perusahaan yang mengurangi pekerjaannya maupun merumahkan sementara pekerjaannya bahkan sebagian menutup usahanya. Kondisi tersebut dapat tercemin dari penyerapan tenagakerja masing-masing sektor yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Sektor yang paling banyak mengalami pengurangan tenaga kerja adalah sektor industri, dari 127.113 jiwa ditahun 2019 menjadi 100.314 jiwa pada tahun 2020 atau berkurang 26.799 pekerja.

Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian bisa dimaknai bahwa pertanian pahlawan dimasa pandemi menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di Pati. Hampir semua sektor mengalami pengurangan tenaga kerja bahkan tidak sedikit yang tutup usaha (gulung tikar), namun sektor pertanian tetap eksis. Bahkan dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2020, sektor pertanian masih tumbuh positif dimana sebagian sektor tumbuh negative (minus).

Pertanian tetap kokoh ditengah guncangan pandemi covid-19, menjadi ketika semua sektor sulit berkembang dan bertahan. Sektor pertanian merupakan bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial untuk dikembangkan ditengah modernisasi dan industri 4.0. Sebagai penyuplai bahan pangan nasional, pertanian di Pati harus dikembangkan.

Modernisasi alat pengolahan pertanian dan penyediaan bibit pertanian yang unggul menjadi daya tarik bagi PEMUDA (generasi Z dan generasi milenial) yang sudah melek dengan teknologi informasi. Harus ada peningkatan yang signifikan dari nilai tambah sektor pertanian sehingga sektor petanian bisa menguntungkan bagi generasi muda ingin terjun usaha dibidang pertanian.

“Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah dimana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang”

~Seno Gumira Ajidarma~

Bagian 3

Menyoal Beras

Diana Dwi Susanti

Kedudukan Beras

Beras merupakan komoditi yang sangat strategis dalam perannya memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial serta politik. Beras merupakan sumber utama kalori dan protein yang dalam jangka pendek sulit disubstitusikan dengan komoditi lain. Sehingga fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi di masyarakat. Permintaan beras yang selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar membuat kesenjangan semakin besar antara produksi dan konsumsi.

Besarnya gap, selisih antara produksi dan konsumsi beras, perlu diwaspadai mengingat besarnya peran beras di dalam perekonomian Indonesia. Beras adalah makanan pokok 260 juta lebih rakyat Indonesia. Komoditas beras selalu berkaitan erat dengan kebijakan moneter dan menyangkut masalah sosial politik. Ibarat kereta, beras merupakan lokomotif yang mengendalikan harga pangan lainnya. Jika tidak dikendalikan akan memicu kenaikan harga kebutuhan pangan lainnya.

Harga beras dalam bobot harga sembilan bahan pokok menduduki posisi 60 – 65 persen. Dari bobot tersebut menggambarkan bahwa kelangkaan beras di negeri ini akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Begitupun sebaliknya, walaupun ada beras tetapi harganya mahal dapat menimbulkan potensi kerusuhan. Biasanya perut lapar akan mendorong orang berpikir tidak rasional.

Produksi vs Konsumsi Beras

Isu kecepatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,3 – 1,5 persen per tahun harus diimbangi dengan laju pertumbuhan produksi padi. Negara harus menjamin keamanan ketersediaan kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakat.

Tetapi kenyataannya justru setiap tahun alih fungsi lahan diperkirakan mencapai 100 ribu hektar per tahun menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya 30 ribu hektar per tahun. Hal ini tentu mengurangi produksi setiap tahunnya.

Selain itu, keberadaan beras nasional terpenuhi oleh hasil produksi di Pulau Jawa sekitar 63 persen. Tentu ini menjadi ancaman ketahanan pangan Indonesia, karena di sisi lain lahan pertanian di pulau terpadat ini terus menyusut setiap tahunnya. Dominasi Jawa

sebagai basis produksi pangan cukup berbahaya karena Jawa sebagai pusat ekonomi dan terpadat penduduknya di antara pulau lainnya.

Diversifikasi Beras

Melihat berbagai permasalahan beras dan semakin menyempitnya lahan pertanian, diversifikasi pangan merupakan solusi untuk mengurangi ketergantungan beras. Fakta menunjukkan bahwa sumber pangan pokok yang hanya bertumpu pada satu sumber karbohidrat yaitu beras akan melemahkan ketahanan pangan sekaligus menimbulkan kesulitan dalam pengadaannya. Apabila hal ini terus terjadi, dalam 10 – 15 tahun mendatang Indonesia diperkirakan akan mengalami kerawanan pangan jika konsumsi masyarakat hanya pada satu jenis makanan. Perlu menggali keanekaragaman jenis pangan serta perubahan pola pikir ketergantungan hanya kepada beras di nusantara untuk mengimbangi kebutuhan konsumsi beras.

Keberhasilan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun juga mampu mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai negara agraris yang kuat dan mandiri. Melalui kebijakan ini pula kemandirian dan kebudayaan pangan nasional dapat kembali berjaya.

Menyoal Impor Beras di Tengah Pandemi

Irma Nur Afifah – BPS Kabupaten Kendal

Jateng Daily, 13 April 2021

Program strategis nasional diantaranya adalah program ketahanan pangan, hal ini didukung dengan dibukanya food estate atau lumbung pangan di beberapa area di Indonesia, yang digaungkan sejak pertengahan tahun lalu. Food estate secara harfiah artinya perusahaan perkebunan/pertanian pangan yang merupakan konsep pengembangan pangan terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan (Indonesia.go.id). Hal ini sejalan dengan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Nasional tahun 2020 yang menyebutkan target program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sesuai RPJMN 2020-2024 yaitu poin pertama Lumbung Pangan Masyarakat. Dengan adanya food estate diharapkan ketahanan pangan makin meningkat dan kokoh. Ketahanan pangan kokoh, artinya suatu kondisi dimana daya beli meningkat, inflasi menurun, pangan tersedia, dan harga-harga stabil.

Menyikapi perihal ketersediaan pangan, Pemerintah menerapkan dua kebijakan pada akhir tahun 2020 yang lalu, pertama melakukan impor beras sebagai cadangan beras pemerintah dan kedua penyerapan gabah oleh Bulog saat panen raya pada triwulan 3 2021 mendatang. Secara nasional data yang di rilis BPS mencatat potensi produksi beras triwulan 1 2021 meningkat 26 persen dibanding tahun 2020, yaitu dari sekitar 11 juta ton menjadi 14 juta ton. Sementara menurut data Bulog, cadangan beras diperkirakan mencukupi sampai pertengahan 2021.

Lantas mengapa muncul polemik impor beras ditengah stok beras yang mencukupi dan panen raya oleh petani? Hal ini kontradiktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional dan program strategis nasional yaitu kedaulatan pangan dengan rancangan food estate atau lumbung pangan menuju swasembada pangan yang kokoh.

POLEMIK IMPOR BERAS

Ketahanan pangan menjadi isu yang kian hangat karena kebijakan rencana impor beras. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berimbas pada terguncangnya ekonomi dalam hal ini terkait dengan pasokan dan distribusi pangan domestik yang terkendala karena pembatasan sosial. Namun demikian sejatinya pandemi ini tidak berpengaruh signifikan pada kegiatan pertanian. Hal ini terbukti pada interview terhadap petani di berbagai wilayah, dimana produksi padi terhitung dalam kondisi panen raya yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Namun sebaliknya, rencana impor beras ternyata justru membuat petani merugi, pasalnya rencana ini memicu anjlognya harga gabah di level petani. Dukungan bagi petani timbul dari berbagai pihak, diantaranya aksi demo mahasiswa pertanian yang menolak rencana impor beras oleh kementerian perdagangan karena dinilai kurang tepat pada kondisi ketersediaan stok beras dan panen raya. Dukungan lain muncul dari himpunan pengusaha, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan ormas dari berbagai wilayah di tanah air. Oleh karena itu diharapkan pemerintah lebih bijak menyikapi polemik ini untuk mendukung petani dengan cara mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani dan menyerap hasil panen lokal untuk cadangan beras pemerintah.

CADANGAN/IRON STOCK BERAS

Cadangan/iron stock beras sejatinya sangat penting, dalam Regulasi Penugasan Pemerintah disebutkan Perum Bulog ditunjuk sebagai penyelenggara usaha logistik pangan pokok yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Bulog berperan dalam pembelian dan penyerapan beras untuk kepentingan pemerintah dengan syarat kualitas gabah kering panen, gabah kering giling dan persyaratan kualitas beras. Selain itu yang tak kalah penting adalah penyerapan beras diutamakan dari petani lokal yang dipergunakan untuk cadangan beras pemerintah. Beras ini kelak menjadi beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan serta cadangan penanggulangan keadaan darurat dan bencana.

Secara nasional data yang di rilis BPS bahwa potensi produksi beras pada triwulan 1 tahun 2021 meningkat 26 persen dibanding tahun 2020, yaitu dari sekitar 11 juta ton menjadi 14 juta ton. Catatan Bulog cadangan/iron stock beras sampai dengan akhir Desember 2020 sebanyak 800 ribu ton beras, sementara kebutuhan akan beras sekitar 1-1,5 juta ton beras. Itulah mengapa pada akhir Desember lalu pemerintah telah menetapkan kebijakan impor beras untuk mencukupi stok beras di bulog, sebagai antisipasi ketersediaan pangan di tanah air mengangak pandemi yang belum berhenti.

Stok beras selalu dicadangkan dengan kisaran 1-1,5 juta ton per tahun. Pengadaan beras oleh Bulog bisa dari domestik atau luar negeri bila input beras dalam negeri diperkirakan tidak mencukupi. Guna cadangan beras adalah untuk kebutuhan mendesak seperti bansos, operasi pasar dan stabilitas harga. Kondisi saat ini cadangan beras yang ada di Bulog

sebesar 800 ribu ton, artinya masih ada kekurangan sekitar 200-700 rb ton. Sejah ini kebijakan impor beras memang baru rencana, belum ada keputusan terkait perlu impor beras atau tidak. Namun memperhatikan kegaduhan terkait impor beras yang ricuh, presiden menegaskan bahwa tidak akan impor beras sampai Juni 2021 mendatang, hal ini juga didukung dengan data ketersediaan pangan dan panen raya di sejumlah daerah.

PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Menyoal polemik ini, sejatinya ada benang merah yang dapat ditarik, yaitu pentingnya komunikasi dan koordinasi antar kementerian/Lembaga terkait. Kementerian perdagangan, kementerian pertanian dan Bulog seyogyanya mampu menghadirkan solusi agar kebutuhan cadangan beras bisa di putuskan apakah mencukupi dari produk lokal atau tidak sebelum impor. Informasi dari Dirut Bulog Budi Waseso, stok beras hingga Mei mendatang masih surplus. Serapan beras oleh Bulog pada produk domestik juga cukup baik, artinya jaminan ketersediaan dirasa aman bisa swasembada, sehingga kebijakan impor perlu dikaji ulang. Tercatat cadangan beras sampai Maret 2021 di Bulog sebesar 883 rb ton ditambah serapan pada panen raya memungkinkan stok beras mencapai lebih dari 1 juta ton.

Komunikasi dan koordinasi antara institusi terkait sangatlah penting, yaitu kementerian pertanian dari sisi kepastian ketersediaan cadangan beras dari hasil pertanian, sedangkan kementerian perdagangan berkontribusi terkait perlu tidaknya impor beras berdasar hasil inventarisasi dari kementan, sedangkan perum bulog sebagai institusi yang menjadi center poin penyediaan stok beras. Ketiga Lembaga ini memungkinkan pengambilan kebijakan secara tepat tanpa harus merugikan petani sebagai penghasil beras di negeri ini.

Disisi lain Food estate yang diharapkan mampu mendukung kenaikan cadangan pangan nasional memang belum berjalan optimal, karena adanya pandemic, anggaran food estate tahun lalu dialihkan pada refocusing penanganan Covid-19, namun demikian program ini tetap menjadi program strategis nasional dan merupakan sebuah harapan menuju ketahanan pangan yang makin meningkat dan kokoh di masa mendatang.

Meneropong Masa Depan Produksi Beras Kota Pekalongan

Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan
Pekalongan.suaramerdeka, 6 November 2021

Ketersediaan pangan terutama beras merupakan isu penting yang selalu hangat dibicarakan. Hal ini tak lepas dari peran beras yang menjadi primadona masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Ketersediaan beras ini erat kaitannya dengan produksi padi dan luas panen, yang menjadi penentu kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Setiap daerah pasti melakukan pemantauan terhadap produksi beras dan kecukupan

stok beras untuk daerah tersebut, salah satunya Kota pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di pesisir utara laut jawa dan bukan wilayah lumbung padi di Jawa Tengah.

Kendati demikian, sebagai kota minapolitan, Kota Pekalongan masih memiliki potensi produksi beras sampai tahun 2021. Akan tetapi produksi beras yang dihasilkan nilai tambahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan subsektor perikanan. Nilai itu berdasarkan kategori usaha pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Pekalongan. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi produksi padi di Kota Pekalongan?

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada 1 November 2021 menyebutkan bahwa pada tahun 2021 luas produksi beras sebesar 4.091 ton. Angka produksi beras itu lebih rendah dibanding 2020 yang mencapai 4.443 ton. Artinya pada 2021 terjadi penurunan sebesar 7,92 persen.

Penurunan ini disebabkan berkurangnya luas panen di Kota Pekalongan pada tahun 2021. Dari rilis BRS BPS terlihat bahwa pada tahun 2021 luas panen di Kota Pekalongan sebesar 1.428 hektar. Angka itu lebih sempit dibanding tahun 2020 yang mencapai 1.628 hektar. Artinya ditahun 2021 terjadi penurunan sebesar 12,29 persen dibanding tahun 2020.

Mencermati data ini terlihat bahwa potensi pertanian padi di Kota Pekalongan semakin menurun. Pemicunya adalah banjir rob yang melanda lahan pertanian terutama di wilayah Pekalongan Utara dan Barat.

Selain itu adanya serangan hama, saluran irigasi yang tercemar, dan bocornya tanggul juga memberikan andil pada penurunan produksi beras di Kota Pekalongan.

Jika kita telisik lebih ke belakang, ternyata penurunan produksi padi di Kota Pekalongan sejak 2018. Kemudian penurunan produksi padi terus terjadi hingga 2021.

Pada tahun 2018 produksi beras di Kota Pekalongan sebesar 5.066 ton sedangkan tahun 2021 produksi 4.091 ton. Data itu menunjukkan penurunan produksi beras yang sangat drastis karena hampir 1.000 ton atau sebesar 19,24 persen.

Hal sama terjadi pada luas panen di mana pada tahun 2018 seluas 1.650 hektar menyempit menjadi 1.428 hektardi tahun 2021. Lalu, Bagaimana dengan masa depan produksi padi di Kota Pekalongan di tahun-tahun mendatang.

Jika kita menelaah dari kondisi produksi beras dan luas panen saat ini maka besar kemungkinan produksi padi di Kota Pekalongan akan semakin menurun. Melihat kondisi lahan pertanian yang banyak terkena banjir rob maupun irigasi yang kurang baik karena sudah tercemar limbah batik, petani akan berpikir dua kali untuk menanam padi di lahannya.

Apalagi semakin berkurangnya hasil yang didapat dengan biaya input besar yang harus ditanggung oleh petani menjadikan petani lebih membiarkan lahannya tidak ditanami. Belum lagi masalah tanggul bocor yang perlu ditangani karena berdampak ke sawah-sawah sekitar tanggul.

Selain itu juga petani masih memiliki resiko gagal panen akibat hama dan cuaca. Tak

heran jika kita melihat semakin banyak sawah yang dibiarkan tidak digarap karena beban operasional yang harus ditanggung petani melebihi output yang didapatkan. Namun masih perlu kajian yang lebih mendalam mengenai masa depan produksi beras di Kota Pekalongan.

Lalu kenapa kita harus membandingkan produksi padi hanya mulai tahun 2018? Hal ini karena pada tahun 2018 dimulainya penyempurnaan penghitungan luas panen dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

Jika kita flashback kembali sejak 2018, BPS telah bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

Penyempurnaan itu juga diiringi dengan penyempurnaan dalam berbagai tahapan penghitungan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif tidak hanya luas lahan baku sawah saja tetapi juga perbaikan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras.

Panen Melimpah, Petani Resah

Rukini – BPS Kabupaten Grobogan Jateng Pos, 17 Maret 2021

Sejatinya petani merasa bangga manakala saat menikmati panennya yang melimpah. Tapi justru tidak dirasakan petani pada musim panen raya sekarang ini. Disaat panen curah hujan tinggi, bahkan ada yang terkena banjir. Penebas maupun tengkulak sepi, tidak ramai seperti tahun sebelumnya. Harga jual Gabah Kering Panen (GKP) yang terus menurun. Produktivitas juga turun akibat hama tikus. Sementara panen menggunakan thresher sudah jarang dilakukan karena harga gabahnya jauh dibawah harga gabah jika dipanen menggunakan combine harvester. Petani sebagian besar tidak melakukan panen sendiri karena terkendala cuaca panas matahari yang tidak optimal dalam proses penjemuran. Dengan adanya combine harvester, banyak petani yang tidak bisa bekerja (tambahan penghasilan) sebagai buruh panen. Berbeda jika panen menggunakan thresher yang membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Kondisi seperti ini yang membuat resah petani selain terpaksa melepaskan gabah dengan harga yang rendah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) juga banyak petani yang tidak mendapatkan tambahan pendapatan. Harapan peningkatan ekonomi disaat panen raya justru tidak tercapai.

Berdasar peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan HPP untuk gabah atau Beras, HPP GKP di petani Rp 4.200 per kilogram serta di penggilingan Rp 4.250 per kilogram. Sedangkan HPP Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 5.250 per kilogram dan di gudang perum Bulog Rp 5.300 per kilogram. Tujuan dari kebijakan HPP adalah agar petani padi menerima harga gabah yang layak, sehingga

mereka menerima insentif untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun demikian, ternyata para tengkulak bisa dan sering menciptakan harga sendiri sesuai keinginan tengkulak. Tengkulak membeli gabah para petani dengan harga yang rendah dibawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) di awal bulan Maret 2021 melaporkan harga rata-rata gabah secara nasional mengalami penurunan jelang masuknya masa panen raya. Harga GKP di tingkat petani Februari 2021 terkoreksi 3,31 persen menjadi Rp 4,758 per kilogram. Sementara harga GKP diluar kualitas Februari 2021 sebesar Rp 4.340 per kg. Penyebab turunnya harga GKP karena pasokan gabah mulai mengalami kenaikan seiring semakin banyaknya daerah yang panen. Selain karena pasokan gabah yang mulai naik, penurunan harga juga dipicu oleh turunnya kualitas gabah. Kadar air GKP pada Februari 2021 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kualitas turun. Kadar air mencapai 19,08 persen pada Februari 2021 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2021 sebesar 18,56 persen. Sementara kadar air di luar kualitas bulan Februari 25,84 persen jauh lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2021 sebesar 22,93 persen

Dari sisi produksi, BPS memproyeksikan ada kenaikan produksi gabah pada Januari-April 2021 sebesar 26, 88 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton gabah. Namun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Secara nasional Februari 2021 sebesar 103,10 atau turun 0,15 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,06 persen, lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,21 persen.

Terlepas dari itu semua, petani hanya bisa berharap perhatian penuh dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada baik dilihat dari keadaan alam (banjir, kering, hama), ekonomi (harga jual GKP yang terus turun sedang input naik, kelangkaan pupuk, price spread antara petani dan konsumen lebar). Jika surplus hasil pertanian semakin meningkat otomatis berdampak pada peningkatan standar kehidupan petani.

*“Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita
berani untuk mewujudkannya”*

~Walt Disney~

III

LITERASI EKONOMI

Diana Dwi Susanti

Perjalanan Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia terbentuk dari perekonomian perdesaan nusantara yang tergantung pada hasil pertanian. Kerajaan-kerajaan besar nusantara seperti Mataram Kuno, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit mengandalkan kegiatan perekonomiannya dari hasil pertanian. Pertanian ini menjadi pemikat pedagang-pedagang asing untuk datang di Indonesia. Karena tertarik dengan sumber daya alam seperti rempah-rempah berupa pala dan cengkeh, beras, emas, tembaga, timah, kayu, gading, tanduk badak, bulu burung yang keberadaannya menyebar di seluruh nusantara dengan potensinya masing-masing.

Pada abad ke-4 permulaan kerajaan nusantara menerima kedatangan pedagang dari India. Kemudian diikuti oleh pedagang dari Arab dan China. Perdagangan ini membuat nusantara tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh di dunia. Seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Perekonomian ini tercatat pada prasasti Canggal pada tahun 1358 yang menyebutkan sebanyak 78 lalu lintas penyeberangan laut antar pulau di dalam negeri nusantara.

Perdagangan ini sampai terdengar oleh bangsa-bangsa Eropa. Sehingga Portugis, Inggris dan Belanda melakukan ekspedisi ke nusantara. Bahkan menjadikan negara Indonesia menjadi negara jajahan yang kekayaan alamnya menjadi investasi di negaranya.

Pada 1836 Van De Bosch bertujuan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat eksportir produk pertanian yang nanti keuntungannya dikantongi oleh Belanda. Tanam Paksa yang dilakukan memang untuk memenuhi permintaan pasar di luar negeri.

Seperti produk kopi, gula, indigo, tembakau, teh, lada, kayu manis yang dihasilkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Memang kala itu Belanda tidak berinteraksi langsung dengan petani, mereka menggunakan bupati, wedana, dan kepala desa untuk berkoordinasi proyek ini.

Petani saat itu juga memproses hasil taninya, jadi tidak hanya mentah. Petani juga mengelola pabrik yang sebenarnya sudah dibangun oleh Belanda. Kemudian para petani juga mendapatkan bayaran dengan sistem fluktuasi harga jual di pasaran.

Penjajahan Belanda berakhir dan jatuh ke tangan Jepang. Hal sama terjadi pada Indonesia, kekayaan alam dikeruk untuk kepentingan kekaisaran Jepang hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Era kepemimpinan Soekarno mengalami tiga fase perekonomian. Fase pertama penataan ekonomi pasca kemerdekaan, fase kedua memperkuat pilar ekonomi dan fase ketiga fase krisis yang mengakibatkan hyper inflasi. Tahun 1961 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,74 persen. Antara tahun 1962 – 1966 pertumbuhan ekonomi berkisar antara 2 – 3 persen. Sempat mengalami minus pada tahun 1963 hingga -2,24 persen. Era pemerintahan ini ditutup dengan inflasi hingga 650 persen pada tahun 1965.

Pada awal era kepemimpinan Soeharto, Indonesia mulai membuka lebar investor asing dengan mengeluarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal. Pertumbuhan ekonomi hingga tahun 1970 mulai terdongkrak hingga 10,92 persen. Sampai dengan tahun 1997 pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 6 – 7 persen. Tahun 1998 terjadi gejala krisis moneter menghantam Indonesia. Pertumbuhan ekonomi minus 13,13 persen.

Era reformasi diawali dengan kepemimpinan B.J. Habibie. Masa transisi ini mampu memulihkan kondisi ekonomi menjadi tumbuh 0,79 persen pada tahun 1999. Berbagai kebijakan keuangan dan moneter diterbitkan oleh Habibie sehingga kurs rupiah menguat dari Rp 16 ribu menjadi Rp 7 ribu.

Lanjut era kepemimpinan Gus Dur pertumbuhan ekonomi perlahan tumbuh pada kisaran 3 – 4 persen. Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diterapkan pada masa pemerintahan ini. Pemerintah membagi dana berimbang antara pusat dan daerah. Era Megawati yang sebelumnya wakil presiden pada era kepemimpinan Gus Dur dan naik menjadi presiden, ekonomi mulai tumbuh di atas 4 – 5 persen.

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi mulai membaik dengan kisaran 5 – 6 persen. Walaupun pada akhir pemerintahan terdampak krisis finansial global, hingga perekonomian melambat 4,63 persen.

Era kepemimpinan Jokowi hingga sekarang pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dekade ini menunjukkan pergeseran dari sektor riil ke sektor jasa. Pertumbuhan sektor jasa walaupun kontribusinya tidak sebesar manufaktur dan pertanian tetapi geliat pertumbuhannya di atas 6 persen. Dan memulai membangun kekuatan ekonomi baru dengan pertanian dan industri sebagai penopang kekuatan ekonomi.

Ekonomi Menguat di Tahun Kedua Pandemi

Kinerja Ekonomi Indonesia Tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,69 persen, menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi. Hal ini patut dicatat mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti Filipina, Mexico, Jerman, Perancis, dan Italia. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari 57,3 di tahun 2020 ke 62,2 juta

rupiah di tahun 2021 (naik 8,6%), atau 4.349,5 dolar AS. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok *Upper-Middle Income Countries* pada tahun 2021.

<https://jateng.bps.go.id>

“Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari”

~ Barack Obama ~

Bagian 1

Bangkit Dari Resesi

Diana Dwi Susanti

Indonesia bisa bangkit dari resesi pada tahun ini di tengah masih berlanjutnya krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Percepatan vaksinasi dan penanganan Covid-19, dukungan moneter dan fiskal yang kuat dan terukur, serta penciptaan lapangan kerja menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia.

Tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 3,69 persen. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia melampaui level periode prapandemi. APBN yang fleksibel dan responsif selama pandemi mampu menjaga keberlanjutan laju pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang sangat dinamis sepanjang 2021, khususnya terkait munculnya gelombang Delta, mampu direspon dengan cepat oleh Pemerintah melalui kebijakan refocusing APBN 2021. Perluasan dan perpanjangan program perlindungan sosial serta dukungan pada sektor usaha dapat menjaga kinerja tetap mampu tumbuh positif pada Triwulan III 2021. Realisasi sementara Belanja Negara T.A. 2021 mencapai Rp 2.786,8 Triliun (101,3% dari pagu). Sementara realisasi sementara Program PEN 2021 sebesar Rp658,6 Triliun (88,4% dari Pagu Rp744,77 T), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp575,8 Triliun. Tetap terjaganya laju pemulihan ekonomi juga memberikan efek positif pada Pendapatan Negara yang tumbuh sebesar 21,6%, terutama ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 19,2% (yoy) atau mencapai 103,9% dari target APBN dan kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019

Pandemi Tahun Kedua

Sejak akhir 2021, berbagai negara mengalami gelombang baru Covid-19 akibat varian tersebut. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat mengalami penurunan. Saat ini, Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36 ribu kasus per 6 Februari. Namun, tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta. Meskipun demikian, harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan.

Ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan

pandemi gelombang Omicron. Pemerintah akan mendorong penegakan protokol kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mempercepat program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 48,2% populasi untuk dosis lengkap. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam mendukung hal tersebut, APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah

Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Today, 2 September 2021

Ekonomi Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih. Dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi pada kondisi triwulan II tahun 2019. Dimana pada kondisi tersebut keadaan masih normal, belum ada virus covid-19 menyerang dunia. Kinerja ekonomi pada saat itu mencapai 248,46 T rupiah (terkoreksi harga tahun dasar 2010). Dan capaian kinerja pada saat ini yaitu triwulan II tahun 2021 sebesar 247 T rupiah (terkoreksi harga tahun dasar 2010) sumber: <https://jateng.bps.go.id>. Masih ada selisih sebesar 1,46 T rupiah untuk bisa menyamai kinerja ekonomi pada kondisi normal. Atau pertumbuhan ekonomi saat ini dibandingkan dengan kondisi normal triwulan II tahun 2019 masih terkontraksi sebesar -0,59% (BPS data diolah).

Namun jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 pada saat puncak pandemi covid mulai mengganas di Jawa Tengah kinerja ekonomi tumbuh sebesar 5,66%. Ibarat masuk jurang resesi yang terdalam, ekonomi Jawa Tengah masih dalam taraf naik tangga. Belum mencapai kondisi pada titik 0 (normal). Jadi pemulihan ekonomi di Jawa Tengah belum kembali pada masa sebelum pandemi covid-19 terjadi.

Konsumsi Masyarakat

Walaupun sudah ada peningkatan daya beli masyarakat pada saat ini dibandingkan dengan pada saat pandemi (triwulan II 2020) yang tumbuh sebesar 4,63% tetapi jika dibandingkan dengan keadaan normal (triwulan II 2019) daya beli masyarakat masih kontraksi sebesar -0,34%. Kontraksi ini sudah cukup tipis dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2020 dengan triwulan yang sama yang terpuruk pada angka -4,75% dibandingkan dengan triwulan II 2019.

Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro pada awal tahun untuk pulau Jawa dan Bali, hal ini membuat aktivitas masyarakat sedikit longgar dibandingkan ketika PSBB pada triwulan II tahun 2020. Kinerja ekonomi kembali berjalan. Meskipun tidak semua bisa berjalan normal seperti tahun 2019 sebelum masa pandemi.

Kondisi dipengaruhi oleh belum normalnya konsumsi masyarakat untuk pengeluaran transportasi/angkutan, pengeluaran rekreasi dan budaya, pengeluaran untuk akomodasi dan restoran dan pengeluaran untuk keperluan jasa pribadi dan jasa lainnya. Pengeluaran

ini biasanya dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Konsumsi mereka masih tertahan karena kondisi pandemi yang belum pulih.

Akibatnya sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata belum bisa tumbuh seperti kondisi normal. Wisatawan mancanegara juga belum mulai berkunjung di negara Indonesia khususnya Jawa Tengah. Karena masih berlibaku dengan virus covid-19 yang jumlah kasus aktifnya terus meningkat sejak awal Januari 2021.

Pemulihan Ekonomi

Yang membuat ekonomi belum kembali ke kondisi normal adalah daya beli masyarakat menengah ke atas masih tertahan. Mereka yang biasa membelanjakan uangnya pada sektor-sektor leisure ekonomi pada saat ini masih menahan diri karena adanya PPKM dan melonjaknya virus covid-19 pada bulan Juni 2021 pasca perayaan hari raya Idul Fitri.

Sektor leisure ekonomi ini memang cukup berdampak positif dalam menggerakkan kinerja ekonomi. Efek domino yang ditimbulkan dari kegiatan wisata mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor bergerak naik. Namun pada kondisi saat ini, dimana kegiatan manusia dibatasi untuk mencegah penularan, kegiatan pariwisata seperti mati suri. Hal ini membuat para pelaku ekonomi di bidang pariwisata ikut menanggung beban kehidupan yang berat di masa pandemi.

Jika covid-19 belum sepenuhnya hilang, maka pergerakan masyarakat masih terbatas. Leisure ekonomi belum bisa menjadi andalan untuk menggerakkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah yaitu dengan peningkatan ekspor non migas. Potensi pertanian dan industri pengolahan dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan sektor perdagangan Jawa Tengah.

Mendorong Kinerja Ekonomi Semester II

Kedua sektor ini merupakan sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Saat ini ekonomi global maupun Indonesia sedang tumbuh. Ini peluang baik untuk Jawa Tengah meningkatkan kinerja ekspor dari sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pada saat ini kinerja sektor industri pengolahan dan pertanian masih lebih rendah. Tahun 2019 kinerja industri mencapai 84,65 T rupiah, untuk saat ini kinerja industri 83,29 T rupiah (PDRB terkoreksi harga 2010), atau pertumbuhannya masih kontraksi sebesar -1,61% dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi.

Demikian juga dengan kinerja pertanian, walaupun beberapa kali mendongkrak perekonomian Jawa Tengah selama pandemi, namun jika dibandingkan pada saat sebelum pandemi yaitu pada triwulan II 2019 sektor ini masih berkontraksi -4,93%.

Sektor produktif Jawa Tengah yang dapat didorong adalah industri makan dan minum, industri kimia farmasi dan tanaman hortikultura. Hal ini dikarenakan sektor tersebut memiliki dampak ekonomi yang cukup tinggi dengan risiko rendah.

Untuk mendukung industri tersebut membutuhkan produk hasil dari pertanian. Potensi pertanian Jawa Tengah yang juga menjadi ekonomi kerakyatan masih tergolong tinggi. Bahkan produksi padi Jawa Tengah termasuk yang tertinggi tingkat nasional.

Hanya saja sektor pertanian masih kurang mendapatkan perhatian. Jalur distribusi, pemasaran dan perlindungan harga hasil pertanian di Jawa Tengah masih tradisional. Akibatnya jika panen raya harga sangat murah. Ini sangat merugikan petani. Bahkan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah semenjak Maret sampai dengan Juli 2021 angkanya di bawah 100. Artinya perubahan harga yang diterima petani jauh lebih lambat dibandingkan harga yang dibayar petani. Hal ini membuat petani harus membayar lebih untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usahanya dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani.

Pada kondisi sulit ini, petani butuh dukungan untuk memasarkan hasil dengan kemajuan teknologi. Produk pertanian di desa bisa diendorse oleh para influenser maupun pejabat yang telah memiliki follower untuk membantu memasarkan produk-produk mereka. Tentu mereka juga dimodali dan dibekali ilmu cara pengemasan barang yang good looking.

Terakhir, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan jika ingin perekonomian kembali pulih. Dengan menurunnya jumlah kasus aktif covid-19 maka kebijakan PPKM skala mikro bisa dihentikan. Mobilitas masyarakat bisa kembali seperti semula dan ekonomi akan pulih dan tumbuh kembali secara normal. Ayo jaga protokol kesehatan untuk Indonesia Tumbuh Indonesia Tangguh!

Sektor Unggulan Jawa Tengah

Hendrawan Toni Taruno – BPS Provinsi Jawa Tengah Tribun Jateng, 13 September 2021

Ekonomi Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih. Dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi pada kondisi triwulan II tahun 2019. Dimana pada kondisi tersebut keadaan masih normal, belum ada virus covid-19 menyerang dunia. Kinerja ekonomi pada saat itu mencapai 248,46 T rupiah (terkoreksi harga tahun dasar 2010). Dan capaian kinerja pada saat ini yaitu triwulan II tahun 2021 sebesar 247 T rupiah (terkoreksi harga tahun dasar 2010) sumber: <https://jateng.bps.go.id>. Masih ada selisih sebesar 1,46 T rupiah untuk bisa menyamai kinerja ekonomi pada kondisi normal. Atau pertumbuhan ekonomi saat ini dibandingkan dengan kondisi normal triwulan II tahun 2019 masih berkontraksi sebesar -0,59% (BPS data diolah).

Namun jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 pada saat puncak pandemi covid mulai mengganas di Jawa Tengah kinerja ekonomi tumbuh sebesar 5,66%. Ibarat masuk jurang resesi yang terdalam, ekonomi Jawa Tengah masih dalam taraf naik tangga. Belum mencapai kondisi pada titik 0 (normal). Jadi pemulihan ekonomi di Jawa Tengah belum kembali pada masa sebelum pandemi covid-19 terjadi.

Konsumsi Masyarakat

Walaupun sudah ada peningkatan daya beli masyarakat pada saat ini dibandingkan dengan pada saat pandemi (triwulan II 2020) yang tumbuh sebesar 4,63% tetapi jika dibandingkan dengan keadaan normal (triwulan II 2019) daya beli masyarakat masih kontraksi sebesar -0,34%. Kontraksi ini sudah cukup tipis dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2020 dengan triwulan yang sama yang terpuruk pada angka -4,75% dibandingkan dengan triwulan II 2019.

Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro pada awal tahun untuk pulau Jawa dan Bali, hal ini membuat aktivitas masyarakat sedikit longgar dibandingkan ketika PSBB pada triwulan II tahun 2020. Kinerja ekonomi kembali berjalan. Meskipun tidak semua bisa berjalan normal seperti tahun 2019 sebelum masa pandemi.

Kondisi dipengaruhi oleh belum normalnya konsumsi masyarakat untuk pengeluaran transportasi/angkutan, pengeluaran rekreasi dan budaya, pengeluaran untuk akomodasi dan restoran dan pengeluaran untuk keperluan jasa pribadi dan jasa lainnya. Pengeluaran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Konsumsi mereka masih tertahan karena kondisi pandemi yang belum pulih.

Akibatnya sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata belum bisa tumbuh seperti kondisi normal. Wisatawan mancanegara juga belum mulai berkunjung di negara Indonesia khususnya Jawa Tengah. Karena masih beribaku dengan virus covid-19 yang jumlah kasus aktifnya terus meningkat sejak awal Januari 2021.

Pemulihan Ekonomi

Yang membuat ekonomi belum kembali ke kondisi normal adalah daya beli masyarakat menengah ke atas masih tertahan. Mereka yang biasa membelanjakan uangnya pada sektor-sektor leisure ekonomi pada saat ini masih menahan diri karena adanya PPKM dan melonjaknya virus covid-19 pada bulan Juni 2021 pasca perayaan hari raya Idul Fitri.

Sektor leisure ekonomi ini memang cukup berdampak positif dalam menggerakkan kinerja ekonomi. Efek domino yang ditimbulkan dari kegiatan wisata mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor bergerak naik. Namun pada kondisi saat ini, dimana kegiatan manusia dibatasi untuk mencegah penularan, kegiatan pariwisata seperti mati suri. Hal ini membuat para pelaku ekonomi di bidang pariwisata ikut menanggung beban kehidupan yang berat di masa pandemi.

Jika covid-19 belum sepenuhnya hilang, maka pergerakan masyarakat masih terbatas. Leisure ekonomi belum bisa menjadi andalan untuk menggerakkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah yaitu dengan peningkatan ekspor non migas. Potensi pertanian dan industri pengolahan dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan sektor perdagangan Jawa Tengah.

Mendorong Kinerja Ekonomi Semester II

Kedua sektor ini merupakan sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Saat ini ekonomi global maupun Indonesia sedang tumbuh. Ini peluang baik

untuk Jawa Tengah meningkatkan kinerja ekspor dari sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pada saat ini kinerja sektor industri pengolahan dan pertanian masih lebih rendah. Tahun 2019 kinerja industri mencapai 84,65 T rupiah, untuk saat ini kinerja industri 83,29 T rupiah (PDRB terkoreksi harga 2010), atau pertumbuhannya masih kontraksi sebesar -1,61% dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi.

Demikian juga dengan kinerja pertanian, walaupun beberapa kali mendongkrak perekonomian Jawa Tengah selama pandemi, namun jika dibandingkan pada saat sebelum pandemi yaitu pada triwulan II 2019 sektor ini masih berkontraksi -4,93%.

Sektor produktif Jawa Tengah yang dapat didorong adalah industri makan dan minum, industri kimia farmasi dan tanaman hortikultura. Hal ini dikarenakan sektor tersebut memiliki dampak ekonomi yang cukup tinggi dengan risiko rendah.

Untuk mendukung industri tersebut membutuhkan produk hasil dari pertanian. Potensi pertanian Jawa Tengah yang juga menjadi ekonomi kerakyatan masih tergolong tinggi. Bahkan produksi padi Jawa Tengah termasuk yang tertinggi tingkat nasional.

Hanya saja sektor pertanian masih kurang mendapatkan perhatian. Jalur distribusi, pemasaran dan perlindungan harga hasil pertanian di Jawa Tengah masih tradisional. Akibatnya jika panen raya harga sangat murah. Ini sangat merugikan petani. Bahkan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah semenjak Maret sampai dengan Juli 2021 angkanya di bawah 100. Artinya perubahan harga yang diterima petani jauh lebih lambat dibandingkan harga yang dibayar petani. Hal ini membuat petani harus membayar lebih untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usahanya dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani.

Pada kondisi sulit ini, petani butuh dukungan untuk memasarkan hasil dengan kemajuan teknologi. Produk pertanian di desa bisa diendorse oleh para influencer maupun pejabat yang telah memiliki follower untuk membantu memasarkan produk-produk mereka. Tentu mereka juga dimodali dan dibekali ilmu cara pengemasan barang yang good looking.

Terakhir, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan jika ingin perekonomian kembali pulih. Dengan menurunnya jumlah kasus aktif covid-19 maka kebijakan PPKM skala mikro bisa dihentikan. Mobilitas masyarakat bisa kembali seperti semula dan ekonomi akan pulih dan tumbuh kembali secara normal. Ayo jaga protokol kesehatan untuk Indonesia Tumbuh Indonesia Tangguh!

Menggelorakan Ekonomi dengan Investasi

Hayu Wuranti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Times Indonesia, 15 April 2021

Salah satu saluran transmisi dampak pandemi Covid-19 secara global adalah perdagangan. Dengan semua mitra dagang utama mengalami resesi, neraca dagang Indonesia kian tertekan. Singapura, China, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) sebagai negara tujuan 42 persen ekspor Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. AS mencatat pertumbuhan minus 3,5 persen pada tahun 2020, terburuk sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada tahun 2020 kontraksi 5,4%. Ini menandai resesi terburuk yang pernah ada di Singapura. Pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2020 kontraksi 4,8%. Ini juga menandai penurunan ekonomi tahunan pertama Jepang sejak tahun 2009 silam. Ekonomi China tahun lalu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, bahkan ketika ekonomi seluruh dunia terpengaruh pandemi virus corona. Ekonomi China tumbuh 2,3% pada 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tahunan ini paling lambat di China dalam beberapa dekade. Kondisi ini juga berdampak pada perputaran roda perekonomian global termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2020, sebesar -2,07 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi akibat pandemi.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2021 menyatakan bahwa pemulihan ekonomi tidak mungkin dicover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kuncinya adalah melalui ekspor dan investasi. Investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan, sedangkan investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu mengurangi pengangguran serta berdampak meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi mengingat kontribusinya terhadap PDB yang cukup tinggi sekitar 57,7 persen. Sementara itu komponen investasi atau PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan penyumbang PDB kedua, setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2020, investasi menyumbang 31,7 persen dari total PDB.

Indonesia merupakan sepuluh negara tujuan investasi dunia pada tahun 2020, karena menguasai 40 persen pangsa pasar investasi di ASEAN dengan letak strategis antara benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia menjadi tempat sasaran investasi pada sektor manufaktur padat karya, manufaktur berorientasi ekspor, industri farmasi dan alat kesehatan, energi terbarukan, infrastruktur dan industri pertambangan. Hasil Survei Disagregasi PMTB yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama tahun 2018, sebagian besar investasi dilaksanakan oleh pihak swasta atau sekitar 84,35 persen. Investasi paling banyak dilakukan oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 19,8 persen disusul sektor Real Estate sebesar 18,74 persen. Indonesia memiliki potensi besar di bidang sumber daya pertambangan seperti batubara, emas, nikel, biji besi, serta sektor pertanian seperti kelapa sawit, teh, kopi, karet, tembakau. Namun sayangnya investasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat hanya sebesar 10,19 persen, sementara sektor pertambangan dan penggalian hanya 8,04 persen. Padahal saat ini telah terjadi pergeseran investasi dari sektor yang berbasis sumber daya (resource base) ke

sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), sehingga menguntungkan Indonesia karena semakin berkembangnya market base yang didukung dengan pengolahan sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

Dilihat dari jenis barang modalnya, sebagian besar investasi di Indonesia dalam bentuk bangunan sebesar 64,58 persen serta mesin dan perlengkapan sebesar 13,76 persen. Pemulihan investasi diperkirakan berlanjut secara bertahap ditopang perbaikan iklim investasi dan pembangunan proyek infrastruktur yang berlanjut. Investasi dalam bentuk bangunan merupakan investasi jangka panjang, karena dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Pemulihan ekonomi pasca pandemi membutuhkan investasi yang cepat menghasilkan dan memberikan dampak yang tidak terlalu lama. Produk kekayaan intelektual merupakan salah satu jenis investasi yang mulai berkembang. Bahkan dalam masa WFH dan PSBB, Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mencatat ada kenaikan pendaftaran kekayaan intelektual dibanding tahun lalu. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat semakin peduli dengan kekayaan intelektual yang mereka miliki. Mulai dari ide seni, merek, desain industri, dan unsur-unsur lainnya yang bisa dilindungi hukum serta memiliki potensi ekonomi. Sayangnya, produk kekayaan intelektual merupakan salah satu jenis investasi yang paling jarang dilakukan, karena sharenya hanya 3,69 persen saja.

Pemulihan investasi pasca Covid-19 menjadi tantangan bagi Indonesia. Tantangan tersebut antara lain perlambatan ekonomi, perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia serta belum optimalnya iklim usaha di Indonesia terutama kemudahan investasi. Peningkatan investasi ditujukan untuk peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi. Efisiensi ini menjadi penting mengingat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sebesar 6,3 atau lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Vietnam yang hanya 4,31. Tingginya nilai ICOR ini menunjukkan, untuk meningkatkan output 1 unit, diperlukan investasi yang lebih besar di Indonesia. Akibatnya investor akan memilih negara lain demi menghasilkan penambahan output yang lebih besar. Inefisiensi ini terjadi karena tingginya biaya pendukung di luar biaya substansi. Upaya membangkitkan investasi agar mampu menggelorakan ekonomi dapat dilakukan melalui deregulasi investasi dan reformasi birokrasi serta memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan investasi di jangka menengah, sehingga Indonesia dapat terhindar dari ancaman middle income trap di tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mampu tumbuh mencapai rata-rata di atas 6% di jangka menengah, dengan motor pertumbuhan yang berasal dari akselerasi investasi..

Pemulihan Ekonomi dan Tertahannya Kemiskinan

**Sulthoni Syahid Sugito – BPS Kabupaten Pematang
Detik.com, 12 Agustus 2021**

Salah satu target program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah menekan kemiskinan. Faktanya penanggulangan kemiskinan di era pandemi membutuhkan usaha

dan perlakuan berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Pembatasan kegiatan sosial yang berujung pada melemahnya perekonomian masyarakat adalah tantangan terbesarnya.

Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), 15/7, diketahui kemiskinan per Maret 2021 mengalami penurunan dibandingkan September 2020. Tetapi masih berada pada level terendah yaitu dua digit. Ini tentu menjadi kabar baik, namun juga kabar buruk karena capaian penurunan kemiskinan tidak sesuai yang diharapkan.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen (atau 27,54 juta orang), menurun 0,05 persen (atau 0,01 juta orang) terhadap September 2020. Namun jika dibandingkan Maret 2020 awal pandemi terjadi masih mengalami peningkatan 0,36 persen (atau 1,12 juta orang). Data ini bukti tertahannya laju penurunan kemiskinan pada level dua digit selama setahun terakhir.

Jika membandingkan sebelum pandemi tentu posisi kemiskinan saat ini mengalami peningkatan yang drastis, namun dengan adanya program perlindungan sosial tentu sangat membantu dalam meredam kemiskinan semakin parah. Program inilah yang diharapkan mayoritas masyarakat terdampak dapat mengerek sebesar-besarnya perekonomian dan berujung menekan angka kemiskinan akibat pandemi.

Kemiskinan perkotaan terdampak paling besar. Penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 naik 138,1 ribu orang dari 12,04 juta September 2020 menjadi 12,18 juta orang. Sedangkan penduduk miskin pedesaan justru mengalami penurunan 145,0 ribu orang pada September 2020 --15,51 juta orang menjadi (15,37 juta orang. Ini menunjukkan kondisi kemiskinan perkotaan lebih terpuruk dan sebaliknya pedesaan menunjukkan eksistensinya relatif lebih tahan dari badai pandemi.

Kondisi di atas bisa dipahami karena pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi di perkotaan berlangsung lebih ketat menyebabkan kemiskinan di perkotaan naik dan di daerah pedesaan relatif cenderung bisa menurunkan kemiskinan karena pengetatan yang terjadi relatif longgar dan masih terbukanya lapangan pekerjaan utamanya di sektor pertanian. Adanya shifting pekerjaan ke sektor ini sangat membantu kemiskinan di pedesaan turun. Sebaliknya di perkotaan sangat sulit mencari substitusi pekerjaan, khususnya pertanian.

Walaupun pandemi masih terjadi nyatanya Garis Kemiskinan (GK) justru mengalami kenaikan dari Rp 458.947 (September 2020) menjadi Rp 472.525 per kapita per bulan (Maret 2021). Dengan rata-rata 4,49 orang anggota rumah tangga, artinya rata-rata GK sebesar Rp 2.121.637 /rumah tangga miskin/bulan. Menariknya lebih dari 53 persen penduduk miskin berada di Pulau Jawa atau sekitar 14,75 juta orang. Ini tentu menjadi tantangan meningkatkan performa ekonomi di Pulau Jawa untuk bangkit dan pandemi diyakini masih menjadi batu sandungan.

Efek Pandemi

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, geliat ekonomi masyarakat turut terhambat. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi semenjak Triwulan II - 2020 terus berada pada pertumbuhan negatif yang artinya terjadinya perlambatan. Triwulan I-2021 terhadap Triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y).

Walaupun masih terjadi kontraksi yang mengindikasikan pertumbuhan kita ke arah minus, tetapi saat ini sudah menunjukkan ke arah pemulihan ekonomi. Jika dibandingkan pada Triwulan II-2020 yang pernah mengalami kontraksi terdalam mencapai -5,32 persen (y-on-y). Tren perbaikan ekonomi yang kita rasakan dari waktu ke waktu tentu tidak lepas dari peran penting berbagai program perlindungan sosial.

Kabar terbaru imbas dari pandemi yaitu laporan Bank Dunia, Indonesia mengalami penurunan status dari negara berpendapatan menengah atas menjadi menengah bawah. Hal ini disebabkan pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia turun dari US\$ 4.050 (2019) menjadi US\$ 3.870 (2020).

Tentu imbas dari perlambatan ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun, bantuan sosial (bansos) diyakini masih jadi bantalan utama dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Seyogyanya kebijakan ini tetap dipertahankan setidaknya hingga tanda-tanda perekonomian masyarakat membaik atau bahkan hingga pandemi berakhir.

Bansos

Di tengah badai kasus harian Covid-19 yang terus mencatatkan rekor dari hari ke hari, ditambah dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang semakin masif di berbagai daerah, diyakini akan terus menekan kondisi ketenagakerjaan yang berimbas pada kemiskinan kita ke depan. Perlu strategi matang untuk mengendalikan situasi di luar kendali ini.

Lonjakan kemiskinan kini menjadi keniscayaan bagi hampir semua negara di dunia akibat pandemi, tapi justru yang terpenting adalah bagaimana mengendalikannya. Bansos yang ada dirasa masih menjadi tumpuan utama menahan laju dampak pandemi.

Dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Presiden melaporkan Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar US\$ 28,5 miliar setara Rp 412 triliun. Keseriusan pemerintah memang diuji melalui bansos ini, karena bansos yang tepat sasaran masih menjadi permasalahan serius. Permasalahan data penerima hingga skema penyaluran masih menjadi perdebatan. Terlebih karena beberapa indikator seperti kemiskinan dan pengangguran hanya mampu sedikit ditekan.

Selain bansos tentu beberapa program lain menjadi upaya dalam pemulihan ekonomi, salah satunya skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Tujuan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya harus didukung, Harapnya tentu dengan terserapnya tenaga kerja dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu menekan pengangguran dan kemiskinan. Keseriusan pemerintah terpancar dari dana yang disediakan pada tahun ini sebesar Rp 6,69 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja.

Oleh karena itu, dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi pada sektor ketenagakerjaan pemerintah pada tahun ini menganggarkan Rp 10 triliun untuk sekitar 2,8 juta target peserta prakerja. Selain itu, menganggarkan bantuan usaha Rp 3,6 triliun untuk mendukung sekitar 3 juta usaha kecil. Harapannya sektor ketenagakerjaan kita bisa tumbuh, sehingga daya beli masyarakat bisa membaik dan tujuan besarnya kemiskinan bisa ditekan sedalam-dalamnya.

Tantangan

Kontraksi ekonomi yang dialami pascapandemi tentu menjadi pukulan terburuk. Efek domino dari kontak ini bisa ditebak pengangguran dan kemiskinan meningkat. Namun di balik itu kita masih bisa bangkit dengan mencermati sektor unggulan dan mengambil peluang asa untuk bisa menggenjot sektor lainnya.

Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Kontraksi pertumbuhan paling besar ada pada transportasi dan perdagangan sebesar 13,12 persen. Ini bisa dipahami karena semenjak pandemi beberapa kebijakan transportasi dilakukan pengetatan dalam hal bepergian ditambah dengan adanya kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan perkantoran sehingga mobilitas masyarakat semakin menurun.

Sedangkan sebaliknya pertumbuhan positif terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,72 persen, menjadi hal lumrah karena kebijakan sekolah dan kerja online sekarang gencar diberlakukan. Menariknya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,95 persen.

Sektor pertanianlah yang digadang mampu menjadi sumber penggerak pemulihan ekonomi kedepan. Namun bukan tidak ada permasalahan pada sektor ini, menjadi masalah karena penduduk yang bekerja sektor pertanian diasosiasikan dengan pekerjaan yang tidak berkualitas, pekerjaannya berpendidikan dan upah atau pendapatannya relatif rendah. Kini tantangannya tentu membuat para petani dan semua yang bergerak di sektor ini dapat mandiri, modern, dan berbasis teknologi.

Menariknya pada Februari 2021 persentase penduduk usia kerja yang terdampak pandemi mencapai 9,30 persen. Dengan penurunan pengangguran 0,81 persen dibanding Agustus 2020 menjadi 8,75 juta orang atau 6,26 persen. masih ada tiga dominasi lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 29,59 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20 persen; dan industri pengolahan sebesar 13,60 persen. Ini juga menjadi catatan karena hanya sektor pertanian saja yang mengalami pertumbuhan positif di ekonomi triwulan I-2021 selebihnya mengalami kontraksi.

Selaras dengan tertekannya perekonomian di sektor seperti perdagangan dan industri menyebabkan pekerja informal meningkat sebanyak 78,14 juta orang (59,62 persen) dibanding Agustus 2020 yang sebesar 77,68 juta orang. Pekerja di sektor ini banyak berubah menjadi pekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga atau tak dibayar. Ini tentu menjadi ironi di kala penanganan pandemi banyak memusatkan di sektor ini.

Strategi

Beberapa strategi bisa dilakukan. Pertama, dengan semakin meningkatnya pekerja informal tentu harapannya pemerintah mampu mendorong investasi baru yang lebih banyak menyerap tenaga kerja berkualitas, tentu bukan hanya kuantitas yang difokuskan. Faktanya saat ini kita kekurangan lapangan pekerjaan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah.

Catatannya pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia turun, pada 2019 persentase pekerjaan kelas menengah masih mencapai 15,4 persen. Namun, setelah pandemi menjadi 10,2 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Kedua, adanya reformasi kebijakan terkait perlindungan dan upah yang layak. Memandang aspek pengupahan yang layak untuk pekerja ini selayaknya diperhatikan pemerintah melalui kebijakan upah minimum yang memadai dan pro pekerja. Sementara standar pekerjaan berkualitas tidak bisa lepas dari kebijakan upah minimum bagi pekerja. BPS mencatat pada Februari 2021 rata-rata upah buruh Rp 2,86 juta/bulan. Rata-rata upah terendah yaitu di sektor pertanian pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 1,93 juta dan penyediaan akomodasi dan makan-minum Rp 2,06 juta.

Ketiga, adanya modernisasi dan transfer teknologi serta keahlian melalui investasi asing. Akselerasi dengan investasi asing tidak hanya di sisi output saja yang terpenting adanya pembelajaran transfer keahlian sehingga ke depan pekerja profesional akan beralih ke pekerja lokal.

Keempat, mendorong pemerintah mampu membuat insentif bagi mereka golongan menengah atas untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di golongan bawah dengan membelanjakan pendapatannya. Berbagai keringanan pajak, kemudahan kredit baik perumahan maupun usaha perlu diteruskan dan dikembangkan lagi

Terakhir, tentu saat ini hampir semua kalangan menjadi sasaran perlindungan sosial. Tidak terbayangkan jika hal ini telat atau bahkan tidak sama sekali diberikan, mungkin akan banyak sekali penduduk kita yang terjerebab di lembah kemiskinan. Program-program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan sembako, BLT, subsidi listrik, kuota internet hingga bantuan UMKM guna mewujudkan pemulihan ekonomi dirasakan masih sangat dibutuhkan. Ke depan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perluasan maupun modifikasi program bantuan ke arah produktif dan mandiri.

Ekonomi Bersemita di Tengah Pandemi

**Irma Nur Afifah – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 19 Agustus 2021**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang semula berlaku 13-20 Juli, diperpanjang secara bertahap hingga akhir Agustus 2021. PPKM dimaksud sebagai upaya mencegah makin meluasnya penyebaran virus Covid-19 yang telah menelan banyak korban jiwa dan kerugian baik secara mental maupun material. Harapannya situasi bisa lebih kondusif dan mampu menekan angka pasien Covid-19 dan angka kematian yang melonjak tajam seperti pra PPKM akibat munculnya varian baru yang sangat menular.

Tak dapat dipungkiri bahwa Covid-19 masih menghantui, menjadi pandemi paling parah dan mencatatkan duka mendalam yang terjadi di Indonesia pertengahan tahun ini. Pandemi telah banyak menyisakan catatan peristiwa yang memilukan. Mulai dari krisis

paling krusial yaitu kesehatan yang telah menciptakan efek domino menjadi krisis multidimensi secara global. Efek domino akibat krisis kesehatan terjadi tidak hanya pada bidang sosial namun juga ekonomi yang berimbas pada kesejahteraan rakyat. Lantas bagaimana kondisi ekonomi global dan nasional selama masa pandemi ini?

EKONOMI GLOBAL

BPS telah merilis kondisi perekonomian melalui Berita Resmi Statistik (BRS) pada 5 Agustus lalu. Pada rilis tersebut Margo Yuwono Kepala BPS menyampaikan bahwa quarter 2 (q2)-2021 perekonomian secara global mengalami peningkatan, terlihat dari pergerakan Purchasing Managers Indeks (PMI) yang meningkat yaitu sebesar 56.6, lebih tinggi dibanding q1 yang sebesar 54.8. Harga-harga komoditas makanan (gandum, minyak kelapa sawit dan kedelai) juga mengalami kenaikan dan komoditas hasil tambang (timah, aluminium, dan tembaga) naik di pasar internasional baik secara q-to-q (quarter to quarter) maupun y-on-y (year on year).

Aktivitas masyarakat pada q2-2021 mengalami peningkatan. Pergerakan mobilitas penduduk mulai terlihat pada pemulihan transportasi, meskipun tidak sama dengan kondisi normal di 2019, yaitu angkutan laut terlihat lebih baik di banding q2-2020, meski lebih rendah dibanding q2-2019. Moda kereta api, q2-2021 juga lebih baik dibanding q2-2020. Mobilitas sangat penting sebagai klarifikasi bahwa pergerakan tersebut berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi, yaitu distribusi barang dan jasa. Data pariwisata dengan indikator tingkat hunian kamar selama q2-2021, juga lebih baik dibanding q2-2020, meski lebih rendah dibanding q2-2019. Secara rata-rata tingkat hunian kamar q2-2021 mengalami peningkatan dibandingkan q1-2021 dan q2-2020. Mobilitas yang membaik akan mendorong sektor pariwisata diantaranya terlihat dari tingkat hunian kamar sehingga supply chain sektor pariwisata akan mendorong sektor ekonomi lainnya. Catatan peristiwa lainnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi, volume penjualan mobil terlihat pada q2-2021 terjadi peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan, terlihat juga pada peningkatan pph 21 sebesar 5 persen, peningkatan ppn barang mewah sebesar 8 persen.

EKONOMI BERSEMI

Perekonomian Indonesia yang diukur dari angka pertumbuhan ekonomi (PE) PDB nasional, secara q-to-q tumbuh 3,31 persen. Jika dibandingkan pada q2-2020 atau y-on-y tumbuh 7,07 persen. Secara kumulatif c-to-c tumbuh 3,10 persen. Secara q-to-q pada q2-2021 tumbuh 3,31 persen artinya perekonomian Indonesia q2 dibanding q1 tumbuh 3,31 persen, sementara pada q2-2020 mengalami kontraksi yang dalam yaitu -4,19 persen. Selama 3 tahun berselang dalam kondisi normal perekonomian Indonesia polanya selalu mengalami peningkatan di sekitar 4 persen. Seperti PDB adhk pada tahun 2020 kontraksi -5,32 persen hal ini karena terbatasnya mobilitas dan pergerakan hampir di semua sektor.

Secara keseluruhan PE menurut lapangan usaha tumbuh positif, hal ini sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Pertanian meski kecil tumbuh sebesar 0,38 persen, yang disupport oleh sub sektor perikanan yang tumbuh tinggi sebesar 9,69 persen, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap tumbuh. Diikuti sub sektor peternakan, tumbuh sebesar 7,07 persen hal ini karena produksi unggas meningkat seiring meningkatnya permintaan baik domestik maupun luar negeri. Sumber berseminya

pertumbuhan ekonomi tertinggi pada q2-2021 y-on-y adalah dari kategori industri, yakni sebesar 1,35 persen. Disusul perdagangan 1,21 persen, transportasi dan pergudangan 0,77 persen, akomodasi dan makan minum 0,54 persen dan lainnya 3,20 persen.

PDB dari sisi pengeluaran, tercatat bahwa nilai Indeks Keyakinan Konsumen pada q2-2021 sebesar 104,42 sedangkan q2-2020 sebesar 82,14. Perdagangan eceran tumbuh 11,62 persen, penguatan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, sandang; suku cadang dan aksesoris; BBM serta barang lainnya. Penjualan wholesale mobil penumpang dan sepeda motor naik signifikan yaitu 904,32 persen dan 268,64 persen. Jumlah penumpang angkutan rel, laut dan udara masing-masing tumbuh sebesar 114,18 persen, 173,56 persen, dan 456,51 persen. Realisasi belanja modal APBN tumbuh 45,56 persen, PMTB tumbuh 3,46 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai APBN tumbuh sebesar 82,10 persen dan 19,79 persen. Hal ini didorong oleh berbagai program penanganan Covid-19, diantaranya pelaksanaan vaksinasi, pengadaan alat uji medis, penyemprotan disinfektan, testing dan tracing serta program lainnya. Secara spasial struktur perekonomian Indonesia pada q2-2021 masih didominasi kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi q2-2021 dari sisi lapangan usaha ditandai dengan meningkatnya semua kategori lapangan usaha, demikian halnya dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif. Meski demikian bagaimana dengan q3-2021 nanti, akan tumbuh bersemi sebagaimana q2-2021 ini, mengingat pemberlakuan PPKM darurat di terapkan mulai Juli 2021, kemungkinan hal ini akan memberikan pressure sebagai akibat terbatasnya pergerakan dan mobilitas masyarakat karena PPKM level 1-4. World ekonomi outlook memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh sebesar 4,91 persen pada q3-2021 mendatang. (Irma NA/BPS Kendal)

Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah di Masa Pandemi

Metriana Jovanika – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Daily – 4 Oktober 2021

SEJAK terjadinya pandemi pada awal tahun lalu, ekonomi Jawa Tengah mengalami tekanan berat. Namun, pada Triwulan II 2021 ini, secara umum ekonomi Jawa Tengah telah mengalami perbaikan. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Agustus 2021 mencatat ekonomi Jawa Tengah Triwulan II 2021 tumbuh sebesar 5,66 persen (y-on-y). Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I 2021 yang pada saat itu mengalami kontraksi.

Ini merupakan titik balik positif untuk pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada masa pandemi, setelah sebelumnya selama empat triwulan terakhir ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Arah pemulihan ekonomi pada Triwulan II 2021 ini telah terjadi secara merata, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi.

Dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif yang menandakan bahwa pada triwulan ini sudah mulai ada perbaikan. Perbaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan

aktivitas pada seluruh komponen pengeluaran dimana sumbangan terbesar berasal dari ekspor dan investasi.

Kenaikan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor sebesar 34,43 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan ini juga sejalan dengan tingginya ekspor terutama permintaan produk komoditas unggulan di luar negeri. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh tinggi sebesar 10,11 persen (*y-on-y*).

Hal ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah sehingga membuat pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksinya pada Triwulan II 2021. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 6,72 persen, sejalan dengan adanya komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan strategi pemulihan ekonomi.

Selain itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang berkontribusi tertinggi, dengan share terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 60,83 persen, juga menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 4,63 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan ini seiring dengan mulai berjalannya mobilitas masyarakat selama Triwulan II 2021. Selain itu, keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian sudah mulai meningkat.

Dari sisi produksi, semua kategori tumbuh positif kecuali kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada triwulan ini masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan positif ini didorong oleh hampir semua kategori. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sebagai akibat meningkatnya permintaan.

Kenaikan pertumbuhan paling tinggi dicatat oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 85,43 persen (*y-on-y*) dikarenakan mulai tingginya mobilitas masyarakat. Kemudian disusul oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 20,70 persen (*y-on-y*). Artinya, telah terjadi peningkatan aktivitas masyarakat pada Triwulan II 2021.

Sementara kategori Industri Pengolahan sebagai kontributor utama ekonomi Jawa Tengah, juga tumbuh tinggi didorong oleh membaiknya perekonomian domestik dan perekonomian global. Hampir seluruh kategori produksi mampu melakukan pemulihan kuat dengan tumbuh positif pada Triwulan II 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh kategori sudah mulai menggeliat dan berfungsi.

Dampak Varian Delta

Pada akhir Triwulan II 2021 ini telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 akibat munculnya varian delta sehingga ekonomi akan terdampak. Tren peningkatan kasus COVID-19 sebagai akibat merebaknya varian delta berpotensi memberi tekanan terhadap ekonomi Jawa Tengah. Ditambah lagi penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga semakin berpengaruh terhadap ekonomi Jawa Tengah pada triwulan selanjutnya.

Peran pemerintah pada masa pandemi turut mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan berbagai aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menekan angka kasus aktif

COVID-19. Selain itu, kebijakan yang diterapkan dapat mendorong kegiatan mobilitas masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.

Pemulihan ekonomi dapat terus dilakukan jika COVID-19 varian delta dapat dikendalikan dan seluruh aktivitas ekonomi mulai bisa berjalan secara normal. Program peningkatan penanganan COVID-19 erat kaitannya dengan program pemulihan ekonomi nasional. Tantangan saat ini adalah bagaimana aktivitas masyarakat tetap berjalan tapi COVID-19 bisa dikendalikan. Kuncinya hanya satu yaitu dengan disiplin kesehatan. Dengan disiplin kesehatan, tentunya pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat mulai dilakukan.

Sehingga, masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi secara optimal serta untuk mengendalikan pandemi dan melanjutkan momentum pemulihan ekonomi. Harapannya adalah momentum pemulihan ekonomi ini dapat terjaga bahkan apabila seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat ikut menjaganya. Maka, pada periode selanjutnya diharapkan perekonomian bisa digenjut ke arah positif kembali.

Pemulihan Ekonomi dan Tertahannya Kemiskinan

**Sulthoni Syahid Sugito – BPS Kabupaten Pematang
Detik.com – 12 Agustus 2021**

Salah satu target program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah menekan kemiskinan. Faktanya penanggulangan kemiskinan di era pandemi membutuhkan usaha dan perlakuan berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Pembatasan kegiatan sosial yang berujung pada melemahnya perekonomian masyarakat adalah tantangan terbesarnya.

Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), 15/7, diketahui kemiskinan per Maret 2021 mengalami penurunan dibandingkan September 2020. Tetapi masih berada pada level terendah yaitu dua digit. Ini tentu menjadi kabar baik, namun juga kabar buruk karena capaian penurunan kemiskinan tidak sesuai yang diharapkan.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen (atau 27,54 juta orang), menurun 0,05 persen (atau 0,01 juta orang) terhadap September 2020. Namun jika dibandingkan Maret 2020 awal pandemi terjadi masih mengalami peningkatan 0,36 persen (atau 1,12 juta orang). Data ini bukti tertahannya laju penurunan kemiskinan pada level dua digit selama setahun terakhir.

Jika membandingkan sebelum pandemi tentu posisi kemiskinan saat ini mengalami peningkatan yang drastis, namun dengan adanya program perlindungan sosial tentu sangat membantu dalam meredam kemiskinan semakin parah. Program inilah yang diharapkan mayoritas masyarakat terdampak dapat mengerek sebesar-besarnya perekonomian dan berujung menekan angka kemiskinan akibat pandemi.

Kemiskinan perkotaan terdampak paling besar. Penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 naik 138,1 ribu orang dari 12,04 juta September 2020 menjadi 12,18 juta orang.

Sedangkan penduduk miskin pedesaan justru mengalami penurunan 145,0 ribu orang pada September 2020 --15,51 juta orang menjadi (15,37 juta orang. Ini menunjukkan kondisi kemiskinan perkotaan lebih terpuruk dan sebaliknya pedesaan menunjukkan eksistensinya relatif lebih tahan dari badai pandemi.

Kondisi di atas bisa dipahami karena pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi di perkotaan berlangsung lebih ketat menyebabkan kemiskinan di perkotaan naik dan di daerah pedesaan relatif cenderung bisa menurunkan kemiskinan karena pengetatan yang terjadi relatif longgar dan masih terbukanya lapangan pekerjaan utamanya di sektor pertanian. Adanya shifting pekerjaan ke sektor ini sangat membantu kemiskinan di pedesaan turun. Sebaliknya di perkotaan sangat sulit mencari substitusi pekerjaan, khususnya pertanian.

Walaupun pandemi masih terjadi nyatanya Garis Kemiskinan (GK) justru mengalami kenaikan dari Rp 458.947 (September 2020) menjadi Rp 472.525 per kapita per bulan (Maret 2021). Dengan rata-rata 4,49 orang anggota rumah tangga, artinya rata-rata GK sebesar Rp 2.121.637 /rumah tangga miskin/bulan. Menariknya lebih dari 53 persen penduduk miskin berada di Pulau Jawa atau sekitar 14,75 juta orang. Ini tentu menjadi tantangan meningkatkan performa ekonomi di Pulau Jawa untuk bangkit dan pandemi diyakini masih menjadi batu sandungan.

Efek Pandemi

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, geliat ekonomi masyarakat turut terhambat. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi semenjak Triwulan II - 2020 terus berada pada pertumbuhan negatif yang artinya terjadinya perlambatan. Triwulan I-2021 terhadap Triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y).

Walaupun masih terjadi kontraksi yang mengindikasikan pertumbuhan kita ke arah minus, tetapi saat ini sudah menunjukkan ke arah pemulihan ekonomi. Jika dibandingkan pada Triwulan II-2020 yang pernah mengalami kontraksi terdalam mencapai -5,32 persen (y-on-y). Tren perbaikan ekonomi yang kita rasakan dari waktu ke waktu tentu tidak lepas dari peran penting berbagai program perlindungan sosial.

Kabar terbaru imbas dari pandemi yaitu laporan Bank Dunia, Indonesia mengalami penurunan status dari negara berpendapatan menengah atas menjadi menengah bawah. Hal ini disebabkan pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia turun dari US\$ 4.050 (2019) menjadi US\$ 3.870 (2020).

Tentu imbas dari perlambatan ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun, bantuan sosial (bansos) diyakini masih jadi bantalan utama dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Seyogyanya kebijakan ini tetap dipertahankan setidaknya hingga tanda-tanda perekonomian masyarakat membaik atau bahkan hingga pandemi berakhir.

Bansos

Di tengah badai kasus harian Covid-19 yang terus mencatatkan rekor dari hari ke hari, ditambah dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang semakin masif di berbagai daerah, diyakini akan terus menekan kondisi ketenagakerjaan yang berimbas pada kemiskinan kita ke depan. Perlu strategi matang untuk mengendalikan situasi di luar kendali ini.

Lonjakan kemiskinan kini menjadi keniscayaan bagi hampir semua negara di dunia akibat pandemi, tapi justru yang terpenting adalah bagaimana mengendalikannya. Bansos yang ada dirasa masih menjadi tumpuan utama menahan laju dampak pandemi.

Dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Presiden melaporkan Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar US\$ 28,5 miliar setara Rp 412 triliun. Keseriusan pemerintah memang diuji melalui bansos ini, karena bansos yang tepat sasaran masih menjadi permasalahan serius. Permasalahan data penerima hingga skema penyaluran masih menjadi perdebatan. Terlebih karena beberapa indikator seperti kemiskinan dan pengangguran hanya mampu sedikit ditekan.

Selain bansos tentu beberapa program lain menjadi upaya dalam pemulihan ekonomi, salah satunya skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Tujuan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya harus didukung, Harapnya tentu dengan terserapnya tenaga kerja dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu menekan pengangguran dan kemiskinan. Keseriusan pemerintah terpancar dari dana yang disediakan pada tahun ini sebesar Rp 6,69 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja.

Oleh karena itu, dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi pada sektor ketenagakerjaan pemerintah pada tahun ini menganggarkan Rp 10 triliun untuk sekitar 2,8 juta target peserta prakerja. Selain itu, menganggarkan bantuan usaha Rp 3,6 triliun untuk mendukung sekitar 3 juta usaha kecil. Harapannya sektor ketenagakerjaan kita bisa tumbuh, sehingga daya beli masyarakat bisa membaik dan tujuan besarnya kemiskinan bisa ditekan sedalam-dalamnya.

Tantangan

Kontraksi ekonomi yang dialami pascapandemi tentu menjadi pukulan terburuk. Efek domino dari kontraksi ini bisa ditebak pengangguran dan kemiskinan meningkat. Namun di balik itu kita masih bisa bangkit dengan mencermati sektor unggulan dan mengambil peluang asa untuk bisa menggenjot sektor lainnya.

Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Kontraksi pertumbuhan paling besar ada pada transportasi dan pergudangan sebesar 13,12 persen. Ini bisa dipahami karena semenjak pandemi beberapa kebijakan transportasi dilakukan pengetatan dalam hal bepergian ditambah dengan adanya kebijakan

work from home (WFH) yang diberlakukan perkantoran sehingga mobilitas masyarakat semakin menurun.

Sedangkan sebaliknya pertumbuhan positif terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,72 persen, menjadi hal lumrah karena kebijakan sekolah dan kerja online sekarang gencar diberlakukan. Menariknya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,95 persen.

Sektor pertanianlah yang digadang mampu menjadi sumber penggerak pemulihan ekonomi kedepan. Namun bukan tidak ada permasalahan pada sektor ini, menjadi masalah karena penduduk yang bekerja sektor pertanian diasosiasikan dengan pekerjaan yang tidak berkualitas, pekerjaannya berpendidikan dan upah atau pendapatannya relatif rendah. Kini tantangannya tentu membuat para petani dan semua yang bergerak di sektor ini dapat mandiri, modern, dan berbasis teknologi.

Menariknya pada Februari 2021 persentase penduduk usia kerja yang terdampak pandemi mencapai 9,30 persen. Dengan penurunan pengangguran 0,81 persen dibanding Agustus 2020 menjadi 8,75 juta orang atau 6,26 persen. masih ada tiga dominasi lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 29,59 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20 persen; dan industri pengolahan sebesar 13,60 persen. Ini juga menjadi catatan karena hanya sektor pertanian saja yang mengalami pertumbuhan positif di ekonomi triwulan I-2021 selebihnya mengalami kontraksi.

Selaras dengan tertekannya perekonomian di sektor seperti perdagangan dan industri menyebabkan pekerja informal meningkat sebanyak 78,14 juta orang (59,62 persen) dibanding Agustus 2020 yang sebesar 77,68 juta orang. Pekerja di sektor ini banyak berubah menjadi pekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga atau tak dibayar. Ini tentu menjadi ironi di kala penanganan pandemi banyak memusatkan di sektor ini.

Strategi

Beberapa strategi bisa dilakukan. Pertama, dengan semakin meningkatnya pekerja informal tentu harapannya pemerintah mampu mendorong investasi baru yang lebih banyak menyerap tenaga kerja berkualitas, tentu bukan hanya kuantitas yang difokuskan. Faktanya saat ini kita kekurangan lapangan pekerjaan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah.

Catatannya pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia turun, pada 2019 persentase pekerjaan kelas menengah masih mencapai 15,4 persen. Namun, setelah pandemi menjadi 10,2 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Kedua, adanya reformasi kebijakan terkait perlindungan dan upah yang layak. Memandang aspek pengupahan yang layak untuk pekerja ini selayaknya diperhatikan pemerintah melalui kebijakan upah minimum yang memadai dan pro pekerja. Sementara standar pekerjaan berkualitas tidak bisa lepas dari kebijakan upah minimum bagi pekerja. BPS mencatat pada Februari 2021 rata-rata upah buruh Rp 2,86 juta/bulan. Rata-rata upah terendah yaitu di sektor pertanian pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 1,93 juta dan penyediaan akomodasi dan makan-minum Rp 2,06 juta.

Ketiga, adanya modernisasi dan transfer teknologi serta keahlian melalui investasi asing. Akselerasi dengan investasi asing tidak hanya di sisi output saja yang terpenting adanya pembelajaran transfer keahlian sehingga ke depan pekerja profesional akan beralih ke pekerja lokal.

Keempat, mendorong pemerintah mampu membuat insentif bagi mereka golongan menengah atas untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di golongan bawah dengan membelanjakan pendapatannya. Berbagai keringanan pajak, kemudahan kredit baik perumahan maupun usaha perlu diteruskan dan dikembangkan lagi.

Terakhir, tentu saat ini hampir semua kalangan menjadi sasaran perlindungan sosial. Tidak terbayangkan jika hal ini telat atau bahkan tidak sama sekali diberikan, mungkin akan banyak sekali penduduk kita yang terjerebab di lembah kemiskinan. Program-program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan sembako, BLT, subsidi listrik, kuota internet hingga bantuan UMKM guna mewujudkan pemulihan ekonomi dirasakan masih sangat dibutuhkan. Ke depan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perluasan maupun modifikasi program bantuan ke arah produktif dan mandiri.

Harmoni Presidensi G20 untuk Recovery Ekonomi

Irma Nur Afifah – BPS Provinsi Jawa Tengah

Detic.com, 28 Mei 2020

Momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Groupt of Twenty (G20) di Italia pada November lalu telah memberikan semangat kebersamaan membawa kembali pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan internasional. G20 merupakan forum kerjasama multilateral terdiri dari 19 negara utama dan 1 lembaga Uni Eropa (EU) dengan pendapatan pada level moderat dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistematis di dunia. Negara G20 secara kolektif merepresentasikan perekonomian dunia sebesar 85 persen, perdagangan internasional 75 persen, investasi global 80 persen dan populasi dunia 60 persen (Diskominfo).

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa, memiliki rumusan tujuan jelas

dan tegas yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi kuat, berkelanjutan dan berimbang dengan peran G20 sebagai premier forum for economic cooperation.

Tantangan global yang terus berkembang dan transformasi informasi yang pesat membuat pembahasan isu strategis G20 tidak terbatas pada sektor ekonomi dan finance track, namun berkembang pula pada isu non-finance/sherpa track. Meski demikian prioritas utama pada kebangkitan ekonomi pasca pandemi yang diharapkan tumbuh optimis pada growth of GDP tidak hanya di level moderat namun pada level tinggi.

PRESIDENSI G20

Fungsi presidensi G20 secara estafet berganti setiap tahun oleh salah satu negara anggota dan Indonesia mendapat kepercayaan memegang presidensi G20 yang sebelumnya dipegang Italia. Presidensi G20 di Indonesia mengusung tema “recover together, recover stronger” bermakna pulih bersama, bangkit perkasa. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan (setkab.go.id).

Opening Ceremony Presidensi G20 di Indonesia pada 1 Desember 2021, menandakan proses presidensi resmi dimulai yang berlanjut hingga 30 November 2022 mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan yaitu sekitar 150 pertemuan dan side events akan digelar secara hybrid dengan memperhatikan situasi pandemi (Diskominfo). Praktis Indonesia mulai membawa arah ekonomi global dengan tanggung jawab mendorong Indonesia agar lebih dipercaya dunia. Pertemuan dan diskusi diantara para pembuat keputusan di level leaders dan pemegang keuangan negara-negara G20 merupakan tantangan yang besar untuk mencapai recover together dengan grand design yang mesti dikemas dalam orchestra yang harmoni.

RECOVERY EKONOMI

Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 sejatinya membawa angin segar bagi Indonesia. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dan kepercayaan dari negara-negara besar di dunia untuk Indonesia. Presidensi dinilai sangat strategis dalam akselerasi recovery ekonomi dan diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi rakyat Indonesia namun juga bagi dunia. Dalam satu tahun kedepan gaung Indonesia akan bergema di dunia, maka nada yang indah dan harmoni harus tetap terjaga untuk mendapatkan kepercayaan dunia dalam penyelenggaraan even ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan even presidensi G20 ini tergantung pada pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter. Pandemi belum sepenuhnya hilang dari belahan bumi ini, namun demikian sinergi bersama berbagai pihak harus terus dijaga demi pemulihan kesehatan yang memiliki korelasi tinggi bagi pemulihan ekonomi. Pandemi membutuhkan extra ordinary policy, menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan penanganan Covid-19 menjadi prioritas dan anggaran yang digelontorkan pun tak main-main. Hasilnya memberikan dampak sangat baik bagi recovery kesehatan yang berdampak pada recovery ekonomi.

Seiring mulainya presidensi G20 praktis momentum strategis ini menjadikan Indonesia sebagai supporting bagi negara-negara di dunia akan manfaat kerjasama sebagai wujud kebangkitan ekonomi. Forum internasional ini diprediksi bermanfaat nyata bagi akselerasi

ekonomi nasional pasca pandemi, diantaranya mampu menumbuhkan konsumsi domestik, menyerap tenaga kerja, investasi kembali aktif, hal ini tak lepas dari kepercayaan internasional sehingga investor tak akan segan berinvestasi di Indonesia.

Tantangan proses presidensi 1 tahun ke depan bagi Indonesia untuk mendorong situasi global agar kembali pulih, ekonomi bangkit dan menjadi kuat bagi anggota G20 adalah dengan mewujudkan situasi prosesi presidensi yang aman, kondusif dan terkendali sebagai titik tolak menuju ekonomi yang optimal. Tantangan urgen lainnya dalam frame informasi yang tak terbendung adalah menciptakan situasi kondusif, pasalnya dalam even rawan informasi yang tak mendukung dan berita hoaks lainnya menjadi kondisi yang harus dikendalikan selama gelaran even internasional ini. Itulah mengapa kontribusi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kondusif sangat diharapkan, mengingat manfaatnya yang sangat baik bagi ekonomi nasional dan internasional. Kolaborasi, koordinasi dan komunikasi yang efektif dan efisien adalah kunci mewujudkan “recover together recover stronger”.

Tantangan Memulihkan Ekonomi Kendal

Irma Nur Afifah – BPS Kabupaten Kendal

Jateng Daily, 6 Maret 2021

Kawasan Industri Kendal (KIK) yang terletak di Kec. Brangsong Kab. Kendal telah resmi naik status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 18 Desember 2019 (PP No 85/2019) dan menjadi proyek strategis nasional. Status KEK artinya memiliki keunggulan untuk menjaring investor berinvestasi di Kendal lebih besar dan mendorong kinerja ekonomi Kendal.

Pelantikan Kepala Daerah Kab/Kota Jateng serentak telah dilaksanakan pada 26 Februari 2021 lalu oleh Gubernur termasuk Kendal. Bupati Kendal Dico M Ganinduto seorang milenial dengan usia masih muda 31 tahun mencanangkan program 100 hari pada pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan upaya meningkatkan infrastruktur dan menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Kendal 2020 kontraksi -1,53 % sebagai dampak Covid-19, meski lebih baik dari pertumbuhan Jateng (-2,65 %), ini merupakan tantangan cukup berat bagi Kendal memulihkan ekonomi hingga tumbuh positif. Akankan target ini tercapai mengingat pandemi tak kunjung usai.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEK memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi yang memiliki daya tarik investasi. KEK Kendal selain lokasi strategis karena berdekatan dengan ibukota Jateng, kemudahan akses ke bandara A Yani, Pelabuhan Tj Emas, perlintasan tol Trans Jawa, jalur pantura Jawa dan dilewati jalur kereta api double track Jkt-Smg-Sub (kek.go.id), juga digadang sebagai sumber potensial mendorong pertumbuhan ekonomi 7 % (target pra pandemi), atau setidaknya tumbuh positif. KEK Kendal berorientasi ekspor impor, high tech product pendukung industri 4.0. Awal 2021 tercatat 66 tenant berinvestasi di KEK, 16 in

operation, 9 in construction and sisanya in permit, demikian disampaikan humas KEK Khairul Imam. Tenant di KEK cukup variatif mulai industri makanan, furnitur, elektronik, peralatan rumah tangga, alat angkutan hingga jasa-jasa. Kawasan ini dibangun dengan fasilitas tata ruang tidak sekedar zona industri, namun dirancang mencakup infrastruktur pendukung, seperti lapangan golf, pusat kota, shopping center, pusat mode, sampai bungalow mewah. Suatu kondisi sangat potensi bagi kinerja ekonomi Kendal.

POTENSI EKONOMI KENDAL

Pertumbuhan ekonomi Kendal 2020 menyiratkan PR berat selama pandemi, mengingat share kategori industri yang memegang peran paling dominan yaitu 42,29 %, disusul pertanian 19,24 % dan perdagangan 11,90 %, faktanya ketiga kategori tersebut kontraksi, tercatat angka pertumbuhan industri kontraksi -0,86 % sebelumnya tumbuh 5,7 %, perdagangan -3,83 % sebelumnya 5,22 % dan pertanian kontraksi -1,09 % sebelumnya 4,63 %, belum lagi kategori strategis lain seperti transportasi -32,20 %, akomodasi -4,31 % dan jasa-jasa -7,21 % sebagai dampak pandemi (BPS 2020).

Sejatinya output industri berkontribusi paling besar pada agregasi output total, pertumbuhan pra pandemi juga cukup tinggi diatas 5 %. Itulah mengapa awal kepemimpinannya Dico langsung meninjau kawasan potensial KEK untuk melihat dan memantau perkembangan KEK guna mendukung program Kendal sebagai pusat industri dan rumah investasi. Adanya KEK memberikan peluang tidak saja menggerakkan UMKM, juga membuka peluang lapangan kerja yang diharapkan menurunkan angka pengangguran. Adanya KEK bukan tidak mungkin dapat memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi Kendal dari kategori industri.

Selain itu secara geografis Kendal memiliki potensi alam yang lengkap, mulai dari pantai, hutan dan pegunungan, selaras dengan program Dico untuk meningkatkan sektor pariwisata. Namun tak dapat dipungkiri sektor ini pun terdampak cukup signifikan akibat pandemi, sehingga perlu langkah strategis untuk menggiatkannya kembali.

TANTANGAN DAN HARAPAN

Guna memulihkan ekonomi akibat pandemi, Dico menyusun RPJMD berbasis isu aktual di lapangan, dan membentuk tim akselerasi pembangunan. Sebagai milenial, target Dico selain pengembangan KEK sebagai prioritas pusat industri, juga penerapan program inovatif, dengan target milenial yaitu menumbuhkan usaha jasa pariwisata, restoran dan wirausaha melalui industri kreatif seperti kriya, fashion, desain, film, video dan fotografi, seni pertunjukan, musik, penerbitan, radio dan televisi, layanan computer dan piranti lunak, serta riset dan pengembangan (kemenparekraf.go.id). Sebagai bonus hasil SP2020, menunjukkan bahwa dominasi penduduk Kendal pada usia produktif 25,31 % Gen Z dan 24,93 % milenial (BPS 2020). Sumber daya yang perlu menjadi perhatian ekstra, agar tepat guna, sebagai motor penggerak ekonomi paling potensi menuju Kendal makin handal dan maju.

Optimis harus selalu ada demi kemajuan pembangunan penggerak roda perekonomian. Setiap peluang yang ada seyogyanya dimanfaatkan dengan tepat, sehingga arah kebijakan Kendal menuju Kendal Berdaya Saing dan Kendal semakin handal dengan titik berat pada investasi, pusat industri dan pariwisata, tata kelola pemerintah profesional bukanlah hal

mustahil untuk diwujudkan, dan yang penting cita-cita mewujudkan Kendal Permata Pantura bukan sekedar slogan belaka.

Produk Dalam Negeri, Berjuang Untuk Dicintai

Danisworo – BPS Provinsi Jawa Tengah

Jateng Daily, 19 Maret 2021

ADA pesan penting yang terlontar dari Presiden Joko Widodo baru-baru ini saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 awal bulan Maret yang lalu, tentang bagaimana bangsa ini merespon penggunaan produk dalam negeri dan juga menyikapi barang impor yang masuk ke Indonesia.

Dalam pidatonya beliau dengan tegas menyampaikan bahwa slogan mencintai produk dalam negeri tidaklah cukup, sehingga perlu digemakan kampanye benci produksi luar negeri. Kata ‘benci’ segera menjadi perdebatan yang muncul karena di era ekonomi modern sekarang ini tidaklah dengan serta merta bisa menutup arus barang yang datang dari luar negeri.

Pemaknaan yang lebih luas digulirkan dari para pemerhati menyikapi pernyataan presiden tersebut, bahwa diharapkan produk dalam negeri bisa lebih bersaing dibanding produk luar negeri bukan sekedar menghentikan datangnya barang impor.

Rilisan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bisa dijadikan salah satu indikator kondisi keterbandingan keberadaan produk dalam negeri dan luar negeri adalah data ekspor impor Indonesia. Kondisi per Februari 2021 tercatat nilai ekspor Indonesia mencapai US\$15,27 miliar atau turun 0,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun jika dibandingkan dengan periode bulan yang sama di tahun 2020 mengalami peningkatan 8,56 persen.

Dari angka tersebut terinformasikan ekspor khusus selain komoditi minyak dan gas (nonmigas) mencapai US\$14,40 miliar, turun 0,04 persen dibanding bulan Januari 2021, tetapi mengalami peningkatan 8,67 persen jika dibandingkan periode bulan Februari 2020. Secara kumulatif awal tahun 2021 sampai dengan akhir Februari, nilai ekspor Indonesia mencapai US\$30,56 miliar atau naik 10,35 persen dibandingkan periode kumulatif yang sama di tahun 2020, sedangkan nilai ekspor nonmigas kumulatifnya sebesar US\$28,81 miliar, juga naik 10,52 persen dibanding tahun sebelumnya.

Impor

Sementara itu untuk data impor Indonesia di bulan Februari 2021, BPS mencatat sebesar US\$13,26 miliar, mengalami penurunan 0,49 persen dibanding bulan Januari 2021. Sedangkan bila dilihat periode yang sama tahun sebelumnya nilai impor mengalami kenaikan 14,86 persen.

Secara lebih khusus untuk nilai impor nonmigas nilainya di bulan Februari 2021 sebesar US\$11,96 miliar atau mengalami peningkatan 1,54 persen dibandingkan bulan Januari 2021. Sehingga dapat diartikan bahwa penurunan nilai impor bulan februari 2021 lebih banyak disumbang oleh komoditi minyak dan gas.

Tidak serta merta menjadi pemahaman kita bahwa penurunan nilai ekspor dan meningkatnya impor non migas ini bertentangan dengan keinginan orang nomor satu di Indonesia seperti disampaikan di awal tulisan. Ekspor yang menurun tidak otomatis mengindikasikan pemanfaatan produk dalam negeri yang terbatas, penggunaan produk lokal di dalam negeri perlu digarisbawahi pula catatan jumlahnya.

Meskipun kita ketahui juga tentang laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga di triwulan 4 tahun 2020 secara nasional masih berkontraksi 3,61 persen sebagai salah satu akibat efek jangka panjang pandemi COVID-19. Sorotan nilai impor kategori nonmigas yang meningkat juga perlu diperdalam analisisnya, apakah barang-barang impor ini terkait dengan konsumsi masyarakat yang meningkat atau di antaranya banyak terkait dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku para pelaku usaha industri di dalam negeri yang belum bisa diproduksi sendiri ataupun tidak adanya barang substitusi.

Wacana yang dikembangkan oleh Presiden memang selayaknya menjadi perhatian bersama untuk lebih mendorong pemakaian produk lokal guna bisa bersaing dengan barang-barang impor. Perlu regulasi yang jelas jika hal ini akan ditindaklanjuti di tataran yang lebih khusus, jangan sampai pada akhirnya Indonesia menjadi ‘terkucil’ dalam ekonomi dunia karena mencoba membatasi arus barang asing masuk ke dalam negeri.

Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah contoh dari para pemimpin negeri ini untuk bisa dijadikan semacam role model penggunaan barang produksi dalam negeri, baik itu di bidang tugas masing-masing maupun dalam kesehariannya, bagaimana pemanfaatan produk domestik ini diimplementasikan secara lebih nyata.

Instansi-instansi pemerintah dan BUMN juga bisa memulai memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa mereka punya komitmen untuk melaksanakan anjuran presiden ini di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ketika satu per satu elemen bangsa ini memposisikan diri sebagai pelaku, niscaya kecintaan pada produk dalam negeri ini bukan sekedar jargon tanpa hasil yang diulang-ulang tanpa henti oleh setiap pemimpin negeri ini.

“Jangan biarkan apa yang tidak bisa kamu lakukan mengganggu apa yang bisa kamu lakukan”

~ John Wooden ~

Bagian 2

Dua Tahun Tanpa Mudik

Diana Dwi Susanti

Genap dua tahun lebaran tanpa mudik. Kebijakan yang diambil pemerintah sebagai upaya pencegahan Covid-19 yang terus meningkat pada tahun kedua pandemi. Ledakan kasus dan lonjakan jumlah kematian akibat Covid-19 menjadi perhatian besar dan memberikan pelajaran penting. Dengan tidak mengulang kesalahan serupa dan hal ini sekaligus menjadi ujian solidaritas bangsa-bangsa untuk saling membantu mengatasi pandemi yang sudah berjalan dua tahun.

Puasa di Era Pandemi

Selama bulan puasa Ramadhan umat Islam telah melakukan ritual besar, yaitu siam (puasa) Ramadhan, plus semua rangkaian ibadah dan amal kebajikan lain, seperti shalat Tarawih dan shalat sunah lainnya, demikian juga tadarus Al-Quran. Maka, di bulan Syawal mereka digolongkan oleh Allah sebagai orang yang mendapat kemenangan dan kembali ke fitrahnya semula (Ted al-Fitri). Idul Fitri ada karena adanya siam Ramadhan, dan tidak ada identitas fitri jika tidak ada pelaksanaan siam Ramadhan tersebut.

Pada saat pandemi Covid-19 kegiatan ibadah yang dilarang adalah ke mesjid. Padahal ini ritual puasa untuk melaksanakan terawih dan tadarus Qur'an pada malam hari di bulan Ramadhan. Tetapi kegiatan ini dilakukan di rumah saja bersama keluarga.

Larangan Mudik

Dalam Idul Fitri, umat Islam memulai lembaran baru dengan mengisi amal-amal saleh. Tradisi silaturahmi, saling berkunjung ke sanak saudara, tetangga, dan kawan serta memuliakan tamu adalah perilaku positif yang diajarkan oleh Islam.

Umat Islam berlatih untuk tetap menjalankan kesabaran dalam berbagai hal karena orang sabar adalah kekasih Tuhan. Namun, saat ini, karena Idul Fitri masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, dan pemerintah telah memberlakukan kebijakan larangan mudik atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, orang kota tak dapat mudik seperti biasa.

Hanya saja, yang perlu diantisipasi oleh pemerintah juga, larangan mudik bagi orang-orang kota akan dimanfaatkan untuk berbelanja atau berekreasi di beberapa mal di sinilah potensi untuk berkerumun dan mungkin berdesakan juga tidak dapat dielakkan. Kasus pelonjakan jumlah dan angka penyebaran Covid-19 di India karena pelanggaran peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan euforianya masyarakat harus menjadi pelajaran bersama tempat-tempat wisata lain.

Silaturahmi Virtual

Pada zaman modern ini, tradisi positif, seperti silaturahmi, yang telah dibangun orangtua kita dulu sudah semakin punah. Hal ini disebabkan kehidupan modern cenderung materialistis dan individualistis.

Orang bersedia berteman jika ada kepentingan kerja atau bisnis. Di kota-kota besar, misalnya, antara tetangga satu dan tetangga yang lain tidak saling mengenal karena rumah mereka sudah dibatasi oleh pagar dan dinding tembok yang tinggi.

Tanpa mengurangi nilai silaturahmi sebagai sebuah tradisi yang baik bangsa ini, halalbihalal juga dapat dilakukan secara daring (online), bisa melalui Whatsapp (WA), pesan singkat (SMS), Facebook, Instagram, messenger, zoom, v-meet, dan sebagainya.

Mempertahankan Lebaran Effect Tanpa Mudik

Diana Dwi Susanti – BPS Provinsi Jawa Tengah
Times Indonesia, 15 Mei 2021

Saat ini mayoritas penduduk di Indonesia yang berasal dari kalangan muslim tengah menikmati tradisi bulan ramadhan. Bulan ramadhan adalah bulan mulia dan penuh rahmat dengan puncak tradisi ini adalah lebaran. Ramadhan dan lebaran biasanya ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Apalagi jika Tunjangan Hari Raya (THR) diterima oleh sebagian besar karyawan baik negeri maupun swasta. Belum lagi dengan aliran zakat/donasi sosial lainnya yang dalam durasi singkat akan menggerak daya beli masyarakat ekonomi bawah. Lebaran effect selalu ditunggu oleh masyarakat, karena dampaknya sangat berpengaruh ke semua lapisan masyarakat. Lebaran effect menjadi momentum dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Kebiasaan mendekati lebaran, belum afdol jika tidak membuat rendang, opor ayam, ketupat, kue kering dan segala macam jajanan konsumsi keluarga atau suguhan tamu yang datang. Membeli pakaian, aksesoris, dan perhiasan juga menjadi semacam prasyarat wajib bagi anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Dan perilaku ini dilakukan hampir rata-rata setiap keluarga Indonesia.

Tradisi mudik berkunjung ke sanak saudara ikut meningkatkan ekonomi yang merata hampir di seluruh wilayah. Bisa dikatakan momen ramadhan dan lebaran ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia.

Larangan Mudik

Berat jika melarang masyarakat Indonesia untuk tidak mudik. Mudik telah menjadi budaya dan tradisi yang begitu kental bagi masyarakat. Sudah dua kali lebaran yaitu tahun 2020 dan 2021, mudik dilarang di Indonesia. Penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang masih belum pergi dari Indonesia. Kasus covid-19 terus bertambah. Terutama ketika usai liburan atau perayaan keagamaan.

Lonjakan kasus yang selalu terjadi pasca libur panjang atau perayaan keagamaan. Pertama, libur Idul Fitri tahun lalu yang menaikkan angka kasus harian hingga 93 persen dan meningkatkan angka kematian mingguan sampai 66 persen.

Kedua, libur panjang 22-23 Agustus 2020 menaikkan kasus sampai 119 persen dan meningkatkan tingkat kematian mingguan hingga 57 persen. Ketiga, libur panjang periode 28 Oktober sampai 1 November 2020 yang menaikkan kasus covid-19 sampai 95 persen dan meningkatkan angka kematian mingguan 75 persen. Terakhir libur panjang natal dan tahun baru 2020 menaikkan kasus harian sampai 78 persen dan tingkat kematian hingga 46 persen.

Hal ini yang membuat pemerintah mengambil langkah kebijakan larangan mudik pada lebaran tahun 2021 dengan mengeluarkan peraturan melalui Surat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021. Demi menjaga lonjakan kasus covid-19 yang belum teratasi. Karena belum semua warga melakukan vaksinasi.

Namun upaya pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh dengan mengeluarkan THR dan bantuan sosial. Untuk menjaga daya beli masyarakat dalam mempersiapkan lebaran tahun 2021.

Lebaran Effect Tanpa Mudik

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2021 masih terkontraksi -0,74 persen yang disebabkan oleh melambatnya dua motor penggerak ekonomi nasional. Yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi yang disebabkan pandemi covid-19.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 56,93 persen. Selanjutnya kontribusi investasi sebesar 31,98 persen. Sisanya pengeluaran pemerintah, lembaga non profit hingga arus perdagangan luar negeri.

Dengan kontribusi terbesar, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu acuan untuk mengukur ekonomi secara keseluruhan. Tren pertumbuhan konsumsi selalu sejalan dengan laju ekonomi. Saat konsumsi melambat, hampir dipastikan akan berefek pada agregat pertumbuhan ekonomi.

Terkontraksinya konsumsi rumah tangga pada triwulan I tahun 2020 disebabkan oleh kelas menengah ke atas menahan konsumsinya pada awal tahun. Padahal distribusi pengeluaran masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang mempunyai pengeluaran tinggi sebesar 45 persen dan masyarakat dengan pengeluaran menengah sebesar 36 persen. Sedangkan masyarakat dengan pengeluaran rendah hanya 17 persen.

Meningkatkan Konsumsi Golongan Menengah Ke Atas

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. THR yang sebagian besar diterima oleh masyarakat menengah ke atas diharapkan dapat menggerakkan komponen konsumsi rumah tangga.

THR yang dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok, berpengaruh terhadap penjual dan produsen. Jika setiap orang membelanjakan uang THR itu, maka konsumsi rumah

tangga akan tumbuh. Dampak positif THR juga akan mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini kesempatan industri riil meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan ramadhan dan lebaran. Maka efek selanjutnya pendapatan karyawan dan perusahaan akan meningkat. Seterusnya akan mendorong juga daya beli karyawan dan perusahaan untuk belanja. Begitulah seterusnya menjadi sebuah lingkaran yang terus berputar dan menjadi sistem yang harus dikelola dengan baik dan hati-hati penuh antisipasi dan perhitungan oleh pemerintah.

Lebaran memang tanpa mudik. Namun masyarakat terutama golongan menengah ke atas bisa tetap melakukan silaturahmi dengan keluarga melalui virtual. Masih bisa berbagi dengan mengirimkan hadiah atau keperluan lebaran ke kampung halaman. Saat lebaran tempat wisata juga dibuka walaupun dengan protokol kesehatan dan pembatasan kunjungan. Setidaknya dengan dibukanya tempat wisata mendorong masyarakat menengah ke atas untuk menikmati wisata.

Walaupun terjadi pro kontra antara mudik dilarang namun tempat wisata dibuka. Tempat wisata dibuka tentu dengan pengawasan dan penjagaan yang ketat. Dan ada batasan untuk pengunjung. Dengan dibukanya tempat wisata, setidaknya ekonomi masih menggeliat. Namun jika mudik tidak dilarang, ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang ke kampung, ke sanak keluarga. Hal ini tentu akan meningkatkan kasus covid-19 yang tidak bisa dibendung. Seperti yang terjadi di negara India.

Lebaran kali ini memang masih menjadi ujian berat terutama bagi para perantau. Namun bijak dalam menanggapi masalah dan tetap melakukan belanja lebaran untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian lebaran effect akan tetap terasa walaupun tidak bersua secara tatap muka.

Mengukur Dampak Ekonomi Larangan Mudik

**Eko Suharto – BPS Provinsi Jawa Tengah
Jateng Daily, 16 Mei 2021**

Ramadhan tahun ini menjadi yang kedua pada masa pandemi Covid-19. Aktivitas selama Ramadhan belum sepenuhnya normal. Kegiatan di Masjid dibuka dengan penerapan protokol kesehatan. Jamaah mengikuti Sholat Tarawih dengan batasan 50 persen kapasitas. Pelaksanaannya diupayakan dengan durasi yang tidak panjang.

Demikian pula mudik lebaran. Memasuki tahun kedua pandemi, Pemerintah kembali melarang tradisi tersebut. Siklus tahunan pulang ke kampung halaman kembali ditiadakan. Bukan keputusan mudah untuk melarang ritual tahunan ini. Langkah strategis ini tentunya berdasarkan pertimbangan dan pemikiran matang berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Di sisi lain, Pemerintah berencana memperbolehkan masyarakat berwisata di daerahnya masing-masing. Situasi ini membuat masyarakat berpolemik. Pro kontra terkait kebijakan tersebut memunculkan anggapan bahwa Pemerintah melakukan blunder. Ketua DPR RI, Puan Maharani bahkan meminta pemerintah memperjelas aturan larangan mudik namun membolehkan tempat wisata beroperasi.

Ekonomi Mudik

Mudik Lebaran merupakan wujud tradisi turun temurun dan telah membudaya. Pulang ke udik (kampung) sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Namun menjadi istimewa karena dilaksanakan saat Hari Raya Idul Fitri. Saudara, handai taulan dan teman di perantauan memiliki hari libur yang sama. Serentak bisa saling bertemu dan melepas rindu di kampung halaman.

Hal menarik dari tradisi mudik yaitu peristiwa ekonomi yang unik. Terjadi aliran dana cukup besar dari berbagai kota menuju pelosok perdesaan. Setelah sekian lama bekerja di perantauan, jutaan orang kembali ke kampungnya. Mereka membawa hasil jerih payah dan membelanjakannya di kampung halaman. Kondisi ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Mobilitas pemudik memerlukan transportasi. Baik itu transportasi pribadi maupun umum. Pengusaha angkutan mampu meneguk keuntungan. SPBU resmi maupun eceran mengalami peningkatan omset. Demikian juga usaha bengkel, tambal ban, maupun juru parkir.

Tak mau kalah moncer bisnis kuliner. Pemudik membutuhkan makanan dan minuman di tempat kedatangan. Rumah makan dan restoran pasti ramai dengan pembeli. Atau meskipun memasak sendiri pasti perlu bahan makanan ekstra. Imbasnya pasar tradisional kebanjiran konsumen.

Bisnis oleh-oleh menanggung untung besar menjelang hari raya. Buah tangan baik makanan maupun non makanan laris diborong. Pemudik membagikan kebahagiaan dengan membawakan oleh-oleh untuk orang tua dan kerabat. Momentum ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan penjualan.

Pengusaha hotel dan penginapan turut panen pada musim mudik. Saat keluarga besar berkumpul, rumah di kampung tidak mampu menampung seluruh anggota. Anak anak kota tidak nyaman tinggal di rumah kakek neneknya. Gerah, panas dan banyak nyamuk. Tinggal di hotel atau penginapan menjadi pilihannya.

Data Survei Balitbang Perhubungan tahun 2019 menunjukkan Jawa Tengah menjadi daerah tujuan terbanyak pemudik. Dari perkiraan 14,9 juta orang Jabodetabel yang mudik, lebih dari 37 persen masuk Jawa Tengah. Jumlah uang yang dibawa dan dibelanjakan pemudik ke Jawa Tengah mencapai lebih dari 3,8 triliun rupiah.

Dalam kondisi normal, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Tengah akan menyambut dengan sukacita kedatangan pemudik. Berbagai poster dan baliho sambutan kedatangan terpampang di pusat kota maupun perbatasan.

Sayangnya itu tidak terjadi pada masa lebaran saat ini dan tahun kemarin. Covid-19 membuat pemerintah daerah memasang baliho larangan mudik dan bepergian. Jumlah pemudik turun tajam. Musim lebaran 2020, kisaran angka tidak lebih dari 1 juta orang masuk Jawa Tengah. Kondisi serupa terjadi pada lebaran tahun ini.

Perputaran ekonomi mudik tidak seperti yang diharapkan. Harapan untuk memacu konsumsi rumah tangga tidak terjadi. Rilis BPS Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2019 memperlihatkan mudik menjadi salah satu faktor ekonomi tumbuh. Konsumsi rumah tangga mendominasi struktur ekonomi dari sisi pengeluaran mencapai 60,66 persen. Pada triwulan II nilainya tumbuh 5,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun kondisinya berbalik arah pada 2020 dimana konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi -4,16 persen. Realitanya ekonomi mudik tidak terjadi pada saat mudik dilarang.

Mengurangi Dampak

Pelarangan mudik dan pengetatan perjalanan dilakukan demi mengendalikan penyebaran Covid-19. Belajar dari India, kewaspadaan mengantisipasi ledakan Covid-19 memang diperlukan. Di sisi lain, perekonomian juga harus digerakkan. Dampak pengganda yang tidak terjadi pada periode mudik dapat disiasati. Tunjangan Hari Raya yang telah dibagikan jangan sampai menjadi dana menganggur.

Pertama, tetap mendorong belanja masyarakat meskipun tidak dengan berpergian. Layanan e-commerce menjadi prioritas. Pemerintah dapat mendorong dengan menggelar hari belanja online. Termasuk memberikan diskon atau subsidi ongkos kirim. Selain membantu dari sisi produksi karena permintaan meningkat, sektor perdagangan juga terimbas. Efek lain, jasa pengiriman barang akan merasakan peningkatan omset.

Kedua, membuka kembali tempat wisata dengan protokol yang ketat. Wisatawan wajib mengikuti protokol kesehatan termasuk membawa surat bebas Covid-19. Ini akan membawa rasa aman dan nyaman bagi pengunjung lainnya. Selain itu aglomerasi wilayah juga menjadi pertimbangan. Wisatawan dari luar area aglomerasi sebaiknya dilarang. Meski terkesan kontradiktif, namun upaya ini perlu dilakukan mengingat sektor pariwisata terpuruk saat pandemi.

Ketiga, dengan menggratiskan biaya pengiriman uang. Perantau yang tidak pulang dapat mengirim uang ke orang tua dan sanak saudara di kampung secara gratis. Uang yang ditransfer diharapkan memacu belanja di daerah perdesaan dan mendorong konsumsi.

Larangan mudik akan menekan ekonomi dari sisi konsumsi. Namun kebijakan yang tepat, diharapkan pergerakan ekonomi tetap terjadi. Lebih dari itu, upaya mengendalikan Covid-

19 harus terus dilakukan. Karena saat Covid-19 dapat dikendalikan, pertumbuhan ekonomi akan terjadi.

Mudik Yang Tak Dirindukan

**Ahmad Fahrur Rohim – BPS Kabupaten Jepara
Info Jateng (Media Online), 3 Mei 2021**

Jika kita pernah merantau, maka pasti akan merindukan yang namanya mudik atau pulang kampung. Mudik di Indonesia umumnya pada saat Lebaran Idul Fitri. Mudik tidak hanya menjadi ajang untuk melepas kangen dengan orang tua dan orang terdekat serta teman-teman, namun juga untuk liburan melepaskan penat dan kejenuhan dari rutinitas. Maka tidak afdhol jika tidak sekalian berkunjung ke tempat wisata, mencicipi masakan khas daerah asal, dan berburu oleh-oleh untuk dibawa kembali ke perantauan.

Tidak hanya perantau saja yang rindu momen mudik. Pemerintah dan pihak swasta pun ikut menunggu hadirnya. Pihak pemerintah biasanya sudah melakukan perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan jauh-jauh hari sebelum bulan puasa. Selain itu ada juga penyiapan moda transportasi, agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman.

Tak kalah dengan pemerintah, pihak swasta pun ikut gembira. Pemilik bus, mobil travel dan agen travel pun ikut merindukan akan datangnya rejeki musiman tersebut. Tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran juga selalu memanfaatkan momen tersebut.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Jawa Tengah. Geliat ekonomi Jawa Tengah pada saat arus mudik lebaran sebelum pandemi dapat kita lihat pada ekonomi triwulan II 2019. Saat itu sektor transportasi dan perdagangan berdasarkan data BPS Jawa Tengah mampu tumbuh 4,16 persen. Sedangkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 3,39 persen.

Pada saat itu (Juni 2019) penumpang yang datang melalui bandar udara di Jawa Tengah mencapai 230.490 orang atau naik 21,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Begitu juga penumpang angkutan laut yang meningkat 29,35 persen dibanding bulan sebelumnya atau sebanyak 56.823 orang

Kedua itu berubah total sejak pandemi melanda pada Maret 2020. Dampak pembatasan mobilitas masyarakat dan pembatasan lainnya, perekonomian Nasional termasuk Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi masing-masing 2,07 persen dan 2,95 persen. Sebagian besar sektor ekonomi pun terkompresi, termasuk transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Maka untuk mengendalikan penyebaran covid-19 pemerintah melarang tradisi mudik lebaran. Yang terbaru, lebaran tahun ini pun pemerintah masih akan melakukan pelarangan hal tersebut.

Pelarangan tersebut bukan tanpa alasan, meskipun vaksinasi sudah berjalan. Berkaca dari sebelumnya, dimana pasca liburan cukup panjang terjadi penambahan kasus covid 19 meningkat. Alarm tetap harus dinyalakan, karena ada warning gelombang ke-2 serangan covid-19 seperti yang terjadi di India yang menyebabkan tsunami covid 19 disana.

Tidak hanya pemerintah saja, pihak keluarga juga semestinya menghimbau anggota keluarganya yang merantau untuk tidak mudik. Akhir-akhir ini ini ada kasus penyebaran covid 19 disalah satu desa di Kabupaten Pati. Ada warga yang pulang dari Jakarta mengadakan syukuran di rumah, menularkan ke 39 orang warga sekitar yang hadir. Kalau seperti itu, mudik menjadi tidak dirindukan lagi, malah membawa malapetaka bagi yang lain.

Memang pro kontra akan adanya pelarangan mudik pun muncul silih berganti, pada satu sisi sudah ada vaksinasi, tren angka kasus yang positif covid juga menurun. Selain itu juga untuk menggerakkan ekonomi yang sempat berkontraksi cukup dalam. Namun pada sisi yang lain, pemerintah ingin menjaga tren penurunan kasus covid-19 yang sudah ada. Jangan sampai hapis liburan Lebaran kasus menjadi meningkat.

Pemerintah pun melakukan pelarangan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021. Kebijakan tersebut didukung dengan kesiapan aparat kepolisian dalam menjaga warga yang tetap nekat mudik dengan mendirikan pos penyekatan di berbagai titik strategis.

Pemerintah diharapkan tegas dalam menerapkan larangan mudik, jangan sampai ada tebang pilih. Selain itu yang perlu diperhatikan juga, karena tempat wisata masih diperbolehkan buka pada lebaran. Hal tersebut berpotensi menjadi pelampiasan masyarakat yang gagal mudik. Sehingga dapat terjadi kerumunan dan berpotensi juga adanya penularan covid-19. Apalagi sebagian masyarakat masih abai dengan proses.

Namun, jika pemerintah sudah siap juga dengan pengawalan tempat wisata dan tempat hiburan dalam menerapkan protocol kesehatan, semoga hal yang dikhawatirkan tidak terjadi. Sehingga masyarakat dapat mengobati kekecewaan tidak dapat mudik dengan berlibur. Selain itu pasca libur Idul Fitri, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia juga terus mengalami penurunan.

THR, Sekoci Ekonomi Rumah Tangga di Tengah Pandemi

**Lina Dewi Yunitasari – BPS Kabupaten Jepara
Lingkar Jateng, 18 April 2021**

Tunjangan Hari Raya (THR) selalu dinanti pegawai pemerintah maupun swasta menjelang Lebaran tiba. THR termasuk pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha

kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. Tradisi pemberian THR hanya ada Indonesia dan seakan sudah menjadi ciri khas.

Pemberian THR telah melewati sejarah cukup panjang di Indonesia. Bermula tahun 1951 pada era Kabinet Soekiman Wirjosandjoyo, seorang politikus partai Masyumi, yang memutuskan memberikan THR bagi pamong praja (kini PNS) menjelang hari raya sebesar Rp 125-Rp 200 atau setara Rp 1,1 juta- Rp 1,75 juta saat ini. Pemberian THR tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pamong praja dan keluarganya. Selain THR, Kabinet Soekiman juga memberikan paket sembako menjelang hari raya dan tunjangan beras setiap bulan. Kebijakan THR yang awalnya hanya untuk para pamong praja, mendapat protes dari para buruh yang merasa hal tersebut tidak adil. Mereka menuntut pemerintah untuk diberikan hak sama, mengingat andil buruh dalam perekonomian nasional juga sama penting. Atas desakan para buruh, akhirnya kebijakan pemberian THR berlaku untuk seluruh pegawai pemerintah dan swasta.

Besaran THR adalah satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja minimal 12 bulan atau proporsional bagi yang bekerja satu hingga kurang dari 12 bulan, dan dibayarkan maksimal 7 hari menjelang hari raya keagamaan. Pembayaran THR secara resmi diatur pemerintah dalam Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

THR memiliki andil penting dalam perekonomian masyarakat. Acapkali THR yang seperti “rejeky nomplik” digunakan untuk biaya mudik, angpao, belanja kebutuhan hari raya, liburan dan konsumsi rumah tangga lainnya. Tekanan kebutuhan yang luar biasa di tengah pandemi tak hanya dirasakan oleh buruh, disisi pengusaha terpaksa harus mengambil keputusan berat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh demi dapat bertahan dan lolos dari situasi sulit ini. Terlihat dari hasil Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2020, jumlah buruh/karyawan turun menjadi 46,7 juta pekerja dari 52,3 juta pekerja Agustus 2019. Pengusaha yang masih bertahan pun berusaha melakukan “penyesuaian” upah sehingga menurut catatan BPS Agustus 2020 rata-rata upah buruh bulanan turun menjadi Rp 2,7 juta dari sebelumnya Agustus 2019 Rp 2,9 juta. Oleh karena itu, THR ibarat “sekoci”, agar ekonomi rumah tangga menjelang Lebaran ini tidak tenggelam karena kebutuhan yang membengkak.

Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dalam PDB Indonesia, tahun 2020 terkontraksi 2,63% akibat pandemi covid-19, bahkan sempat mengalami kondisi terburuk yaitu triwulan 2-2020 terkontraksi 5,52%. Perlahan, konsumsi rumah tangga meningkat berkat dukungan stimulus APBN terhadap perekonomian dan program vaksinasi yang berjalan lancar sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Kepercayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari hasil Survei Bank Indonesia (BI), barupa Indeks Kepercayaan Konsumen Maret naik ke angka 93,4 dari bulan sebelumnya hanya berangka 85,8. Pembayaran THR diharapkan memberikan multiplier effect besar bagi seluruh pelaku ekonomi. THR yang diterima buruh/karyawan akan masuk ke dalam aliran pendapatan yang diterima rumah tangga. Rumah tangga membelanjakan ke berbagai sektor usaha, sehingga pendapatan sektor usaha akan terungkit naik. Meskipun saat ini masih dibayang-bayangi larangan mudik dan berbagai pembatasan sosial, pemanfaatan THR untuk memenuhi konsumsi masih bisa terbantu

dengan perkembangan teknologi yang serba canggih saat ini. Jika pembelanjaan THR dapat dimaksimalkan, maka konsumsi rumah tangga akan terdorong dan pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi kearah positif.

<https://jateng.bps.go.id>

Bagian 3

Melewati Satu Tahun Pandemi

Diana Dwi Susanti

Pandemi Covid-19 sudah dua tahun melanda Indonesia terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Berbagai macam wisata di Indonesia ditutup akibat Covid-19 ini. Namun setelah diberlakukannya *new normal*, wisata-wisata itu pun dibuka kembali namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada 2 Maret 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus Covid-19 terus bertambah. Gelombang pertama kasus Covid-19 di Indonesia terjadi pada Januari-Februari 2020. Pada saat itu, kasus Covid-19 harian tertinggi terjadi pada 30 Januari 2020 sebanyak 14.528.

Lalu, gelombang kedua kasus Covid-19 terjadi di Indonesia pada Juni-Juli 2021 akibat varian Delta. Kasus tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Kini, Indonesia dihadapkan pada gelombang ketiga yang dipicu oleh varian Omicron. Sejauh ini, penambahan kasus Covid-19 tertinggi terjadi pada 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus. Hingga 2 Maret 2022, total tercatat 5.589.176 kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia. Sementara itu, total kasus sembuh berjumlah 4.944.237 dan kasus meninggal 149.036.

Pembatasan Masyarakat

Sejak pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, pemerintah sudah bolak-balik menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan Covid-19. Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mulai berlaku 17 April 2020.

Kemudian pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro pada Februari 2021. Bolak-balik diperpanjang, Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro pada medio Juni 2021. Namun, kasus Covid-19 terus naik.

Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Jawa-Bali, dan 12-20 Juli di luar Jawa-Bali. Kemudian diperpanjang dengan istilah baru PPKM Level 4 pada 20-25 Juli 2021. Pada 7 September 2021, pemerintah memberlakukan PPKM berbasis Level 4, 3, dan 2, 1 di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Kebijakan tersebut berlaku sampai saat ini.

Laju Vaksinasi

Hingga Rabu, 2 Maret 2022, vaksinasi dosis pertama sudah diberikan kepada 190.979.676 (91,70 persen) penduduk, dan vaksinasi dosis kedua sudah diberikan kepada 144.565.875 (69,41 persen) penduduk. Sementara itu vaksinasi dosis ketiga (booster) sudah diberikan kepada 10.249.634 (4,92 persen) penduduk.

Untuk vaksinasi booster, kini sudah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun, dan telah menerima vaksinasi dosis primer minimal tiga bulan sebelumnya. Pemerintah juga telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yakni vaksin sinopharm. dengan demikian ada 6 jenis regimen vaksin booster yang digunakan di Indonesia; Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J), dan Sinopharm..

Pemerintah saat ini mulai menyiapkan skenario menuju endemi. Proses menuju endemi memang butuh waktu yang panjang. Pemerintah saat ini berupaya membuat kondisi pandemi terkendali, sebelum masuk pra-endemi dan endemi.

Secerach Harapan pada Tahun Kedua Pandemi

Ahmad Fahrur Rohim – BPS Kabupaten Jepara
Lingkar Jateng, 29 Juli 2021

Hampir satu bulan terakhir kita dihebohkan dengan berita seputar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ataupun level 4. Kondisi tersebut merupakan upaya pemerintah seiring masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia, terutama karena adanya varian baru. Pro dan kontra terhadap adanya pengetatan mobilitas massa melalui PPKM darurat pun tidak dapat dihindari. Pada satu sisi pemerintah berusaha menekan laju penyebaran Covid-19. Sedang pada sisi yang lain, masyarakat yang utamanya bekerja pada sektor informal sangat terpuruk, seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan usaha kecil lainnya. Usaha mereka menjadi sepi, sehingga pendapatannya menurun drastis. Selain itu beberapa sektor lain seperti hotel restoran dan transportasi juga menjadi terpuruk, bahkan ada yang sampai mengibarkan “bendera putih”.

Sejatinya secara makro, kondisi yang terjadi pada tahun 2021 sudah agak membaik. Hal tersebut seiring semakin gencarnya program vaksinasi dan adanya pelonggaran terhadap pembatasan masyarakat dibandingkan pada periode awal pandemi. Berdasarkan data BPS, Ekonomi Indonesia triwulan I 2021 dibanding periode yang sama tahun lalu hanya mengalami kontraksi sebesar -0,74 persen. Kondisi tersebut merupakan kabar cukup mengembirakan di tengah gelombang kedua Virus Covid-19.

Apalagi tahun lalu ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sampai -2,07 persen. Perlu diketahui juga bahwa triwulan I tahun lalu, Januari dan Februari masih belum pandemi dan masih normal. Sehingga angka triwulan I tahun ini dirasa cukup baik.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di wilayah Jawa Tengah, dimana pada triwulan I 2021 berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kontraksi -0,87 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya optimisme untuk mencapai pertumbuhan positif, mengingat periode triwulan II-IV 2020 mengalami kontraksi pada kisaran -3 hingga -5 persen.

Perbaikan juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan, data BPS Jawa Tengah mencatat angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Februari 2021 sebesar 5,96 persen atau mengalami penurunan 0,52 persen poin dibandingkan periode Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi di Jawa Tengah juga mengalami penurunan.

Pada Februari 2021 sebanyak 2,49 juta orang (9,18 persen penduduk usia kerja) terdampak Covid-19, berkurang sebanyak 1,47 juta orang atau sekitar 37,17 persen dibandingkan kondisi Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di Jawa Tengah pada Februari 2021 jika dirinci terdiri 251,20 ribu orang pengangguran, 94,94 ribu orang bukan angkatan kerja, 141,37 ribu orang sementara tidak bekerja dan 2 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja..

Pemerintah berusaha keras untuk mengurangi angka pengangguran dengan berbagai program. Indikasi-indikasi perbaikan diatas menunjukkan adanya secercah harapan akan adanya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 ini. Usaha pemerintah tersebut ditunjang adanya vaksinasi besar-besaran dari pemerintah, ditambah program-program intervensi pemerintah, seperti bantuan sosial dan bantuan usaha mikro kecil.

Kebijakan PPKM darurat yang dilanjutkan level 4 dengan sedikit pelonggran ini juga diklaim pemerintah mampu menurunkan angka kasus Covid-19 dan memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Kita sebagai warga Indonesia diharuskan ikut berperan yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mendukung program pemerintah.

Secercah Asa di Tengah Pandemi

**Irma Nur Afifah – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 26 Februari 2021**

Pandemi masih melanda negeri ini, termasuk di Jawa Tengah tercatat kasus total terkonfirmasi Covid-19 pada Februari 2021 sebanyak 152.052 orang, menduduki peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Covid-19.go.id). Pandemi Covid-19 bermula dari problem kesehatan yang kemudian merambah pada merosotnya kinerja ekonomi. BPS mencatat angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan 4 2020 masih menyisakan kontraksi sebesar -3,34 persen. Turunnya kinerja ekonomi, berdampak angka kemiskinan Jateng meningkat, tahun 2019 tercatat sebesar 10,58 persen, tahun 2020 naik menjadi 11,41 persen. Hal selaras terjadi pada indikator ketenagakerjaan, dimana angka pengangguran turut meningkat, dari 4,72 pada 2019, menjadi 6,48 persen di tahun 2020. Problem kesehatan menghantui ibarat bayang-bayang hitam tak kasat mata, menggoyahkan lini strategis ekonomi dan sosial di Jawa Tengah.

POTENSI BONUS DEMOGRAFI

Meski pandemi, BPS telah menyelesaikan Sensus Penduduk 2020 dan merilis hasilnya pada Januari 2021 yang lalu. Tercatat jumlah penduduk Jateng sebanyak 36,52 juta, dengan persentase penduduk usia produktif sebesar 70,60 persen dalam posisi bonus demografi, sementara persentase penduduk lansia tercatat sebesar 12,14 persen. Komposisi penduduk menurut generasi, tercatat 25,31 persen Gen Z dan 24,93 persen Milenial, 22,53 persen Gen X, 14,18 persen baby boomer dan 10,61 persen Post Gen Z (BPS, 2020). Artinya komposisi generasi didominasi kaum muda mudi yaitu Gen Z dan Milenial. Berarti pula bahwa momen yang sangat tepat untuk terus memacu potensi sumber daya yang ada, demi kemajuan Jawa Tengah. Sejauh ini prestasi yang diraih Jawa Tengah juga bergengsi, yaitu sebagai provinsi terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Desember 2020 yang lalu.

HARAPAN HIDUP

Menurut catatan BPS Angka Harapan Hidup Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 74,37 tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang selama 74,23 tahun (BPS,2020). Dan ternyata perempuan memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, baik di 2019 maupun 2020, tercatat perempuan di Jateng memiliki harapan hidup sampai dengan 76.30 tahun dan laki-laki sampai usia 72.51 tahun pada 2020. Naik dibandingkan tahun 2019, yang tercatat bahwa penduduk perempuan 76.16 tahun dan laki-laki 72.33 tahun. Sehingga dari sisi usia dapat disimpulkan bahwa penduduk Jawa Tengah telah mampu memperpanjang usia meski pun penambahan pada bilangan bulan, ini berarti juga bahwa penduduk telah dengan kesadaran penuh, mulai beralih pada lifestyle yang lebih sehat. Hal ini tercermin dari gencarnya pengaturan pola makan, pola diet sehat dan ragam menu yang lebih sehat disajikan lebih viral, menjadi hikmah dibalik pandemi.

HARAPAN EKONOMI

Berbicara tentang pandemi, kita ketahui Covid-19 telah memberikan efek domino yang serius, artinya bahwa dampak Covid-19 yang sejatinya merupakan problem kesehatan, merambah ke problem ekonomi dan sosial, yang menimpa seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana rilis BPS, tercatat Pertumbuhan Ekonomi Jateng kuartal 1 sebesar 2,60 persen, kuartal 2 sebesar -5,42 persen, kuartal 3 sebesar -3,92 persen dan kuartal 4 sebesar -3,34 persen, dan secara total pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar -2,65 persen.

Melihat angka pertumbuhan ekonomi per triwulan, ada secercah harapan bahwa ekonomi meskipun melambat, pelan-pelan mulai menunjukkan geliatnya. Kesehatan memang menjadi prioritas utama dalam pergerakan ekonomi makro. Betapa tidak, manakala kesehatan runtuh praktis sosial dan ekonomi ambruk. Untuk itulah upaya-upaya terus dilakukan, diantaranya mulai penerapan PPKM, protokol kesehatan dan yang sedang dilakukan adalah vaksinasi. Pandemi ini bukan tidak mungkin dapat teratasi, namun memang perlu proses dan upaya yang kuat dari semua pihak untuk bersinergi bersama memerangi musuh tak kasat mata ini menjadi amunisi optimis sehingga bisa menggerakkan kembali roda perekonomian.

SECERCAH ASA

Secara linier usia harapan hidup berbanding lurus terhadap ekonomi. Makin membaik ekonomi sejatinya harapan usia seseorang makin baik pula, artinya dengan pendapatan yang memadai dapat dikatakan bahwa seseorang akan mampu memenuhi kebutuhan primer (sandang pangan papan), kebutuhan sekunder dan bahkan tertierinya. Sedangkan kondisi ekonomi dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, untuk dapat beraktivitas memenuhi kebutuhan ekonominya, seseorang yang sehat tentu makin mampu bekerja menghasilkan pendapatan untuk diri maupun keluarganya.

Sejalan dengan itu adanya bonus demografi yaitu dominasi pada usia produktif pada level milenial dan Gen Z menjadi sumber daya potensial yang harus di asah dengan tepat sehingga menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan. Dan saat ini telah terbukti bahwa telah tumbuh ekonomi kreatif yang digagas oleh kaum muda mudi dan menunjukkan keberhasilan dalam bisnisnya.

Sementara itu dari sisi angka harapan hidup yang panjang juga merupakan nilai plus bagi harapan keberlangsungan hidup karena mereka dinilai memiliki pertahanan kesehatan yang lebih baik sejak dini.

Peluang bonus demografi, Angka Harapan Hidup yang makin lama, potensi pertumbuhan ekonomi yang sedikit demi sedikit mulai membaik, merupakan harapan dan menjadi modal utama meraih kembali asa yang sempat tertunda karena pandemi yang melanda. Potensi tersebut yang harus dijaga agar keadaan kembali terkendali. Dengan segala daya dan upaya, Jateng mencoba bangkit kembali, memerangi pandemi demi meraih kembali kondisi yang lebih baik lagi.

Kesehatan pulih, ekonomi bangkit, pembangunan berlanjut, problem sosial yang mencatat naiknya angka kemiskinan, pengangguran dan problem lainnya akan dapat teratasi, akhirnya semoga secercah asa yang ada ini menjadi booster semangat bangkit kembali di tengah pandemi yang tak kunjung berhenti.

Kabar Jawa Tengah Setahun Corona

Nurul Kurniasih - BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily – 7 Maret 2021

MARET 2021, tepat setahun bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan virus Corona. Tanggal 2 Maret 2020 lalu untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan munculnya kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Sejak saat itu setiap langkah dalam keseharian kita seakan dihantui dengan ketakutan terinfeksi virus yang telah merenggut 36.721 nyawa ini. Segala upaya telah dilakukan untuk memperlambat penularan virus COVID-19. Mulai dari penerapan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak yang diikuti dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah zona merah, hingga terakhir dikembangkan pola baru 5 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

PSBB pun akhirnya disesuaikan menjadi PPKM, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dibuat lebih longgar agar roda perekonomian bisa berputar dengan sedikit lebih lega. Dihadirkannya vaksin Covid-19 menjadi angin segar tersendiri di antara segala upaya pembatasan penularan virus corona. Hingga saat ini program pemberian vaksin masih dilakukan bertahap di seluruh nusantara kepada sasaran-sasaran prioritas yang telah ditetapkan.

Angin segar pun mulai terasa, dilihat dari grafik kasus Covid-19 di laman Covid-19.go.id menunjukkan tren menurun sejak awal Februari 2021. Kasus yang mencapai titik puncak pada 31 Januari 2021 dengan jumlah kasus harian sebanyak 14.528 kasus, kini sudah turun menjadi 6.395 kasus pada 6 Maret 2021. Sayangnya, meski grafik kasus harian Covid-19 mulai menunjukkan tren menurun, imbas yang ditimbulkan virus ini pada berbagai bidang kehidupan belum sepenuhnya menunjukkan tren membaik. Pergerakan mobilitas penduduk yang terbatas membuat roda perekonomian belum bisa kembali berputar secara leluasa. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang selama satu dasawarsa terakhir rata-rata mampu tumbuh di atas 5 persen, kali ini tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen, lebih dalam dari angka nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.

Upaya pemerintah dalam pencegahan penularan virus Covid-19 seperti memakan buah simalakama. Pada satu sisi ingin melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, tapi pada sisi lain berimbas pada berderitnya roda perekonomian. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah menyebabkan distribusi hasil industri masih terbatas. Upaya lain melalui phisycal distancing juga menyebabkan kesulitan tersendiri pada pola kerja pegawai. Imbasnya, pengurangan tenaga kerja dan pengaturan bahkan pengurangan jam kerja dalam suatu perusahaan harus dilakukan. Sektor perdagangan pun ikut lesu karenanya, begitupun sektor-sektor perekonomian lainnya tak bisa terelakkan dari 'infeksi virus Corona'.

Efek domino dari virus Covid-19 pun akhirnya sampai pada kenaikan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2020 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami peningkatan 0,43 persen menjadi 11,84 persen dibandingkan Maret 2020. Hal ini berarti dalam waktu kurang dari satu tahun terdapat penambahan 139,03 ribu orang penduduk Jawa Tengah berada pada kondisi miskin, yaitu menjadi 4,12 juta orang.

Covid-19 menyebabkan semakin banyak orang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Bagaimana tidak, melambatnya perputaran roda perekonomian akibat Covid-19 membuat banyak pelaku usaha harus mengurangi jam kerja, merumahkan sementara karyawan-karyawannya bahkan tak sedikit yang dengan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). BPS mencatat pada Agustus 2020 terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebesar 2,04 persen dan juga peningkatan jumlah setengah pengangguran sebesar 3,24 persen dibandingkan kondisi pada pertengahan 2019. Selain peningkatan jumlah pengangguran, dampak pandemi juga menyebabkan 3,19 juta penduduk Jawa Tengah mengalami pengurangan jam kerja, yang tentunya diikuti dengan berkurangnya pendapatan.

Upaya pemerintah Jawa Tengah dalam mencegah semakin luasnya penularan virus Covid-19 sebenarnya juga tidak sedikit. Melalui Surat Edaran bernomor 440/0005942 pada

tanggal 14 Maret 2020, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 melalui empat langkah. Pertama, masyarakat dihimbau tetap tenang dan menjaga kesehatan. Kedua, diinstruksikan kepada semua Kades/Lurah untuk mengedukasi warga tentang pencegahan virus Corona, dan ajakan mencuci tangan menggunakan sabun, serta sukarela memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti Corona (demam, flu, dll).

Ketiga, himbauan untuk mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Dan yang keempat adalah penyediaan tempat cuci tangan dan sabun di ruang publik (sekolah, tempat ibadah, mall, dll). Bukan hanya itu, pada April 2020, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program Jogo Tonggo, yaitu gerakan saling menjaga tetangga di saat pandemi, yang meliputi gotong royong melawan penyebaran dan penularan Covid-19, jaring pengaman sosial dan keamanan serta jaring ekonomi. Untuk membantu agar roda perekonomian tetap berputar di masa pandemi, Jawa Tengah melakukan terobosan phisycal distancing di pasar rakyat agar pedagang tetap bisa berjualan dan masyarakat bisa tetap berbelanja dengan aman dan nyaman. Selain itu, Ganjar Pranowo juga membantu pemasaran produk-produk UMKM dengan mempromosikan melalui akun-akun sosial mediana dengan program ‘Lapak Ganjar’. Tak hanya itu, Pemprov Jawa Tengah juga telah menggelontorkan dana sebesar 38 milyar rupiah untuk membantu UKM yang terdampak corona.

Banyaknya upaya yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah tak begitu saja sanggup untuk menbendung efek ‘infeksi virus Covid-19’ pada berbagai bidang. Banyaknya masyarakat yang masih kurang disiplin hidup dalam era new normal dimana harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, membuat peredaran virus corona di Jawa Tengah sempat melesat dengan cepat. Akibatnya pemulihan kondisi perekonomian pun tertekan tak bisa ikut melesat. Hadirnya vaksinasi yang diluncurkan sejak Januari 2021 diharapkan menjadi penyambung sebuah harapan untuk menghambat perkembangan corona sehingga kondisi kehidupan masyarakat bisa berangsur pulih seperti sedia kala. Tentunya harus dibarengi dengan peran aktif dari masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dimanapun dan kapan pun.

Ekonomi Jawa Tengah di Masa Pandemi

Hayu Wuranti – BPS Provinsi Jawa Tengah Suara Merdeka, 9 November 2021

Pandemi Covid-19 telah merontokkan berbagai sektor ekonomi sehingga kondisi resesi tidak terelakkan. Sebenarnya pergerakan ke arah perbaikan terlihat sejak akhir semester pertama tahun lalu. Masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat sempat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Kemudian sejak 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dikenalkan dengan PPKM Level 4 dan PPMKM Level 2,3, dan 4 (yaitu pemberlakuan pembatasan

kegiatan di Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian) pada 3 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Pemberlakuan PPKM di Jawa Tengah juga berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah. Bagaimana perekonomian Jawa Tengah di masa PPKM?

Ekonomi Jawa Tengah Tumbuh Melambat

Kinerja ekonomi Jawa Tengah melambat lantaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi terhambat akibat penerapan PPKM untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Jawa Tengah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di zona positif pada saat puncak pandemi Covid-19 menghebat pada Juli-September 2021. Seperti diketahui, pada triwulan III-2021 tersebut Jawa Tengah juga menerapkan pembatasan ketat pergerakan masyarakat setelah berkali-kali mencatatkan kasus positif dan kematian harian tertinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2021 tumbuh melambat 2,56 % secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,66 % secara triwulanan (quarter to quarter/qtoq) dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Rp 359,54 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 251,24 triliun. Pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu tersebut, ditopang oleh kinerja positif ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 17,83% di saat konsumsi rumah tangga dan pemerintah tertekan. Hal ini menunjukkan, pemulihan perekonomian Jawa Tengah lebih bergantung pada faktor eksternal, seperti mulai pulihnya perekonomian sejumlah daerah serta negara dan kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang digadang-gadang menjadi penjaga ketahanan ekonomi justru tumbuh rendah hanya sebesar 1,84%, sedangkan konsumsi pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar -7,30%.

Penguatan permintaan domestik pasca lonjakan kasus varian delta berhasil mendorong kinerja di beberapa sektor utama pada Triwulan III-2021. Secara tahunan, sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar Produk Domestik Bruto tumbuh positif sebesar 2,62%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain Sektor Perdagangan, Konstruksi dan Pertambangan yang masing-masing secara yoy tumbuh sebesar 6,52%, 12,91% dan 13,23%. Sementara, Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi akibat pengetatan kebijakan PPKM sebagai upaya mitigasi lonjakan kasus varian delta di awal Triwulan III-2021. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, namun kondisi ini dinilai menjadi modal sosial kuat bagi ekonomi Jawa Tengah untuk terus tumbuh dan membaik. Namun, semua pihak mesti tetap waspada karena pandemi belum berakhir.

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2021 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah menurun menjadi 6,95%, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 6,48%. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar 2,37% (dibandingkan Agustus 2020). Secara umum, upaya pengendalian pandemi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang

terdampak Covid-19 menjadi sebesar 286,73 ribu orang di Agustus 2021, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 377,20 ribu orang.

Sejalan dengan konsistensi penurunan kasus harian Covid-19 yang terus terjadi, Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM secara lebih luas namun tetap dalam pengawasan dan penerapan protokol Covid-19 secara disiplin. Kondisi yang kondusif ini memungkinkan permintaan bertumbuh dan perekonomian terus mengalami pemulihan. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada beberapa indikator utama yang menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Lebih lanjut, peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19 dan berlanjutnya berbagai program pemulihan ekonomi diperkirakan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Upaya untuk mencegah lonjakan kasus covid-19 juga dilakukan dengan melaksanakan vaksin covid-19. Hingga 30 September 2021, tercatat 12,83 juta jiwa atau 44,84 persen penduduk Jawa Tengah telah menerima vaksin. Dengan semakin membaiknya berbagai indikator kesehatan serta diiringi dengan kebijakan dan strategi Pemerintah yang tepat, pemulihan ekonomi diyakini memiliki prospek yang positif.

Setahun Pandemi, Tingkat Ketimpangan Semakin Melebar

**Faisal Luthfi Arief – BPS Kabupaten Rembang
Suarahukum-news.com, 9 Desember 2021**

Badan Pusat Statistik telah merilis angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 yang menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam rilisnya dijelaskan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2010, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Status IPM rendah apabila $IPM < 60$, sedang $60 \leq IPM < 70$, tinggi $70 \leq IPM < 80$ dan sangat tinggi apabila $IPM \geq 80$. (22/12).

Selama 2010–2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Setelah melambat pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IPM Indonesia kembali mengalami perbaikan pada tahun 2021 seiring meningkatnya kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Peningkatan IPM tahun 2021 didukung dengan adanya perbaikan di setiap dimensi penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan yang disebabkan turunnya dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).

Peningkatan IPM di tingkat nasional juga terjadi pada level provinsi. Selama periode 2020-2021, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,11), sedangkan urutan IPM terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua (60,62). Pada periode ini, DI Yogyakarta mengikuti DKI Jakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Dengan peningkatan status pembangunan manusia di DI Yogyakarta, jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 21, status “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 11, dan tidak ada lagi provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018 tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah”. Hal tersebut terjadi setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.

Pencapaian setiap Dimensi.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang direpresentasikan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,76 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. UHH Indonesia pada tahun 2010 adalah 69,81 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, dimensi pengetahuan pada IPM terus meningkat dari tahun ke tahun, meski selama pandemi COVID-19 mengalami perlambatan. Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,35 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,24 persen per tahun.

Pada tahun 2021, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021.

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Indonesia mencapai Rp 11,16 juta per tahun. Angka ini meningkat 1,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali.

Permasalahan di masa Pandemi.

Meskipun IPM kembali meningkat setelah setahun pandemi, masih menyisakan beberapa permasalahan terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Di bidang kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan masyarakat dan kesadaran terhadap perilaku sehat masih harus ditingkatkan, terlebih lagi dengan masih adanya ancaman pandemi Covid-19. Di bidang

ekonomi, kondisi perekonomian yang kembali kondusif telah berkontribusi besar dalam peningkatan kehidupan yang layak, namun demikian tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan dan melebarnya tingkat ketimpangan harus diupayakan solusinya secepat mungkin oleh Pemerintah.

Di sisi lain, disparitas capaian antarwilayah juga perlu mendapat perhatian. Disparitas IPM antara satu provinsi dengan provinsi lainnya masih tinggi, misalnya IPM DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang sudah atas 80 persen dengan Papua yang baru 60,62 persen. Hal tersebut harus segera dipecahkan permasalahannya supaya kondisinya mengalami perbaikan dan disparitasnya semakin rendah.

Vaksinasi dan Normalisasi Ekonomi

Irma Nur Afifah – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 14 November 2021

Konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan 3 (q3) 2021 pada 27 Oktober lalu menyebutkan bahwa stabilitas sektor keuangan dalam kondisi normal dan sektor finansial dinilai efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi seiring menurunnya angka kasus Covid-19, demikian ungkap Sri Mulyani. Sektor lainnya tentu tak bisa dipandang sebelah mata, geliat ekonomi mulai tumbuh seiring dengan penanganan melonjaknya varian delta yang cepat dengan hasil yang optimal, dengan tren kasus Covid-19 menurun secara signifikan.

Sejalan dengan stabilitas keuangan negara, kondisi perekonomian pun membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia q3 2021 tumbuh sebesar 3,51 persen, meski lebih rendah dari q2 (7.07 persen). Perkembangan tersebut sebagai dampak kinerja ekspor yang membaik dengan tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Margo Yuwono Kepala BPS dalam pers rilis pertumbuhan ekonomi 5 November lalu.

Vaksinasi yang gencar dilakukan merata di seluruh belahan negeri ini telah memberikan dampak sangat baik dan berkontribusi tinggi dalam menurunkan kasus Covid-19 varian delta hingga terkendali. Optimisme geliat pergerakan ekonomi pun bertumbuh lebih baik, demikian pula pemulihan ekonomi dunia juga mulai terus berlanjut.

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19

Pemerintah berupaya keras memacu angka partisipasi vaksinasi Covid-19. Guna membentuk hert immunity, idealnya sekitar lebih dari 70 persen penduduk telah divaksina. Berdasarkan data yang dikutip pada laman vaksin.kemkes.go.id, secara nasional target vaksinasi sebesar 208.265.720 penduduk atau 76,50 persen terhadap populasi penduduk. Sasaran ini meliputi tenaga kesehatan, lansia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum usia 12-17 tahun. Capaian vaksinasi pada November minggu 2 tercatat dosis 1 sebesar 62,47 persen dan dosis 2 sebesar 40,25 persen. Upaya vaksinasi melalui regulasi sebagai syarat untuk memasuki suatu wilayah harus menunjukkan sertifikat telah di vaksin membuahakan hasil yang sangat baik.

Vaksinasi sejatinya bertujuan untuk mencegah penularan, atau apabila seseorang tertular tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi virus. Meski demikian protokol kesehatan harus tetap diterapkan sebagai upaya pencegahan terbaik. Manfaat vaksinasi diantaranya adalah mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 yang berat, melindungi penyebaran Covid-19 bagi orang lain, membantu melindungi generasi berikutnya, dalam arti untuk mencegah virus corona bermutasi dan bereplikasi sehingga memungkinkan menjadi lebih kebal terhadap vaksinasi. Sehingga upaya vaksin yang gencar dilaksanakan sangat penting untuk melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi virus ini. Vaksinasi terbukti efektif dalam mengendalikan kasus Covid-19. Hal ini terlihat pada penurunan level penerapan PPKM dari level 4 menurun ke level 1 bahkan 0 di sejumlah wilayah.

Strategi APBN responsive dan fleksible digelontorkan untuk upaya penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan bantuan sosial untuk keberlangsungan produksi UMKM terbukti efektif, dimana dengan situasi dan kondisi kesehatan yang berangsur normal, maka selain menurunkan kasus harian Covid-19, juga menumbuhkan daya tahan masyarakat yang berimplikasi positif bagi akselerasi pemulihan ekonomi.

CAPAIAN DAN NORMALISASI EKONOMI

Perkembangan Covid-19 yang belum benar-benar bebas dari bumi ini, menyebabkan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, meski masih berada pada level moderat dari angka 6 persen menjadi di angka 5,9 persen. Namun demikian pada q3 2021, berbagai catatan peristiwa secara umum perekonomian global mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) mencapai lebih dari 50 poin. Harga-harga komoditas makanan dan hasil tambang mengalami peningkatan, demikian pula ekonomi mitra dagang Indonesia yaitu Tiongkok, Amerika, Singapura, Korea Selatan, Hongkong dan Uni Eropa juga tumbuh positif, kinerja ekspor Indonesia pun tumbuh signifikan meski melambat dibanding q2.

Awal q3 bulan Juli-Agustus, PPKM diterapkan karena kasus Covid-19 yang melonjak tinggi, hal ini membatasi mobilitas penduduk yang berdampak pula pada berbagai sektor, diantaranya transportasi udara domestik secara q to q melambat, secara y oy juga turun, namun tren q3 terjadi perbaikan di bulan September. Demikian pula dengan angkutan laut dan kereta api meski di awal q3 turun, di September menunjukkan perbaikan. Kegiatan pariwisata domestik pun turun, dimana TPK yang mencerminkan aktivitas sektor pariwisata, menurun dibanding q2, destinasi wisata secara q to q juga menurun di berbagai wilayah. Support ekonomi menurut kategori lapangan usaha, terbesar tumbuh 14,06 persen di kategori kesehatan, hal ini terkait dengan penanganan Covid-19 yang masif dari peralihan APBN di bidang kesehatan.

Secara umum indikator ekonomi dapat dikatakan menuju tren pemulihan, PMI manufaktur masuk pada zona ekspansif, mobilitas penduduk meningkat, indeks penjualan masyarakat seperti kendaraan bermotor, semen, konsumsi listrik di sektor industri bisnis juga ekspansif, serta laju inflasi yoy tetap terkendali. Demikian pula catatan pendapatan negara q3 tumbuh, eksternal surplus neraca perdagangan meningkat serta cadangan devisa sebesar 146,86 milyar USD atau setara 8,9 bulan import barang dan jasa. Perkembangan yang sangat positif ini tidak terlepas dari upaya penguatan dan sinergi antara pemerintah

dan lembaga terkait dalam rangka terus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

PPKM yang mulai dibuka sesuai tingkat level kasus Covid-19, pelaksanaan vaksinasi yang masif dan ketatnya penerapan protokol kesehatan di beberapa wilayah memberikan catatan pemulihan aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan penerimaan negara membaik dan membuat kondisi berangsur membaik dan Covid-19 pun terkendali.

Seiring dengan hal tersebut sumbatan kran-kran ekonomi (baca: pasca PPKM) mulai terbuka kembali meski belum mengguayur deras, merupakan sinyal yang sangat baik bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Demikian pula ke depan apabila seluruh elemen masyarakat bersinergi bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi, niscaya ekonomi mampu kembali tumbuh untuk Indonesia yang makin tangguh.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

**Santi Widyastuti – BPS Kota Salatiga
Solo Pos, 9 Agustus 2021**

Solopos.com, SOLO — Pandemi Covid-19 masih belum selesai, bahkan semakin merajalela selama Juni-Juli 2021. Menurut data Worldometers, penambahan kasus harian di Indonesia mencapai 56.757 kasus per hari pada 15 Juli 2021. Bahkan 2.069 jiwa melayang pada 12 Juli 2021.

Pasien yang membludak menjadi pemandangan biasa di ruang instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit rujukan Covid-19. Bahkan seorang teman mengisahkan bahwa yang terjadi di lapangan sungguh memilukan. Beberapa pasien yang sudah meninggal dunia tidak bisa segera dipindahkan karena sibuknya tenaga kesehatan. Beberapa pasien menunggu dengan napas tersengal-sengal dan banyak cerita memilukan lainnya.

Sejak awal ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah sudah berupaya membuat kebijakan secara bertahap yang tujuannya menekan lonjakan kasus yang terjadi. Dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi, PSBB ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali, PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM menurut level lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah.

PPKM darurat diberlakukan pada 3-25 Juli 2021 setelah kasus Covid-19 mulai mengalami lonjakan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 kasus per hari. Kebijakan PPKM Darurat meliputi pembatasan aktivitas bekerja, aktivitas perdagangan, aktivitas sosial serta pembatasan mobilitas masyarakat.

Perilaku Masyarakat

PPKM darurat juga diterapkan di Kota Salatiga mengingat kasus Covid-19 di wilayah ini juga mengalami lonjakan. Menurut data Humas Setda Kota Salatiga melalui akun Instagram, pada 22-30 Juni terdapat 1.225 lonjakan kasus baru. Angka ini merupakan yang tertinggi selama pandemi berlangsung.

Pada masa PPKM darurat, lonjakan kasus baru Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 935 kasus pada periode 1-8 Juli 2021. Selanjutnya pada periode 9-16 Juli 2021, jumlah kasus baru mengalami penurunan kembali menjadi 495 kasus.

Penurunan lonjakan kasus Covid-19 tidak terlepas dari perilaku masyarakat Kota Salatiga dalam menyikapi kebijakan yang ditetapkan. Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa 94 persen responden mengaku patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.

Indikator protokol kesehatan dari survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga tersebut antara lain: memakai 2 masker, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga sirkulasi udara baik di tempat kerja maupun di rumah, menjaga etika batuk dan menjaga daya tahan tubuh.

Selain mematuhi protokol kesehatan, 91,5 persen responden yang pernah positif Covid-19 melaporkan kondisi mereka kepada Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 yang lebih luas melalui proses tracing.

Selain bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mayoritas responden juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurut responden, 10-14 persen masyarakat di sekitar responden masih ada yang abai terhadap protokol kesehatan. Melihat hal tersebut, sebagian besar responden tidak tinggal diam, tetapi menegur masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut atau melaporkannya kepada ketua wilayah.

Hal lain yang mendukung pengurangan kasus Covid-19 di Salatiga adalah vaksinasi yang sudah berjalan. Sebanyak 69,6 persen responden sudah divaksin dan sebagian besar mau divaksin karena kesadaran pribadi.

Di sisi lain masih ada 30,4 persen responden yang belum divaksin. Sebagian besar alasan responden yang belum divaksin karena menunggu jadwal vaksin dan mencari lokasi yang menyelenggarakan vaksinasi atau memiliki kuota vaksin. Sayangnya masih ada juga responden yang belum divaksin karena khawatir efek samping vaksin (7,9 persen) bahkan ada responden yang tidak percaya akan efektivitas vaksin (2,0 persen).

Pembatasan Kegiatan

Dalam kegiatan ekonomi dan sosial, banyak responden yang mematuhi aturan dalam PPKM darurat. Menurut 41,9 persen responden, tempat bekerja mereka memberlakukan 50 persen work from office (WFO) dan 50 persen work from home (WFH). Bahkan 13,5 persen mengaku tempat bekerja mereka memberlakukan 100 persen WFH. Pada sektor pendidikan, sebanyak 90,4 persen responden mengaku kebijakan belajar mengajar di lingkungan mereka memberlakukan sistem daring (online).

Dari sektor bisnis, menurut responden, sebagian besar (76,9 persen) operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, toko swalayan di lingkungan mereka mematuhi peraturan pemerintah dengan hanya beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Begitu juga dengan tempat makan. Lebih dari separuhnya memberlakukan sistem take away atau membungkus makanan untuk dikonsumsi di rumah.

Untuk aktivitas sosial seperti di tempat ibadah di lingkungan responden, 55,6 persen tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, fasilitas umum seperti taman atau tempat rekreasi, menurut 65,4 persen responden, tutup untuk sementara waktu. Begitu juga dengan kegiatan seni budaya sebagian besar juga berhenti sementara.

Dampak PPKM

Di sisi lain, pembatasan kegiatan ekonomi berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa responden mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan obat-obatan serta vitamin. Selain itu, sebanyak 36,7 persen responden mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan seperti termometer, oksimeter, dan lain-lain.

Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan, pembatasan kegiatan juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Sebanyak 59,52 persen responden mengaku mengalami kejenuhan selama penerapan pembatasan kegiatan. Kejenuhan tersebut menyebabkan sebagian mereka mengalami perasaan mudah marah, rasa takut berlebihan, dan menjadi sering merasa cemas. Untuk menyikapi hal tersebut, mereka melakukan berbagai kegiatan seperti banyak beribadah, berolahraga, atau berkomunikasi dengan teman atau kerabat.

Untuk meminimalisir dampak selama pembatasan berlangsung, maka mereka berharap pemerintah bisa menyediakan berbagai kebutuhan mereka seperti sambungan internet gratis, bantuan sembako, serta bantuan obat dan pengawasan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan di pasaran. Lebih penting lagi, kita semua berharap pandemi ini segera berakhir supaya kegiatan masyarakat kembali berjalan dengan normal.

Diterjang Pandemi, PDRB Kabupaten Purworejo

Musliman – BPS Kabupaten Purworejo

Jawa Pos Radar Semarang, 26 Oktober 2021

Pandemi yang melanda negara kita setidaknya mulai dari pertengahan bulan maret 2020 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga sangat memukul perekonomian negara ke arah keterpurukan. Pandemi memaksa masyarakat untuk membatasi kegiatan keseharian tak terkecuali kegiatan ekonomi. Banyak kegiatan ekonomi yang terhambat, karena terganjal oleh aturan tentang protokol kesehatan.

Kemunduran ekonomi tidak hanya terjadi pada skala makro. Kemunduran ekonomi juga terjadi pada skala regional seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Kemunduran ini dapat dilihat dari data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo 2020 yang menyentuh angka -1,66 persen sedangkan pada lima tahun sebelumnya selalu pada angka diatas 5 persen. Laju Pertumbuhan PDRB Presentase PDRB Harga Konstan menurut lapangan Usaha tahun ini dengan tahun sebelumnya

dibandingkan dengan PDRB Harga Konstan menurut lapangan Usaha tahun sebelumnya. Banyak aspek ekonomi mengalami perlambatan laju pertumbuhan PDRB.

Aspek pertanian, kehutanan, dan perikanan (22,84 persen PDRB) mengalami perlambatan laju pertumbuhannya sebesar -0,10 persen dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 0,85 persen. Perlambatan juga terjadi pada aspek konstruksi (8,80 persen PDRB) sebesar -3,75 persen sedangkan pada tahun sebelumnya melaju pada angka 5,72 persen. Aspek lain yang terdampak adalah Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,22 persen PDRB) yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan sebesar -4,36 persen yang tentunya lebih kecil dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,22 persen. Aspek Transportasi dan pergudangan (3,95 persen PDRB) muncul sebagai aspek yang paling terdampak paling serius. Aspek ini mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB sebesar -27,25 padahal tahun sebelumnya melaju pada kisaran 7,96 persen.

Penurunan juga terjadi pada aspek penyedia akomodasi dan makan minum (2,07 persen PDRB) yang melambat jalu pertumbuhannya di angka -4,84 persen sedangkan tahun sebelumnya sebesar 7,70. Aspek real estate (2,02 persen PDRB) juga melambat laju pertumbuhannya di angka -0,29 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,51. Aspek jasa perusahaan (0,31 persen PDRB) tahun 2020 melaju pada angka -7,13 persen padahal tahun sebelumnya melaju pada angka 9,62 persen. Perlambatan pada aspek administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,90 persen PDRB) menyentuh angka -1,44 persen padahal tahun sebelumnya melaju pada angka 3,69 persen. Aspek jasa pendidikan (9,34 persen PDRB) melambat -0,20 sedangkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan 7,56. Jasa lainnya (2,25 persen PDRB) melambat -7,89 tahun sebelumnya tumbuh 9,02.

Namun, dibalik penurunan beberapa aspek ekonomi, terdapat aspek yang justru mengalami kenaikan laju pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu aspek informasi dan komunikasi serta aspek jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Aspek Informasi dan Komunikasi (6,26 persen PDRB) naik ke angka 14,32 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 10,76 persen. Aspek jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,90 persen PDRB) juga mengalami kenaikan dan bertengger pada angka 8,46 persen yang ditahun sebelumnya hanya di angka 6,93 persen.

Aspek lain yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan meskipun tidak signifikan adalah Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Penulis berharap pandemi Covid_19 segera berlalu agar perkonomian tumbuh dan Perkonomian tangguh secara mikro maupun makro.

Pandemi Turut Mempercepat Penetrasi Internet Jepara

Yusup Rujiyanto – BPS Kabupaten Purworejo

Lingkar Jateng, 23 Desember 2021

Internet merupakan kata yang sudah tidak asing lagi pada zaman sekarang. Bagi sebagian orang internet sudah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi ada juga sebagian orang yang

belum mengenal internet. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Pada awal mulanya, media yang jamak digunakan untuk mengakses internet yaitu komputer ataupun laptop. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi serta dukungan sinyal internet yang semakin luas jangkauannya, dengan menggunakan smartphone kita sudah dapat terhubung ke internet.

Penetrasi Internet yaitu persentase pengguna internet terhadap populasi di wilayah tertentu. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional bulan maret 2021, persentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir menggunakan internet adalah 62,05 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya persentase penduduk Jepara yang menggunakan internet meningkat 5,59 persen.

Penggunaan internet tidak hanya dilakukan oleh kelompok penduduk yang ekonominya baik saja. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional bulan maret 2021 dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok pengeluaran 40% kebawah mengalami peningkatan penetrasi internet terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya yaitu 7,9 persen, meningkat dari 46,55 menjadi 54,45 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah naik 4,48 persen, meningkat dari 60,16 menjadi 64,64 persen. Pada kelompok pengeluaran 20% atas naik 3,27 persen, meningkat dari 68,22 menjadi 71,49 persen. Hal ini merupakan sebuah indikasi baik karena kelompok pengeluaran 40% kebawah juga ikut menikmati perkembangan teknologi.

Peningkatan penggunaan internet ini tidak terlepas dari adanya pengaruh pandemi covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Kebijakan yang secara langsung berdampak pada peningkatan penetrasi internet ini yaitu pembelajaran secara online. Kebijakan ini mampu menyentuh kalangan-kalangan yang sebelumnya tidak berinteraksi dengan internet. Bagi siswa ataupun orang tua siswa yang sebelum ada pembelajaran online tidak bergelut dengan internet, mau tidak mau harus bergelut dengan internet untuk mengikuti pembelajaran secara online. Terlebih lagi, pemerintah turut serta memberikan subsidi kuota internet dalam rangka menunjang kebijakan pembelajaran secara online.

Kuota internet yang murah turut serta mempercepat peningkatan penetrasi internet. Penggunaan kuota internet juga banyak ragamnya pada era sekarang ini. Kuota internet bukan cuma untuk mengakses website, tetapi dapat digunakan untuk sarana komunikasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan juga video. Perkembangan teknologi semacam ini juga lah yang sedikit demi sedikit merubah cara/sarana berinteraksi dan bersosialisasi antar manusia sebagai makhluk sosial. Terlebih ada himbaun pemerintah untuk physical distancing turut serta mempengaruhi penggunaan sarana komunikasi melalui internet.

Himbauan physical distancing, penutupan tempat rekreasi dan sarana hiburan juga mempengaruhi penggunaan internet untuk mendapatkan hiburan. Dengan bermodalkan jaringan internet yang dimiliki, masyarakat dapat mengakses sarana hiburan baik berupa game, video, ataupun film. Sarana pendidikan, sarana komunikasi dan sarana hiburan merupakan beberapa pintu awal bagi masyarakat untuk memulai berinteraksi dengan internet.

Semakin bertambah orang-orang yang menggunakan internet, semakin bertambah pula angka penetrasi internet. Adanya pandemi, semakin terjangkaunya peralatan yang digunakan untuk mengakses internet, kemudahan untuk memilikinya, serta kebijakan-kebijakan pemerintah secara simultan mempercepat program transformasi digital Indonesia.

Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Rembang Minus 1,49 Persen

Sri Rejeki – BPS Kabupaten Rembang Jawa Pos Radar Kudus, 4 Maret 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga saat ini telah mengguncang perekonomian di seluruh Indonesia bahkan dunia hingga terancam di ambang resesi, tidak terkecuali Kabupaten Rembang. Secara kumulatif, untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 perekonomian Kabupaten Rembang berkontraksi hingga -1,49 persen setelah selama satu dasawarsa mampu mencatat pertumbuhan di atas 5 persen. Namun demikian, perekonomian Kabupaten Rembang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (-3,34 persen) dan Nasional (-2,07 persen).

Perekonomian Rembang 2020 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 18,9 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 13,4 triliun. Menurut kategori Lapangan Usaha, sektor ekonomi Kabupaten Rembang di tahun 2020 ditopang oleh tiga lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan andil 25,86 persen, disusul Industri Pengolahan sebesar 23,34 persen dan Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi dan Makan Minum sebesar 12,92 persen.

Pada tahun 2020, secara umum, terdapat 6 lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif dan 11 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif.

Tiga dari enam lapangan usaha yang tumbuh positif cukup tinggi yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mencapai pertumbuhan terbesar (23,06 persen), disusul lapangan usaha jasa kesehatan & kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 14,27 persen, dan lapangan usaha pertambangan & penggalian dengan pertumbuhan sebesar 6,69 persen.

Sementara itu, tiga dari sebelas lapangan usaha yang tumbuh negatif cukup dalam yaitu, lapangan usaha transportasi & pergudangan yang tumbuh sebesar -23,04 persen, disusul lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh sebesar -6,69 persen, serta lapangan usaha penyediaan akomodasi & makan minum yang tumbuh sebesar -5,02 persen.

Kedepan, tantangan pemerintah makin berat untuk memulihkan dan membangkitkan kembali geliat ekonomi masyarakat di tengah badai pandemi yang semakin luas.

Better Late Than Never

Irma Nur Afifah – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 14 Juli 2021

Tests and new confirmed COVID-19 cases per day, Indonesia
For both measures the 7-day rolling average is shown.

Our World
in Data



Source: Official data collated by Our World in Data – Last updated 13 July 2021, 13:20 (London time), Johns Hopkins University CSSE CC BY
COVID-19 Data – Last updated 14 July, 06:03 (London time)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat selama dua pekan mulai berlaku pada 3-20 Juli 2021, hal ini diterapkan mengingat lonjakan angka konfirmasi Covid-19 yang semakin tajam dan menjadi kondisi gawat darurat nasional karena

angka kematian yang terus bertambah. Data yang diupdate melalui web Covid-19.go.id menunjukkan jumlah kasus positif menembus 2.615.529, dengan tingkat kematian sebesar 2,6 persen, dengan tren melonjak tajam, dibanding awal tahun, seperti grafik yang di download dari link <https://ourworldindata.org/grapher/>. Selain itu penerapan PPKM darurat juga dipicu kondisi rumah sakit yang overload, karena keterbatasan tenaga kesehatan, ruang dan peralatan medis, hingga mendirikan tenda di halaman guna menangani pasien Covid-19 dan non Covid-19 yang terus bertambah, serta kondisi rawan lainnya yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi emergency yang tak terbayangkan dan terpredeksi sebelumnya ini harus segera diantisipasi secepatnya.

Meskipun PPKM darurat ini menurut sekretaris umum PP Muhammadiyah (Abdul Mukti) terbilang lambat diterapkan, karena fakta di lapangan menunjukkan angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi selama 2 minggu terakhir pra PPKM darurat, namun hal ini jauh lebih baik daripada tidak. Pasalnya jumlah angka kematian terus bertambah seiring keterbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan. PPKM darurat ini bisa dibilang lebih baik terlambat diterapkan daripada tidak sama sekali, atau dengan kata lain better late than never. Dalam arti bahwa PPKM darurat atau lockdown harus diambil, agar kondisi bisa segera terkendali. Beliau juga menyebutkan bahwa tidak berlebihan apabila tahun ini dengan tingginya jumlah angka kematian disebut sebagai tahun dukacita bagi Indonesia.

SINERGI BERSAMA

Persoalan pandemi ini merupakan problem bersama yang harus diatasi bersama mulai dari hulu hingga hilir. Kondisi semakin genting, grafik angka konfirmasi Covid-19 tak kunjung turun tapi makin naik, satu hari turun hari berikutnya melonjak dua kali lipat, berita kematian setiap hari terdengar dalam pekan terakhir ini. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sejatinya memang harus melibatkan semua elemen, bukan unsur pemerintah saja atau masyarakat saja, namun semua stakeholder harus terlibat dan bersinergi bersama. Sinergi artinya bekerja bersama-sama, hal ini terbentuk dari suatu proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis. Syarat utama penciptaan sinergi adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat dan kreativitas. Mengapa sinergi penting? Sinergi sangat penting karena pemimpin yang hebat tidak akan berhasil mencapai tujuan organisasi apabila tidak mendapat bantuan dari seluruh pegawai di institusi tersebut. Intisari sinergi adalah menghargai dan menghormati perbedaan, membangun kekuatan, dan mengimbangi kelemahan. Menghargai dan menghormati perbedaan dapat dilakukan dengan membangun komunikasi sinergi yang baik.

Salah satu poin penting dalam sinergi diantaranya adalah komunikasi. Sejauh ini komunikasi publik di lapangan masih belum optimal, pasalnya masyarakat beranggapan bahwa menjadi hal yang menakutkan terkait PPKM atau lockdown. Lockdown seringkali diartikan sebagai kondisi mencekam dengan adanya petugas yang berpatroli setiap waktu. Namun sesungguhnya tujuan utamanya adalah demi meredam penyebaran virus Covid-19. Itulah mengapa pemahaman awam perlu diluruskan supaya tidak salah dalam memaknai PPKM atau lockdown ini. Segenap elemen mestinya juga saling percaya, saling menghargai, bersatu membangun kekuatan dan bersabar hingga situasi benar-benar terkendali.

DISIPLIN PROKES

Penerapan protokol kesehatan (prokes) tak henti-henti terus dikampanyekan, namun di beberapa wilayah rawan, seperti pasar dan pusat keramaian faktanya masih banyak ditemukan ketidakdisiplinan dan mengabaikan prokes dengan berbagai alasan, yang menyedihkan lagi manakala ada yang masih tidak percaya akan adanya virus Covid-19.

Kondisi yang tidak normal ini solusinya adalah kekompakan semua pihak dalam menerapkan prokes dengan ketat. Seperti memakai masker kesehatan atau double masker di area publik yang ramai, menjaga jarak, hal ini juga ada kecenderungan abai, terlebih ketika bertemu dalam suatu ruang kemudian mengobrol, selain tidak menjaga jarak terkadang masker pun dilepas. Mencuci tangan sejatinya juga sebuah kebiasaan yang baik, karena tangan merupakan sumber penghubung dari berbagai polutan benda yang dipegang maupun tersentuh tanpa disadari. Sehingga mencuci tangan agar disiplin dilakukan dengan intens, setiap selesai aktivitas memegang handphone, memegang keyboard, handle pintu, lift dsb yang darinya rawan menempel virus dan bakteri. Selain itu penyediaan hand sanitiser juga penting, manakala kesulitan dalam mencuci tangan saat bepergian. Akhirnya sebelum terlambat dan menyesal kemudian, mari bersama menjaga

diri, menjaga keluarga dan menjaga lingkungan sekitar kita, disiplin dalam prokes, turut berkontribusi mencegah penyebaran Covid-19, tidak mengapa, karena better late than never.

<https://jateng.bps.go.id>

“Jangan biarkan apa yang tidak bisa kamu lakukan mengganggu apa yang bisa kamu lakukan”

~ John Wooden ~

<https://jateng.go.id>

Bagian 4

Apa Kabar Inflasi?

Diana Dwi Susanti

Kenaikan Harga itu Inflasi

Mungkin tidak terasa sebagian orang merasakan bahwa harga barang dan jasa kebutuhan pokok pada saat ini lebih mahal dibandingkan dengan harga barang dan jasa tersebut pada satu atau dua tahun yang lalu. Bahkan kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari bagi sebagian masyarakat menjadi beban hidup yang sangat berat. Seperti kenaikan harga beras, BBM, listrik, dll. Kenaikan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari dari waktu ke waktu disebut sebagai inflasi.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Selain inflasi jika terjadi penurunan harga-harga kebutuhan sehari-hari disebut deflasi. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sampai sebatas mengurangi dan mengendalikannya.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yakni inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan bila kenaikan harga berada di bawah angka 10 persen setahun. Inflasi sedang antara 10 – 30 persen setahun, inflasi berat antara 30 – 100 persen setahun dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100 persen setahun.

Mengingat pentingnya mengatasi masalah inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pengerjaannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadi inflasi.

Inflasi bisa dikarenakan adanya permintaan masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Karena ada permintaan yang bertambah sedangkan penawaran tetap akhirnya mengakibatkan harga naik. Atau permintaan tetap, tetapi penawaran menurun seperti pasokan komoditi tertentu yang terganggu karena gagal panen dan bencana banjir juga bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Masih banyak lagi penyebab dari inflasi, misalkan kenaikan harga bahan baku, kenaikan pajak dan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah juga bisa memicu kenaikan harga-harga di pasaran.

Mengapa Harga Harus Stabil?

Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1966 – 1967 hingga menembus angka 650 persen. Yang terjadi pada saat itu kenaikan harga bahan pokok, pengangguran dimana-mana dan diperparah dengan krisis politik yang memuncak.

Pada tahun 1998, Indonesia juga mengalami inflasi tingkat berat. Inflasi melejit hingga 77,63 persen. Stabilitas politik dan keamanan juga mengalami kekisruhan pada waktu itu. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi tinggi juga menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus merosot. Akibatnya standar hidup masyarakat turun dan menjadikan semua orang, terutama orang miskin akan bertambah miskin. Inflasi tidak terkendali juga menyulitkan masyarakat dalam menentukan konsumsi, investasi dan produksi. Dan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan pra syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, mengatasi inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat, baik itu kebijakan di bidang moneter, kebijakan fiskal atau kebijakan lainnya seperti meningkatkan dan menambah jumlah barang di pasar atau menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang terutama yang kenaikan harga tersebut berkaitan dengan konsumsi masyarakat luas.

Nasibku Hargamu

Philipus Kristanto – BPS Kota Salatiga Jawa Pos, 23 Mei 2021

Kebutuhan primer masyarakat adalah sandang, pangan, dan perumahan. Kebutuhan pangan yang sangat dinantikan oleh masyarakat adalah sembilan bahan pokok. Hal ini adalah wajar karena masyarakat perlu mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok untuk memenuhi asupan gizi bagi tubuh, seperti protein, karbohidrat, mineral, dan kalsium. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut selain persediaan juga dipengaruhi faktor harga.

Kenaikkan harga kebutuhan pangan tidak tentu waktunya. Setiap bulan, minggu, setiap hari bahkan setiap saat. Ketika harga naik cukup tinggi, sebagian besar warga pasti mengeluh, karena menambah beban anggaran rumah tangga. Langkah yang biasa diambil adalah memperketat pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.

Pada April 2021 terjadi inflasi sebesar 0,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,29. (Berita Resmi Statistik Inflasi bulan April 2021, BPS). Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada April 2021 antara lain ayam ras, telur ayam ras, sapi, daging ayam ras, daging sapi, rokok kretek dengan filter, dan minyak goreng. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya

sebesar 0,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen.

Sedangkan dampak covid-19 terhadap pelaku usaha, “memukul” pendapatan dunia usaha. Usaha menengah besar dan usaha mikro kecil mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 82,9 persen (BPS, Indikator Strategis pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru). Tiga sektor tertinggi yang paling terdampak adalah sektor akomodasi dan makan minum 92,47 persen, jasa lainnya 90,90 persen, dan transportasi pergudangan 90,34 persen.

Adaptasi perubahan yang dilakukan dunia usaha ini adalah pengurangan jam kerja, untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak oleh pandemi. Selanjutnya dengan diversifikasi usaha, yaitu melakukan penambahan produk dan penambahan lokasi usaha selama pandemi. Kemudian pemasaran secara online, dapat berpengaruh positif. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan usahanya.

Masyarakat cenderung memilih harga barang atau jasa yang lebih murah. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang pasti terjadi apalagi pada masa pandemi ini. Harga jual produk merupakan hal penting bagi sebuah usaha. Harga jual ini salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli. Dan pasti memilih produk dengan kualitas terbaik dengan harga terjangkau.

Kenaikan harga dapat membantu meningkatkan penerimaan pemerintah, namun berdampak negatif pada tingkat konsumsi masyarakat dan bisa menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya penurunan harga terus menerus, berdampak menurunnya pendapatan perusahaan, terjadi PHK, banyak perusahaan merugi. Sehingga kondisi yang dinilai lebih baik untuk mengatasi ini adalah Pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat dan mengarahkan terciptanya lapangan kerja untuk bisa menaikkan pendapatan masyarakat.

Diharapkan dengan daya beli masyarakat yang meningkat, perekonomian akan berjalan baik dan pulih kembali. Pemerintah dengan memberikan kelonggaran, dengan aturan tetap mengikuti dan menjaga protokol kesehatan 3M bagi dunia usaha yang ingin membuka usahanya. Pemerintah juga membenahi sisi permintaan masyarakat sebelum Ramadhan sampai dengan Lebaran tahun ini. Periode ini menjadi puncak belanja dan konsumsi sepanjang tahun guna menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pertumbuhan ekonomi, nasibku tergantung hargamu..

Bisnis Online Merana

Mugiyana – BPS Provinsi Jawa Tengah Suara Merdeka, 6 Juli 2020

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedang viral dan sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia bahkan dunia. Makhluk yang konon berasal dari negeri tirai bambu tersebut sejak diumumkan WHO (World Health Organization) bulan Maret 2020 dan

menjadi pandemi global telah mengakibatkan angka kematian (mortality) yang tinggi dan menimbulkan guncangan ekonomi (economic shock).

Dampak pandemi telah mengubah tatanan kehidupan di masyarakat dan menghancurkan perekonomian saat ini. Kondisi dimana semua orang harus diam di rumah mengisolasi diri (stay at home) agar selamat dan terhindar dari virus yang mematikan tersebut membuat semua aktivitas menjadi terhambat. Terutama yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, semua pelaku usaha terdampak baik yang berbisnis secara offline (konvensional) maupun online dan tidak sedikit pula terpaksa harus menutup usahanya secara sementara bahkan permanen dan berakibat banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh kepada penduduk kelompok usia kerja (working age population) di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 26,61 juta orang (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2019), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu poin yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Disisi lain keberuntungan lebih berpihak kepada para pebisnis online untuk tetap bisa bertahan bahkan berkembang dibandingkan yang offline, karena sudah banyak pebisnis offline yang usahanya menurun bahkan menutupnya karena bangkrut.

Berdasarkan Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 Jawa Tengah Tahun 2020, dari hasil survei terhadap 10.570 responden di Jawa Tengah ada sekitar 2.5 persen responden survei yang baru saja mengalami PHK dan sebagian besar laki-laki, sedangkan 14,9 persen diantaranya bekerja namun sementara dirumahkan. Sehingga secara umum responden mengalami penurunan pendapatan sebesar 41,6 persen, terdiri 43,1 persen responden laki-laki dan 39,7 persen perempuan.

Kelompok pekerjaan pada 3 jenis lapangan usaha paling terdampak meliputi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 69,2 persen; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 66,7 persen; serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 82,6 persen.

Yang menarik selama pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pengeluaran dari kondisi biasa atau sebelumnya yaitu sebesar 56,1 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran dan 16,3 persen mengalami penurunan pengeluaran sedangkan sisanya tetap. Peningkatan pengeluaran responden antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah kesehatan sebanyak 72,9 persen, pemenuhan kebutuhan makanan 64,1 persen, pembelian pulsa atau paket data 61,7 persen, pembelian makanan dan minuman jadi 44,8 persen dan pengeluaran konsumsi listrik sebanyak 32,2 persen.

Adanya anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah (stay at home) selama pandemi COVID-19 membuat masyarakat mengubah pola belanja dengan melakukan aktivitas

belanja online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil survei menunjukkan sebanyak 27,1% responden mengalami peningkatan aktivitas belanja online dan 26,9% responden mengalami penurunan sedangkan sisanya tetap.

Perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi secara cepat dengan mengembangkan inovasi produk sesuai dengan kecenderungan permintaan pasar disertai penyesuaian perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan aplikasi online. Semua tidak boleh menyerah masih ada celah untuk meraih sukses di tengah wabah.

Pemicu Inflasi Jawa Tengah

**Muhammad Yamani – BPS Kota Semarang
Jateng Daily, 23 Desember 2021**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Hingga saat ini inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian banyak pihak. Maksudnya dalam hal ini inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah. Sedemikian pentingnya inflasi menyebabkan rilis inflasi setiap awal bulan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan perhatian dari masyarakat luas.

BPS Provinsi Jawa Tengah dalam rilis inflasi terakhir menyebutkan pada November 2021, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,34 persen. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 0,46 persen diikuti oleh Kota Purwokerto sebesar 0,40 persen; Kota Cilacap sebesar 0,36 persen; Kota Surakarta sebesar 0,33 persen; Kota Semarang sebesar 0,33 persen; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,31 persen.

Komoditas Penyumbang Utama Inflasi

Inflasi bulan November 2021 sebesar 0,34 persen, lebih tinggi dibandingkan November 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,18 persen. Tingkat inflasi tahun kalender November 2021 sebesar 1,05 persen, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun November 2021 terhadap November 2020 sebesar 1,51 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,78 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,64 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,63 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,17 persen; kelompok

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Andil Inflasi adalah besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok yang memberikan andil/sumbangan Inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,19 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga dan penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan pendidikan tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Jawa Tengah.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan andil/sumbangan Inflasi terbesar. Komoditas pada kelompok ini yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, adalah telur ayam ras sebesar 0,09 persen, minyak goreng sebesar 0,08 persen dan cabai merah sebesar 0,07 persen. Ketiga komoditas ini juga mendominasi andil/sumbangan inflasi pada enam kota IHK di Jawa Tengah. Inflasi di Kota Tegal utamanya disebabkan naiknya harga telur ayam ras, minyak goreng dan cabai merah dengan andil/sumbangan inflasi 0,15 persen; 0,11 persen dan 0,09 persen. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Purwokerto yaitu telur ayam ras, minyak goreng dan cabai merah sebesar 0,13 persen; 0,10 persen dan 0,05 persen. Kota Cilacap mengalami inflasi yang utamanya disebabkan kenaikan harga minyak goreng; telur ayam ras dan cabai merah sebesar 0,11 persen; 0,09 persen dan 0,04 persen. Beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kota Surakarta antara lain telur ayam ras, minyak goreng dan cabai merah sebesar 0,11 persen; 0,09 persen dan 0,05 persen. Inflasi di Kota Semarang utamanya disebabkan naiknya harga cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng dengan andil yang sama 0,08 persen. Kota Kudus mengalami inflasi yang utamanya disebabkan kenaikan harga telur ayam ras, cabai merah dan minyak goreng sebesar 0,11 persen, 0,06 persen dan 0,05 persen.

Lantaran ketiga komoditas memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi COVID-19. Selain itu, dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Implementasi strategi difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama antardaerah.

Tak Semanis Rasa Gula

Adi Ratnaningrum – BPS Kabupaten Pati

Jateng Daily, 19 Mei 2021

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025 merupakan program aksi pemerintah saat ini yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025. Salah satu agenda pembangunan yang akan dilaksanakan adalah meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian termasuk didalamnya subsektor perkebunan. Salah satu komoditas subsektor perkebunan yang sangat strategis dan merupakan bagian penting dari RPJMN adalah komoditas tebu. Tebu merupakan bahan baku bagi industri gula.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) luas lahan perkebunan tebu di Indonesia dalam kurun waktu 2014 – 2018 semakin berkurang yaitu 478.108 hektar pada tahun 2014 menjadi 417.576 hektar pada tahun 2018. Seiring dengan menurunnya luasan lahan pada kurun waktu tersebut, produksi gula nasional juga mengalami penurunan dari 2,57 juta ton pada tahun 2014 menjadi 2,17 juta ton pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 produksi gula nasional mengalami lonjakan hingga mencapai 2,5 juta ton, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 2,22 juta ton. Kondisi inilah yang mendorong Kementrian Perdagangan dan Perindustria (Kemenperin) mengeluarkan peraturan No 3/2021 untuk mengatur impor ketersediaan bahan baku gula kristal putih guna kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri yang cukup untuk memproduksi gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional.

Jika melihat sektor industri makanan dan minuman sebagai pengguna gula terbanyak, pertumbuhannya anjlok dari 7,8 persen tahun 2019 menjadi hanya 1,6 persen tahun 2020 tergambar produksi gula nasional turun. Hanya saja, dikatakan bahwa penurunan produksi yang terjadi hanya berada pada angka 200 an ribu ton, dari 2,5 juta ton tahun 2019 menjadi 2,13 juta ton tahun 2020.

Jadi jauh lebih kecil daripada kenaikan volume impor yang mencapai 1,45 juta ton, keran impor dibuka lebar-lebar oleh pemerintah boleh jadi untuk meredam lonjakan harga rata-rata yang sempat menembus Rp15.000/kg pada April 2020 dimana harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp 12.500/kg. Berdasarkan laporan United States Departement of Agriculture (USDA) stok gula Indonesia pada September 2019 sebesar 2,30 juta ton, sedangkan pada September 2020 sebesar 1,95 juta ton.

Regulasi terbaru Menteri Perindustrian mengenai jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri gula di dalam negeri dinilai diskriminatif dan bisa berdampak negatif bagi kelangsungan pabrik gula lama. Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional membuka jalan bagi pabrik gula berbasis tebu yang memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk mengimpor bahan baku jika pasokan tebu dari dalam negeri tidak memadai. Pelaku usaha menilai aturan tersebut diskriminatif dan menyebabkan persaingan

usaha yang tidak sehat karena membatasi impor gula mentah (raw sugar) hanya kepada pabrik gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Hal ini seolah pemerintah menutup mata terhadap keberadaan kalangan UMKM dan industri makanan dan minuman dimana peraturan tersebut menyebabkan banyak pabrik gula yang tidak bisa memasok kebutuhan industri makanan dan minuman. Regulasi ini terkesan dipaksakan yang mana aturan ini tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi yang mengatakan dimana-mana bahwa target utama pemerintah di tahun 2021 adalah menstimulus pemulihan ekonomi dengan cara mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Di samping itu juga memuluskan rembesan gula rafinasi ke pasar gula kristal putih.

Jika kita melihat latar belakang dari dikeluarkannya permenperin tersebut adalah menitikberatkan pada 3 hal yaitu pertama sebagai upaya penertiban produksi gula pada pabrik gula guna mengurangi potensi kebocoran/rembesan gula. Kedua, terkait produksi gula di mana aturan ini dimaksudkan agar pabrik gula berproduksi sesuai bidang usaha masing-masing. Misalnya Pabrik Gula Rafinasi (PGR) memproduksi Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk melayani industri makanan minuman dan farmasi. Sedangkan pabrik gula berbasis tebu memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan gula konsumsi/GKP guna memasok kebutuhan konsumsi masyarakat serta memastikan GKR diperuntukkan bagi bahan penolong industri makanan, minuman dan farmasi.

Saat ini memang impor gula tidak bisa dihindari baik dalam bentuk raw sugar maupun GKP untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini karena produksi gula nasional yang berbasis tebu tidak mampu memproduksi sesuai kapasitas yang diharapkan. Produksi gula dalam negeri hanya mampu memasok 2,1 juta ton. Terjadi defisit yang sangat besar mencapai 3,7 juta ton. Untuk memenuhi defisit tersebut hanya satu jalan, yakni impor yang selalu dikerubuti pengusaha pemburu rente untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Mahalnya Harga Telur Jelang Natal

Lina Dewi Yunitasari – BPS Kabupaten Jepara

Infojateng, 31 Desember 2021

Kenaikan Harga Telur

Belum selesai dikagetkan dengan kenaikan harga minyak goreng yang hampir mencapai 20 ribu/liter dan harga cabai rawit 100 ribu/kg, kini masyarakat khususnya kalangan emak-emak harus kembali shock dengan kenaikan harga telur ayam ras yang fantastis. Harga telur ayam ras melonjak tepat pada momen menjelang Natal dan pergantian tahun dihampir seluruh wilayah tanah air. Data hari ini 29 Desember 2021, harga telur ayam ras rata-rata tembus 32 ribu/kg ditingkat konsumen dan 27 ribu/kg ditingkat produsen. Berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2020, harga acuan pembelian ditingkat produsen adalah 19-21 ribu/kg, dan harga acuan penjualan dikonsumsi adalah 24 ribu/kg. Kondisi harga yang sudah jauh melampaui harga acuan yang ditetapkan pemerintah baik dari sisi produsen maupun konsumen patut diwaspadai. Disatu sisi pemerintah melalui Kementan menjamin stok telur aman. Kementan menyatakan bahwa

produksi telur ayam mencapai 5,15 juta ton, sementara total kebutuhan penduduk diperkirakan 4,9 juta ton atau surplus 0,25 juta ton. Seakan sudah menjadi tipikal, fluktuasi harga dan pasokan telur, khususnya menjelang hari raya atau momen penting lainnya kerap terjadi. Banyak faktor ditengarai berpengaruh terhadap fluktuasi harga telur. Dilihat dari sisi permintaan, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap harga telur. Dari sisi pasokan, harga telur dipengaruhi oleh jumlah populasi ayam, harga pakan, harga bibit dan ayam afkir, cuaca, serangan penyakit, biaya distribusi dari sentra produksi dll.

Telur Menjadi Pilihan

Telur akrab dengan masyarakat karena selama ini terkenal murah, pengelolaannya praktis dan mudah, disukai hampir semua kalangan usia, serta menjadi bahan baku utama/tambahan dalam berbagai industri makanan. Selain itu telur merupakan pangan hewani sumber protein, asam amino dan lemak sehat yang boleh dibilang paling mudah untuk didapatkan baik dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan harga. Dalam satu butir telur banyak mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kecukupan gizi yang diterima oleh tubuh dari konsumsi pangan yang cukup, berkualitas dan beragam erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Selain peran besarnya dalam pemenuhan gizi penduduk, telur juga memiliki andil cukup besar sebagai komponen pembentuk inflasi nasional. Melihat data BPS, pada inflasi November 2021 sebesar 0,37 persen, andil telur sebesar 0,06 persen (terbesar kedua setelah minyak goreng 0,08 persen). Sementara pada September 2021 ketika terjadi deflasi 0,04 persen, telur diketahui paling dominan memberikan andil deflasi sebesar 0,07 persen. Melihat peran besar telur bagi masyarakat, keluhan mengenai kenaikan harga telur patut segera direspon dan dipikirkan solusi terbaik yang adil diterima semua pihak.

Konsumsi Protein Masyarakat Indonesia

Tujuan kedua dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tingkat kecukupan gizi dapat dihitung dengan melihat konsumsi kalori dan protein penduduk. Melihat perkembangan konsumsi protein selama kurun 2015-2021 menunjukkan perubahan rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menuju ke arah yang lebih baik. Tercatat Maret 2015 rata-rata konsumsi protein penduduk Indonesia sehari hanya sebesar 55,11 gram dan terus meningkat hingga pada Maret 2021 berada pada angka 62,28 gram (diatas standar rekomendasi dari Widyakarya Nasional Pangan Dan Gizi (WNPG) sebanyak 57 gram). Kaitannya dengan telur, rata-rata konsumsi protein yang berasal dari telur dan susu (data keduanya tidak bisa dipisahkan) selama kurun waktu tersebut juga terus mengalami peningkatan, dari tahun 2015-2021 berturut-turut jumlah konsumsinya sebesar 3,23 gram; 3,34 gram; 3,35 gram; 3,50 gram; 3,42 gram; 3,47 gram dan 3,49 gram per kapita sehari (BPS, 2021). Pada tahun 2021, telur dan susu berada pada posisi keenam penyumbang protein yang dikonsumsi oleh setiap penduduk sehari. Telur dan susu juga sudah merata dikonsumsi oleh seluruh lapisan penduduk, meskipun dengan pola konsumsi yang beragam. Jika penduduk dikelompokkan menurut kuintil pengeluaran, maka terlihat sebuah perbedaan menonjol pola konsumsi telur dan susu pada kuintil pertama dan kelima, dimana konsumsi protein telur dan susu pada kuintil kelima 5,70 gram sementara pada kuintil pertama sebesar 1,88 gram. Artinya pada

kelompok penduduk berpengeluaran 20 persen teratas, konsumsi protein telur dan susu tiga kali lipat lebih besar dibandingkan penduduk berpengeluaran 20 persen terbawah. Perlu adanya suatu dukungan dan perhatian yang lebih, khususnya bagi penduduk yang berada pada kelompok penduduk berpenghasilan 40 persen terbawah agar konsumsi protein nasional mereka dapat tercukupi diatas rekomendasi WNPG 57 gram per penduduk sehari.

Dampak dan Saran Solusi

Kenaikan harga telur berdampak pada perekonomian masyarakat, baik level rumah tangga maupun industri mikro kecil. Mahalnya harga telur menambah beban kebutuhan pangan rumah tangga, setelah sebelumnya ada kenaikan harga minyak dan cabai rawit. Keseimbangan antara permintaan dan pasokan telur harus dijaga sehingga fluktuasi harga pada momen-momen tertentu dapat diantisipasi dini. Faktor depopulasi ayam, harga bibit serta harga pakan juga harus dikalkulasi secara tepat dan adil khususnya tidak memberatkan peternak yang berpengaruh pada biaya produksi.

Pemerintah harus memonitoring stok telur aman dan dikawal ketat sehingga mencegah peluang masuknya oknum yang berusaha memanfaatkan situasi ini. Efisiensi rantai distribusi dari produsen telur ke konsumen dari segi biaya dan waktu sangat diperlukan. Sebagai masyarakat pada situasi seperti ini tidak ada salahnya mencoba alternatif sumber protein hewani lain yang harganya lebih terjangkau, atau beralih ke protein nabati sehingga kecukupan gizi tidak terganggu. Butuh waktu agar kondisi harga telur kembali normal, semoga pemerintah cepat merespon persoalan pangan ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Harga Minyak Goreng dan Negeri Penghasil Sawit

Eli Sufiati – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 27 November 2021

Istilah Industri 4.0 mungkin sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun Miris, hidup di negeri dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga minyak goreng membumbung tinggi bak roket. Kementerian Pertanian mencatat bahwa Indonesia memiliki perkebunan sawit yang luasnya saat ini mencapai kurang lebih 10 juta hektar, 41 persen diantaranya adalah perkebunan rakyat. Dengan produktivitas kurang lebih 6 ton Crude palm Oil (CPO) per hektar. Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), total produksi minyak sawit / CPO tahun 2020 sekitar 47 juta ton. Dari total produksi tersebut, sebanyak 34 juta ton terserap di pasar ekspor.(IDXChannel)

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas sembilan bahan pokok / sembako (1. Beras 2. Minyak goreng 3. Sayur dan buah 4. Gula 5. Garam beryodium 6. Daging sapi 7. Susu 8. Telur 9. Gas elpiji) penting yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk keperluan rumah tangga sehari – hari sebagai salah satu bahan utama pengolahan makanan / memasak yang disajikan di rumah untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Kenaikan

harga minyak goreng yang membumbung tinggi ditengah himpitan ekonomi karena pandemi covid-19 membuat ibu rumah tangga menjerit. Mereka harus pintar – pintar mengatur pengeluaran rumah tangga yang bertambah karena naiknya harga minyak goreng. Harga eceran nasional minyak goreng saat ini berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan untuk minyak goreng curah sudah mencapai Rp. 16.500 per liter naik 14,58 persen dari bulan Oktober dan untuk minyak goreng kemasan 18.300 naik 10,98 persen.

Mengapa harga minyak goreng meroket di negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia? Itulah yang saat ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian besar masyarakat. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan ada dua penyebab naiknya harga minyak goreng selama sebulan terakhir belakangan antara lain faktor global dan faktor dalam Negeri. Faktor global karena pasokan minyak nabati dunia menurun dan adanya krisis energi di berbagai Negara misalnya, Cina, India dan Eropa. Untuk faktor dalam negeri, kebanyakan entitas produsen minyak goreng dan CPO berbeda, artinya produsen minyak goreng tergantung pada harga CPO. Oleh karena itu ketika harga minyak sawit mentah melonjak harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana ikut meningkat tajam. Ini berpengaruh langsung karena 435 entitas produsen minyak goreng didominasi ketergantungan pada CPO, karena tidak semua terafiliasi dengan kebun sawit. (Bisnis.com, 24/11/2021)

Minyak goreng merupakan komoditas yang memiliki andil cukup besar dalam pengeluaran konsumsi masyarakat (0,1%) setelah perhiasan emas (0,26%) dan cabai merah (0,16%). Selain itu kebutuhan sumber omega 9 ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Proyeksi tingkat konsumsi minyak goreng pada tahun 2019 sebesar 10,86 liter/kapita/tahun. Angka ini cenderung meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 9,60 liter/kapita/tahun. (Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng, 2021)

Inflasi bulan Oktober 2021 sebesar 0,12 persen, minyak goreng sebagai salah satu komoditas kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau yang memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi bulan Oktober yaitu sebesar 0,05 persen. (Berita Resmi Statistik, November 2021)

Minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat berpengaruh terhadap kenaikan inflasi, harusnya pemerintah tanggap terhadap fluktuasi harga minyak goreng ini. Kita tahu bahwa fluktuasi harga komoditas strategis (Beras, Jagung, Bawang merah, Bawang putih, Cabai besar, Cabai rawit, Daging sapi/kerbau, Daging ayam, Gula pasir, dan Minyak goreng) tidak hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi setiap menjelang hari – hari besar nasional seperti Hari raya Idul Fitri dan hari raya Natal sering mengalami fluktuasi harga.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana akan menghentikan ekspor minyak sawit mentah untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan di dalam negeri. Disisi lain produsen minyak goreng dalam negeri bekerja sama dengan pelaku usaha ritel

modern mengalokasikan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp. 14.000 menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Adapun volume alokasi minyak goreng murah itu mencapai 11 juta liter yang didistribusikan ke setiap gerai ritel modern secara nasional. (Bisnis.Com)

Kebijakan yang diambil Pemerintah untuk menghentikan ekspor minyak sawit dan kontribusi para pelaku usaha yang terkait sektor tersebut dalam upaya menekan harga minyak goreng dapat segera terealisasi.

<https://jateng.bps.go.id>

Bagian 5

Pariwisata dalam Tahun Kedua Pandemi

Diana Dwi Susanti

Pandemi virus corona berdampak luas dan dalam pada industri pariwisata di seluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Drastisnya penurunan permintaan ini disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal itu.

Berbagai macam wisata di Indonesia ditutup akibat Covid-19 ini. Namun setelah diberlakukannya new normal, wisata-wisata itu pun dibuka kembali namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona.

Sepinya wisatawan domestik maupun mancanegara juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan.

Pelaku UMKM

Merosotnya industri pariwisata akibat pandemi virus corona secara langsung memberi dampak pada pelaku UMKM industri jasa pariwisata. Industri pariwisata dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan.

Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau backward yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya.

UMKM yang Mampu Bertahan

UMKM yang mampu bertahan di tengah iklim Covid-19 ini antara lain adalah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital dengan memanfaatkan marketplace yang ada di Indonesia. Dan UMKM yang mampu bertahan di era pandemi Covid-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi, misalnya yang tadinya menjual produk-produk tas dan baju kemudian merubah produknya menjadi jual masker kain.

Industri lain yang mampu bertahan di masa pandemi Covid-19 adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan perbankan. Demikian halnya dengan industri ritel yang mampu bertahan, hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital.

Memulihkan Sektor Pariwisata

Hayu Wuranti – BPS Provinsi Jawa Tengah Detik.com, 25 November 2021

Sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut antara lain sebagai kontributor penerimaan negara dalam bentuk devisa, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada 2019 mencapai sebesar 4,8 persen atau naik sebesar 0,3 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5 persen.

Pandemi Covid-19 memberikan pukulan telak terhadap perekonomian. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat dan penutupan objek pariwisata menyebabkan pelaku usaha pariwisata mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Sektor-sektor yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata yaitu transportasi, industri seperti industri tekstil, industri alat angkutan dan industri kerajinan, perdagangan, serta restoran dan hotel mengalami kontraksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis sejak Februari 2020, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158,1 ribu kunjungan. Secara kumulatif, sepanjang 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia

hanya sekitar 4,052 juta orang, yang berarti hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019.

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara memperparah kondisi sektor pariwisata karena berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel-hotel di Indonesia. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2020 mencapai rata-rata 37,48 persen atau turun 19,29 poin dibandingkan dengan TPK bulan yang sama pada 2019 yang tercatat sebesar 56,77 persen.

Perubahan Tren

Kesehatan dan keamanan menjadi prioritas utama setelah terjadinya pandemi Covid-19. Salah satu yang tergeser akibat pandemi ini adalah tren selfie di tempat-tempat yang instagramable. Tren populer yang digemari masyarakat salah satunya adalah wisata alam. Kejenuhan akibat di rumah saja akan mendorong wisatawan jalan-jalan keluar rumah untuk sekadar menikmati udara segar dan keindahan alam, karena alam memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan, tetapi rendah risiko.

Wisata alam juga memberikan keleluasaan untuk tetap menerapkan physical distancing dengan wisatawan lainnya. Wisata alam berbasis adventure atau petualangan menjadi salah satu tren baru yang digemari, khususnya kegiatan dalam grup kecil dengan aktivitas yang dinamis, seperti trekking, snorkeling, dan diving. Hal ini berpengaruh terhadap beberapa destinasi yang selama ini populer dikunjungi banyak orang (mass tourism) yang untuk sementara akan dihindari.

Selain itu, pemberlakuan pembatasan akses terutama untuk jalur internasional akan mendorong orang berlibur ke destinasi-destinasi lokal yang jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi. Hal ini mendorong meningkatnya wisatawan Nusantara.

Pilihan liburan masyarakat mengalami perubahan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Masyarakat akan lebih memilih liburan yang tidak banyak bersentuhan dengan orang lain. Staycation atau berlibur di dalam lingkungan hotel akan menjadi pilihan terbaik karena konsumen atau wisatawan tidak perlu bepergian jauh. Berada di tempat yang nyaman seperti hotel atau sewa apartemen yang dekat rumah mereka dengan segala fasilitas mumpuni.

Biaya yang lebih murah daripada liburan ke luar negeri atau ke luar pulau yang masih berisiko bisa tertular menjadikan staycation lebih digemari. Fasilitas hotel yang ramah terhadap keluarga (family-friendly) seperti restoran, taman bermain hingga kolam renang menjadi prioritas konsumen. Seluruh fasilitas ini harus mengikuti standar protokol kesehatan seperti kebersihan dan physical distancing.

Sementara itu sektor penunjang pariwisata seperti mall dan tempat atraksi lainnya, menyediakan hal yang baru dengan menyulap bangunan menjadi tempat drive-in cinema dimana pengunjung bisa menonton film bioskop dari dalam mobil ala tahun 90-an. Selain itu beberapa tempat wisata menyediakan layanan virtual tourism.

Sebagai contoh PT Kereta Api Pariwisata Indonesia juga telah menyelenggarakan kegiatan tur virtual yang bertajuk Virtual Tours The Legend Jogja dan Virtual Tour de Lawang Sewu. Layanan online virtual tour juga ditawarkan oleh Kebun Binatang Ragunan; selain menampilkan kegiatan para hewan, dalam tur daring ini konsumen juga diperkenalkan mengenai habitat, cara bertahan hidup hingga status populasi hewan yang sedang beratraksi.

Menata Ulang

Menurunnya tingkat penjualan resto selama pandemi Covid-19 mendorong para pelaku usaha untuk melakukan berbagai inovasi guna untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini menciptakan tren baru dalam dunia wisata kuliner. Konsumen yang semakin pintar sehingga bersikap lebih preventif terhadap potensi kontaminasi virus-virus lain, mendorong pemilik bisnis restoran untuk menata ulang konsep restoran secara keseluruhan.

Konsep makan di luar ruangan (outdoor dining) menjadi salah satu konsep yang dihadirkan dengan pertimbangan suasana outdoor sirkulasi udara menjadi lebih lancar dibandingkan berada di dalam ruang. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir kontaminasi virus. Konsep outdoor dining mendukung implementasi pembatasan sosial atau jaga jarak. Larangan untuk menyediakan makan di tempat (dine-in) bagi pengusaha kuliner berpotensi menyebabkan penurunan omzet.

Pengusaha kuliner berupaya mengembangkan tren baru seperti menyediakan layanan take away dengan penerapan contactless service sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir untuk membeli makanan di resto. Selain itu disediakan juga fitur digital seperti booking online, scan barcode menu, dan digital payment. Salah satu tren di usaha kuliner adalah curbside pickup atau yang lebih dikenal dengan sebutan drive thru.

Tren lain dalam usaha kuliner salah satunya dengan memanfaatkan platform kolaborasi dan ko-kreasi untuk menciptakan layanan baru yang sangat dibutuhkan oleh konsumen yaitu dengan apa yang disebut sebagai ghost kitchen model atau cloud kitchen, platform berbentuk dapur yang dapat diisi oleh berbagai restoran secara bersama-sama (sharing). Hal ini membuat proses produksi para pengusaha resto dan kuliner menjadi efisien dan terjangkau.

Pemulihan sektor pariwisata Indonesia didukung dengan upaya pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi. Walaupun harapan untuk kembali pada kondisi normal tentunya tidak mudah. Sektor pariwisata juga sektor lain harus melakukan inovasi, kolaborasi, dan kelincahan (agility) sebagai upaya untuk bisa pulih kembali.

Pandemi Covid-19 telah memaksa pelaku usaha pariwisata untuk mengambil langkah menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah. Protokol kesehatan seperti wajib masker, pengecekan suhu tubuh, dan hasil tes negatif telah dengan cepat menjadi prosedur operasional standar, membutuhkan peralatan baru, perangkat lunak untuk pelacakan dan penyesuaian lainnya.

Sektor pariwisata melakukan berbagai upaya perubahan dengan menerapkan sistem baru pada industri pariwisata. Diperlukan kolaborasi antara pelaku usaha sektor pariwisata dengan pemerintah, pakar, dan pelaku usaha sektor lain untuk berbagi wawasan, menerapkan teknologi, dan menemukan cara efektif untuk bekerja sama menerapkan langkah perubahan.

Teknologi berbasis data dapat membantu wisatawan untuk berbagi informasi, seperti data vaksin dibutuhkan oleh para pelaku usaha pariwisata. Pengalaman yang mengesankan selama berwisata menjadi impian setiap wisatawan. Tren baru dunia pariwisata dengan memanfaatkan segenap ilmu pengetahuan dan sumber daya, bekerja sama dan menggunakan teknologi untuk mentransformasikan layanan menjadi upaya bangkitnya sektor pariwisata.

Pandemi Covid-19, Apa Kabar Tren Leisure?

Ahmad Fahrur Rohim – BPS Kabupaten Jepara
Lingkar Jateng, 19 Mei 2021

Masih ingatkah kita fenomena beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, mal-mal konvensional sepi pengunjung. Sedangkan pada sisi yang lain kafe dan resto berkonsep experiential menjamur. Warung modern ala “Kids Jaman Now” juga agresif membuka cabang. Destinasi wisata baru bermunculan, yang didukung juga Hotel budget yang sering full booked.

Fenomena tersebut menunjukkan leisure economy sedang trending. Istilah leisure economy sendiri dipopulerkan oleh Linda Nazareth melalui bukunya *The Leisure Economy How Changing Demographics, Economics, and General Attitudes Will Reshape Our Lives and Our Industries*(2007). Linda memakai istilah tersebut untuk menggambarkan pergeseran pola konsumsi masyarakat dari konsumsi berbasis barang ke arah konsumsi berbasis pengalaman.

Seringkali leisure economy disebut sebagai aktivitas ekonomi yang isinya bersenang-senang sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi. Beberapa aktivitas konsumsi yang termasuk dalam kategori leisure diantaranya kegiatan traveling, menginap di hotel, kuliner, film, dan konser musik, serta keinginan mengenal keragaman budaya yang telah berkembang sebagai konsumsi gaya hidup masa kini.

Pergeseran inilah yang bisa menjelaskan kenapa pusat perbelanjaan jadi sepi. Mal yang berkonsep lifestyle dan kuliner (kafe/resto) akan tetap ramai, sementara yang hanya

menjual beragam produk (pakaian, sepatu, atau peralatan rumah tangga) semakin sepi. Selain itu yang terkait liburan, menginap di hotel, makan dan nongkrong di kafe/resto meningkat pula.

Hingga akhirnya pada Maret 2020 muncullah babak baru dengan adanya pandemi Covid-19. Jika sebelumnya leisure economy berhasil mendisrupsi banyak hal, maka kali ini justru tren itu sendiri yang terdisrupsi.

Hal tersebut juga yang terjadi di Jawa Tengah, seiring dengan terkontraksinya ekonomi di wilayah tersebut tahun 2020 mencapai 2,95 persen. Adanya kebijakan pembatasan mobilitas massa dan pembatasan lainnya membuat leisure economy luluh lantak. Tempat wisata dan hiburan periode Maret-Mei 2020 tutup total. Penginapan, restoran dan transportasi pun otomatis mengalami mati suri.

Meskipun setelah bulan Mei ada pelonggaran, namun kondisi tersebut membuat konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta konsumsi hotel dan restoran dalam komponen konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya terkontraksi sampai 5,89 persen, sedangkan konsumsi hotel dan restoran terkontraksi 6,73 persen. Hal tersebut juga membuat penurunan sumbangsih keduanya dalam komponen konsumsi rumah tangga.

Setelah periode Maret-Mei 2020 seiring dengan pelonggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah, sebenarnya sektor-sektor tersebut mulai bangkit, meskipun tidak bisa pulih seperti sebelumnya. Masyarakat masih belum bisa secara bebas untuk menikmati hal-hal seperti sebelumnya, disamping karena daya belinya yang sedang menurun.

Kedepan leisure economy diharapkan akan meningkat kembali dan dapat menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian ke jalur positif. Apalagi pemerintah telah melakukan vaksinasi secara massal.

Wajah Pariwisata Jateng di Tengah Pandemi

Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 5 Oktober 2021

Bagaimana kabar Pariwisata di Jawa Tengah?

JIKA ditelisik dari Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mengenai Perkembangan Statistik Transportasi Jawa Tengah Agustus 2021 terlihat bahwa banyaknya penumpang pesawat domestik yang datang ke Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2021 menunjukkan adanya tren peningkatan dibandingkan Juli 2021. Hal ini terkait dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana sebelumnya penerbangan hanya diperuntukan untuk kalangan terbatas dan harus memenuhi berbagai syarat termasuk tes PCR dan surat keterangan atau Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

Pada Agustus 2021 kedatangan penumpang domestik di Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo meningkat sebesar 27,97 persen dibandingkan Juli 2021. Sedangkan melalui angkutan laut pada Agustus 2021 meningkat 12,77 persen dibanding Juli 2021. Peningkatan ini diharapkan merupakan sinyal bergeraknya pariwisata di Jawa Tengah ditengah pandemi.

Sayangnya, kedatangan penumpang domestik melalui angkutan udara ternyata mengalami penurunan sebesar 57,85 persen pada Agustus 2021 jika dibandingkan Agustus 2020. Begitupun untuk kedatangan penumpang melalui angkutan laut pada Agustus 2021 turun sebesar 25,35 persen dibanding Agustus 2020.

Hal ini wajar jika melihat bahwa kasus covid-19 di Indonesia selama Agustus 2021 lebih parah dibandingkan Agustus 2020 sehingga pemerintah menerapkan PPKM, juga mengingat Jawa Tengah masih berada di level 4 saat Agustus 2021. Selain itu, persyaratan untuk terbang yang harus mencantumkan hasil negatif PCR juga memberi andil terhadap penurunan yang terjadi pada Angkutan Udara dan dianggap memberatkan bagi penumpang sehingga banyak yang membatalkan atau mengundur jadwal penerbangannya apalagi jika tujuannya untuk berwisata.

Berdasarkan BRS BPS Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus 2021 tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Sumarmo. Apabila dikumulatifkan selama periode Januari-Agustus 2021 tercatat hanya ada 9 wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Sumarmo.

Data dan fakta diatas menjadi indikasi seperti apa kabar pariwisata di Jawa Tengah saat ini, selain itu pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah pada sektor pariwisata untuk menekan laju penularan Covid-19 menjadikan pelaku pariwisata perlu menelaah kembali strategi untuk tetap menggaet wisatawan dan tetap menggali potensi pariwisata di Jawa Tengah agar tetap eksis di tengah Pandemi.

Seperti apa Wajah Pariwisata Jawa Tengah?

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan budaya dan wisata yang sangat banyak. Terletak di wilayah yang memiliki daerah pesisir sampai pegunungan menjadikan Jawa Tengah menawarkan berbagai jenis wisata mulai dari pantai sampai pemandangan yang indah di pegunungan. Tak lupa banyaknya budaya yang masih sangat kental dan unik menjadi daya tarik tersendiri.

Dari Candi Borobudur, Dataran tinggi Dieng, Guci, Baturaden, Candi Prambanan sampai pulau Karimun Jawa menjadi wisata unggulan dan menjadi favorit wisatawan ketika berkunjung ke Jawa Tengah. Keunikan dan kekentalan budaya jawa dengan adanya keraton Kasunanan Surakarta juga tak lepas dari tujuan wisatawan. Selain itu, Kemistisan lawang sewu juga turut andil dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Belum lagi wisata kuliner yang beragam dengan cita rasa dan kekhasannya juga menarik minat wisatawan.

Jika dibuat daftarnya banyak sekali daya tarik wisata di Jawa Tengah, bukan hanya bagi wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara. Namun sayangnya di masa pandemi sekarang pariwisata di Jawa Tengah harus berjalan merangkak untuk tetap bertahan. Banyaknya wisata yang ditutup sementara karena peraturan pemerintah atau sepiunya pengunjung menjadikan pariwisata di Jawa Tengah lesu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menunjukkan bahwa daya tarik wisata di Jawa Tengah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 750 objek menjadi 917 objek di tahun 2019 dan 1.069 objek pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah tidak kekurangan daya tarik wisata. Sayangnya jika dilihat dari jumlah pengunjung menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan.

Data menunjukkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 61,24 persen pengunjung wisatawan mancanegara dan nusantara ke Jawa Tengah. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah selama tahun 2020 hanya sebanyak 78.290 wisatawan turun dari sebelumnya 691.699 wisatawan di tahun 2019. Sedangkan untuk wisatawan nusantara turun dari 57,9 juta wisatawan di tahun 2019 menjadi 22,7 juta wisatawan di tahun 2020. Hal ini menjadi dampak nyata pandemi pada pariwisata yang berimbas pada penerimaan devisa pariwisata karena berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Bagaimana strategi menumbuhkan pariwisata Jawa Tengah?

Tren pariwisata di masa pandemi telah bergeser. Keinginan liburan tanpa banyak berinteraksi dengan orang lain mengubah tren pariwisata. Untuk itu pelaku pariwisata di Jawa Tengah perlu berfikir out of the box dan berinovasi untuk mendukung tren pariwisata yang bergeser di tengah pandemi, salah satunya dengan virtual tourism yang menawarkan liburan online tanpa perlu datang ke tempat wisata.

Jawa Tengah memiliki banyak wisata yang menjadi daya tarik untuk dibuat menjadi virtual tourism dengan ide dan sentuhan seni yang ciamik berpotensi menarik minat tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Contoh saja Korea Selatan yang tetap bisa berdiplomasi mengenai pariwisatanya dan menjualnya di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu di tengah pandemi ini perlu membangun era baru pariwisata seperti yang dikatakan oleh Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Selaras dengan pernyataan Menparekraf pengembangan digital tourism mulai digencarkan demi mendongkrak pariwisata ditengah pandemi. Pelaku pariwisata di Jawa Tengah harus sadar di zaman yang semakin canggih ini perlu melakukan promosi dan inovasi yang bisa menarik wisatawan.

Namun pelaku pariwisata di Jawa Tengah tidak bisa sendirian dalam membangun era baru pariwisata. Poin kunci kesuksesan branding digital tourism dan virtual tourism tidak terlepas dari sinergi antara pelaku pariwisata dengan pemerintah Jawa Tengah maupun Kemenparekraf serta perlu adanya kerjasama dengan menggandeng platform digital maupun pelaku industri hiburan demi menjual dan menarik minat calon wisatawan.

Hampir 50% Hotel Gulung Tikar Akibat Pandemi Covid-19

Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan
Jateng Daily, 22 November 2021

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 berdampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,07 persen (year on year) pada tahun 2020. Pemerintah sempat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal masa pandemi tahun 2020 yang membuat mobilitas masyarakat sangat terbatas sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut tersendat. Pembatasan mobilitas ini juga berimbas terhadap dunia perhotelan di Indonesia.

Banyak hotel yang terpaksa tutup karena tidak ada tamu yang datang. Aktivitas bisnis restoran dan agenda pertemuan di hotel juga sempat sama sekali berhenti. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat pada tahun 2020 sedikitnya ada 1.642 hotel yang terpaksa tutup (data PHRI pada April 2020) karena wabah Covid-19. Jika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di Indonesia terdapat 3.516 hotel, maka hotel yang tutup karena imbas pandemi adalah sebesar 46,70 persen dari total hotel yang ada.

Imbas dari pandemi Covid-19 juga tak terelakkan terjadi di Kota Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi di kota batik juga mengalami perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Kota Pekalongan tumbuh melambat sebesar 8,35 persen (year on year) pada tahun 2020. PSBB alias lockdown cukup mematikan langkah berbagai sektor ekonomi di Kota Pekalongan.

Ditutupnya sentra-sentra penjualan batik di Jakarta, Jogja, Solo maupun di Kota Pekalongan sendiri menyebabkan industri batik banyak yang mengurangi produksi bahkan berhenti beroperasi. Selain berimbas pada industri batik, pembatasan mobilitas penduduk sejak Maret 2020 menyebabkan beberapa hotel di Kota Pekalongan juga sempat memutuskan untuk tutup sementara. Terjadinya penurunan tingkat hunian hotel secara signifikan juga berkurangnya permintaan penyediaan ruang pertemuan dan makanan & minuman di restoran hotel menyebabkan Gross Operating Loss (GOL) yang mengakibatkan kondisi keuangan hotel terganggu hingga berada pada posisi minus.

Adapun hotel yang tetap bertahan pada masa itu, memilih untuk mengurangi jumlah pegawai dan ada juga yang memberlakukan unpaid leave pada pegawainya untuk mengurangi beban biaya operasional. Pemberlakuan new normal pada Juni 2020 ternyata juga tidak mampu mendongkrak okupansi hotel pada titik normalnya. Pemberlakuan syarat perjalanan yang ketat dan juga masih adanya kekhawatiran masyarakat akan tertular virus Covid-19 menyebabkan mobilitas masyarakat belum normal seutuhnya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan, termasuk upaya Kemenparekraf yang memberlakukan uji sertifikasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) untuk hotel, restoran dan juga destinasi wisata.

Penerapan protokol kesehatan sesuai dengan SOP yang dituangkan dalam handbook yang disusun Kemenparekraf/Baparekraf dan merupakan turunan dari protokol kesehatan yang diterbitkan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 382/2020, dinilai dapat meningkatkan kepercayaan kembali wisatawan yang ingin berkunjung ke sebuah destinasi wisata, hotel atau restoran.

Meski begitu, ternyata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Kota Pekalongan belum sepenuhnya kembali normal. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) TPK hotel pada tahun 2020 sebesar 45,77 persen turun 1,26 poin dibandingkan dengan TPK tahun 2019 yang sebesar 47,03 persen.

Hal yang menarik adalah penurunan tingkat penghunian kamar hotel hanya terjadi pada hotel bintang saja yaitu dari 59,64 persen pada tahun 2019 menjadi 50,93 persen pada tahun 2020. Sementara itu, hotel non bintang justru mengalami peningkatan TPK sebesar 1,68 poin yaitu dari 26,23 persen pada tahun 2019 menjadi 27,91 persen pada tahun 2020.

Jika dilihat dari data TPK tersebut tampak jika hotel non bintang lebih tangguh di masa pandemi dibandingkan hotel bintang. Akan tetapi jika ditelisik lebih dalam lagi dari karakteristik tamu menurut jenis hotel, hotel bintang lebih banyak menerima tamu ketika ada event tertentu baik acara dari perusahaan swasta, pemerintah maupun perorangan seperti pernikahan.

Pemberlakuan PSBB bahkan new normal yang masih melarang diadakannya acara yang menimbulkan kerumunan menyebabkan okupansi hotel bintang sulit kembali ke titik normalnya. Terlebih ketika hotel dengan sertifikasi CHSE memberlakukan protokol kesehatan ketat bagi pengunjung, dimungkinkan mengurangi kenyamanan untuk pengunjung yang tidak terbiasa menerapkan proses dalam kesehariannya.

Sedangkan karakteristik tamu pada hotel non bintang di Kota Pekalongan sebagian besar adalah para pedagang atau distributor yang melakukan distribusi barang sepanjang area Pantura. Pada saat PSBB distribusi beberapa barang penting masih bisa berjalan normal, apalagi setelah diberlakukan era new normal kegiatan distribusi barang-barang kebutuhan pokok kembali bergulir sehingga tingkat hunian hotel non bintang bisa kembali ke titik normalnya.

Tak heran setelah pandemi perlahan berlalu, banyak hotel bintang yang melakukan terobosan untuk mengembalikan masa kejayaannya. Berbagai promo digelar, baik diskon tarif inap hingga inovasi layanan pesan online makanan & minuman dari restoran hotel untuk masyarakat. Pemerintah pun mulai mengendorkan aturan tentang larangan berkerumun.

Acara-acara sudah mulai bisa kembali diadakan di hotel dengan batasan-batasan tertentu dan tentunya dengan proses ketat. Beberapa acara meeting baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah sudah mulai diadakan di hotel lagi, pelatihan-pelatihan dan juga pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan sudah mulai menyumbang peran dalam peningkatan okupansi hotel.

Lantas bagaimana dengan masa depan dunia perhotelan di tahun 2021 ini? Seiring dengan penurunan sebaran covid-19 di Indonesia dan terus meningkatnya capaian vaksinasi,

kebijakan pemerintah untuk mulai memberlakukan PSBB ke level 1 yang membuka kran perjalanan dan destinasi wisata di sebagian besar wilayah NKRI tentu menjadi harapan baru.

Secara umum kini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2021 ini juga sudah menunjukkan tren peningkatan, dimana sesuai rilis data dari BPS RI, Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). Sebagai harapan, semoga pertumbuhan ekonomi ini akan terus menunjukkan tren peningkatan sampai akhir tahun 2021, dan nafas kehidupan dunia perhotelan yang sempat begitu terengah bahkan sempat terputus dan gulung tikar di tahun 2020 dapat kembali menunjukkan geliat kehidupannya, bangun menatap Indonesia Emas di tahun 2045

Omicron dan Potensi Turunnya Kunjungan Wisman

Ahmad Fahrur Rohim – BPS Kabupaten Jepara

Jateng Daily, 3 Desember 2021

Virus Covid-19 varian baru B.1.1.529 atau Omicron akhir-akhir ini mengagetkan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, menurut Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman virus yang ditemukan pertama kali di Afsel ini mempunyai kemampuan 5 kali lebih menular dibandingkan virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China tahun 2019 lalu. World Health Organization (WHO) menjelaskan berdasarkan bukti awal bahwa peningkatan resiko infeksi ulang dengan varian Omicron, dibandingkan dengan Variant of Concern (VOC) lainnya. Kondisi tersebut sontak membuat dunia menjadi waspada kembali. Banyak negara di dunia seperti Inggris, Australia, Jepang dan lainnya yang menutup pintu masuk negaranya dari warga asing, yang utamanya berasal dari Afrika Selatan dan negara lain yang sudah ditemukan kasus Omicron.

Tidak terkecuali Indonesia, kabar tersebut juga membuat beberapa bandar udara di Indonesia yang merupakan salah satu pintu masuk warga asing ke Indonesia ikut hati-hati. Menurut Manajemen Angkasa Pura 2, Bandar Udara Sukarno Hatta Jakarta telah memperketat penjagaan pada pintu kedatangan luar negeri dan membatalkan penerbangan dari negara yang masuk daftar hitam varian Omicron. Sedangkan menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Jatim, dr. Makhyan Jibril Alfarabi pihaknya melakukan penutupan Bandar Udara Internasional Juanda dari masuknya warga asing ke Jatim.

Kondisi tersebut sebenarnya berpotensi menurunkan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terjadi penurunan tipis sebesar 0,83 persen wisman bulan Oktober 2021, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun pada sisi lain, terjadi peningkatan wisman periode Oktober 2021 dibandingkan bulan September 2021 sebesar 21,73 persen. Wisman yang berkunjung Indonesia pada Oktober 2021 melalui moda angkutan udara sebanyak 15,72

ribu kunjungan, moda angkutan laut sebesar 375,02 ribu kunjungan dan melalui angkutan darat mencapai 95,52 ribu kunjungan.

Namun, dengan adanya kasus varian Omicron di atas, maka masyarakat Indonesia maupun warga asing tentu juga akan mengurungkan niatnya untuk ke luar negeri. Hal tersebut tentu akan membuat menurunnya kunjungan wisman, padahal pariwisata tanah air sudah mulai menggeliat beberapa bulan terakhir pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Adanya varian Omicron di beberapa negara di atas cukup membuat masyarakat agak kaget. Hal tersebut mengingatkan beberapa bulan terakhir kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia cukup mereda. Wajar memang pemerintah Indonesia juga cukup waspada dengan varian baru ini. Selain siap di pintu masuk bandara, sebaiknya pemerintah juga perlu mewaspadaai pintu masuk lewat pelabuhan dan jalur darat.

Pengetatan warga asing yang masuk ke Indonesia, sebaiknya juga tidak hanya sekedar menysar yang berasal dari negara yang sudah ada kasus varian Omicron. Namun, perlu juga memeriksa apakah beberapa minggu terakhir pernah melakukan kunjungan ke negara-negara berkasus melalui pemeriksaan paspor.

Dengan adanya kewaspadaan tinggi dan antisipasi sejak awal, semoga virus Omicron tidak singah di tanah air. Selain itu upaya pemerintah yang terus meningkat capaian vaksin, diharapkan juga semakin mempercepat negara kita ini terbebas dari virus Covid-19. Dengan demikian, pariwisata semakin menggeliat dan ekonomi dapat menjadi tumbuh.

UMK Tak Menyentuh Penjaga Warisan Budaya

Nurul Kurniasih – BPS Kota Pekalongan

Jateng Daily, 27 November 2021

KENAIKAN Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 hanya sebesar 0,78 persen, jauh dari tuntutan Aliansi Buruh Jawa Tengah yang menghendaki kenaikan hingga 16 persen. Aliansi Buruh Jawa Tengah yang menolak penetapan UMP 2022 menyatakan bahwa buruh selalu menjadi pihak tertindas yang dituntut bekerja maksimal dengan upah minimal. Penolakan juga datang dari Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah yang mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (25/11/2021).

Mereka menganggap bahwa UMP 2022 dipandang tidak berpihak kepada buruh dan membebani buruh di tengah pandemi Covid-19. Padahal Gubernur Ganjar Pranowo melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tanggal 20 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, telah menetapkan UMP Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp1.812.935. Penetapan UMP ini telah menggunakan perhitungan formula sesuai

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 Tentang Pengupahan, dimana variabel data acuan yang digunakan telah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.

Jika serikat-serikat buruh bisa berdemo menuntut kenaikan UMP yang lebih tinggi, apa kabar saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal? Apa kabar kesejahteraan buruh batik yang sedari dulu upahnya tak pernah mencapai UMP atau UMK?

Di saat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Pekalongan ditetapkan naik dari Rp2.139.754 pada tahun 2021 menjadi Rp.2.156.444 pada tahun 2022, upah buruh batik tetap pada tarif rendahnya. Upah buruh batik bagian nyolet (mewarnai batik) masih berada pada kisaran Rp25.000 per hari yang berarti sekitar Rp600.000 sebulan. Sedangkan upah buruh batik bagian nglorod (pencelupan kain batik pada air panas untuk melepaskan lilin malam) berkisar pada Rp70.000 per hari yang berarti sekitar Rp1.680.000 sebulan. Sangat jauh dari besaran UMK yang dinilai sebagai standar minimum upah yang layak untuk biaya hidup seorang buruh.

Menurut penelitian Amalinda Savirani, kepala program doktoral di Departemen Politik & Pemerintahan di UGM, tahun 2007, skala usaha para perajin batik di Pekalongan 90 persen adalah skala rumahan dan bersifat informal. Hal ini didukung juga dengan data dari Kementerian Perindustrian yang mencatat bahwa pada tahun 2019 industri batik didominasi Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di 101 sentra di Indonesia, dengan jumlah sebanyak 47.000 pengusaha dan menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja dimana aturan formal termasuk dalam ketenagakerjaan tidak berlaku untuk para buruh batik. Karena tidak terangkut dalam regulasi formal inilah upah buruh batik selalu abadi berada pada titik yang jauh di bawah UMK.

Hal ini dimantapkan dengan adanya tren maklon di mana untuk menjadi pengusaha batik tidak perlu mendirikan pabrik batik melainkan hanya perlu modal usaha saja. Juragan batik memberikan sanggan/pekerjaan batikan ke pengusaha-pengusaha kecil untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Hal ini sangat menguntungkan para pengusaha besar. Mereka tak perlu mengeluarkan modal pendirian pabrik, tak perlu mengeluarkan upah sesuai standar UMK, tak ada biaya operasional perusahaan apalagi biaya asuransi tenaga kerja.

Padahal proses pengerjaan batik baik batik tulis maupun batik cap merupakan proses yang panjang. Mulai dari penyiapan kain mori, penggambaran sketsa, pewarnaan, pelorodan, penjemuran hingga pengepakan. Buruh batik biasanya bekerja 8-10 jam per hari. Untuk proses pewarnaan/pembatikan biasanya dilakukan oleh buruh perempuan dan proses pelorodan & penjemuran dilakukan oleh buruh laki-laki. Semua pekerja ini setiap hari harus berinteraksi dengan obat batik yang baunya begitu menyengat dan beresiko tinggi merusak kulit dan paru-paru.

Beberapa kondisi inilah yang menyebabkan Kota Batik hampir kehilangan generasi penerus penjaga warisan budaya. Anak-anak muda di Kota Pekalongan banyak yang memilih bermigrasi ke kota lain untuk penghasilan dan jaminan pekerjaan di bidang yang

lebih menjanjikan, atau tetap bertahan di Kota Batik namun memilih bidang pekerjaan selain batik.

Sebagai kota yang telah memperoleh predikat Kota Kreatif Dunia dengan julukan “World City Of Batik”, Kota Pekalongan tentu harus memperhatikan kelangsungan warisan budaya nasional ini. Apalagi otentifikasi batik yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda (world intangible cultural heritage), tentu merupakan warisan yang sangat berharga. Lalu bagaimana nasib warisan budaya dunia ini jika tak ada lagi yang bersedia menjaga keberlangsungannya hanya karena tidak ada kepastian kesejahteraan bagi mereka?

Hal ini diperparah lagi dengan hadirnya pandemi Covid-19 di tanah air. Dikutip dari detikfinance, Asosiasi Perajin & Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) melaporkan, di Indonesia terdapat 151.656 perajin batik dan setelah dihantam pandemi menyisakan 37.914 perajin saja yang aktif. Artinya pandemi telah mengurangi jumlah perajin batik hingga 75 persen. Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan lesunya penjualan batik di semua sentra mulai dari Pasar Klewer (Solo), Pasar Grosir Setono (Pekalongan), Pasar Beringharjo (Yogyakarta) hingga Pasar Batik Thamrin City (Jakarta).

Terpaan pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar 1,87 persen. Industri pengolahan dan perdagangan merupakan dua sektor yang memiliki peran besar pada perekonomian di Kota Pekalongan, dimana menurut catatan BPS, masing-masing sektor ini memiliki peran 21,40 persen dan 21,16 persen pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan tahun 2020. Dan sebagian besar penopang dari dua sektor ini adalah batik.

Bisa dibayangkan bagaimana kondisi para buruh batik, penjaga warisan budaya dunia bertahan hidup dalam masa pandemi dengan kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi seperti ini. Dalam kondisi normal saja mereka harus bertahan dengan upah murah di bawah UMK, apalagi dalam kondisi pandemi. Tak ayal angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun meningkat dari 6,08 persen pada tahun 2019 menjadi 8,05 persen pada tahun 2020.

Tantangan lain yang dihadapi oleh dunia perbatikan adalah hadirnya batik printing atau cetak yang mengaku sebagai batik padahal sebenarnya tak bisa dikategorikan sebagai batik. Menurut Irwan Tirta, konsep batik adalah teknik dekorasi kain / tekstil menggunakan lilin untuk pewarnaan warna, di mana semua proses dilakukan dengan tangan. Sedangkan batik printing/cetak tidak melalui semua proses ini.

Batik printing merupakan kain printing/cetak yang bermotif batik. Batik printing/cetak banyak dikuasai oleh pengusaha besar, diproduksi dengan mesin secara massal dalam waktu lebih cepat dan tentunya bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini yang mematikan pasaran batik tulis dan batik cap dimana pada akhirnya juga mengancam eksistensi usaha batik di Kota Pekalongan. Diperlukan kebijakan yang tegas dari

pemerintah daerah maupun pusat untuk melindungi kemurnian batik. Perlu ada gerakan besar untuk regenerasi perajin batik, tentunya diawali dengan perbaikan kesejahteraan buruh batik agar generasi muda tertarik.

Klaster-klaster batik yang sudah ada seharusnya bisa memaksimalkan perannya. Tidak hanya berkuat pada promosi, pameran, edukasi penggunaan bahan, edutourism batik tapi juga mulai memikirkan kesejahteraan buruh batik. Pemerintah juga seharusnya mulai peduli dengan nasib buruh batik. Kesejahteraan para penjaga warisan budaya bangsa ini harus diperhatikan.

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam usaha batik harus menjadi fokus pemerintah Kota Pekalongan. Kebijakan tentang konsep maklon pada mata rantai industri batik harus dikaji ulang. Jangan sampai ketimpangan penghasilan antara juragan dan buruh batik semakin menjadi bagai bumi dan langit. Konsep maklon membuat buruh batik di Kota Batik menjadi direndahkan.

Pengusaha bermodal besar baik dari dalam maupun luar kota membayar buruh batik dengan harga murah, lalu memberikan label merk mereka dan dijual di kota lain dengan harga yang sangat mahal. Brand value inilah yang menyebabkan banyak ditemukan produk batik dengan motif batik yang sama, kualitas kain yang sama, model dan warna yang sama, namun harganya jauh berbeda, sementara nasib para buruh batik kedua produk ini tetaplah sama, merana, jauh dari standar UMK.

Menyembuhkan Angkutan Pasca Pandemi

Santi Widyastuti – BPS Kota Salatiga

Jateng Daily, 23 April 2021

Pada tanggal 24 April, setiap tahunnya diperingati sebagai hari angkutan. Peringatan hari angkutan ditanggapi dingin oleh masyarakat bahkan mungkin ada yang tidak menyadari. Hari angkutan diperingati karena angkutan merupakan sarana yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

Sebagai bagian dari transportasi, angkutan merupakan kunci bagi berlangsungnya roda perekonomian suatu wilayah. Di beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi sering disebutkan, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan mempermudah akses antar wilayah diantaranya dengan menyediakan infrastruktur dan transportasi meliputi angkutan yang memadai.

Di Kota Salatiga, angkutan yang beroperasi hanya angkutan darat yang menghubungkan berbagai wilayah seperti Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kabupaten Magelang. Karena menjadi penghubung antar wilayah, maka

angkutan di Kota Salatiga sangat berpengaruh dalam membangun perekonomian di Kota Salatiga sendiri maupun wilayah di sekitarnya.

Hantaman Pandemi COVID-19

Akibat hantaman pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Kondisi tersebut sebenarnya sudah bisa diperkirakan sejak awal dan tidak bisa dielakkan. Kontraksi ekonomi terjadi karena pandemi memaksa pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah pandemi menjadi semakin merajalela. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, pembatasan kerumunan, termasuk juga membatasi mobilitas masyarakat antar wilayah.

Memburuknya perekonomian akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan di Kota Salatiga. Hasil rilis pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, menyebutkan bahwa ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,68 persen. Penurunan terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi, akan tetapi sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor transportasi.

Setelah beberapa tahun sebelumnya sektor transportasi mengalami pertumbuhan di atas 5 persen, pada tahun 2020 pertumbuhan sektor transportasi turun sebesar -26,86 persen. Meskipun kontribusi sektor ini tidak terlalu besar terhadap perekonomian Kota Salatiga, akan tetapi kontraksi yang terlalu dalam menjadikan sektor transportasi sebagai sumber terbesar turunnya pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga secara umum.

Peran Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini memang seperti makan buah simalakama. Jika kerumunan atau mobilitas penduduk dibatasi maka akan berdampak pada berbagai sektor ekonomi, tetapi jika tidak maka pandemi COVID-19 akan semakin merajalela dan mungkin bisa menghancurkan ekonomi lebih dalam.

Pada akhirnya, jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah saat ini dengan membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Pada sektor angkutan, pemerintah menetapkan social distancing dengan maksimal kapasitas penumpang sebesar 50 persen.

Setelah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan vaksinasi. Mulai tahun 2021 pemerintah memberikan vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat secara bertahap.

Pemberian vaksin dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Ketika masyarakat kembali lebih produktif, diharapkan sektor ekonomi khususnya sektor transportasi dan angkutan bisa bangkit kembali.

Menyembuhkan Sektor Angkutan

Menyembuhkan sektor transportasi akibat dihantam pandemi COVID-19 memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak tantangan yang menanti. Pertama, butuh waktu untuk menyelesaikan vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat. Untuk membantu memulihkan transportasi, maka vaksinasi perlu diprioritaskan pada masyarakat pengguna angkutan umum diantaranya pelajar dan pekerja .

Kedua, vaksinasi tidak serta merta membuat kekebalan seseorang menjadi seratus persen. Oleh karena itu jika kegiatan masyarakat sudah mulai kembali normal, maka protokol kesehatan perlu tetap diterapkan pada angkutan umum. Penerapan protokol kesehatan pada angkutan umum juga perlu disampaikan ke masyarakat melalui berbagai media. Tujuannya supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari Covid-19 saat melakukan perjalanan. Selain itu, dengan adanya sosialisasi adanya protokol kesehatan maka masyarakat diharapkan tidak takut lagi untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum.

Ketiga, banyak perusahaan angkutan yang merugi akibat jumlah penumpang yang turun drastis. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan subsidi kepada perusahaan angkutan supaya operasional angkutan tetap berjalan. Selain itu subsidi juga bisa diberikan untuk mengurangi harga tarif angkutan, sehingga masyarakat tertarik untuk kembali menggunakan angkutan umum. Semoga pandemi segera berakhir dan angkutan kembali mampu menggerakkan roda perekonomian. Selamat hari angkutan.

Menjaga Momentum Peningkatan Wisatawan Berlibur ke Karimunjawa

**Ahmad Fahrur Rohim – BPS Kabupaten Jepara
Info Jateng, 25 November 2021**

Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sampai saat ini cukup mempengaruhi geliat pariwisata di Indonesia. Apalagi pada masa PPKM darurat Juli-September 2021 untuk mengendalikan persebaran Covid-19 varian delta yang cepat dan massif, gairah pariwisata menjadi lesu

Salah satu tempat wisata yang cukup terdampak adalah Pulau Karimunjawa. Pada periode Juli dan Agustus pengunjung yang datang cukup rendah, seiring terjadinya puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Jepara.

Sebetulnya wisata ke Pulau Karimunjawa merupakan salah satu solusi liburan sehat di tengah pandemi. Sebelum menyeberang ke Pulau Karimunjawa wisatawan diwajibkan untuk melakukan Rapid Test Antigen di pelabuhan penyeberangan. Sehingga hanya

pengunjung yang berstatus negatif yang boleh menyeberang ke pulau yang terkenal keindahan taman bawah lautnya.

Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 dan meningkatnya partisipasi vaksin Covid-19, maka pengunjung yang datang ke Karimunjawa juga mengalami peningkatan. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah jumlah pengunjung yang datang di Pelabuhan Karimunjawa pada September 2021 mencapai 3.910 pengunjung atau meningkat 83 persen dibandingkan Agustus 2021. Angka tersebut cukup tinggi, mengingat pada Agustus pengunjung yang datang hanya sebesar 2.136 pengunjung dan bahkan pada Juli 2021 hanya mencapai 1.121 pengunjung.

Sebenarnya pada masa peak season sebelum pandemi, seperti pada Desember 2019 pengunjung tempat wisata andalan Kabupaten Jepara ini mencapai 12.797 pengunjung. Tidak hanya melalui moda kapal cepat maupun kapal feri, bahkan ada 19 pesawat yang mendarat di Bandar Udara Dewandaru Karimunjawa selama satu bulan tersebut.

Pandemi yang mulai terjadi pada Maret 2020 membuat Karimunjawa menjadi sepi. Pulau Karimunjawa mulai bangkit kembali pada tahun 2021 dan tercatat pada Juni 2021 yang mencapai 3.828 pengunjung menurut data BPS Jawa Tengah. Namun, adanya varian Delta dan pemberlakuan PPKM Darurat membuat pengunjung periode Juli-Agustus menurun kembali.

Setelah PPKM Darurat diperlonggar menjadi PPKM levelling, maka industri pariwisata juga mulai tumbuh kembali. Hal tersebut mendongkrak juga peningkatan hunian hotel dan restoran. Tercatat berdasarkan rilis pertumbuhan ekonomi oleh BPS Jateng, sektor pengadaan akomodasi dan restoran pada triwulan III ini tumbuh mencapai 1,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun sektor transportasi masih mengalami kontraksi -0,99 persen, mengingat masyarakat masih belum terlalu berani menggunakan transportasi umum. Kondisi tersebut disinyalir masyarakat masih lebih percaya diri melakukan mobilitas menggunakan kendaraan pribadi pada masa pandemi ini.

Mengingat liburan akhir tahun akan segera datang, maka pemerintah dan masyarakat perlu menjaga momentum positif yang telah ada. Masyarakat sebaiknya tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah.

Momentum ekonomi Indonesia dan Jawa Tengah yang tumbuh 3,53 persen dan 2,56 persen pada triwulan III secara year on year, covid-19 yang cukup terkendali dan partisipasi vaksin yang terus meningkat harus terus dijaga seiring meningkatnya gelombang masyarakat yang ingin berlibur pada akhir tahun.

Salah satu antisipasi pemerintah yang dilakukan pada akhir tahun adalah dengan meniadakan cuti bersama pada akhir tahun dan yang terbaru memberlakukan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Kondisi tersebut setidaknya untuk mengurangi mobilitas warga masyarakat utamanya pada momen Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut berkaca pada pengalaman sebelumnya, jika habis libur panjang maka kasus positif Covid-

19 mengalami peningkatan. Selain itu pelaku usaha wisata dan hiburan juga harus tetap menerapkan aturan protokol kesehatan dan upaya pencegahan terjadinya kerumunan.

Geliat Batik Pekalongan di Masa Pandemi

Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan

Jateng Daily, 2 Oktober 2021

Pekalongan “World’s City of Batik”

BATIK merupakan ikon yang tidak bisa dilepaskan dari Kota Pekalongan. Batik menjadi identitas yang dilambangkan dalam logo Kota Pekalongan. Melekatnya batik dengan Kota Pekalongan juga tidak terlepas dari mata pencaharian warga Kota Pekalongan yang kebanyakan menjadi pengrajin batik.

Hal ini menjadikan batik sebagai denyut nadi kehidupan dan penggerak perekonomian Kota Pekalongan. Batik Pekalongan sudah lama dikenal bahkan sejak lebih dari satu abad yang lalu. Pesona batik Kota Pekalongan yang memiliki warna-warna yang cerah dan tidak kuno dengan corak yang khas dan variatif menjadi ciri khas batik Kota Pekalongan.

Ciri khas ini karena berkembangnya batik Kota Pekalongan di daerah pesisir dan terpengaruh oleh para pendatang dari China dan Belanda. Selain sebagai identitas batik yang sudah mandarah daging dengan warga kota juga memiliki nilai budaya sebagai aset Kota Pekalongan. Kota Pekalongan dengan batiknya menjadi salah satu jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori crafts dan folk art dengan city branding World’s city of Batik.

Batik dan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun telah membuat ekonomi masyarakat suatu daerah terpuruk yang berimbas pula ke pendapatan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha harus kehilangan pendapatan, bahkan ada yang harus menutup usahanya karena sepiya transaksi ekonomi selama masa pandemi covid-19 dikarenakan daya beli masyarakat juga ikut turun.

Pengrajin batik di Kota Pekalongan tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Banyak pengrajin batik yang berkurang omsetnya, sehingga harus mengurangi jumlah pekerja bahkan harus sementara tidak memproduksi karena tingginya beban operasional yang harus ditanggung oleh pengrajin batik. Pelemahan yang terjadi pada pengrajin batik berpengaruh pada pelemahan perekonomian di Kota Pekalongan.

Hal ini dikarenakan batik merupakan salah satu lapangan usaha yang memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian. Pada tahun 2020 peranan industri pengolahan di kota Pekalongan menyumbang sebesar 21,40 persen dan masih menjadi kontributor

terbesar di Kota Pekalongan. Besarnya peranan industri pengolahan tidak terlepas dari peranan industri batik di Kota Pekalongan. Secara langsung maupun tidak langsung lesunya industri batik di Kota Pekalongan akan berdampak pada perekonomian kota Pekalongan dan memiliki multiplier effect ke Lapangan Usaha yang lain.

Menumbuhkan pengrajin batik di masa pandemi

Pada masa pandemi seperti sekarang pelaku usaha perlu memikirkan cara untuk membuat usahanya tetap berjalan ditengah-tengah perjuangan keluar dari krisis akibat pandemi covid-19. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga keberlangsungan usaha untuk bertahan ditengah-tengah kondisi pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 roda perekonomian mulai berjalan ke arah pertumbuhan kembali setelah sempat terpuruk pada tahun 2020, namun pelaku usaha tetap harus menjaga momentum untuk tetap menjaga berjalannya perekonomian. Kota Pekalongan sebagai Kota yang perekonomiannya ditopang oleh industri terutama industri batik perlu membuat strategi agar keberlangsungan industri batik tetap dapat bertumbuh ditengah-sepinya minat beli masyarakat.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengrajin batik untuk terus menumbuhkan usahanya. Pengrajin batik bisa melakukan strategi melalui differinsiasi produk seperti membuat sarung bermotif batik dan kerudung bermotif batik atau bisa juga merambah ke sepatu yang bermotif batik. Selain itu, keeksisan pengrajin dapat pula dilakukan dengan cara mengupayakan suatu inovasi, kreativitas dan strategi pemasaran. Dengan canggihnya teknologi digital sekarang dan sudah merambahnya pasar ke digital harus dimanfaatkan juga oleh pengrajin batik terutama di masa seperti sekarang yang terbatas untuk berbelanja ke pasar ataupun ke mall.

Strategi bersaing harus diterapkan oleh pengrajin batik dengan marketing yang ciamik melalui Instagram, market place, whatsapp dan media lainnya. Apalagi dengan potensi yang dimiliki oleh batik Pekalongan yang memiliki desain batik yang berbeda dengan yang lain yang mengkombinasikan corak klasik dan modern. Selain itu juga batik pekalongan terkenal dengan warna-warna yang cerah dan desain yang trendi dan mengikuti fashion.

Keberlangsungan pengrajin batik juga tidak terlepas dari peran dan dukungan dari pemerintah serta pembinaan terutama dinas terkait untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan pengrajin batik ditengah-tengah pandemi covid-19. Pada momentum hari batik dunia ini merupakan momentum untuk kebangkitan bersama pengrajin batik dan pemerintah Kota Pekalongan untuk terus menumbuhkan batik pekalongan di tengah-tengah tantangan covid-19 melalui differensiasi, inovasi, kreativitas dan startegi pemasaran yang lebih luas dan menggandeng berbagai pihak untuk terus meluaskan jaringan usaha.

Bagian 6

Sisi Lain di Balik Ekonomi Pandemi

Diana Dwi Susanti

Pola hidup bersih dan sehat dalam kondisi pandemi selayaknya menjadi suatu hal yang wajib untuk terus menerus dilakukan. Beberapa protokol kesehatan sebagaimana anjuran WHO, cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, serta penggunaan *hand sanitizer* dalam aktivitas sehari-hari harus terus menerus didengarkan untuk memerangi penyebaran virus Covid-9 ini.

Refleksi Pandemi

Adanya pandemi akibat covid-19 ini memang jadi kejutan tersendiri bagi seluruh penduduk dunia. Tak hanya berdampak besar di bidang kesehatan, tapi juga semua sisi kehidupan terutama ekonomi.

Untuk itu, hikmah dibalik pandemi menjadi bahan untuk refleksi diri supaya bisa lebih baik di kemudian hari. *Pertama*, hidup itu singkat. Dari kejadian yang sudah memakan jutaan korban jiwa, menyadarkan bahwa hidup sangatlah singkat. Untuk itu hidup harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bekal kehidupan nanti yang kekal abadi. Karena tidak ada yang bisa menebak jatah waktu yang diberikan Tuhan.

Kedua, pekerjaan hanyalah sementara. Ada banyak PHK akibat pandemi. Ini menyadarkan bahwa pekerjaan hanyalah bersifat sementara dan tak bisa memberikan rasa aman sepenuhnya. Mumpung masih bekerja, pergunakan gaji yang ada dengan bijaksana.

Ketiga, sehat itu nikmat. Sakit itu tidaklah enak. Apalagi yang telah merasakan kena Covid-19. Syukuri nikmat sehat yang tak ternilai dengan upaya-upaya menjaga kesehatan dan mencegah penularan. Jangan sampai berujung penyesalan karena abai dalam menjaga diri.

Keempat, sisihkan gaji untuk tabungan. Pekerjaan tak bisa diandalkan untuk menjamin rasa aman secara finansial. Gaji yang tidak dikelola dengan baik, akan berujung bencana ketika ada hal tak terduga yang terjadi.

Kelima, Tuhan Maha Besar. Pandemi ini terjadi sebagai peringatan dari Tuhan akibat kesombongan yang manusia perlihatkan. Sering merasa jumawa, bisa melakukan banyak hal atau mampu meraih apa pun yang diinginkan tanpa adanya keterlibatan Tuhan.

Ternyata cukup dengan satu jenis virus yang kecil, seluruh penduduk dunia menjadi porak poranda. Ekonomi morat-marit, perusahaan gulung tikar, meningkatnya pengangguran. Dan banyak peristiwa dari balik kejadian pandemi ini.

BTS Meal dan Pergeseran Pola Konsumsi

Dwi Agus Styawan – BPS Kabupaten Kebumen

Jateng Daily, 16 Juni 2021

BERBAGAI linimasa media sosial pada Rabu (9/6/2021) dibanjiri postingan tentang BTS Meal. Tagar tentang BTS Meal pun bergema di ruang udara maya. BTS Meal adalah produk makanan terbaru yang diluncurkan oleh salah satu gerai makanan cepat saji berkolaborasi dengan BTS, grup idola dari Korea.

Makanan instan ini langsung menjadi buruan para BTS Army, sebutan fans BTS, yang memang terkenal fanatik. Berbagai gerai makanan cepat saji tersebut sontak ramai dipenuhi BTS Army dan driver ojek online yang kebanjiran order BTS Meal. Mereka rela berjubel, menunggu berjam-jam, hingga mengabaikan protokol kesehatan untuk mendapatkan BTS Meal yang dikemas dalam kemasan khusus berwarna ungu tersebut.

Fenomena BTS Meal ini tentu menarik dari berbagai perspektif. Pada satu sisi, dalam perspektif industri musik dan marketing, fenomena ini membuktikan kekuatan hebat industri musik dalam menjual suatu produk. Kekuatan ini ditambah dengan dukungan media sosial mempercepat sekaligus memperluas gaung suatu produk hingga sudut-sudut kota.

Pada sisi lain, dalam perspektif demografi atau kependudukan, antusiasme BTS Army ini menunjukkan dua hal menarik, yaitu dominasi Generasi Z-Milenial dalam struktur penduduk Indonesia dan pergeseran pola konsumsi penduduk yang cenderung mulai menggemari makanan/minuman jadi.

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas penduduk Indonesia merupakan Generasi Z dan Milenial. Proporsi Generasi Z di Indonesia sebanyak 27,94 persen atau 74,93 juta jiwa, sedangkan proporsi Generasi Milenial sebesar 25,87 persen atau 69,38 juta jiwa.

Kedua generasi inilah yang juga mendominasi BTS Army bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Hal ini tercermin dari hasil Sensus BTS Army 2020 yang mencatat bahwa lebih dari separuh BTS Army berusia kurang dari 18 tahun, dan hampir 43 persen BTS Army berusia 18 – 29 tahun (<https://www.btsArmycensus.com/results>). Dengan demikian, lebih dari 90 persen fans BTS di dunia berusia relatif muda yakni kurang dari 30 tahun.

Dominasi generasi muda ini menjadi pasar potensial bagi para pelaku industri, terutama industri kreatif, dalam memasarkan berbagai produknya. Para pelaku industri benar-benar mengoptimalkan karakteristik Generasi Z dan Milenial yang selalu lekat dengan gawai serta tidak bisa jauh dari media sosial. Mereka menggunakan media sosial sebagai media promosi dan pemasaran berbagai produk. Media sosial yang tidak terbatas ruang dan waktu menyebabkan penyebaran produk semakin meluas dan massif.

Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan BTS Meal bukan hanya diserbu oleh BTS Army, tetapi juga oleh orang-orang non BTS Army yang secara psikologis cenderung penasaran dengan berita/informasi di media sosial. Dominasi Generasi Z dan Milenial ini menjadi ceruk pasar baru di Indonesia yang berusaha direbut oleh gerai makanan cepat saji tersebut. Bahkan gerai tersebut rela mengganti kemasan yang identik dengan warna merah menjadi ungu sesuai dengan warna ikonik BTS.

Strategi membidik Generasi Z dan Milenial ini bukan hanya untuk mendapatkan pasar baru pada masa sekarang, tetapi juga pada masa mendatang. Seiring dengan transisi demografi di Indonesia, kedua generasi ini pada masa mendatang akan cenderung meningkat. Sejalan dengan hal ini, Generasi Z dan Milenial juga akan menjadi segmen pasar yang terus tumbuh pada tahun-tahun mendatang.

Fenomena BTS Meal ini seharusnya juga membuka sudut pandang kita bahwa Generasi Z dan Milenial merupakan aktor potensial untuk menggerakkan perekonomian nasional pada masa kini dan nanti. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Generasi Milenial yang saat ini berusia 24 – 39 tahun seluruhnya merupakan usia produktif, sehingga harus dioptimalkan sebagai motor penggerak pembangunan pada masa kini.

Adapun Generasi Z yang saat ini berusia 8 – 23 terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Pergeseran Pola Konsumsi

Terlepas dari loyalitas dan antusiasme BTS Army terhadap grup idolanya, fenomena BTS Meal ini juga menyuguhkan gambaran pergeseran pola konsumsi penduduk Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan proporsi pengeluaran makanan dan nonmakanan berdasarkan kelompok komoditas.

Pada tahun 1998, secara umum mayoritas pengeluaran rumah tangga terbesar adalah untuk kelompok padi-padian sebesar 15,56 persen, sedangkan kelompok makanan/minuman jadi hanya 6,19 persen. Namun, setelah 22 tahun kemudian terjadi

perubahan yang mendasar dalam pola pengeluaran, yaitu dari dominan kelompok padi-padian menjadi kelompok makanan/minuman jadi.

Pada tahun 2020, kelompok makanan/minuman jadi mendominasi struktur pengeluaran rumah tangga yakni sebesar 16,87 persen, sedangkan kelompok padi-padian hanya 5,45 persen. BTS Meal yang terdiri dari nugget ayam, kentang goreng, dan minuman bersoda ini termasuk dalam kelompok makanan/minuman jadi.

Pergeseran pola konsumsi penduduk yang terjadi setelah lebih dari dua dekade ini menggambarkan bahwa penduduk Indonesia semakin memiliki kecenderungan berpola hidup praktis. Mereka cenderung memilih membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi makanan/minuman jadi.

Hal ini terjadi seiring dengan semakin meningkatnya jumlah generasi muda di Indonesia yang cenderung lebih menyukai makan di luar rumah (eating out) baik di kafe, restoran, foodcourt, ataupun warung makan pinggir jalan. Terlebih dengan kehadiran teknologi wifi di berbagai gerai makanan cepat saji membuat mereka semakin betah duduk berjam-jam, bermain media sosial, walaupun hanya ditemani secangkir kopi atau teh.

Pada satu sisi perubahan pola konsumsi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka mampu membeli dan menikmati makanan/minuman siap saji. Akan tetapi pada sisi lain perubahan ini juga menggambarkan semakin terbatasnya waktu untuk menyiapkan/memasak makanan dan minuman di rumah.

Keterbatasan waktu ini antara lain disebabkan oleh jarak rumah ke sekolah/tempat bekerja yang relatif semakin jauh, kepadatan lalu lintas sehingga waktu tempuh perjalanan semakin meningkat, dan peningkatan persentase perempuan bekerja.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh BPS mencatat bahwa selama periode 2005 – 2021, partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 50,65 persen menjadi 54,03 persen. Sementara itu pada periode yang sama, partisipasi angkatan kerja laki-laki justru cenderung menurun dari 85,55 persen menjadi 82,14 persen. Hal ini mengindikasikan perempuan di Indonesia cenderung semakin aktif secara ekonomi, baik bekerja atau mencari pekerjaan.

Butuh Perhatian Serius

Perubahan pola konsumsi penduduk ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak terutama terkait aspek kesehatan, sebab makanan/minuman siap saji ini cenderung menimbulkan penyakit degeneratif seperti diabetes, darah tinggi, stroke, dan jantung koroner. Mercola, dalam artikelnya *9 Ways That Eating Processed Food Made the World Sick and Fat*, menyatakan bahwa makanan/minuman jadi merupakan hasil dari proses kimia dengan menggunakan bumbu-bumbu yang mengandung bahan tambahan termasuk bahan pengawet.

Makanan/minuman jadi umumnya juga memiliki kandungan gula atau fruktosa, zat pengawet, dan lemak yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara kontinu terhadap industri makanan/minuman, termasuk gerai-gerai makanan cepat saji, agar makanan/minuman yang disajikan tidak berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Terlepas dari itu semua, kehebohan yang dibawa BTS Meal membuka mata kita mengenai terjadinya pergeseran pola konsumsi dan dominasi Generasi Z-Milenial dalam struktur penduduk Indonesia. Pergeseran pola konsumsi harus direspon secara bijak oleh pemerintah terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

Demikian pula dengan dominasi Generasi Z-Milenial harus dioptimalkan melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Generasi merekalah yang akan menentukan wajah Indonesia pada masa depan.

Bagaimanapun juga kehadiran mereka dengan gawai di tangan tidak dapat diabaikan. Termasuk dalam jangka pendek ini, mereka juga yang akan meramaikan pesta politik 2024. Suara mereka tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka adalah kantong-kantong suara potensial yang layak diperjuangkan, sehingga selain moncer di lapangan, maka aktif di media sosial adalah pilihan yang tidak dapat dinafikan.

Kenaikan UMP Tameng dan Bumerang

**Ernie Irawaty Maysarah – BPS Kabupaten Kendal
Jateng Daily, 30 Desember 2021**

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 1,09 persen pada 16 November 2021 lalu. Kenaikan UMP sendiri memberikan kekhawatiran oleh banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam hal ini pekerja sektor formal maupun informal.

Berbagai studi yang sudah cukup banyak dipublikasikan menuliskan bahwa kenaikan UMP sendiri dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi pekerja sektor formal. Namun berbeda dengan pekerja sektor informal yang cenderung lebih mendapatkan dampak negatif, meskipun secara tidak langsung.

Direktorat Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pernah mempublikasikan hasil studi, di mana setiap kenaikan 10 persen upah minimum akan mengurangi kesempatan kerja sebesar 1,1 persen. Pengurangan kesempatan kerja di sektor formal ini justru akan mengalihkan pencari kerja dari sektor formal ke informal. Hal ini tentu akan meningkatkan permintaan tenaga kerja pada sektor informal.

encari kerja yang kesulitan mendapatkan peluang di sektor formal akan berlomba-lomba mencari penghidupan pada sektor informal yang memang secara umum tidak memerlukan modal besar maupun keahlian khusus. Persaingan antar tenaga kerja sektor informal yang

semakin meningkat akan menurunkan upah nominal yang diterima, padahal upah pekerja sektor informal tidak diatur regulasi.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, upah pekerja sektor informal yang tidak diatur regulasi membuat mereka harus mampu menyesuaikan pengeluarannya dengan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi demi mencapai kesejahteraan. Alih-alih memberikan kesejahteraan hidup, upah nominal pekerja sektor informal yang terus turun justru mungkin hanya mampu digunakan untuk menyambung hidup dari hari ke hari saja.

Perlambatan Penurunan Kemiskinan

Belum ditemukan hubungan langsung dari kenaikan UMP terhadap perlambatan penurunan kemiskinan. Namun, berbagai studi telah menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan secara makro, salah satunya ditentukan dari perbaikan kondisi pendidikan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terkendali, serta penurunan tingkat pengangguran.

Kenaikan UMP yang memberikan dampak pada berkurangnya tingkat penciptaan tenaga kerja di sektor formal tentunya akan memicu kenaikan jumlah pengangguran. Bila melihat struktur pengangguran di Jawa Tengah sendiri berdasarkan survei angkatan kerja nasional yang diselenggarakan oleh BPS selama kurun empat tahun terakhir, lebih dari 50 persen penganggur merupakan pengangguran terdidik, yang setidaknya menamatkan tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Penganggur yang secara sukarela memilih tidak bekerja karena kesempatan kerja sektor formal menurun ini merupakan cerminan kondisi yang tidak diharapkan. Padahal di sisi lain, berbagai kebutuhan makanan maupun non makanan harus tetap dipenuhi demi menyambung hidup.

Menurut Ernest Engel (1857), pengeluaran untuk makanan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan dari rumah tangga karena meningkatnya pendapatan, maka akan membuat proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin menurun.

Fakta bahwa masih ada sekitar 40 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah yang masih dominan menghabiskan pengeluarannya untuk konsumsi makanan, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang masih belum sesuai harapan. Padahal pekerja sektor informal sebagian besar merupakan bagian dari penduduk dengan pengeluaran terendah tersebut. Tentunya, perubahan pendapatan akan ikut mempengaruhi perubahan pola pengeluaran.

Peningkatan pendapatan seharusnya mampu menggeser pola konsumsi masyarakat dari dominasi makanan menjadi nonmakanan. Kenaikan UMP sendiri akan meningkatkan kualitas daya beli pekerja sektor formal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, secara tidak langsung kenaikan UMP justru juga menurunkan upah nominal pekerja sektor informal, dan ikut menggeser pola pengeluaran pekerja sektor informal menjadi semakin dominan pada makanan.

Hal ini tentu menunjukkan adanya penurunan tingkat kesejahteraan di sisi pekerja sektor informal. Karena itu, meski pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, namun menjadi sangat wajar

jika upaya penurunan kemiskinan kita akan tetap mengalami hambatan dari sisi ketenagakerjaan dan pengupahan.

Kenaikan UMP, meski di satu sisi bertujuan menyejahterakan para pekerja sektor formal agar daya beli riil mereka mampu naik menyesuaikan tingkat inflasi, tapi di sisi lain tetap memberikan dampak negatif bagi sektor informal. Penetapan UMP sendiri setiap tahun hampir selalu menuai kontroversi dari beberapa pihak, termasuk memunculkan sikap protes dan demonstrasi dari serikat pekerja sendiri.

Antara tameng atau bumerang, namun upaya pemerintah dalam menetapkan kenaikan UMP seharusnya tetap mampu kita lihat secara positif untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat di masa pandemi ini.

Standar Hidup di Tengah Kenaikan Upah yang Minim

Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan Pekalongan Suara Merdeka, 6 Desember 2021

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Pekalongan Tahun 2022 sudah ditetapkan. Penetapan UMK Kota Pekalongan tahun 2022 sebesar Rp 2.156.213,77 atau hanya naik sebesar 0,77 persen.

Kenaikan itu lebih rendah dibanding kenaikan rata-rata UMK nasional yang besarnya 1,09 persen. Kenaikan itu dilakukan setelah di pada 2021 upah buruh tidak naik akibat resesi ekonomi yang terjadi tahun 2020.

Kenaikan UMP tahun 2022 merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Hal itu dampak dari berlakunya UU Cipta Kerja. Pasalnya Penetapan UMP tahun 2022 sudah mengacu pada PP No 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Kenaikan yang minim ini jelas mengecewakan buruh.

Tuntutan kenaikan upah sebesar 7-10 persen yang diajukan oleh buruh ternyata tidak diindahkan pemerintah. Bagi pemerintah menghadapi tuntutan kenaikan upah itu dilematis. Di satu sisi pemerintah berkewajiban memastikan buruh terpenuhi standar hidup yang layak, tapi di sisi lain pemerintah harus mengakomodasi kepentingan pengusaha dalam rangka memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.

Apabila merujuk pada PP Nomor 78 Tahun 2015, kenaikan UMP tahun 2022 bisa lebih besar karena penghitungannya merupakan hasil penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi triwulan 2-2021 sebesar 7,07 persen dan angka inflasi September 2021 (y-o-y) sebesar 1,6 persen. Namun, jika menggunakan aturan terbaru sesuai PP Nomor 36 tahun 2021 penghitungannya berbeda.

Dalam aturan PP terbaru, kenaikan upah didasarkan dari nilai salah satu yang terbesar antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Apabila di peraturan sebelumnya angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang digunakan adalah angka nasional, pada penyesuaian formula yang baru menggunakan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi tingkat provinsi.

Formula penyesuaian upah minimum yang baru ini bertambah rumit dibandingkan peraturan sebelumnya. Penghitungan batas atas upah minimum memasukkan nilai rata-rata konsumsi per kapita dikali dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Kemudian dibagi dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Harapannya formula ini mencerminkan kondisi standar hidup layak yang sebenarnya sesuai dengan rata-rata kebutuhan rumah tangga di masing-masing daerah.

Jika ditelaah, penghitungan yang baru ini memberlakukan ketentuan, semakin besar selisih antara UMP/UMK dengan batas atas upah minimum, maka semakin besar pengali untuk kenaikan UMP/UMK setiap tahunnya. Demikian juga sebaliknya, apabila nominal UMP/UMK semakin mendekati batas atas upah minimum, maka semakin kecil pengali untuk kenaikan UMP/UMK setiap tahunnya.

Selain itu hendaknya kenaikan upah minimum tidak hanya berdasarkan kenaikan harga barang/jasa, tapi juga perubahan komponen pengeluaran/konsumsi. Standar hidup layak sebelum dan sesudah pandemi tentu berbeda karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Misalnya, hasil survei BPS tahun 2020, dampak Covid-19 menunjukkan pengeluaran penduduk mengalami peningkatan untuk kesehatan dan informasi/komunikasi. Konsumsi produk kesehatan meningkat hingga 73,30 persen selama pandemi, sedangkan pulsa dan paket data meningkat sebesar 56,60 persen.

Oleh karena itu data konsumsi rata-rata hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dari BPS dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengakomodir komponen kebutuhan hidup yang bersifat dinamis. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui konsumsi rata-rata tiap daerah.

Permasalahan selanjutnya adalah ketimpangan upah yang terjadi antar pekerja usaha mikro dan usaha besar. Pasalnya saat ini kebijakan upah minimum ini baru diberlakukan untuk usaha berskala menengah dan besar. Padahal sekitar 75 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja pada usaha mikro kecil.

Data dari BPS juga menyebutkan pada tahun 2020 proporsi tenaga kerja pada sektor Industri Manufaktur Besar dan Sedang hanya sebesar 13,61 persen. Jumlah itulah yang mendapat ketentuan UMK/UMP. Sementara pada usaha mikro dan kecil, pengupahan masih berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh.

Data saat ini pengupahan pekerja usaha mikro dan kecil ternyata hanya pada rentang paling sedikit 50 % dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi atau 25 persen dari di atas garis kemiskinan provinsi.

Oleh karena itu, pekerja usaha mikro kecil ini juga harus memperoleh perhatian oleh pemerintah karena kelompok inilah yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan di tengah guncangan ekonomi seperti pandemi sekarang ini.

Menurut Pratomo (2012) Kebijakan upah minimum di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan hanya pada desil ke-5 hingga desil ke-8 dari distribusi upah, namun tidak memberikan pengaruh signifikan pada kelompok 40 persen terbawah distribusi upah. Oleh karenanya, diperlukan transisi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja agar memenuhi standar hidup layak.

Selain itu perlu diwaspadai terjadinya berpindahnya dari tenaga kerja formal menjadi tenaga kerja informal karena kelebihan penawaran tenaga kerja. Menurut teori, kenaikan upah minimum yang melebihi titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja akan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja terutama di sektor formal.

Teori di atas senada dengan kenyataan. Saat ini jumlah tenaga kerja informal di Indonesia mengalami peningkatan selama pandemi, dari 75,50 juta orang pada Februari 2020 menjadi 77,91 juta orang pada Agustus 2021.

Fenomena itu bisa berdampak negatif. Pasalnya informalitas mengandung resiko atas terpenuhinya hak-hak pekerja akibat rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses modal. Oleh karena itu, untuk buruh/pekerja usaha mikro atau tenaga kerja informal yang belum mencapai upah minimum memerlukan perlindungan sosial dari pemerintah agar mampu memenuhi standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Optimalisasi E-Commerce untuk UMKM

Lina Dewi Yunitasari – BPS Kabupaten Jepara
Lingkar Jateng, 6 Januari 2021

Dewasa ini, marak berseliweran lahan jualan orang saat kita buka pesan instan dan media social (medsos), baik melalui whatsapp, line, Instagram, facebook, maupun twitter. Jual beli live melalui medsos dan marketplace seperti shopee live, facebook live pun tak kalah diminati. Barang makanan minuman, fashion, produk kecantikan mendominasi transaksi melalui e-commerce.

Indonesia yang berpenduduk 272 juta jiwa, ada Januari 2020 terdapat 175 juta pengguna internet, yang 160 juta diantaranya adalah pengguna aktif medsos. Jumlah itu meningkat 8,1% dibandingkan April 2019. Jenis perangkat yang dipakai untuk mengakses internet antara lain smartphone (94%), laptop/PC (66%), dan tablet (23%). Rata-rata penggunaan internet masyarakat Indonesia dalam sehari mencapai 8 jam.

Melihat data pesatnya perkembangan internet dan penggunaannya, bisa menjadi peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya. Hasil Survei E-commerce Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha yang beroperasi, tercatat 84,51% usaha mulai beroperasi kurun waktu tahun 2016-2019. Media penjualan melalui pesan instan paling banyak digunakan oleh usaha e-commerce (90,56%), lainnya melalui medsos (65,14%); marketplace (25,72%); website (4,96%).

Pengguna internet yang melakukan pencarian online untuk mencari suatu barang/jasa melalui perangkat seluler/komputer tercatat mencapai 93% dan 88% mereka menyelesaikan transaksi hingga pembayaran. Pilihan metode pembayaran beragam bisa secara tunai, cash on delivery (COD), dan transfer bank. Bila dipilah menurut pendapatan yang diterima pelaku usaha melalui e-commerce yang berpendapatan kurang dari 300 juta mencapai 75,15% usaha (BPS, 2020), dan ini merupakan porsi para pelaku UMKM. Bank

Indonesia mencatat semester 1 tahun 2020, nilai transaksi jual beli online dari 14 marketplace di Indonesia mencapai 140,44 triliun rupiah.

Merujuk hasil Survei E-commerce BPS 2020, mayoritas pemilik usaha e-commerce tamatan SMA/ sederajat kebawah (62,69%). Jika profil pelanggan yang melihat lapak/iklan jualan melalui medosos, 91,5 persen pengguna berusia 13-44 tahun. Artinya, melapak produk UMKM melalui e-commerce adalah sebuah pilihan cerdas dan menjanjikan bagi para pengusaha khususnya yang menasar generasi muda. E-commerce telah menjadi ruang interaksi sosial sekaligus media pemasaran yang lebih mudah, cepat dan murah (low cost).

Pemanfaatan e-commerce secara tepat dan optimal oleh UMKM akan meningkatkan daya kompetisi UMKM tersebut. Dengan dukungan e-commerce, pelaku UMKM akan dapat lebih mudah berkomunikasi tentang harga, produk, distribusi maupun promosi. Pemerintah sendiri dapat mengambil peran menyusun strategi peningkatan hasil UMKM melalui penetapan regulasi yang relevan serta mendukung pemasaran produk UMKM secara langsung seperti diselenggarakannya ajang Festival Diskon Nasional bulan Desember 2020.

Tantangan pelaku UMKM di era ini tidak mudah. Pelaku UMKM dituntut mampu menyajikan display product yang menarik, memberikan pelayanan memuaskan dan menjamin keamanan produk sampai diterima konsumen. Cara pandang pelaku UMKM harus mulai berubah, sebagai pelaku usaha kini bisa memanfaatkan sharing resources dengan cara-cara cerdas, terintegrasi, resiko diperkecil dan hasilnya maksimal, misal melalui usaha reseller, buka open order dan lain-lain.

Potensi Produksi Kopi Nasional Belum Tercapai

Muhammad Abdul Aziz – BPS Kabupaten Blora

Jateng Pos, 25 Februari 2021

Hitam, pahit, dengan semerbak wangi yang khas. Demikian yang kita bayangkan tentang segelas kopi. Kopi pertama kali dikenal di desa Gesha, Abbyssinia (sekarang Ethiopia). Seorang penggembala bernama Kaldi suatu hari menyadari kambingnya bergerak lebih aktif dari biasanya setelah mengonsumsi buah liar berwarna merah. Kemudian diicipnya cascara buah tersebut dan dirasakannya sangat pahit. Kemudian dia coba keringkan dan membakarnya. Sontak aroma menyegarkan dari bebijian kopi menyeruak. Hasil bebakaran kemudian dihancurkan dan dilarutkan ke dalam air panas untuk diminum. Barulah Kaldi merasakan efek seperti gembalaannya. Sejak itu kopi mulai dikenal sebagai minuman yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Kopi di Indonesia awalnya dikembangkan Belanda pada abad 17 dengan mendirikan sejumlah kebun di wilayah Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Semenjak itu luasan kebun semakin berkembang dan produksinya semakin besar. Dalam publikasi Statistik Kopi 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi kopi Indonesia pada tahun 2019

mencapai 741,6 ribu ton. Sejak 2015, produksi kopi selalu mengalami peningkatan dimana produksinya naik sekitar 16 persen dalam kurun lima tahun.

Di kancah internasional, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. International Coffee Organization (ICO) menyebutkan Indonesia sebagai negara penghasil kopi sekaligus eksportir kopi terbesar ke-empat di dunia, di bawah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Indonesia juga dikenal dunia dengan sejumlah kopi istimewa seperti Kopi Luwak (yang merupakan kopi termahal di dunia), Kopi Toraja, dan Kopi Mandailing. BPS mencatat nilai ekspor kopi Indonesia di 2019 mencapai 883,1 juta US dollar dengan volume sebanyak 359,1 ribu ton atau sekitar 48 persen dari total produksi.

Meskipun terlihat menggemirakan, sejumlah permasalahan menyebabkan perkembangan kopi di Indonesia dirasa belum maksimal. Dengan luasan areal perkebunan mencapai 1,23 juta hektar, faktanya sebagian besar produksi kopi Indonesia berasal dari kebun-kebun kecil milik rakyat. BPS mencatat bahwa luas areal perkebunan kopi dari Perkebunan Rakyat (PR) mencapai 98,05 persen. Sejalan dengan itu, 98,65 persen produksi kopi Indonesia juga dihasilkan dari PR. Bahkan sejak 2017, proporsi produksi kopi oleh Perkebunan Besar (PB) terus menurun.

Kurangnya perkebunan kopi berskala besar menyebabkan Indonesia menemui lebih banyak hambatan dalam menjaga volume produksi serta stabilitas kualitas biji kopi. Hal tersebut terlihat dari rendahnya produktivitas kopi Indonesia. BPS mencatat produktivitas kopi Indonesia di 2019 hanya 0,79 ton per hektar. Sedangkan pesaing regional -yaitu Vietnam- telah mencapai 2,61 ton per hektar menurut ICO.

Permasalahan produktivitas kopi nasional ditengarai berawal dari kualitas benih yang digunakan mayoritas petani serta belum meluasnya aplikasi teknik budidaya sesuai anjuran Good Agricultural Practices (GAP). Permasalahan lain yang dihadapi adalah besarnya proporsi tanaman yang tidak produktif. BPS menyebutkan bahwa 9,95 persen areal perkebunan kopi berupa Tanaman Tidak Menghasilkan/Tua/Rusak.

Dalam menjawab tantangan produksi kopi, pemerintah melalui Kementan perlu berfokus pada peningkatan produktivitas oleh petani dengan menggencarkan penyuluhan sistem budidaya sesuai GAP serta melanjutkan upaya sertifikasi kebun kopi berkelanjutan. Selain itu pemerintah perlu untuk mendorong perluasan kebun kopi terutama kopi arabika sembari melakukan peremajaan kebun lama yang sudah tidak menghasilkan melalui rehabilitasi dan intensifikasi lahan kopi robusta. Perlu diketahui bahwa Kementan menyebutkan bahwa 71,04 persen perkebunan kopi di Indonesia ditanami kopi robusta. Padahal, secara umum kualitas kopi robusta berada di bawah kopi arabika sehingga harganya relatif lebih rendah di pasaran.

Dalam hal peningkatan SDM, pemerintah perlu memperluas cakupan program pemberdayaan dan pendampingan intensif berkelanjutan kepada para petani. Pemerintah juga perlu menggenjot pengembangan citra kopi specialty atau kopi khas agar semakin

dikenal sehingga berdampak terhadap permintaan kopi Indonesia di pasar internasional. Mudah-mudahan kontinuitas pelaksanaan sejumlah upaya pengembangan kopi nasional dapat membawa kopi Indonesia berjaya. Kita telah memiliki modal luasan areal perkebunan kopi yang besar, bahkan nomor dua terluas sedunia. Jika mampu menggenjot produktivitas per hektar -setidaknya mendekati produktivitas kopi di Vietnam- tentu potensi besar dari produksi kopi Indonesia akan bisa dicapai.

Penipuan Pinjol, Salah Siapa?

Azka Muthia – BPS Kota Pekalongan

Jateng Daily, 18 November 2021

PINJAMAN online (pinjol) yang beredar ditengah masyarakat tengah menjadi sorotan. Menjamurnya kasus pinjol ilegal yang menjebak masyarakat menjadi penyebabnya. Pinjol ternyata menjadi pisau bermata dua. Satu sisi memberikan angin positif namun disisi lain memberikan efek bencana. Lalu mengapa bisa begitu?

Adanya pinjol sebenarnya dapat membuka akses penyaluran kredit kepada sektor produktif dan UMKM yang membantu roda perekonomian. Namun maraknya pinjol ilegal yang melakukan praktik penipuan meresahkan masyarakat. Sayangnya, literasi mengenai fintech yang sudah legal dan ilegal dalam memberikan pinjaman online masih sangat minim dipahami oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang belum mengetahui mana pinjol yang legal dengan yang ilegal. Dampaknya, seperti disebutkan di atas banyak masyarakat terperangkap dalam praktik penipuan pinjol ilegal, mulai dari bunga yang sangat tinggi sampai pencurian data pribadi.

Selain itu iming-iming kemudahan layanan yang ditawarkan oleh pinjol dalam memberikan pinjaman menjadikan masyarakat tergiur untuk mencoba mengajukan pinjaman tanpa mengecek legalitas pinjol tersebut. Akhirnya masyarakat pulalah yang menjadi korban pinjol ilegal dan menanggung kerugiannya.

Jika ditelisik dari sisi pelaku pinjol, pinjol ilegal makin marak di masyarakat karena dapat membuka usaha dengan bebas yang didukung akses website dan aplikasi dengan mudah. Banyak pinjol ilegal yang memunculkan iklannya melalui website atau situs yang menarik minat masyarakat. Selain itu penawaran-penawaran melalui sms atau WhatsApp(WA) juga menjadi salah satu trik pinjol ilegal. Menurut Satuan Tugas Investasi (SWI) menyatakan bahwa pihaknya telah menghentikan aktivitas sebanyak 3.193 fintech/pinjol ilegal sampai tahun 2021.

Lalu mengapa banyak masyarakat yang dengan mudahnya terperosok ke jurang pinjol ilegal?

Pinjol sebenarnya mulai berkembang tahun 2016 namun mulai terlihat geliatnya dari tahun 2018. Perkembangan pinjol ini melesat sampai sekarang apalagi ditengah sulitnya

kondisi perekonomian pada pandemi Covid-19 seperti ini. Pandemi Covid-19 ini tak dipungkiri membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya terutama kalangan menengah kebawah. Akhirnya mereka yang melakukan pinjaman online.

Kesulitan yang terjadi salah satunya karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan saat pandemi Covid-19 ini. Tercatat dari data BPS 21,32 juta orang terkena dampak covid pada Agustus 2021 di mana 1,82 juta orang diantaranya menjadi pengangguran karena Covid-19. Selain itu perilaku masyarakat yang konsumtif juga menjadi pendorong untuk melakukan pinjaman online. Menurut data BPS Pengeluaran rumah tangga selalu mengambil porsi lebih dari 50 persen dari total pengeluaran. Dari data BPS yang terbaru pada triwulan III Tahun 2021 pengeluaran untuk rumah tangga mengambil porsi 53,09 persen dari total PDRB.

Terbukti jika dilihat dari laporan OJK penyaluran pinjaman bulanan memiliki kecenderungan tren naik. Pada bulan September tahun 2021 tercatat sebesar 14,26 triliun rupiah dana yang disalurkan oleh fintech. Meningkat sangat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang sebesar 6,83 triliun. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 108,78 persen. Data tersebut menunjukkan makin banyak masyarakat yang melakukan pinjaman online.

Dari 14,26 triliun rupiah tersebut ternyata pinjaman ke sektor rumah tangga menyumbang sebesar 3,50 triliun rupiah atau 24,54 persen yang hampir seperempat dari penyaluran pinjaman di bulan September 2021. Porsi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tergiur untuk melakukan pinjaman online karena kemudahan persyaratan yang ditawarkan dan bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu mendatangi Lembaga pembiayaan.

Sayangnya dari kasus yang terjadi pada pinjol ilegal terindikasi banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman karena perilaku konsumtif bukan untuk pemenuhan kebutuhan ataupun dana darurat. Ditambah lagi bunga yang sangat tinggi pada pinjol ilegal yang menyebabkan terjadinya default atau gagal bayar. Pada akhirnya setelah terperosok masyarakat baru sadar bahwa mereka telah terkena penipuan pinjol ilegal.

Dari sini bisa terlihat bahwa masyarakat perlu bijak dalam melakukan pinjaman online. Memang kondisi pandemi sekarang membuat semua serba susah karena perekonomian belum kembali seperti sediakala. Namun tidak berarti demi gaya hidup dan gengsi maka dengan mudahnya melakukan pinjaman online. Apalagi tanpa melakukan cross check fintech tempat meminjam uang apakah sudah legal atau belum. Ini memang penyakit masyarakat Indonesia yang sangat mudah termakan iklan dan kurang mau menggali informasi sebelum bertindak. Padahal di laman OJK sudah tersedia informasi yang lengkap mengenai fintech terdaftar yang melakukan pinjaman secara online.

Di sisi lain, peran aktif pemerintah dalam hal ini OJK Bersama SWI, Kominfo, dan Polri untuk membuat masyarakat melek terhadap pinjol ilegal. Sebuah pekerjaan rumah yang

harus diselesaikan oleh pemerintah agar pinjol ilegal ini bisa diberantas. Sinergi dan peran aktif dari sisi masyarakat dan pemerintah harus terjalin dengan baik agar bisa memberantas pinjol ilegal yang masih ada di Indonesia.

Pemerintah dapat memberikan edukasi melalui kecanggihan teknologi baik dari sms blast, WA, dan memasang iklan di website-website. Selain itu, peningkatan keamanan dan pembatasan gerak dengan membentuk sistem early warning sangat diperlukan agar masyarakat waspada mengingat karakteristik masyarakat Indonesia. Jika pemerintah sudah bekerja keras menjadi peran masyarakat untuk bersinergi menghilangkan praktik pinjol ilegal sampai ke akarnya.

<https://jateng.bps.go.id>

Daftar Pustaka

A World Bank Group Flagship Report, “Global Economic Prospect,” World Bank Group, Januari 2022

AKMEN. 2020. “ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)”, Chairul Iksan Burhanuddin, Muhammad Nur Abdi, 1 Maret 2020.

Bachtiar Hassan Miraza. 2019. Seputar Resesi dan Depresi, Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 30, No. 2 Desember 2019

Badan Pusat Statistik. 2021. Profil Kemiskinan di Indonesia Bulan Maret 2021. Jakarta : Berita Resmi Statistik, No. 56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2021.

Badan Pusat Statistik. 2021. Profil Kemiskinan di Indonesia Bulan September 2021. Jakarta : Berita Resmi Statistik, No. 16/02/Th.XXIV, 15 Februari 2021.

Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta : Berita Resmi Statistik, No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik. 2021. Pendapatan Nasional Indonesia 2016-2020. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021. Semarang : Berita Resmi Statistik, No. 12/02/33.Th.XV (1 Februari 2021).

Badan Pusat Statistik. 2021. “[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2017-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/169/1955/1/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran.html> 7 Februari 2022.

Badan Pusat Statistik. 2021. “[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2017 - 2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/169/1956/1/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran.html.html>, 7 Februari 2022.

Badan Pusat Statistik. 2022. “[Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) 2015-2021”, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/08/06/834/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-miliar-rupiah-2015-2021.html>, 7 Februari 2022.

Badan Pusat Statistik. 2021. “[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen) 2015-2021”, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/08/06/834/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-miliar-rupiah-2016-2020.html>, 7 Februari 2022.

Geodika 2021. “Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* Volume 5 Nomor 1 Juni 2021, 33-42

Ikfina Chairani, 2020. “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia/Edisi Khusus Demografi dan Covid-19*, Juli 2020, 39-42

Sari Lestari Zainal Ridho dan Syaiful Aqli Yusuf, 2020. “Dinamika Komposisi Penduduk: Dampak Potensial Pandemi Covid-19 terhadap Demografi di Indonesia”, *Populasi* Volume 28, No.2, 2020, 54-69

Putu Nopita Purnama Ningsih, Ketut Jayanegara, P Putu Eka Nila Kencana, 2013. “Analisis Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali dengan Menggunakan Metode Generalized Structured Component Analysis”, *E-Jurnal Matematika* Vol.2, No.2, Mei 2013, 54-58

Wibowo Hadi Wardoyo. 2020. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19” *jurnal.umj.ac./id/index.php/baskara*, volume 2, No.2, 2 April 2020

World Bank Group. 2021. “Global Economic Prospects, A World Bank Group Flagship Report”, January 2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 841805, Fax 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id